



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:



- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera utara tahun 2019 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) Jo. PP Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);



23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);
26. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 51);
27. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 34);
28. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 35);
29. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Kapitalisasi Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 23);
30. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 58);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.



1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Pertumbuhan Ekonomi
- 2.3. Kebijakan pengelolaan keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 3.5. Akuntansi Kewajiban
- 3.6. Akuntansi Ekuitas Dana
- 3.7. Kebijakan Akuntansi Tertentu

IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 4.5. Laporan Perubahan Ekuitas, dan (LPE)
- 4.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

V. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Namun demikian perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Perkembangan kondisi umum ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Utara.

Kondisi ekonomi Sumatera Utara sampai akhir tahun 2019 secara umum dipengaruhi berbagai indikator makro ekonomi Sumatera Utara, antara lain pertumbuhan ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto, inflasi, struktur ekonomi, tingkat pengangguran, penduduk miskin dan nilai tukar petani. Inflasi Sumut di tahun 2019 diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2018 meski masih tetap mendukung capaian inflasi nasional sebesar $3,5\% \pm 1\%$. Beberapa tekanan inflasi yang masih mewarnai dinamika hingga akhir tahun diantaranya adalah kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menjaga kestabilan harga melalui berbagai program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang fokus kepada empat pilar pengendalian inflasi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Sebagai sebuah provinsi penghasil dan eksportir komoditas sektor pertanian, khususnya sektor perkebunan, Provinsi Sumatera Utara memiliki ketergantungan pada ekonomi dunia. Walaupun hilirisasi komoditas terus digenjut dan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif telah dicanangkan untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Sumatera Utara, namun statistik ekonomi tahun 2019 masih menunjukkan sektor pertanian masih mendominasi ekonomi dengan capaian sebesar 20,50% (yoy). Korelasi harga komoditas tentu sangat erat dengan kondisi ekonomi global. Dengan resiko perang dagang yang mungkin masih terus terjadi, *black campaign* atas produk kelapa sawit, dan *International Monetary Fund* yang terus menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara kedepan tentu dihadapkan dengan sebuah tantangan yang cukup berat.



Berdasarkan rilis International Monetary Fund 2020, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,3% di tahun 2020 dan 3,4% di tahun 2021. Dipangkasnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global antara lain dipicu oleh proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah di India. Pada proyeksi IMF awal tahun 2019, pertumbuhan ekonomi India untuk tahun 2020 dan 2021 diprediksi masing-masing di level 7% dan 7,4%; sementara pada awal Januari 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi India telah dipangkas masing-masing menjadi 5,8% pada 2020 dan 6,5% pada 2021. Kemungkinan perlambatan ekonomi India antara lain disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor perlambatan permintaan ekonomi dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2020 dan 2021 juga diperkirakan melambat. Pada akhir tahun 2019, perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 6,1%, merupakan pertumbuhan terendah sejak tahun 1990. Pada tahun 2020 ekonomi Tiongkok diproyeksikan tumbuh semakin melambat menjadi sebesar 6,0% pada tahun 2020 dan kembali melambat menjadi 5,9% pada tahun 2021. Ekonomi Tiongkok diproyeksi semakin menurun sedikit banyak diakibatkan oleh perang dagang, perlambatan permintaan domestik dan stagnansi investasi. Virus Corona yang belakangan menjadi isu global tentunya dapat menjadi pemicu lain bagi perlambatan ekonomi

Ekonomi Amerika juga diproyeksikan mengalami pelemahan. Pada tahun 2020 ekonomi Amerika diproyeksi tumbuh sebesar 2,0% dan tahun 2021 sebesar 1,7%. Perang dagang dengan Cina yang diharapkan akan meningkatkan ekonomi domestik dan penguatan tenaga kerja Amerika diprediksi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara adidaya tersebut.

Proyeksi terkait pemulihan pertumbuhan ekonomi global di bebrbagai negara tetaplah diselimuti ketidakpastian. Perekonomian dunia terus bergantung kepada pemulihan dari negara-negara berkembang yang dipenuhi dengan tekanan, sementara pertumbuhan di negara-negara maju bergerak stagnan.

Pada triwulan III 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 5,11% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,25% (yoy). Deselerasi bersumber dari perlambatan konsumsi pemerintah dan investasi seiring dengan moderasi belanja operasional dan realisasi belanja modal yang belum optimal. Selain itu, pihak swasta cenderung menahan investasi karena kapasitas yang ada masih mampu memenuhi permintaan. Hal tersebut lebih lanjut berdampak kepada perlambatan LU konstruksi. Namun demikian, konsumsi rumah tangga masih tumbuh tinggi dan menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut yang juga berdampak terhadap tingginya LU perdagangan.

Memasuki triwulan IV tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diprakirakan mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya. Akselerasi perekonomian disinyalir bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi terkait dengan tingginya aktivitas belanja dan berlibur serta optimalisasi belanja modal pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun. Dari sisi eksternal, ekspor diprakirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan harga komoditas ekspor utama di pasar global. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Sumatera untuk keseluruhan tahun 2019 akan tumbuh 5,0 – 5,4% (yoy).



ASESMEN KEUANGAN DAERAH

Pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara (Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota) sejak empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sampai dengan triwulan III 2019, realisasi APBD di Provinsi Sumatera mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja dan transfer APBD mencapai Rp 33,7 triliun atau 53,3% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan realisasi triwulan III 2018 yang mencapai 61,7% atau Rp 32,8 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja APBN di Sumatera Utara masih terbatas dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja APBN pada triwulan III 2019 mencapai Rp 46,7 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya mencapai Rp 48,6 triliun.

ASESMEN INFLASI

Melambatnya permintaan domestik tercermin juga dari sisi perkembangan harga. Inflasi IHK Sumatera Utara tercatat sebesar 4,47% (yoy) pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,87%), didorong oleh penurunan harga kelompok bahan makanan seiring dengan masuknya periode panen raya kedua. Menurunnya tingkat inflasi disumbang terutama oleh sub kelompok bumbu bumbuan, khususnya cabai merah sering dengan meningkatnya pasokan karena masuknya masa panen di berbagai daerah sentra. Memasuki triwulan IV 2019, inflasi Sumatera Utara diperkirakan menurun seiring dengan meredanya tekanan dari kelompok bahan makanan. Dengan perkembangan tersebut, prospek inflasi IHK Sumatera Utara di tahun 2019 diperkirakan berada pada rentang 4% - 4,5% (yoy).

ASESMEN STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pertumbuhan ekonomi yang solid juga diiringi oleh kondisi stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Kondisi stabilitas keuangan Sumatera Utara pada triwulan III 2019 cukup baik yang tercermin dari peningkatan ROA, BOPO dan NIM. Sementara rasio intermediasi (LDR) berada di rentang optimal dengan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit lokasi proyek pada triwulan laporan. Peningkatan penyaluran kredit masih diimbangi dengan kualitas kredit (NPL) yang masih terjaga, meskipun dalam tren meningkat tipis. Penurunan indeks penghasilan menunjukkan bahwa terdapat potensi kenaikan risiko terhadap kinerja rumah tangga di triwulan III 2019. Sementara itu, penyaluran kredit korporasi terpantau membaik yang mengindikasikan kondisi korporasi yang relatif terjaga.

ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

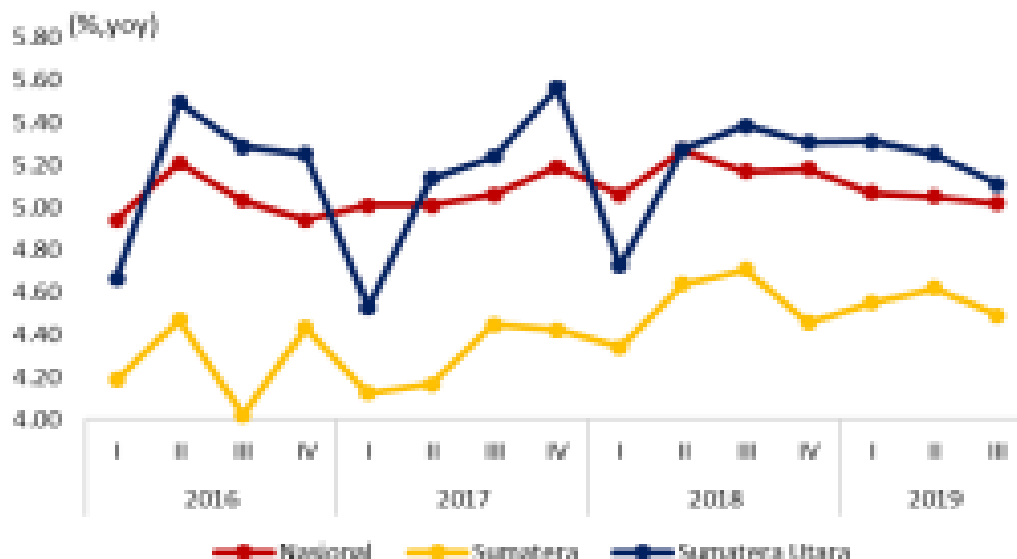
Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang masih tumbuh kuat, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara juga membaik. Beberapa indikator mengkonfirmasi perbaikan tersebut antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun, tingkat kemiskinan yang juga menurun diikuti dengan indeks keparahan dan kedalaman yang semakin mengecil, serta ketimpangan pendapatan



yang membaik. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara relatif baik.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih tumbuh cukup tinggi pada triwulan III 2019 meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 yang mencapai 5,25% (yoy). Pencapaian tersebut masih di atas nasional dan Sumatera yang masing - masing tumbuh sebesar 5,02% (yoy) dan 4,49% (yoy). Deselerasi bersumber dari perlambatan konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor sementara konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat. Selain itu, kontraksi impor yang lebih dalam dari pada ekspor turut menahan deselerasi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Gambar 1
Perkembangan PDRB dan PDB



Sumber: BPS; Bappedasu

Permintaan domestik mengalami deselerasi disumbang oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi sementara konsumsi rumah tangga terakselerasi. Perlambatan konsumsi pemerintah terkait dengan normalisasi belanja operasional pasca Pemilihan Umum 2019 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sementara belanja modal pemerintah belum optimal. Di samping itu, rendahnya realisasi belanja modal pemerintah juga berdampak kepada perlambatan laju investasi sementara pihak swasta cenderung menahan investasi karena kapasitas yang dimiliki masih mampu memenuhi permintaan.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat seiring dengan tingginya aktivitas konsumsi pada periode libur lebaran. Hal tersebut juga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan pencairan gaji ke-13, penyaluran



Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta perbaikan harga komoditas lokal.

Dari permintaan eksternal, ekspor terkonsentrasi disumbang oleh penurunan ekspor antar daerah serta ekspor luar negeri. Menurunnya ekspor antar daerah sejalan dengan penurunan produksi pertanian akibat musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang. Selain itu, ekspor luar negeri khususnya *crumb rubber* terdeselerasi akibat berlakunya kuota ekspor yang berlaku hingga Juli 2019 sementara bahan baku terbatas. Di sisi lain, sejalan dengan kontraksi ekspor, impor mengalami penurunan dengan tingkat yang lebih dalam. Penurunan impor terutama disebabkan oleh kurang optimalnya belanja modal dalam bentuk bangunan dan non bangunan milik pemerintah dan swasta.

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), perlambatan ekonomi bersumber dari menurunnya kinerja LU pertanian dan konstruksi sementara industri pengolahan dan perdagangan tumbuh meningkat. Deselerasi terkonfirmasi oleh realisasi kegiatan dunia usaha pada triwulan III 2019 yang mengalami penurunan. Perlambatan LU pertanian disebabkan oleh penurunan produksi pertanian akibat cuaca yang kurang kondusif serta serangan hama dan penyakit. LU konstruksi disebabkan oleh telah selesainya proses konstruksi beberapa proyek perumahan sementara pelaku usaha cenderung menahan aktivitas pembangunan akibat penjualan yang terbatas. Rendahnya realisasi belanja modal pemerintah untuk pembangunan juga turut mendorong deselerasi lebih lanjut.

Sementara itu, pertumbuhan LU perdagangan meningkat signifikan sejalan dengan tingginya konsumsi rumah tangga pada periode libur sekolah. Terjaganya daya beli masyarakat dan berbagai inovasi yang dilakukan perusahaan retail menopang kinerja perdagangan lebih lanjut. Selain itu, LU industri pengolahan terakselerasi cukup tinggi didorong oleh perbaikan kinerja industri makanan dan minuman terutama industri pengolahan kelapa sawit dan kopi. Peningkatan tersebut seiring dengan melimpahnya bahan baku dan tingginya permintaan.

Memasuki triwulan IV 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik dari triwulan sebelumnya. Akselerasi tersebut bersumber dari tingginya antusiasme masyarakat dalam belanja dan berwisata menjelang Natal dan Tahun Baru. Investasi juga diprediksi terus menguat menjelang akhir tahun seiring dengan berlanjutnya proyek - proyek pembangunan multiyears serta optimalisasi realisasi belanja modal pemerintah dan swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah diprediksi tumbuh terbatas seiring dengan penurunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Namun demikian, kegiatan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) dan realisasi belanja modal diperkirakan akan menahan perlambatan lebih lanjut. Dari sisi eksternal, ekspor diprediksi tumbuh meningkat seiring dengan perbaikan harga komoditas di pasar internasional. Di satu sisi, impor juga tumbuh meningkat seiring dengan potensi perbaikan investasi dan ekspor.

Berdasarkan LU, membaiknya pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari sektor- sektor utama. Akselerasi LU perdagangan sejalan dengan tingginya aktivitas belanja yang juga didukung oleh daya beli masyarakat yang masih cukup kuat. Pembangunan proyek- proyek tahun jamak serta peningkatan realisasi belanja modal pemerintah diprediksi turut menopang perbaikan kinerja LU konstruksi. Selanjutnya, kinerja LU Pertanian berpotensi tumbuh moderat didorong oleh peningkatan produksi



seiring dengan dengan cuaca yang lebih kondusif untuk panen. Di samping itu, LU industri pengolahan berpotensi tumbuh meningkat bersumber dari optimalisasi kapasitas industri menyambut potensi kenaikan permintaan domestik di akhir tahun serta perbaikan harga komoditas di tingkat global.

Untuk keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diprediksi tumbuh lebih tinggi dari tahun 2018. Perbaikan pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari akselerasi konsumsi pemerintah serta perbaikan net ekspor. Tingginya konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan pagu anggaran belanja pemerintah daerah serta peningkatan anggaran transfer pusat ke daerah untuk dana desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Lebih lanjut, perbaikan net ekspor bersumber dari deselerasi impor yang lebih rendah dari penurunan ekspor. Impor diprediksi melambat terutama dipengaruhi oleh deselerasi impor barang modal seiring dengan tingkat investasi yang tidak setinggi tahun sebelumnya. Impor barang konsumsi juga diperkirakan menurun terkait dengan kenaikan bea masuk untuk 1.147 barang konsumsi. Dari sisi LU, akselerasi pertumbuhan ekonomi diprediksi bersumber dari LU perdagangan dan LU konstruksi. Persiapan Pemilu 2019 serta aktivitas MICE dari pemerintah dan swasta diperkirakan mendorong kinerja LU perdagangan sementara berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah serta pembangunan dari sektor riil oleh swasta menopang pertumbuhan LU konstruksi. Ke depan, masih terdapat beberapa faktor yang menahan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian negara- negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Kawasan Eropa, Jepang dan India diperkirakan tumbuh melambat sehingga akan berdampak terhadap penurunan permintaan ekspor. Lebih lanjut, prospek pertumbuhan ekonomi global yang terus melambat berpotensi menurunkan minat pelaku usaha dalam investasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Selain itu, risiko ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok serta kondisi geopolitik perlu terus dicermati.

Proyeksi terperinci IMF terkait ekonomi dunia terlampir pada tabel berikut:

Tabel 1 Perkiraan Global Economy
Overview of the World Economic Outlook Projections

(Percent change, unless noted otherwise)

	Estimate		Projections	
	2018	2019	2020	2021
World Output	3.6	2.9	3.3	3.4
Advanced Economies	2.2	1.7	1.6	1.6
United States	2.9	2.3	2.0	1.7
Euro Area	1.9	1.2	1.3	1.4
Germany	1.5	0.5	1.1	1.4
France	1.7	1.3	1.3	1.3
Italy	0.8	0.2	0.5	0.7
Spain	2.4	2.0	1.6	1.6
Japan	0.3	1.0	0.7	0.5
United Kingdom	1.3	1.3	1.4	1.5
Canada	1.9	1.5	1.8	1.8
Other Advanced Economies 3/	2.6	1.5	1.9	2.4
Emerging Market and Developing Economies	4.5	3.7	4.4	4.6
Emerging and Developing Asia	6.4	5.6	5.8	5.9
China	6.6	6.1	6.0	5.8
India 4/	6.8	4.8	5.8	6.5
ASEAN -5 5/	5.2	4.7	4.8	5.1
Emerging and Developing Europe	3.1	1.8	2.6	2.5
Rusia	2.3	1.1	1.9	2.0
Latin America and the Caribbean	1.1	0.1	1.6	2.3



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Brazil	1.3	1.2	2.2	2.3
Mexico	2.1	0.0	1.0	1.6
Middle East, North Africa, Afganistan, and Pakistan	1.9	0.8	2.8	3.2
Saudi Arabia	2.4	0.2	1.9	2.2
Sub-Saharan Africa	3.2	3.3	3.5	3.5
Nigeria	1.9	2.3	2.5	2.5
South Africa	0.8	0.4	10.8	1.0

Tabel 2 Perkiraan Harga Komoditas Dunia

Uraian	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019p	2020p
Karet, SGP/MYS	USD/Kg	2,0	1,6	1,7	1,7
Logam Dasar, tidak termasuk bijih besi	Indeks	84,9	90,6	81,7	82,1
Batu Bara, Australia	USD/mt	88,5	107,0	79,0	71,0
Minyak Mentah	USD/bbl	52,8	68,3	60,0	58,0
LNG	USD/mt	8,6	10,7	10,7	9,8
Minyak Sawit	USD/mt	751	639	575	575

Beberapa harga komoditas dunia juga diproyeksikan mengalami penurunan kedepannya. Harga komoditas minyak kelapa sawit diperkirakan akan mengalami stagnansi pada tahun 2020 namun sejatinya penurunan harga telah terjadi sejak tahun 2018. Komoditas batu bara juga diproyeksi mengalami penurunan pada tahun 2020. Disatu sisi, komoditas karet diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan. Proyeksi IMF terhadap penurunan harga komoditas tentu menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi negara penghasil dan eksportir komoditas.

Beberapa resiko masih menjadi catatan dalam proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi dunia tahun 202 yang antara lain:

1. Resiko Perang Dagang (*Trade War*)

Kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinan Trump masih menimbulkan resiko ketidakpastian. Kemungkinan perang dagang dengan Cina masih terbuka lebar. Ketegangan yang masih mungkin terus timbul paska Brexit juga masih membayangi ekonomi.

2. Resiko Geopolitik

Ketegangan geopolitik yang baru-baru ini terjadi antara Amerika dan Iran tentu membuka kemungkinan terdampaknya pelemahan ekonomi global. Resiko perang di Asia tengah juga masih membayangi. Begitu pula konflik yang masih berlangsung di Asia Timur.

3. Resiko kebijakan proteksionisme

Semakin tertutupnya negara-negara maju terhadap permintaan komoditas ekspor dari negara berkembang tentu menimbulkan celah semakin terbukanya pelemahan ekonomi. Sebagai contoh, ekonomi negara berkembang antara lain Indonesia juga akan terdampak antara lain kebijakan menolak ekspor kelapa sakit dari luar Eropa.

4. Resiko Pelemahan Neraca Perdagangan

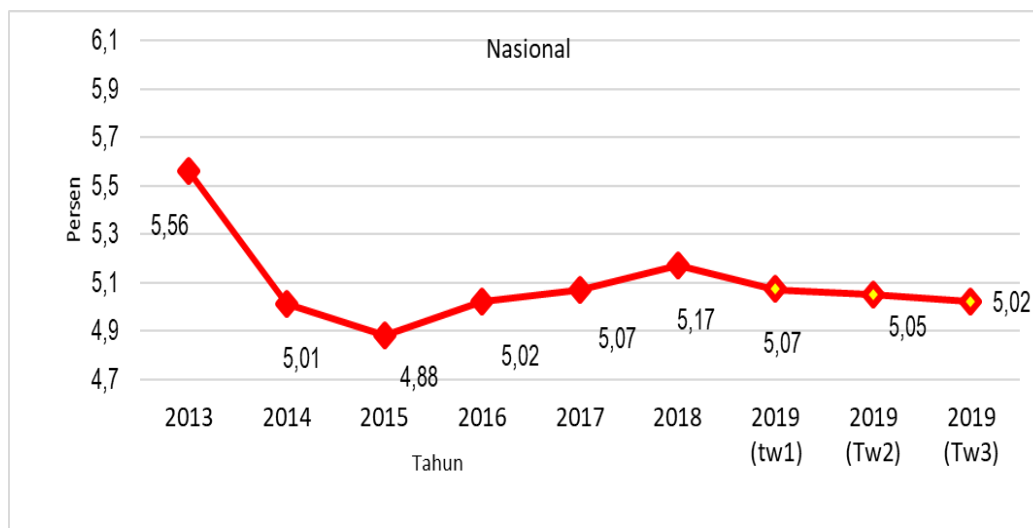
Secara garis besar, perang dagang dan kebijakan proteksionisme akan berdampak



terhadap ekonomi dan neraca perdagangan luar negeri berbagai negara. Semakin menurunnya permintaan khususnya kepada negara berkembang akan semakin melemahkan ekspor dan pada akhirnya akan memperlambat laju ekonomi.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 (5,17%), tercatat mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2017 (5,07%). Berdasarkan Analisa Bank Dunia, pada tahun 2019, ekonomi nasional diperkirakan akan mengalami perlambatan sehingga diperkirakan tumbuh sebesar 5,0% sementara pada tahun 2020 ekonomi diperkirakan akan sedikit meningkat sehingga tercatat sebesar 5,1%.

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber : BPS; Bank Indonesia; Bappedasu

Tabel 3 Indikator-Indikator Ekonomi Nasional

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2018	2019e	2020p	2019
Indikator ekonomi yang utama				
Produk Domestik Bruto (PDB)	5,2	5,0	5,1	-0,1
Konsumsi Sektor Swasta	5,1	5,2	5,1	0,0
Konsumsi Pemerintah	4,8	3,5	3,7	-1,6
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,7	4,5	5,0	-0,5
Ekspor Brang dan Jasa	6,5	-1,0	1,5	-3,6
Impor brang dan Jasa	12,0	-6,0	0,5	-6,0
Asumsi Ekonomi				
Nilai Tukar (Rp./USD)	14.237	14,160	14.165	-26
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/bbl)	67,5	60,0	58,0	-4,3

Sumber: BPS; Bank Indonesia; CEIC; Bank Dunia; Bappedasu



Tabel 4 Indikator-Indikator Ekonomi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun		
		2018	2019e	2020p
PDB Riil	Persen Perubahan Tahunan	5,2	5,0	5,1
Indeks Harga Konsumen	Persen Perubahan Tahunan	3,2	3,1	3,5

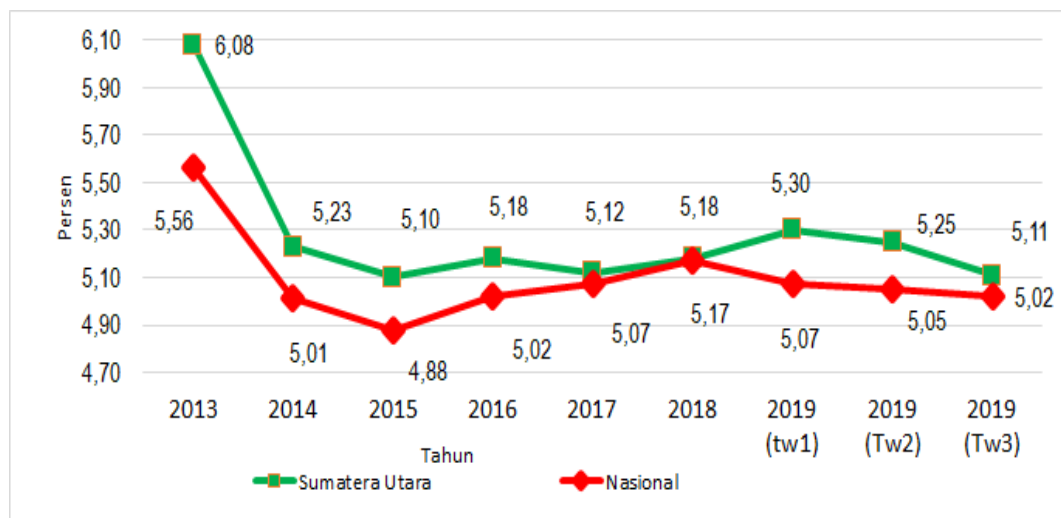
Sumber: BPS; Bank Indonesia; CEIC; Bank Dunia; Bappedas

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan dipicu oleh peningkatan konsumsi domestik. Belanja pemerintah juga diperkirakan menyumbang kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi juga diperkirakan akan semakin tumbuh begitupula dengan kinerja ekspor yang semakin membaik. Di sisi yang lain, impor diperkirakan akan dapat lebih ditekan. Inflasi Indonesia juga diperkirakan stabil sepanjang 2019 dan 2020, sehingga daya beli dapat terus terjaga.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Pada Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,18 %, kondisi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional pada periode yang sama yaitu sebesar 5,17%. Pada triwulan III 2019, pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,11 % masih tetap berada diatas pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,02 %. Perlambatan ekonomi Sumatera Utara antara lain disebabkan melambatnya kinerja sektor pertanian khususnya perkebunan yang merupakan dampak daripada pelemahan ekonomi global. Selain itu, sektor pariwisata yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru belum menunjukkan kinerja yang cemerlang. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan perbandingan dengan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2013-2019 TW 3 (%)



Sumber : BPS; Bappedas



Secara terperinci, produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, terdapat empat sektor dominan yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2019 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,50%, Industri Pengolahan sebesar 18,85%, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,20%, dan Konstruksi sebesar 14,16%. Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2018, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami sedikit penurunan. Begitu juga dengan sektor industri pengolahan mengalami penurunan distribusi (turun 1,08%) dibandingkan triwulan III Tahun 2018. Akan tetapi di sektor perdagangan besar dan eceran, mengalami kenaikan sebesar 1,07% dan demikian juga pada sektor konstruksi naik sebesar 0,26% dibandingkan triwulan III Tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5 Perbandingan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Triwulan III 2018 dan Triwulan III 2019 (year on year)
(dalam Juta Rupiah)**

No.	Uraian	2018 Triwulan III	Distribusi (%)	2019 Triwulan III	Distribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.797.373,78	21,08	41.905.239,93	20,50
2	Pertambangan dan Penggalian	2.430.425,98	1,29	2.597.040,80	1,27
3	Industri Pengolahan	37.777.719,68	19,93	38.531.333,34	18,85
4	Pengadaan Listrik, Gas	214.601,37	0,11	228.628,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	202.047,48	0,10	201.470,88	0,10
6	Konstruksi	26.011.185,22	13,90	28.944.833,03	14,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34.989.342,04	18,13	39.237.873,58	19,20
8	Transportasi dan Pergudangan	9.408.140,56	4,97	10.334.899,83	5,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.501.666,63	2,36	4.907.898,99	2,40
10	Informasi dan Komunikasi	3.782.934,50	2,03	4.377.285,00	2,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.810.533,26	3,06	5.846.169,20	2,86
12	Real Estate	9.168.733,93	5,03	10.462.206,48	5,12
13	Jasa Perusahaan	1.969.782,38	1,03	2247.672,17	1,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.478.848,93	3,63	7.530.821,07	3,68
15	Jasa Pendidikan	3.418.460,09	1,81	3.767.662,81	1,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.799.517,86	0,98	2.073.714,33	1,01
17	Jasa lainnya	1.083.397,52	0,57	1.203.604,96	0,59
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	188.844.711,22	100%	204.398.354,49	100%

Sumber : BPS (BRS 5 Nov 2018 & 2019); Bappedas



Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, terdapat empat sektor dominan yang memberikan laju pertumbuhan dalam ekonomi pada Tw III Tahun 2019 yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,40%, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,03%, Konstruksi sebesar 0,90% dan Industri Pengolahan sebesar 0,22%. Adapun sektor yang meunjukkan perlambatan pertumbuhan yaitu sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,01% dan Pengadaan listrik dan gas sebesar 0,00% serta Jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,01%. Penjelasan lebih terperinci terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Triwulan III 2018 dan Triwulan III 2019 (year on year) (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2018 Triwulan III	Laju (%)	2019 Triwulan III	Laju (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.906.253,60	1,21	41.905.239,93	1,03
2	Pertambangan dan Penggalian	1.729.044,49	0,08	2.597.040,80	0,06
3	Industri Pengolahan	24.493.823,91	0,93	38.531.333,34	0,22
4	Pengadaan Listrik, Gas	176.924,61	0,00	228.628,11	0,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.765,70	0,00	201.470,88	0,01
6	Konstruksi	16.413.345,39	0,66	28.944.833,03	0,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.947.138,19	1,10	39.237.873,58	1,40
8	Transportasi dan Pergudangan	6.196.342,18	0,29	10.334.899,83	0,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.061.639,75	0,16	4.907.898,99	0,21
10	Informasi dan Komunikasi	3.561.190,77	0,21	4.377.285,00	0,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.786.958,81	0,13	5.846.169,20	0,01
12	Real Estate	5.520.824,87	0,23	10.462.206,48	0,20
13	Jasa Perusahaan	1.191.045,21	0,06	2.247.672,17	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.180.513,66	0,20	7.530.821,07	0,26
15	Jasa Pendidikan	2.631.753,07	0,09	3.767.662,81	0,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.260.341,79	0,05	2.073.714,33	0,04
17	Jasa lainnya	666.112,92	0,03	1.203.604,96	0,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		130.846.018,91	5,43	204.398.354,49	5,11

Sumber : BPS (BRS 5 Nov 2018 & 2019); Bappedas

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, secara total PDRB pengeluaran pada triwulan III tahun 2018 berjumlah 188.844.711,22 (ADHB) dan 130.846.018,91 (ADHK). Komponen pengeluaran terbesar pada triwulan III tahun 2018 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 101.575.315,61 (ADHB) yang kemudian diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar Rp.73.113.660,42 dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp.58.676.120,79. Pada *year on year* (yoy) triwulan III Tahun 2019, kontribusi pengeluaran terbesar masih berada pada konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 110.444.741,33 yang kemudian diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp. 67.176.218,56 dan ekspor barang dan jasa sebesar Rp. 66.263.751,16. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 7 Perbandingan PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Triwulan III 2018 dan Triwulan III 2019
(dalam Juta Rupiah)**

No	Uraian	2018 Triwulan III		2019 Triwulan III	
		Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	101.575.315,61	66.854.926,62	110.444.741,33	69.834.282,89
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.793.414,47	1.372.632,32	1.874.700,26	1.415.121,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.890.607,56	9.184.805,33	16.345.506,57	10.533.210,80
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	58.676.120,79	38.881.992,27	67.176.218,56	43.055.301,98
5	Perubahan Inventori	1.805.908,08	1.207.067,98	2.875.654,31	2.113.508,19
6	Ekspor Barang dan Jasa	73.113.660,42	57.280.474,34	66.263.751,16	54.893.376,20
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	63.010.315,70	43.935.879,94	60.582.217,71	44.371.542,20
PDRB		188.844.711,22	130.846.018,91	204.398.354,49	137.473.259,25

Sumber : BPS (BRS 5 Nov 2018 & 2019); Bappedas

Berdasarkan persentase distribusi menurut pengeluaran, komponen terbesar pada triwulan III 2019 (*year on year*) didominasi oleh pengeluaran rumah tangga yaitu sebesar 54,03% yang diikuti oleh PMTB sebesar 32,87% dan ekspor barang dan jasa sebesar 32,42%. Sedangkan berdasarkan sumber pertumbuhan, persentase PDRB Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,50%, yang kemudian diikuti oleh Investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 1,94%, sementara sumber pertumbuhan ekspor, mengalami penurunan sebesar minus 1,76%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8 Perbandingan Distribusi Presentase Dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera
Utara Menurut Pengeluaran Triwulan III 2018 dan 2019 (yoy)
(Persen)**

No	Uraian	2018 Triwulan III		2019 Triwulan III	
		Distribusi	Sumber Pertumbuhan	Distribusi	Sumber Pertumbuhan
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	54,02	3,34	54,03	2,50
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,99	0,13	0,92	0,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,76	0,76	8,00	1,82
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	32,39	2,08	32,87	1,94
5	Perubahan Inventori	1,39	0,017	1,41	-



6	Ekspor Barang dan Jasa	31,05	1,22	32,42	-1,76
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	27,61	2,17	29,64	-1,53
PDRB		100.00	5,43	100.00	5,11

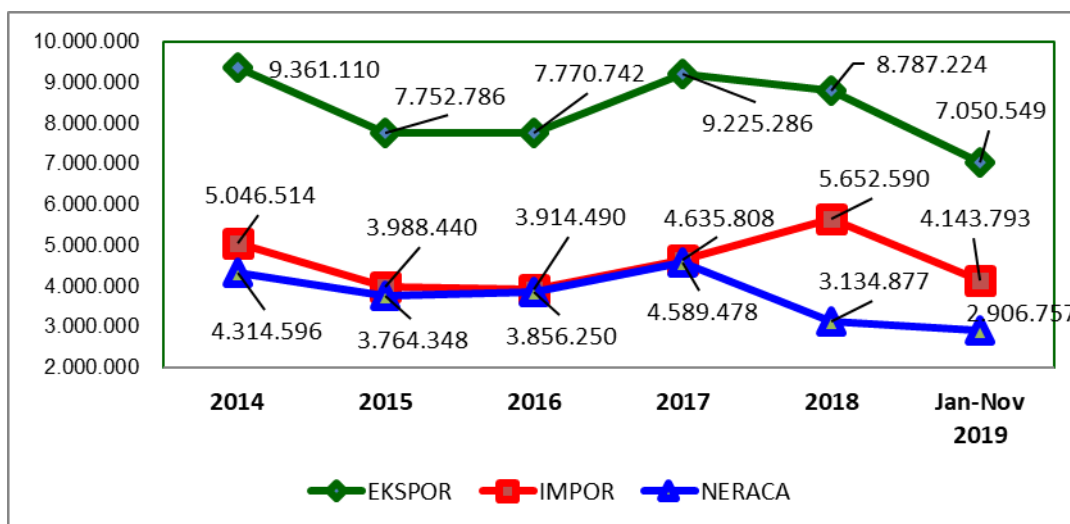
Sumber : BPS (BRS 5 Nov 2018 & 2019); Bappedasu

Neraca Perdagangan Luar Negeri

Pembahasan akan neraca perdagangan diperlukan sebagai suatu instrument dalam mengantisipasi resiko ekonomi global sekaligus merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga penguatan laju pertumbuhan ekonomi.

Neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada Januari-November 2019 tercatat mengalami surplus, sebesar US \$ 2.90 Milyar. Ekspor Sumatera Utara pada tahun 2018 tercatat sebesar US\$ 7.05 Milyar dan import sebesar US\$ 4.14 Milyar. Surplus neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara dengan negara mitra utama selama bulan November 2019 berturut-turut adalah senilai US\$54,28 juta dengan Amerika Serikat, senilai US\$43,25 juta dengan India, senilai US\$26,01 juta dengan Jepang, senilai US\$25,97 juta dengan Kamboja, dan senilai US\$20,75 juta dengan Belanda. **Defisit** perdagangan luar negeri Sumut bulan November 2019 tercatat dengan Singapura sebesar US\$42,20 juta, dengan Argentina sebesar US\$25,24 juta, Tiongkok sebesar US\$36,52 juta, Malaysia sebesar US\$17,62 juta, dan sebesar US\$22,91 juta dengan Australia. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut:

Gambar 4
Perdagangan Luar Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sampai Januari-November 2019



Sumber: BPS Sumut; Bappedasu

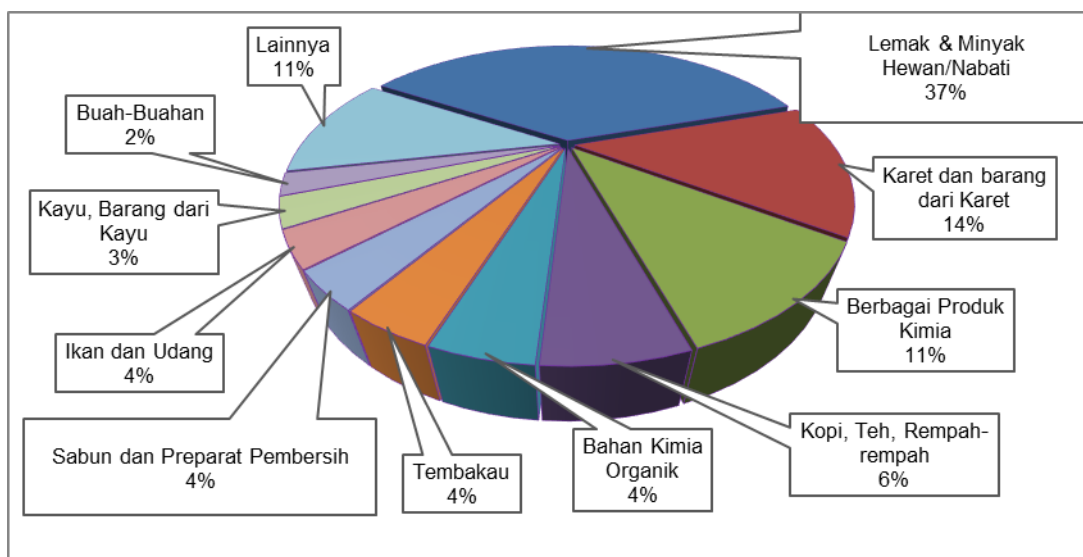
Pangsa Pasar Ekspor Provinsi Sumatera Utara bulan Januari-November 2019 menurut Negara tujuan yang terbesar adalah ke Tiongkok dengan nilai US\$ 985,22 Juta (13,97%), diikuti ke Amerika Serikat dengan Nilai US\$ 901,71 Juta (12,79%) dan India



dengan Nilai US\$ 518,38 Juta (7,35%). Sedangkan Impor Sumatera Utara selama bulan Januari-November 2019 menurut Negara asal yang terbesar adalah dari Tiongkok dengan nilai US\$ 1,18 Miliar (28,49%) dan Singapura dengan nilai US\$ 393,93 Juta (9,51%) serta Malaysia dengan nilai US\$ 359,01 Juta (8,66%).

Ekspor Sumatera Utara pada Januari-November tahun 2019 didominasi dari Golongan Barang Lemak & Minyak Hewan/Nabati sebesar 36,93 %, diikuti Karet dan barang dari karet sebesar 14,07 %, serta Berbagai Produk Kimia sebesar 10,77 %. Hal ini terlihat dalam grafik dibawah ini:

Gambar 5
Ekspor Provinsi Sumatera Utara Menurut Golongan Barang
HS (Harmonized System Code) 2 Dijit
Januari-November 2019 (Nilai FOB, Ribu US \$)

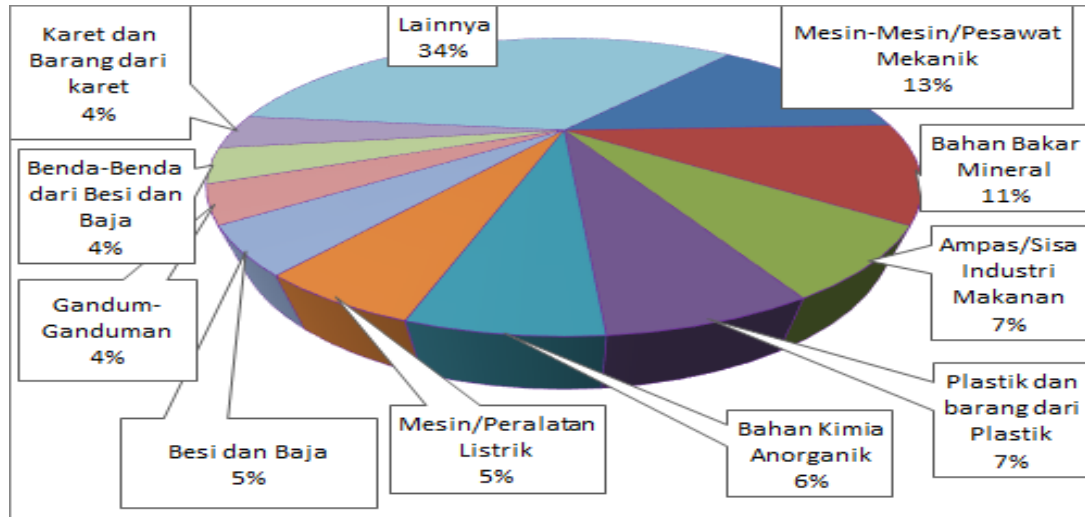


Sumber: BPS Sumut; Bappedasu

Impor Sumatera Utara pada Januari-November tahun 2019 didominasi dari Golongan Barang lainnya dengan dominasi bahan baku penolong sebesar 34,39 %, diikuti Golongan Barang Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik sebesar 13,27 %, dan Bahan Bakar Mineral sebesar 10,55 %. Hal ini terlihat dalam grafik dibawah ini:



Gambar 6
Ekspor Provinsi Sumatera Utara Menurut Golongan Barang
HS (Harmonized System Code) 2 Diji
Januari-November 2019 (Nilai FOB, Ribu US \$)



Sumber: BPS Sumut; Bappedasu

Prospek Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2020 dan 2021

Seperti telah disampaikan sebelumnya, ekonomi Sumatera Utara kedepan akan diliputi dengan berbagai tantangan. Asumsi perang dagang yang masih terus berlangsung, kebijakan proteksionisme, pelemahan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor tentu menjadi sebuah hambatan yang berarti bagi penguatan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi (TPPE) yang merupakan Tim yang terdiri atas Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Praktisi dan Stakeholder-stakeholder lainnya telah merumuskan langkah-langkah penting yang dapat dilaksanakan secara sinergis, antara lain; Penguatan hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan menuju penciptaan komoditas unggul dan bernilai tambah; Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain melalui optimalisasi membangun desa menata kota yaitu penciptaan desa dan kota produktif, pengembangan KSPN Danau Toba, Pengembangan Destinasi TBT (Tahura- Bukit Lawang-Tangkahan) dan destinasi-destinasi lainnya dan; Penguatan neraca perdagangan melalui strategi yang disusun oleh Tim Ekonomi Internasional yang memuat penguatan ekspor dalam berbagai sektor. Selain itu, percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis Provinsi Sumatera Utara dan penguatan investasi juga diharapkan dapat berkontribusi positif bagi laju ekonomi. Tak kalah penting adalah penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga konsumsi domestik dapat terus terjaga.

Secara terperinci, ekonomi Sumatera Utara tetap diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PDRB ADHB diproyeksikan akan berkisar pada angka Rp 920.227.421 Triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 607.437.367 Triliun. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020,



dimana PDRB ADHB diproyeksikan sebesar 861.447.027 Triliun dan PDRB ADHK sebesar 543.043.442 Triliun. Tabel dibawah menggambarkan pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut sektor:

**Tabel 9 Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK (juta)
2020-2021**

NO	URAIAN	ADHB		ADHK	
		TAHUN			
		2020*	2021*	2020*	2021*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	180.718.075,55	192.168.644,81	143.144.542,77	151.322.327,96
2	Pertambangan dan Penggalian	10.058.171,10	10.454.112,28	7.385.367,22	7.755.842,33
3	Industri Pengolahan	178.753.878,79	192.063.910,76	102.437.438,67	105.992.230,58
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.146.870,86	1.266.381,21	805.016,25	891.042,48
5	Pengadaan Air	1.053.640,83	1.150.931,39	567.213,31	579.240,90
6	Konstruksi	114.449.921,06	121.843.731,68	73.925.880,88	78.873.147,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	157.663.868,66	169.045.176,98	104.107.513,64	111.666.169,33
8	Transportasi dan Pergudangan	43.070.945,55	45.953.529,47	28.124.357,47	30.118.679,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	20.106.041,51	21.378.001,99	14.419.954,45	15.658.286,18
10	Informasi dan Komunikasi	17.217.584,96	18.446.846,69	15.961.681,56	17.080.704,64
11	Jasa Keuangan	25.745.047,73	27.049.781,21	14.879.487,72	14.989.462,11
12	Real Estate	44.954.836,41	48.792.207,36	25.347.203,95	27.163.927,15
13	Jasa Perusahaan	9.550.910,42	10.369.556,10	5.314.053,32	5.676.771,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	28.314.774,33	29.709.465,76	17.435.771,81	18.191.079,00
15	Jasa Pendidikan	15.093.779,90	15.953.393,18	11.280.851,75	11.870.884,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.163.741,26	8.726.255,70	5.858.183,41	6.349.890,58
17	Jasa lainnya	5.384.938,15	5.855.495,30	3.048.924,01	3.257.680,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		861.447.027,07	920.227.421,86	574.043.442,20	607.437.367,01

Sumber : Bappedasu (data diolah)
) data proyeksi

Secara keseluruhan pertumbuhan terjadi hampir di semua sektor. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam ekonomi diprediksi akan mengalami peningkatan, sektor industri pengolahan juga diproyeksikan mengalami peningkatan. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Penjelasan terperinci terkait pertumbuhan ekonomi sektoral terlampir dalam tabel dibawah.



Tabel 10 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2019-2020 (%)

NO	URAIAN	TAHUN (%)	
		2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,39	5,40
2	Pertambangan dan Penggalian	4,76	4,78
3	Industri Pengolahan	3,29	3,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,56	9,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,58	2,08
6	Konstruksi	6,24	6,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,50	6,77
8	Transportasi dan Pergudangan	6,61	6,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,89	7,91
10	Informasi dan Komunikasi	6,53	6,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	0,73
12	Real Estat	6,68	6,69
13	Jasa Perusahaan	6,38	6,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,12	4,15
15	Jasa Pendidikan	4,94	4,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	7,74
17	Jasa Lainnya	6,40	6,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		5,1 - 5,5	5,2 - 5,6

Sumber: Bappedasu (data diolah)

Dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi diprediksi masih berada pada pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2020 diproyeksi akan memiliki kontribusi sebesar 53,53% dan tahun 2021 sebesar 53,56%. Sektor PMTB juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan yaitu sebesar 31,35% pada tahun 2020 dan 31,40% pada tahun 2021, seiring dengan semakin meningkatnya investasi diberbagai sektor. Tabel dibawah menjelaskan kontribusi PDRB dari sektor pengeluaran.

Tabel 11 Proyeksi Kontribusi PDRB Pengeluaran 2020-2021

No	Uraian	Proyeksi (%)	
		2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	53,55	53,56
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,82	0,83
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,67	7,94
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	31,35	31,40



5	Perubahan Inventori	1,17	1,18
6	Ekspor Luar Negeri	37,65	37,78
7	Impor Luar Negeri	32,21	32,25
PDRB		100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2019 (data diolah)

Secara keseluruhan, pada tahun 2020 ekonomi Sumatera Utara diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,1%-5,5% dan pada tahun 2021 sebesar 5,2%-5,6% sementara inflasi Sumatera Utara untuk tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran $2,90 \pm 1\%$ dan pada tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran $2,85 \pm 1\%$.

Berdasarkan berbagai analisa yang telah diulas sebelumnya, maka proyeksi makro ekonomi Sumatera Utara dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 12 Asumsi Makro Ekonomi Sumatera Utara 2020- 2021

INDIKATOR	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,1-5,5%	5,2-5,6%
Inflasi (%yoy)	$2,90 \pm 1\%$	$2,85 \pm 1\%$

2.3. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi laporan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan fasilitas layanan perbankan yang disediakan melalui *Payment Gateway* PT. Bank Sumut yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam posisinya sebagai nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui *Delivery Channel Bank* seperti teller, customer service, ATM, CMS dan lainnya. Instrumen transaksi pembayaran non tunai menggunakan *Cash Management System (CMS)*, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.

Untuk aplikasi CMS Non SP2D, proses pemindahbukuan (*overbooking*) dilakukan melalui aplikasi secara *online* dan *realtime* yang penggunaannya oleh Bendahara Pengeluaran seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sistem tersebut dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggang waktu (*deadline*) yang jelas dan terukur.



Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tetap menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang;
- b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;
- d. Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya;
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui;
- g. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:
 - 1) Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 2) Pengangggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
- d. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- e. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi.



2.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) Pendapatan –LRA dan (2) Pendapatan-LO.

Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengolaannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berasal dari penerimaan (1) pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, (2) retribusi daerah seperti biaya pengurusan izin usaha, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yaitu PDAM Tirtanadi, Bank Sumut, PD. Perkebunan, PD. Perhotelan, PT. Aneka Industri dan Jasa serta (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan harga dari pengadaan barang dan jasa, pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan diklat, serta dari penjualan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut PSAP Nomor 3 Paragraf 8 adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pendapatan Transfer dikatakan sebagai Dana Perimbangan. Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas (1) dana bagi hasil pajak seperti cukai hasil tembakau, (2) dana alokasi umum, (3) dana alokasi khusus, (4) dana bagi hasil sumber daya alam, serta (5) dana penyesuaian.



c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sah sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 berasal dari hibah pemerintah pusat, badan/ organisasi swasta dalam/ luar negeri yang tidak mengikat. Kemudian dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban bencana alam seperti bencana gunung Sinabung yang masih berlangsung hingga sekarang, banjir di daerah Mandailing Natal serta pendapatan lainnya.

2.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tak berwujud.
- c. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.
- d. Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti bagi hasil pajak ke Kabupaten Kota, bagi hasil retribusi ke Kabupaten/ Kota, serta bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/ Kota.

2.3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang



perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto menurut PSAP Nomor 2 paragraf 58-61 adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan OPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai urusannya dibagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Jumlah keseluruhan OPD adalah 51 (lima puluh satu) termasuk sembilan Biro yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem
 4. Rumah Sakit Umum Haji Daerah
 5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
 6. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik
 9. Satuan Polisi Pamong Praja
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 11. Dinas Sosial

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 1. Dinas Tenaga Kerja
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
 4. Dinas Lingkungan Hidup
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
 8. Dinas Perhubungan
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika



10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 12. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 14. Dinas Perpustakaan dan Arsip
3. Urusan Pilihan
1. Dinas Kelautan dan Perikanan
 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 3. Dinas Perkebunan
 4. Dinas Kehutanan
 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
 4. Badan Kepegawaian Daerah
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 8. Biro Umum dan Perlengkapan
 9. Biro Pemerintahan
 10. Biro Bina Perekonomian
 11. Biro Sosial dan Kesejahteraan
 12. Biro Organisasi
 13. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
 14. Biro Administrasi Pembangunan
 15. Biro Hukum
 16. Biro Humas dan Keprotokolan
 17. Sekretariat DPRD
 18. Inspektorat Daerah Provinsi
 19. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 20. Badan Penghubung Daerah Provinsi

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran masih berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.



Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

Dasar peraturan kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;



- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;



- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

12. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/asset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

13. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi



menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan atau yang akan dibayarkan. Nilai wajar dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer



dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran

d. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU, Tahun Anggaran berjalan.

- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan



dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah



Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

- c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan



Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.
- d. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan
Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
 - b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.
- e. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer
Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
- f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.
- g. Penerimaan dan pengeluaran lainnya
Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.



Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.



Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen:

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan



untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:



No	Periode jatuh tempo pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur;

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e. Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian



dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau



		4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b.	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	Umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

No	Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5%
b.	Kurang Lancar	10%
c.	Diragukan	50%
d.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian



pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang *defensif* bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Gubernur, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:



- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write-off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel;

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.



3.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, termasuk bahan pakai habis dan bahan tidak pakai habis (bahan material);
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, persediaan ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan bahan baku pembuatan benih;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti alat-alat pertanian setengah jadi dan benih yang belum cukup umur;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan seperti hewan dan bibit tanaman.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Akuntansi Persediaan adalah penentuan kuantitas nilai persediaan yang mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip – prinsip akuntansi menetapkan bahwa persediaan harus dicatat dan dilaporkan sebesar harga perolehannya.

Untuk pencatatan persediaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode perpektual dalam pencatatannya yaitu penyelenggaraan pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus – menerus setiap terjadi transaksi perolehan atau pengeluaran yang mempengaruhi persediaan. Pencatatan perpektual digunakan untuk pencatatan persediaan barang pakai habis dan barang/ bahan material seperti alat tulis kantor, dokumen, alat listrik dan elektronik, peranko, materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas, tabung pemadam kebakaran, tabung gas, bahan bangunan, bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, alat peraga pendidikan dan lain-lain.

Sedangkan untuk penentuan persediaannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau masuk pertama keluar pertama yaitu metode penentuan persediaan yang didasarkan pada anggapan bahwa barang yang paling dulu dibeli (masuk) adalah yang paling dulu dikeluarkan dan sisa persediaan barang dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli terakhir. Pencatatan metode FIFO digunakan untuk pencatatan bahan/ material seperti bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok, bahan medis lainnya, bibit tanaman, bibit ternak dan lain-lain.

Pengakuan

Persediaan diakui sebagai salah satu unsur yang akan disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berbasis akrual dengan ketentuan



sebagai berikut :

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Aset, beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga seperti persediaan obat dirumah sakit.
- b. Pendekatan Beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi seperti persediaan untuk suatu kegiatan.
- c. Pendekatan Penggunaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
- d. Pendekatan akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.



Aset Non Lancar meliputi:

- a. Investasi Jangka Panjang;
- b. Aset Tetap;
- c. Dana Cadangan dan
- d. Aset Lainnya

3.4.11.1. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

c. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

d. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

3.4.11.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:



- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset



tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olah raga sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke atas.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai



bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

No.	Kelompok Aset	Umur
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	50
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

No.	Kelompok Aset	Umur
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.



b. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

c. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.



Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- 2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima;
- 3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

f. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja



adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

a. Batasan minimal kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Lebih dari 15%
2.1	Alat-alat berat	
2.2	Alat-alat angkutan	
2.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	
2.4	Alat-alat pertanian / peternakan	
2.5	Alat-alat kantor kantor dan rumah tangga	
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	
2.7	Alat-alat kedokteran	
2.8	Alat-alat laboratorium	
2.9	Alat keamanan	
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	Lebih dari 25%
3.1	Bangunan gedung	
3.2	Bangunan monument	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	Lebih dari 6%
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.2	Bangunan Air / Irigasi	
4.3	Instalasi	
4.4	Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	Lebih dari 20%
5.1	Buku Perpustakaan	
5.2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

b. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal			
Permanen	50	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	5
		50 % s.d < 75 %	10
		> 75 %	15
Semi Permanen	25	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	7
Darurat	10	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	2
		> 75 %	5
<hr/>			
Bangunan Menara	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
<hr/>			
Bangunan Bersejarah	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
<hr/>			
Bangunan Monumen dan Tugu Peringatan	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
<hr/>			
Rambu-rambu	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4

3.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,



lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.



Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.



Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- 1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



- b. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - 3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatangani kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.



Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Utang PFK
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang kepada pihak ketiga
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- c. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Bagian lancar hutang jangka panjang.
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk



masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3.5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2019 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai Rp 13.079.598.635.469,31 atau 93,20% dari anggaran sebesar Rp14.034.339.344.970,00

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0-100%), secara obyektif dapat dikategorikan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2019 dari sisi capaian target pendapatan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN	14.034.339.344.970,00	13.079.598.635.469,31	93,20
Pendapatan asli daerah	6.284.220.582.270,00	5.761.270.412.051,31	91,68
Pendapatan transfer	7.736.050.762.700,00	7.300.647.588.241,00	94,37
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	14.068.000.000,00	17.680.635.177,00	125,68
BELANJA	11.381.194.207.215,19	10.170.845.213.205,25	89,37
Belanja Operasi	9.778.812.733.865,21	8.899.945.553.856,85	91,01
Belanja Modal	1.577.381.473.349,98	1.249.600.483.637,40	79,22
Belanja tak terduga	25.000.000.000,00	21.299.175.711,00	85,20
TRANSFER	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73
Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73
SURPLUS/DEFISIT	(692.322.808.436,19)	(360.725.070.277,94)	52,10
PEMBIAYAAN NETTO	692.322.808.436,19	697.322.808.436,19	100,72
SILPA	0,00	336.597.738.158,25	



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Pendapatan-LRA **TA 2019** **TA 2018**
Rp13.079.598.635.469,31 **Rp12.703.058.587.890,97**

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp14.034.339.344.970,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 7). Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp13.079.598.635.469,31 atau 93,20 dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	6.284.220.582.270,00	5.761.270.412.051,31	91,68	5.638.960.579.478,97
Pendapatan Transfer – LRA	7.736.050.762.700,00	7.300.647.588.241,00	94,37	7.055.134.429.266,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	14.068.000.000,00	17.680.635.177,00	125,68	8.963.579.146,00
Jumlah	14.034.339.344.970,00	13.079.598.635.469,31	93,20	12.703.058.587.890,97

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp376.540.047.578,34 atau 2,96% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp12.234.837.881.539,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.761.270.412.051,31	5.638.960.579.478,97	122.309.832.572,34	2,17
Pendapatan Transfer – LRA	7.300.647.588.241,00	7.055.134.429.266,00	245.513.158.975,00	3,48
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	17.680.635.177,00	8.963.579.146,00	8.717.056.031,00	97,25
Jumlah	13.079.598.635.469,31	12.703.058.587.891,97	376.540.047.577,34	2,96



Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2019 ditambah dengan pendapatan yang dikelola tersendiri oleh RSU Haji Medan sebagai BLUD sebesar Rp66.750.389.275,00.

	TA 2019	TA 2018
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	Rp5.761.270.412.051,31	Rp5.638.960.579.478,97

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.761.270.412.051,31 atau mencapai 91,68% dari anggaran P.APBD sebesar Rp6.284.220.582.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	5.171.010.378.270,00	5.058.443.944.654,00	97,82	5.219.324.543.311,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	39.126.339.000,00	38.408.031.263,00	98,16	36.614.846.458,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	515.021.784.768,00	436.284.942.769,00	84,71	191.995.313.161,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	559.062.080.219,00	228.133.493.365,31	40,81	191.025.876.548,97
Jumlah	6.284.220.582.270,00	5.761.270.412.051,31	91,68	5.638.960.579.478,97

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp122.309.832.572,34 atau 2,17% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

	TA 2019	TA 2018
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp5.058.443.944.654,00	Rp5.219.324.543.311,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.058.443.944.654,00 atau mencapai 97,82% dari anggaran P.APBD sebesar Rp 5.171.010.378.270,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	1.986.414.422.977,00	1.995.480.813.304,00	100,46	2.048.416.695.396,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	1.404.009.027.338,00	1.315.420.245.168,00	93,70	1.426.420.236.038,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	865.000.000.000,00	889.959.158.091,00	102,86	879.812.550.550,00
Pajak Air Permukaan – LRA	40.400.000.000,00	62.420.420.198,00	154,51	43.851.582.047,00
Pajak Rokok – LRA	875.186.927.968,00	795.163.307.893,00	90,86	820.823.479.280,00
Jumlah	5.171.010.378.270,00	5.058.443.944.654,00	97,82	5.219.324.543.311,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp160.880.598.657,00 atau 3,08% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	Rp38.408.031.263,00	Rp36.614.846.458,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp38.408.031.263,00 atau 98,16% dari anggaran P.APBD sebesar Rp39.126.339.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Retribusi Jasa Umum	25.003.651.000,00	22.841.010.277,00	91,35	23.200.229.518,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	24.359.151.000,00	21.846.603.327,00	89,69	22.202.668.268,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	303.000.000,00	303.282.500,00	100,09	303.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LRA	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	152.000.000,00
Retribusi Pengujian Mutu Barang - LRA	320.000.000,00	443.500.000,00	138,59	317.335.000,00
Retribusi Pemakaian Alat Berat - LRA	0,00	226.124.450,00	0,00	225.226.250,00
Retribusi Jasa Usaha	10.298.112.000,00	10.986.584.957,00	103,69	9.352.377.512,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	3.457.134.000,00	4.095.124.185,00	118,45	2.969.178.172,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	2.792.521.000,00	2.379.605.000,00	85,21	2.378.655.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi - LRA	109.752.000,00	159.065.000,00	144,93	109.752.500,00
Retribusi Tempat Pariwisata - LRA	0,00	0,00	0,00	93.820.500,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olah raga- LRA	1.260.000.000,00	1.647.605.250,00	130,76	1.225.557.250,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.678.705.000,00	2.705.185.522,00	100,99	2.575.414.090,00
Retribusi Perizinan Tertentu	3.824.576.000,00	4.580.436.029,00	119,76	4.062.239.428,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	300.000.000,00	322.940.000,00	107,65	287.170.000,00
Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu – LRA	0,00	0,00	17,22	103.324.900,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	1.250.000.000,00	2.151.613.102,00	172,13	1.010.019.104,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA – LRA	0,00	0,00	0,00	2.341.958.300,00
Retribusi Pemakaian Tanah Milik Jalan – LRA	0,00	344.401.627,00	0,00	319.767.124,00
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA – LRA	2.274.576.000,00	1.761.481.300,00	0,00	0,00
Jumlah	39.126.339.000,00	38.408.031.263,00	98,16	36.614.846.458,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.184.805,00 atau 4,90% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Rp436.284.942.769,00	Rp191.995.313.161,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp436.284.942.769,00 atau 84,71% dari anggaran P.APBD sebesar Rp515.021.784.768,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 19 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA. 2019 dan 2018**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA:	511.032.898.000,00	432.296.056.001,00	84,59	188.245.607.267,00
PD. Perkebunan	2.706.000.000,00	2.706.000.000,00	100,00	200.000.000.000,00
PT. Dhirga Surya	200.000.000,00	145.000.000,00	72,50	150.000.000,00
PT. Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Bank Sumut	482.236.898.000,00	409.145.056.001,00	84,84	175.250.878.355,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	244.728.912,00
PDAM Tirtanadi	25.590.000.000,00	20.000.000.000,00	78,16	10.600.000.000,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN – LRA:	3.988.886.768,00	3.988.886.768,00	100,00	3.749.705.894,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	169.595.681,00	169.595.681,00	100,00	216.194.555,00
PT. Kawasan Industri Medan	3.819.291.087,00	3.819.291.087,00	100,00	3.533.511.339,00
Jumlah	515.021.784.768,00	436.284.942.769,00	84,71	191.995.313.161,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp244.289.629.608,00 atau 127,24% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

	TA 2019	TA 2018
4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Rp228.133.493.365,31	Rp191.025.876.548,97

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp228.133.493.365,31 atau 40,81 % dari P.APBD sebesar Rp559.062.080.219,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	50.000.000,00	86.190.000,00	172,38	438.715.600,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	69.099.556.866,00	33.154.847.351,00	47,98	43.818.888.562,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA	0,00	0,00	0,00	1.003.062.258,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	10.000.000.000,00	2.269.050.882,82	22,69	5.586.315.481,65
Pendapatan Denda Pajak – LRA	376.242.683.653,00	70.314.829.731,00	18,69	50.070.288.379,00
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	42.870.000.000,00	52.181.532.629,49	121,72	34.458.114.430,32
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LRA	3.063.220.000,00	3.050.525.000,00	99,59	8.899.058.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	136.619.700,00	326.128.496,00	238,71	119.677.700,00
Pendapatan BLUD – LRA	57.600.000.000,00	66.750.389.275,00	115,89	46.631.756.138,00
Jumlah	559.062.080.219,00	228.133.493.365,31	40,81	191.025.876.548,97



Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp37.107.616.816,34 atau 19,43% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.1.2 Pendapatan Transfer **TA 2019** **Rp7.300.647.588.241,00** **TA 2018** **Rp7.055.134.429.266,00**
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp7.300.647.588.241,00 atau mencapai 94,37% dari anggaran P.APBD sebesar Rp7.736.050.762.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	7.736.050.762.700,00	7.300.647.588.241,00	94,37	7.055.134.429.266,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.736.050.762.700,00	7.300.647.588.241,00	94,37	7.055.134.429.266,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp245.513.158.975,00 atau 3,48% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018.

4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer **TA 2019** **Rp7.300.647.588.241,00** **TA 2018** **Rp7.055.134.429.266,00**
Pemerintah Pusat – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp7.300.647.588.241,00 atau mencapai 94,37% dari anggaran P. APBD sebesar Rp7.736.050.762.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Bagi Hasil Pajak – LRA	467.407.683.700,00	322.412.067.550,00	68,98	455.531.997.729,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	83.179.994.000,00	58.892.050.331,00	70,80	58.317.018.988,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	2.713.750.553.000,00	2.713.750.553.000,00	100,00	2.629.224.545.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	4.471.712.532.000,00	4.205.592.917.360,00	94,05	3.912.060.867.549,00
Jumlah	7.736.050.762.700,00	7.300.647.588.241,00	94,37	7.055.134.429.266,00



Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp126.999.489.353,00 atau 1,83% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

	TA 2019	TA 2018
	Rp322.412.067.550,00	Rp455.531.997.729,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp322.412.067.550,00 atau mencapai 68,98% dari anggaran P.APBD sebesar Rp467.407.683.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	134.404.425.000,00	115.464.306.029,00	85,91	118.611.960.641,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	327.401.800.000,00	201.341.476.998,00	61,50	329.303.454.923,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	5.601.458.700,00	5.606.284.523,00	100,09	6.445.996.000,00
Alokasi Biaya Pemungutan PBB	0,00	0,00	0,00	1.170.586.165,00
Jumlah	467.407.683.700,00	322.412.067.550,00	68,98	455.531.997.729,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp133.119.930.179,00 atau 29,22% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

	TA 2019	TA 2018
	Rp58.892.050.331,00	Rp58.317.018.988,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp58.892.050.331,00 atau mencapai 70,80% dari anggaran P.APBD sebesar Rp83.179.994.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Kehutanan – LRA	21.695.614.000,00	15.077.785.097,00	69,50	8.108.207.483,00
Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara – LRA	56.935.878.000,00	41.088.600.419,00	72,17	5.464.751.824,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	2.008.410.000,00	1.104.625.500,00	55,00	311.480.809,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	1.613.255.000,00	887.290.250,00	55,00	480.023.735,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	926.837.000,00	733.749.065,00	79,18	337.880.914,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	0,00	0,00	0,00	396.944.031,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	0,00	0,00	0,00	434.660.560,00
Jumlah	83.179.994.000,00	58.892.050.331,00	70,80	58.317.018.988,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp575.031.343,000,00 atau 0,99 % dibandingkan realisasi tahun 2018.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	Rp2.713.750.553.000,00	Rp2.629.224.545.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 terealisasi 100% yakni sebesar Rp2.713.750.553.000,00. Realisasi DAU Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp84.526.008.000,00 atau mencapai 3,21% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	Rp4.205.592.917.360,00	Rp3.912.060.867.549,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.205.592.917.360,00 atau mencapai 94,05% dari anggaran P.APBD sebesar Rp4.471.712.532.000,00. Realisasi DAK Tahun Anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp293.532.049.811,00 atau 7,50 % dibandingkan dengan realisasi TA 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	390.619.136.000,00	341.921.622.956,00	87,533	315.558.425.916,00
a. Bidang Pendidikan SMA	66.035.969.000,00	65.181.104.360,00	98,71	64.797.120.311,00
b. Bidang Kesehatan Pelayan Rujukan	1.709.999.000,00	1.251.000.000,00	73,16	2.800.000.000,00
c. Bidang Kesehatan Pelayan Kefarmasian	568.250.000,00	142.062.500,00	25,00	316.546.300,00
d. Bidang Pertanian	8.550.000.000,00	7.888.011.376,00	92,26	8.587.891.847,00
e. Bidang Kelautan dan Perikanan	4.721.218.000,00	3.304.852.600,00	70,00	2.618.635.000,00
f. Bidang Panataan Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Bidang Irigasi (KedaulataPangan)	7.712.097.000,00	7.712.093.514,00	99,99	7.711.394.965,00
h. Bidang Jalan	49.305.083.000,00	39.766.889.591,00	80,66	59.342.150.000,00
i. Bidang Pendidikan SMK	144.705.198.000,00	137.862.826.056,00	95,27	127.380.489.154,00
j. Bidang Lingkungan Hidup	602.648.000,00	421.853.600,00	70,00	841.746.000,00
k. Bidang Kesehatan (RS Rujukan)	11.097.969.000,00	10.610.465.779,00	95,61	11.482.367.935,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
l. Bidang Kesehatan penur.stunting	2.059.207.000,00	1.707.665.000,00	82,93	0,00
m. Bidang Kesehatan bapelkes	9.657.539.000,00	7.061.654.250,00	73,12	0,00
n. Bidang Kesehatan Prioritas	0,00	0,00	0,00	14.978.209.104,00
o. Bidang Kehutanan	21.445.554.000,00	15.011.887.800,00	70,00	14.701.875.300,00
p. Bidang Pasar	3.297.406.000,00	3.210.895.665,00	97,38	0,00
q. Bidang Pendidikan SLB	9.228.229.000,00	8.364.174.165,00	90,64	0,00
r. Bidang Jalan (Reguler)	44.318.876.000,00	31.023.213.200,00	70,00	0,00
s. Bidang Pariwisata	5.603.894.000,00	1.400.973.500,00	25,00	0,00
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.081.093.396.000,00	3.863.671.294.404,00	96,67	3.596.502.441.633,00
a. Bantuan Operasional Sekolah	3.113.544.200.000,00	2.911.315.213.800,00	93,51	2.983.985.974.500,00
b. Tunjangan Profesi Guru	614.377.661.000,00	598.445.330.898,00	97,41	589.900.619.000,00
c. Tambahan Penghasilan Guru	8.628.000.000,00	6.073.500.000,00	70,39	8.803.500.000,00
d. Tunjangan Khusus Guru	6.856.112.000,00	11.682.382.800,00	170,39	5.750.380.800,00
e. Dana Kapasitas Koperasi dan	3.948.740.000,00	3.896.127.075,00	98,67	3.338.357.000,00
f. Bantuan Operasional Kesehatan	5.135.250.000,00	4.246.474.000,00	82,69	0,00
g. Akriditas Labkesda	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.425.738.000,00	2.284.570.831,00	94,18	2.228.031.588,00
i. Bantuan Operasional Kesehatan - Afirmasi	231.625.000.000,00	231.625.000.000,00	100,00	2.495.578.745,00
j. Bantuan Operasional Kesehatan - Kinerja	92.302.695.000,00	92.302.695.000,00	100,00	0,00
k. Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Museum	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	4.471.712.532.000,00	4.205.592.917.360,00	94,05	3.912.060.867.549,00

	TA 2019	TA 2018
4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun anggaran 2019.

Tabel 25 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Dana Insentif Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	TA 2019	TA 2018
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	Rp17.680.635.177,00	Rp8.963.579.146,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.680.635.177,00 atau mencapai 125,68% dari anggaran P.APBD sebesar Rp14.068.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pendapatan Hibah dari	5.000.000.000,00	9.757.229.677,00	195,15	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pemerintah				
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LRA	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	100,00	5.352.000.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LRA	3.500.000.000,00	2.355.405.500,00	67,30	3.611.579.146,00
Jumlah	14.068.000.000,00	17.680.635.177,00	125,68	8.963.579.146,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp8.717.056.031,00 atau 97,25 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.2 Belanja – LRA **TA 2019** **TA 2018**
Rp10.170.845.213.205,25 **Rp10.993.656.938.251,00**

Tahun Anggaran 2019, realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp10.170.845.213.205,25 atau mencapai 89,37% dari anggaran sebesar Rp11.381.194.207.215,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Realisasi Belanja – LRA TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Operasi	9.778.812.733.865,21	8.899.945.553.856,85	91,01	9.375.598.176.840,00
Belanja Modal	1.577.381.473.349,98	1.249.600.483.637,40	79,22	1.564.903.232.653,00
Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	21.299.175.711,00	85,20	53.155.528.758,00
Jumlah	11.381.194.207.215,19	10.170.845.213.205,25	89,37	10.993.656.938.251,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp822.811.725.044,75 atau 7,48 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.2.1 Belanja Operasi **TA 2019** **TA 2018**
Rp8.899.945.553.856,85 **Rp9.375.598.176.840,00**

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp8.899.945.553.856,85 atau mencapai 91,01% dari anggaran belanja P.APBD sebesar Rp9.778.812.733.865,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Realisasi Belanja Operasi TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Pegawai	3.814.628.029.741,68	3.527.528.304.319,00	92,47	3.584.399.318.400,00
Belanja Barang dan Jasa	2.726.845.451.823,53	2.392.374.120.437,85	87,73	2.098.059.596.323,00
Belanja Hibah	3.230.010.871.200,00	2.972.714.748.000,00	92,03	3.165.070.721.289,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	7.328.381.100,00	7.328.381.100,00	100,00	528.068.540.828,00
Jumlah	9.778.812.733.863,21	8.899.945.553.856,85	91,01	9.375.598.176.840,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp475.652.622.983,15 atau 5,07 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai TA 2019 TA 2018
Rp3.527.528.304.319,00 **Rp3.584.399.318.400,00**

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp3.527.528.304.319,00 atau mencapai 92,47 % dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.814.628.029.741,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Belanja Pegawai TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.641.873.376.700,68	2.530.567.978.620,00	95,79	2.482.541.643.582,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	888.354.545.707,00	790.281.124.528,00	88,96	839.302.805.260,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	36.953.361.040,00	34.314.000.000,00	92,86	32.227.872.482,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	147.583.074.721,00	87.499.789.372,00	59,29	110.417.155.051,00
Honorarium PNS	82.625.228.573,00	69.631.558.718,00	84,27	60.481.701.297,00
Honorarium Non PNS	16.429.243.000,00	14.443.553.081,00	87,91	58.677.640.728,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	809.200.000,00	790.300.000,00	97,66	750.500.000,00
Jumlah	3.814.628.029.741,68	3.527.528.304.319,00	92,47	3.584.399.318.400,00

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp56.871.014.081,00 atau 1,59% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.2.1.2 Belanja Barang - Dan Jasa TA 2019 TA 2018
Rp2.392.374.120.437,85 **Rp2.098.059.596.323,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.392.374.120.437,85 atau mencapai 87,73% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp2.726.845.451.823,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Bahan Pakai Habis	78.388.643.697,49	68.768.928.992,50	87,73	72.032.052.056,00
Belanja Bahan/Material	105.223.252.088,48	89.971.233.877,00	85,51	122.470.067.891,00
Belanja Jasa Kantor	184.654.238.289,00	155.189.101.526,00	84,04	134.066.580.095,00
Belanja Premi Asuransi	96.041.893.446,00	93.678.269.965,00	97,54	93.796.028.085,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.073.233.959,00	20.307.877.385,00	77,89	16.506.132.068,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	52.551.364.290,00	38.160.563.779,00	72,62	39.226.273.735,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/	61.281.950.980,00	48.665.472.849,00	79,41	42.229.001.050,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.841.115.600,00	2.972.685.026,00	77,39	4.031.983.482,00
Belanja Sewa Alat Berat	92.000.000,00	79.382.900,00	86,29	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.213.244.771,00	25.291.403.180,00	92,94	21.685.279.400,00
Belanja Makanan dan Minuman	113.330.402.575,00	97.491.687.859,00	86,02	81.129.252.846,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.829.494.400,00	8.511.295.510,00	86,59	6.537.793.268,00
Belanja Pakaian Kerja	2.929.312.950,00	2.503.198.425,00	85,45	2.995.409.750,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.428.886.250,00	9.545.514.500,00	83,52	9.820.462.843,00
Belanja Perjalanan Dinas	600.312.469.088,46	475.081.329.063,00	79,14	394.857.463.844,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	340.000.000,00	246.350.000,00	72,46	225.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.215.283.500,00	15.673.713.243,00	77,53	15.664.147.617,00
Belanja Pemeliharaan	192.287.189.041,52	174.696.356.102,35	90,85	157.484.928.871,00
Belanja Jasa Konsultansi	84.324.933.200,00	66.982.431.000,00	79,43	71.372.995.327,00
Belanja Barang Dana BOS	387.380.440.504,00	386.300.545.435,00	99,72	0,00
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,,00	0,00	0,00	1.087.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendukung	364.220.243.223,52	345.081.037.513,00	94,75	210.855.294.310,00
Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.361.209.635,40	129.472.228.472,00	91,59	229.888.634.990,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.655.132.834,16	131.539.641.836,00	90,31	0,00
Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00	0,00	5.174.784.260,00
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.034.017.500,00	6.163.872.000,00	55,86	3.064.529.100,00
Belanja Uang Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.835.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa Bos	0,00	0,00	0,00	361.858.351.435,00
Jumlah	2.726.845.451.823,53	2.392.374.120.437,85	87,73	2.098.059.596.323,00

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp294.314.524.114,85 atau 14,03% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018. Dari realisasi belanja barang dan jasa berupa honorarium TAPD, terdapat permasalahan berupa uang hilang senilai Rp1.672.987.500,00 yang telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum dengan Tanda Bukti Laporan Nomor STTLP/1991/IX YAN.2.5/2019/SPKT RESTABES MEDAN dan saat ini telah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan dokumen Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788 hingga 3791/Pid.B/2019/PN.Mdn diketahui barang bukti sebagaimana pada tabel di bawah ini dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat laporan ini diterbitkan, serah terima barang bukti tersebut belum dilaksanakan.



Daftar barang bukti yang akan dikembalikan kepada BPKAD berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara uang hilang TA 2019 senilai Rp1,6M adalah sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Uraian	Nilai
1.	Indra Haposan Nababan	Uang tunai	8.000.000,00
2.	Musa Hardianto Sihombing	Uang tunai 1 buah jam tangan Alexander Christie	105.000.000,00 -
3.	Nico Demus Sihombing	1 unit mobil Avanza hitam BK 1417 IC beserta STNK dan BPKB 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam BK 5771 PBC beserta STNK	- -
4.	Niksar Sitorus	uang tunai	3.428.000,00

4.1.2.1.3 Belanja Hibah TA 2019
Rp2.972.714.748.000,00 TA 2018
Rp3.165.070.721.289,00

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.972.714.748.000,00 atau mencapai 92,03% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.230.010.871.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Belanja Hibah TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	336.900.000.000,00	310.671.988.000,00	92,21	736.228.561.289,00
Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan	2.893.110.871.200,00	2.662.042.760.000,00	92,01	2.428.842.160.000,00
Jumlah	3.230.010.871.200,00	2.972.714.748.000,00	92,03	3.165.070.721.289,00

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp192.355.973.289,00 atau 6,08% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial TA 2019
Rp0,00 TA 2018
Rp0,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial pada APBD untuk Tahun Anggaran 2019.

4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan TA 2019
Rp7.328.381.100,00 TA 2018
Rp528.068.540.828,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp7.328.381.100,00 atau 100% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp7.328.381.100,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 32 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	520.827.788.828,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	7.328.381.100,00	7.328.381.100,00	100,00	7.240.752.000,00
Jumlah	7.328.381.100,00	7.328.381.100,00	100,00	528.068.540.828,00

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2019 tersebut mengalami penurunan Rp520.740.159.728,00 atau 98,61% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pada tahun 2019.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.1.2.2 Belanja Modal	Rp1.249.600.483.637,40	Rp1.564.903.232.653,00

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.249.600.483.637,40 atau mencapai 79,22% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp1.577.381.473.349,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Belanja Modal TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Modal Tanah	45.372.600.320,99	35.324.222.041,00	77,85	417.558.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	438.256.523.071,58	302.487.781.004,00	69,02	254.885.635.630,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	245.358.694.085,34	218.045.649.622,40	88,87	256.603.997.928,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	734.989.642.258,07	584.709.449.585,00	79,55	937.616.597.667,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.404.013.614,00	109.033.381.385,00	96,15	115.379.443.428,00
Jumlah	1.577.381.473.349,98	1.249.600.483.637,40	79,22	1.564.903.232.653,00

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp315.302.749.015,60 atau 20,15% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Rp35.324.222.041,00	Rp417.558.000,00

Realisasi belanja modal tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp35.324.222.041,00 atau mencapai 77,85% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp45.372.600.320,99. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp34.906.664.041,00 atau 8.359,72% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018. Peningkatan realisasi tanah ini disebabkan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

pengadaan tanah untuk Islamic center yang terletak di Dusun XI,VIII,VII,V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan luas 50 Hektar dengan nomor sertifikat 2.5/KPTS/338/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

4.1.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

	TA 2019	TA 2018
	Rp302.487.781.004,00	Rp254.885.635.630,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp302.487.781.004,00 atau mencapai 69,02% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp438.256.523.071,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	7.869.400.000,00	7.145.578.000,00	90,80	0,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	1.073.890.000,00	812.329.125,00	75,64	826.240.750,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	38.608.715.440,00	23.098.940.218,00	59,83	19.743.828.524,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	3.795.000.000,00	422.510.000,00	11,13	0,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	134.597.100,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.234.956.000,00	2.190.770.000,00	98,02	14.740.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	17.033.500,00
Pengadaan Alat Ukur	1.168.532.040,00	333.073.351,00	28,50	1.270.920.000,00
Pengadaan Alat Pengolahan	1.843.290.600,00	1.684.369.134,00	91,38	5.295.677.200,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	235.000.000,00	228.503.000,00	97,24	381.625.100,00
Pengadaan Alat Kantor	3.955.156.728,00	3.184.645.170,00	80,52	2.343.437.530,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	54.223.075.821,74	40.937.249.590,00	75,50	15.809.758.777,00
Pengadaan Komputer	49.718.982.318,00	46.285.993.008,00	93,10	15.603.795.622,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.284.301.425,00	2.002.130.083,00	87,65	4.841.559.840,00
Pengadaan Alat Studio	6.112.292.050,00	4.969.777.366,00	81,31	3.297.488.893,00
Pengadaan Alat Komunikasi	741.134.100,00	583.386.100,00	78,72	1.235.256.450,00
Pengadaan Alat Kedokteran	34.431.326.905,00	33.171.413.989,00	96,34	42.401.974.219,00
Pengadaan Alat Kesehatan	1.459.482.586,00	1.294.149.417,00	88,67	1.004.410.592,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	10.238.111.004,00	9.003.588.570,00	87,94	19.481.608.836,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	71.053.770.360,84	63.848.775.440,00	89,86	71.164.210.382,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	602.648.000,00	570.000.000,00	94,58	0,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	25.300.000,00	25.287.350,00	99,95	12.815.000,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.339.283.000,00	1.121.569.000,00	83,74	145.865.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin – BOS	145.242.874.693,00	59.573.743.093,00	41,02	49.858.792.315,00
Jumlah	438.256.523.071,58	302.487.781.004,00	69,02	254.885.635.630,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp47.602.145.374,00 atau 18,68% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan TA 2019 TA 2018
Rp218.045.649.622,40 **Rp256.603.997.928,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp218.045.649.622,40 atau mencapai 88,87% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp245.358.694.085,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	236.377.338.521,66	213.991.112.236,00	90,53	240.961.026.615,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	149.920.000,00	149.325.704,00	99,60	9.950.586.354,00
Pengadaan Bangunan Gedung Menara	0,00	0,00	0,00	2.422.451.959,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan/Kemerdekaan	0,00	0,00	0,00	236.516.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.553.089.018,84	3.414.667.466,40	45,21	0,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	99.000.000,00	0,00	0,00	3.033.417.000,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Monumen/Bersejarah lainnya	1.029.346.545,20	490.544.216,00	47,66	2.422.451.959,00
Jumlah	245.358.694.085,34	218.045.649.622,40	88,87	256.603.997.928,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp38.558.348.305,60 atau 15,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 TA 2018
Rp584.709.449.585,00 **Rp937.616.597.667,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp584.709.449.585,00 atau mencapai 79,55% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp734.989.642.258,07 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 36 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pengadaan Jalan	497.066.484.229,31	390.838.856.586,00	78,63	571.965.778.867,00
Pengadaan Jembatan	51.164.500.000,00	41.889.978.153,00	81,87	137.837.142.205,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	60.794.582.038,13	53.844.985.550,00	88,57	83.469.104.441,00
Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	932.331.300,00
Pengadaan Bangunan Air Rawa	1.139.999.635,47	960.728.245,00	84,27	2.485.904.900,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	78.276.109.431,42	57.998.347.106,00	74,10	105.228.328.631,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	90.460.800,00	89.924.458,00	99,41	0,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.039.972.060,74	1.840.998.300,00	90,25	2.318.109.261,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.672.660.450,00	4.260.446.329,00	91,18	6.070.060.000,00
Pengadaan Bangunan Air	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	30.084.054.263,00	24.680.623.319,00	82,04	15.226.904.337,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.549.268.900,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah	50.006.000,00	49.610.000,00	99,21	3.460.396.625,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.569.150.200,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pertahanan	1.019.000.000,00	1.015.851.426,00	99,69	0,00
Pengadaan Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00	96.250.000,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	6.851.390.000,00	6.677.081.562,00	97,46	0,00
Pengadaan Jaringan Listrik	1.152.301.250,00	514.046.051,00	44,61	0,00
Belanja Instalasi Listrik dan Telepon	48.122.100,00	47.954.500,00	99,65	407.868.000,00
Jumlah	734.989.642.258,07	584.709.449.585,00	79,55	937.616.597.667,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp352.907.148.082,00 atau 37,64% dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

TA 2019	TA 2018
Rp109.033.381.385,00	Rp115.379.443.428,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp109.033.381.385,00 atau mencapai 96,15% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp113.404.013.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pengadaan Buku	1.051.699.620,00	1.036.193.800,00	98,53	1.936.498.800,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	859.270.000,00	858.100.000,00	99,86	0,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	7.358.131.686,00	6.930.272.009,00	94,19	608.938.200,00
Pengadaan Hewan	473.200.000,00	467.574.020,00	98,81	219.081.000,00
Pengadaan Tanaman	110.000.000,00	108.577.294,00	98,71	0,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	11.146.259.290,00	7.281.851.244,00	65,33	22.464.928.850,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - BOS	92.405.453.018,00	92.350.813.018,00	99,48	90.149.996.578,00
Jumlah	113.404.013.614,00	109.033.381.385,00	96,15	115.379.443.428,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp6.346.062.043,00 atau 5,50% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga **TA 2019** **TA 2018**
Rp21.299.175.711,00 **Rp53.155.528.758,00**

Belanja tak terduga Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp21.299.175.711,00 atau mencapai 85,20% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp25.000.000.000,00. Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp31.856.353.047,00 atau 59,93% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.3 Transfer **TA 2019** **TA 2018**
Rp3.269.478.492.542,00 **Rp1.569.730.611.414,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp3.269.478.492,00 atau mencapai 97,73% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.345.467.946.191,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Transfer TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Kota Medan	1.246.649.473.008,00	1.245.070.749.711,00	99,87	390.135.098.003,00
Kota Binjai	51.763.748.145,00	50.910.082.579,00	98,35	32.800.287.680,00
Kota Tebing Tinggi	41.498.879.840,00	41.223.925.266,00	99,34	25.502.579.570,00
Kota Pematangsiantar	49.201.429.251,00	46.288.450.288,00	94,08	25.195.360.601,00
Kota Sibolga	24.928.213.906,00	24.486.276.018,00	98,24	14.061.082.975,00
Kota Tanjung Balai	38.254.365.191,00	36.516.025.064,00	95,46	22.535.485.602,00
Kabupaten Batubara	79.412.313.382,00	75.520.299.246,00	95,10	39.870.236.828,00
Kabupaten Asahan	125.680.261.926,00	117.227.609.674,00	93,28	64.226.592.491,00
Kabupaten Dairi	53.406.451.415,00	53.113.096.549,00	99,45	27.522.170.970,00
Kabupaten Deli Serdang	280.609.232.940,00	278.636.286.784,00	99,30	162.095.738.528,00
Kabupaten Serdang Bedagai	89.008.549.520,00	88.539.296.639,00	99,47	49.778.688.910,00
Kabupaten Karo	86.674.699.987,00	81.474.267.106,00	94,00	44.119.130.772,00
Kabupaten Labuhan Batu	93.047.431.035,00	87.080.489.425,00	93,59	48.338.999.555,00
Kabupaten Langkat	141.740.398.520,00	135.585.542.669,00	95,66	75.238.033.167,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Kabupaten Mandailing Natal	93.819.256.136,00	88.307.907.250,00	94,13	42.994.819.736,00
Kabupaten Nias	28.298.373.042,00	27.598.430.859,00	97,53	17.620.649.719,00
Kabupaten Simalungun	103.617.351.938,00	102.972.917.965,00	99,38	59.620.719.148,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	59.916.817.288,00	59.477.611.279,00	99,27	31.654.244.229,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	58.745.641.690,00	58.210.474.473,00	99,09	53.762.777.298,00
Kabupaten Tapanuli Utara	52.946.157.515,00	52.486.381.654,00	99,13	43.125.380.927,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	49.104.795.741,00	47.872.738.053,00	97,49	25.731.463.721,00
Kabupaten Toba Samosir	50.640.192.999,00	48.065.422.313,00	94,92	31.021.432.821,00
Kabupaten Samosir	34.467.816.977,00	32.000.332.470,00	92,84	16.539.591.307,00
Kota Padang sidempuan	40.097.499.035,00	37.802.865.494,00	94,28	21.530.079.846,00
Kabupaten Padang Lawas	57.418.708.987,00	53.207.862.944,00	92,67	22.208.805.555,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	57.722.312.744,00	55.040.385.388,00	95,35	30.177.517.857,00
Kabupaten Pakpak Bharat	17.908.271.473,00	17.737.404.791,00	99,05	11.839.432.423,00
Kabupaten Nias Selatan	52.942.803.426,00	49.914.511.210,00	94,28	28.875.842.614,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	60.756.639.117,00	56.836.065.938,00	93,55	32.541.776.416,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	63.985.888.190,00	62.773.905.230,00	98,11	30.916.734.886,00
Kabupaten Nias Utara	24.428.556.167,00	21.910.416.727,00	94,31	19.332.926.078,00
Kabupaten Nias Barat	13.797.833.407,00	13.031.533.149,00	94,45	9.122.857.295,00
Kota Gunungsitoli	22.977.582.253,00	22.558.928.337,00	98,18	19.694.073.886,00
Jumlah	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73	1.569.730.611.414,00

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2019 tersebut meningkat sebesar Rp1.699.747.881.128,00 atau 108,28% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018. Kenaikan ini dikarenakan Provinsi Sumatera Utara telah membayar hutang Dana Bagi Hasil Pajak kepada 33 Kabupaten/ Kota.

4.1.4 Surplus/Defisit **TA 2019** **TA 2018**
(Rp360.725.070.277,94) **Rp139.671.038.225,97**

Realisasi Surplus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar (Rp360.725.070.277,94) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Surplus Defisit TA. 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi TA 2018
Pendapatan	14.034.339.344.970,00	13.079.598.635.469,31	93,20	12.703.058.587.891,00
Belanja + Transfer	14.726.662.153.406,19	13.440.323.705.747,25	91,27	12.563.387.549.665,00
Surplus/Defisit	(692.322.808.436,19)	(360.725.070.277,94)	52,10	139.671.038.225,97

Realisasi surplus Tahun Anggaran 2019 tersebut menurun sebesar Rp500.396.108.503,91 atau mencapai 358,27% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

4.1.5 Pembiayaan Netto **TA 2019** **TA 2018**
Rp697.322.808.436,19 **Rp841.496.523.210,22**

Realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp697.322.808.436,19 atau 100,72 % dari anggaran P.APBD sebesar Rp692.322.808.436,19 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 40 Realisasi Pembiayaan TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Penerimaan Pembiayaan	981.167.561.436,19	981.167.561.436,19	100,00	841.496.523.210,22
Penggunaan (SiLPA)	981.167.561.436,19	981.167.561.436,19	100,00	841.496.523.210,22
Penerimaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0,00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan	288.844.753.00,000	283.844.753.000,00	98,27	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	288.844.753.00,000	283.844.753.000,00	98,27	0.00
Pembiayaan Netto	692.322.808.436,19	697.322.808.436,19	100,72	841.496.523.210,22

4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan TA 2019 TA 2018
Rp981.167.561.436,19 **Rp841.496.523.210,22**
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp981.167.561.436,19 atau mencapai 100,00% dari anggaran P.APBD sebesar Rp981.167.561.436,19.

4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 TA 2018
Rp283.844.753.000,00 **Rp0,00**
Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp283.844.753.000,00 atau mencapai 98,27% dari anggaran belanja P.APBD sebesar Rp288.844.753.000,00.

Tabel 41 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi TA 2018
Penyertaan Modal kepada PT Perkebunan	288.844.753.000.00	283.844.753.000,00	98,27	0.00
Jumlah	288.844.753.000.00	283.844.753.000,00	98,27	0.00

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp283.844.753.000,00 atau mencapai 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018.

4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2019 TA 2018
Rp336.597.738.158,25 **Rp981.167.561.436,19**

SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp336.597.738.158,25 Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer, ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:



Tabel 42 Perhitungan SiLPA TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
PENERIMAAN				
Pendapatan	14.034.339.344.970,00	13.079.598.635.469,31	93,20	12.703.058.587.890,97
Pembiayaan	981.167.561.436,19	981.167.561.436,19	100,00	841.496.523.210,22
Jumlah Penerimaan	15.015.506.906.406,19	14.060.766.196.905,50	93,64	13.544.555.111.101,19
PENGELUARAN				
Belanja + Transfer	14.726.662.153.406,19	13.440.323.705.747,25	91,27	12.563.387.549.665,00
Pembiayaan	288.844.753.000,00	283.844.753.000,00	98,27	0,00
Jumlah Pengeluaran	15.015.506.906.406,19	13.724.168.458.747,25	91,40	12.563.387.549.665,00
SiLPA	0,00	336.597.738.158,25	0,00	981.167.561.436,19

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 2019 TA 2018
Rp981.167.561.436,19 **Rp841.496.523.210,22**
Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp981.167.561.436,19 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2018 sebesar Rp841.496.523.210,22 maka terdapat kenaikan sebesar Rp139.671.038.225,97 atau 16,60%.

4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai TA 2019 TA 2018
Penerimaan Tahun Berjalan **Rp981.167.561.436,19** **Rp841.496.523.210,22**
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp981.167.561.436,19 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp841.496.523.210,22 maka terdapat kenaikan sebesar Rp139.671.038.225,97 atau 16,60%.

4.2.3 Sisa Lebih/Kurang TA 2019 TA 2018
Pembiayaan Anggaran **Rp336.597.738.158,25** **Rp981.167.561.436,19**
(SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp336.597.738.158,25 Merupakan selisih antara:

- Surplus / Defisit Anggaran	(Rp 360.725.070.277,94)
- Pembiayaan Netto	Rp 697.322.808.436,19
SiLPA Tahun berjalan	Rp 336.597.738.158,25

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp981.167.561.436,19 maka terdapat penurunan sebesar Rp644.569.823.277,94 atau 65,69 %.



4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

	TA 2019	TA 2018
4.3.1. Pendapatan – LO	Rp12.300.114.791.244,14	Rp11.736.501.110.544,58

Pendapatan - LO merupakan jumlah pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan koreksi.

Pendapatan – LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp12.300.114.791.244,14 dan Rp11.736.501.110.544,58. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp563.613.680.699,56 atau 4,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Realisasi Pendapatan – LO TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	6.557.828.472.994,14	6.217.868.109.657,58	339.960.363.336,56	5,47%
Pendapatan Transfer – LO	5.691.899.955.809,00	5.505.441.565.811,00	186.458.389.998,00	3,39%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	50.386.362.441,00	13.191.435.076,00	37.194.927.365,00	281,96%
Jumlah	12.300.114.791.244,14	11.736.501.110.544,58	563.613.680.699,56	4,80%

	TA 2019	TA 2018
4.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Rp6.557.828.472.994,14	Rp6.217.868.109.657,58

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp6.557.828.472.994,14. Terdapat kenaikan sebesar Rp339.960.363.336,56 atau 5,47% jika dibandingkan dengan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2019	Pendapatan - LO 2018
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.058.443.944.654,00	2.550.783.068.375,00	1.971.020.703.345,00	5.638.206.309.684,00	5.646.283.756.440,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	38.408.031.263,00	4.363.646.735,00	5.905.827.808,00	36.865.850.190,00	38.331.051.564,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	436.284.942.769,00	370.935.627.964,01	145.519.455.747,67	661.701.114.985,34	338.748.031.255,56
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	228.133.493.365,31	14.835.245.751,49	21.913.540.982,00	221.055.198.134,80	194.505.270.398,02
Jumlah	5.761.270.412.051,31	2.940.917.588.825,50	2.144.359.527.882,67	6.557.828.472.994,14	6.217.868.109.657,58

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.



TA 2019 **TA 2018**

4.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO **Rp5.638.206.309.684,00** **Rp5.646.283.756.440,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp5.638.206.309.684,00. Terdapat penurunan sebesar Rp8.077.446.756,00 atau 0,14% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari realisasi pendapatan pajak – LRA ditambah dengan piutang pajak tahun 2019 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2019	Pendapatan - LO 2018
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	1.995.480.813.304,00	0,00	0,00	1.995.480.813.304,00	2.048.416.695.396,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	1.315.420.245.168,00	0,00	0,00	1.315.420.245.168,00	1.426.420.236.038,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	889.959.158.091,00	85.847.939.239,00	86.455.905.864,00	889.351.191.466,00	883.342.066.510,00
Pajak Air Permukaan – LO	62.420.420.198,00	2.464.935.129.136,00	1.884.564.797.481,00	642.790.751.853,00	467.281.279.216,00
Pajak Rokok – LO	795.163.307.893,00	0,00	0,00	795.163.307.893,00	820.823.479.280,00
Jumlah	5.058.443.944.654,00	2.550.783.068.375,00	1.971.020.703.345,00	5.638.206.309.684,00	5.646.283.756.440,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) – LO**
 Nilai pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor – LO tahun anggaran 2019 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2019 ditambah dengan piutang pajak kendaraan bermotor tahun berjalan sebesar Rp85.847.939.239,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp86.455.905.864,00.
- Pajak Air Permukaan – LO**
 Nilai pendapatan pajak air permukaan – LO tahun anggaran 2019 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2019 ditambah dengan piutang pajak air permukaan tahun berjalan sebesar Rp2.464.935.129.136,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.884.564.797.481,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

TA 2019 **TA 2018**

4.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO **Rp36.865.850.190,00** **Rp38.331.051.564,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp36.865.850.190,00. Terdapat penurunan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Rp1.465.201.374,00 atau 3,82% jika dibandingkan dengan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2019	Pendapatan - LO 2018
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	21.846.603.327,00	3.998.026.735,00	5.423.422.808,00	20.421.207.254,00	23.996.789.624,00
Retribusi Pemakaian Alat Berat – LO	226.124.450,00	0,00	0,00	226.124.450,00	225.226.250,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	303.282.500,00	0,00	0,00	303.282.500,00	303.000.000,00
Retribusi Retribusi Pengujian Mutu Barang - LO	443.500.000,00	0,00	0,00	443.500.000,00	317.335.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	152.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	5.686.558.435,00	365.620.000,00	482.405.000,00	5.569.773.435,00	2.891.261.922,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	2.379.605.000,00	0,00	0,00	2.379.605.000,00	2.378.655.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	159.065.000,00	0,00	0,00	159.065.000,00	1.429.130.250,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.705.185.522,00	0,00	0,00	2.705.185.522,00	2.575.414.090,00
Retribusi Izin Trayek - LO	322.940.000,00	0,00	0,00	322.940.000,00	287.170.000,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	2.151.613.102,00	0,00	0,00	2.151.613.102,00	1.010.019.104,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	400.572.627,00	0,00	0,00	400.572.627,00	423.092.024,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	1.761.481.300,00	0,00	0,00	1.761.481.300,00	2.341.958.300,00
Jumlah	38.408.031.263,00	4.363.646.735,00	5.905.827.808,00	36.865.850.190,00	38.331.051.564,00

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan retribusi – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pendapatan diterima di muka tahun berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Nilai retribusi pelayanan kesehatan – LO sebesar Rp20.421.207.254,00 diperoleh dari nilai retribusi pelayanan kesehatan – LRA ditambah piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2019 sebesar Rp3.998.026.735,00 dan dikurangi pelunasan piutang tahun 2018 sebesar Rp5.423.422.808,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA TA. 2018 21.846.603.327,00

Mutasi Tambah:

Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2019:

Dinas Kesehatan 994.459.735,00

Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem 3.003.567.000,00

Jumlah Mutasi Tambah 3.998.026.735,00

Mutasi Kurang:

Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018:

Dinas Kesehatan 2.069.059.259,00



Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	3.354.363.549,00
Jumlah Mutasi Kurang	5.423.422.808,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2019	20.421.207.254,00

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO sebesar Rp5.569.773.435,00 diperoleh dari nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LRA ditambah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp365.620.000,00 dikurangi pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp105.350.000,00 serta pendapatan diterima di muka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp377.055.000.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	TA 2019	TA 2018
4.3.1.1.3. Pendapatan Hasil	Rp661.701.114.985,34	Rp338.748.031.255,56
 Pengelolaan Kekayaan		
 Daerah Yang		
 Dipisahkan – LO		

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp661.701.114.985,34. Terdapat kenaikan sebesar Rp338.748.031.255,56 atau 95,34% dibandingkan dengan tahun 2018. Rincian pendapatan ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 47 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2019	Pendapatan - LO 2018
		Penambahan	Pengurangan		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO:	432.296.056.001,00	351.639.755.266,01	145.519.455.747,67	638.416.355.519,34	318.910.072.612,96
PT. Perkebunan Sumatera Utara	2.706.000.000,00	18.520.423.387,87	0,00	21.226.423.387,87	2.000.000.000,00
PT. Bank Sumut	409.145.056.001,00	274.801.789.694,00	145.374.455.747,67	538.572.389.947,33	209.451.318.030,89
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	145.000.000,00	247.779.540,00	145.000.000,00	247.779.540,00	150.000.000,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	300.000.000,00	6.869.422.262,14	0,00	7.169.422.262,14	9.763.849.322,07
PDAM Tirtanadi	20.000.000.000,00	51.200.340.382,00	0,00	71.200.340.382,00	97.544.905.260,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN – LO:	3.988.886.768,00	19.295.872.698,00	0,00	23.284.759.466,00	19.837.958.642,60
PT. Kawasan Industri Medan	3.819.291.087,00	19.295.872.698,00	0,00	23.115.163.785,00	19.621.764.087,60



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2019	Pendapatan - LO 2018
PT. Asuransi Bangun Askrida	169.595.681,00	0,00	0,00	169.595.681,00	216.194.555,00
Jumlah	436.284.942.769,00	96.133.838.270,01	145.519.455.747,67	661.701.114.985,34	338.748.031.255,56

Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari penyesuaian atas nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pad BUMD/BUMN sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca atas investasi jangka panjang permanen.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.3.1.1.4.Lain-lain PAD Yang Sah – LO	Rp221.055.198.134,80	Rp194.505.270.398,02

Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp221.055.198.134,80. Terdapat kenaikan sebesar Rp26.549.927.736,78 atau 13,65% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2019	Pendapatan - LO 2018
		Penambahan	Pengurangan		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	86.190.000,00	0,00	0,00	86.190.000,00	438.715.600,00
Penerimaan Jasa Giro – LO	33.154.847.351,00	0,00	0,00	33.154.847.351,00	43.818.888.562,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	2.269.050.882,82	0,00	0,00	2.269.050.882,82	5.586.315.481,65
Pendapatan Denda Pajak – LO	70.314.829.731,00	0,00	0,00	70.314.829.731,00	50.070.288.379,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	52.181.532.629,49	0,00	2.050.000.000,00	50.131.532.629,49	34.458.114.430,32
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan – LO	326.128.496,00	0,00	242.770.346,00	83.358.150,00	3.567.896.102,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	249.451.947,49	0,00	249.451.947,49	303.710.331,05
Pendapatan BLUD – LO	66.750.389.275,00	14.585.793.804,00	19.620.770.636,00	61.715.412.443,00	47.362.283.512,00
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.050.525.000,00	0,00	0,00	3.050.525.000,00	8.899.058.000,00
Jumlah	228.133.493.365,31	14.835.245.751,49	19.863.540.982,00	221.055.198.134,80	194.505.270.398,02

Nilai lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima di muka tahun sebelumnya serta



memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya, pendapatan diterima di muka tahun berjalan dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan – LO
Mutasi pengurang sebesar Rp242.770.346,00 merupakan pelunasan atas piutang angsuran penjualan rumah sebesar Rp92.238.000,00, pelunasan piutang TGR 2019 - Anggota DPRD Provsu Temuan BPK Tahun 2018 sebesar Rp75.822.146,00 dan pelunasan piutang TGR (SK 3 tahap tahun 2018) sebesar Rp74.710.200,00.
2. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO
Mutasi tambah sebesar Rp249.451.947,49 merupakan nilai pendapatan diterima di muka tahun lalu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Pendapatan BLUD – LO
Mutasi tambah sebesar Rp14.585.793.804,00 terdiri dari piutang jasa pelayanan kesehatan tahun 2019 pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp14.011.159.269,00 dan uang muka pasien tahun 2019 sebesar Rp574.634.535,00.
Sedangkan mutasi pengurang sebesar Rp19.620.770.636,00 terdiri dari pelunasan piutang jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp18.306.111.066,00 dan uang muka pasien tahun 2018 sebesar Rp740.025.035,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.3.1.2. Pendapatan Transfer – LO	Rp5.691.899.955.809,00	Rp5.505.441.565.811,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp5.691.899.955.809,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp186.458.389.998,00 atau 3,39% jika dibandingkan dengan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2019	Pendapatan - LO 2018
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	7.300.647.588.241,00	1.632.688.083.010,00	3.241.435.715.442,00	5.691.899.955.809,00	5.505.441.565.811,00
Bagi Hasil Pajak - LO	322.412.067.550,00	91.410.092.227,00	5.915.124.470,00	407.907.035.307,00	514.289.617.069,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO	58.892.050.331,00	3.737.490.744,00	277.682.172,00	62.351.858.903,00	61.015.850.732,00
Dana Alokasi Jmum (DAU) – LO	2.713.750.553.000,00	0,00	0,00	2.713.750.553.000,00	2.629.224.545.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	4.205.592.917.360,00	1.537.540.500.039,00	3.235.242.908.800,00	2.507.890.508.599,00	2.300.911.553.010,00
Jumlah	7.300.647.588.241,00	1.632.688.083.010,00	3.241.435.715.442,00	5.691.899.955.809,00	5.505.441.565.811,00



Nilai pendapatan transfer – LO disajikan sebesar nilai pendapatan transfer – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan koreksi tambah lainnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak – LO

Mutasi tambah sebesar Rp91.410.092.227,00 merupakan koreksi Piutang Bagi Hasil Pajak berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020, sedangkan mutasi pengurangan sebesar Rp5.915.124.470,00 merupakan utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat tahun 2018 yang terdiri dari utang dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp2.050.035.868,00, dan utang dana bagi hasil PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 Dan 29 sebesar Rp3.865.088.602,00.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO

Mutasi tambah sebesar Rp3.737.490.744,00 merupakan koreksi Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020, sedangkan mutasi pengurangan sebesar Rp277.682.172,00 merupakan utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat tahun 2018 yang terdiri dari utang dana bagi hasil SDA mineral dan batubara sebesar Rp53.101.543,00, dan utang dana bagi hasil kehutanan sebesar Rp216.000.000,00.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

Mutasi tambah sebesar Rp1.537.540.500.039,00 merupakan penyaluran dana BOS tahun 2019, sebesar Rp917.173.000.000,00 melalui mekanisme hibah (PPKD) untuk swasta dan sebesar Rp620.367.500.039,00 melalui Dinas Pendidikan untuk sekolah unit kerja Pemprov (SMA/SMK Negeri).

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp3.235.242.908.800,00 merupakan penerimaan dana BOS dari pemerintah pusat yang diakui sebagai hutang dana BOS.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	TA 2019	TA 2018
4.3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Rp50.386.362.441,00	Rp13.191.435.076,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp50.386.362.441,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp37.194.927.365,00 atau 281,96% jika dibandingkan dengan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2019	Pendapatan - LO 2018
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Hibah – LO	17.680.635.177,00	32.705.727.264,00		50.386.362.441,00	13.191.435.076,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Jumlah	17.680.635.177,00	32.705.727.264,00	0,00	50.386.362.441,00	13.191.435.076,00
--------	-------------------	-------------------	------	-------------------	-------------------

Komponen penambah nilai realisasi pendapatan hibah ini berasal dari hibah aset dari Kementerian maupun kabupaten/ kota lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Penambahan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2019

(dalam Rupiah)

OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	Hibah dari Kementerian Pertanian (PUSDATIN) dengan BAST nomor: 1526/PL.130/A/04/2019 tanggal 09- 04 - 2019	25 Unit Sepeda Motor Merk Suzuki, Shogun R Tahun (@ Rp.13.410.000)	335.250.000,00
Dinas Perhubungan Provsu	Hibah dari Kementerian Perhubungan dengan BAST nomor: PL.301./7/11/DJPD/2019 dan 552/9258/2019 tanggal 09- 09 -2019	1 Unit Kapal Passanger Merk Yanmar Tipe 6HA2M-THE, 2x350 HP (KPM SUMUT I) tahun 2008	14.326.836.700,00
		1 Unit Kapal Passanger Merk Yanmar Tipe 6HA2M-THE, 2x350 HP (KPM SUMUT I) tahun 2009	15.695.012.300,00
Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu	Hibah dari kementerian Pemuda dan Olahraga RI ke Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov	1 Unit Laptop Merk Lenovo B490-5656	7.500.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	Hibah dari Kab/Kota dengan BAST No. 800/1936/BA.INVEN.SBMN/XII/2019	TPI Pantai Labu Jl. Pelabuhan Dusun IV Desa Pantai Labu Luasnya 21826.98 m2	873.079.200,00
		TPI Bagan Percut Jl. Dusun XVII Desa Percut Luasnya 2500 m2	125.000.000,00
		TPI Bagan Serdang Jl. Dusun III Desa Bagan Serdang Luasnya 14538.07 m2	581.522.800,00
	Hibah dari Kab/Kota dengan BAST No. 800/1936.1/BA.INVEN.SBMN/XII/2019	TPI Bandar Rahmat Jl. Pariwisata Dusun VI Luasnya 700 m2	38.500.000,00
		TPI Pangkalan Dodek Jl. Tengku Amir Hamzah Kab. Batu Bara Luasnya 1.150 m2	47.150.000,00
		TPI Lalang Dusun Pekan Desa Lalang Kab. Batu Bara Luasnya 570 m2	23.370.000,00
		TPI Pahlawan Jl. Merdeka Ujung Bom Kab. Batu Bara Luasnya 1013.22 m2	8.511.048,00
		TPI Perupuk Dusun III Desa Perupuk Kab. Batu Bara Luasnya 753.35m2	1.506.700,00
	Hibah dari Kab/Kota dengan BAST No. 800/1935/BA.INVEN.SBMN/XII/2019	TPI Sialang Buah Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Luasnya 1029.37m2	5.146.850,00
		TPI Tj Beringin Dusun I Kec. Tj Beringin Kab Serdang Bedagai Luasnya 3770m2	18.850.000,00
	Hibah dari Kab/Kota dengan BAST No. 800/1934/BA.INVEN.SBMN/XII/2019	TPI Kwala Gebang Dusun I Kec. Gebang Kab. Langkat Luasnya 33.782m2	776.986,00
		TPI Pulau Kampai Dusun I Jl. Pelabuhan Kab. Langkat Luasnya 341.88 m2	5.811.960,00
		TPI Pki Susu Dusun I Jl. Pelabuhan Kab. Langkat Luasny 1755m2	128.115.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

	TPI Pkl Brandan Lingkungan Bahari Kab. Langkat Luasnya 1104m ²	470.304.000,00
	TPI Bubun Dusun VI Kab Langkat Luasnya 793.16	13.483.720,00
TOTAL NILAI PENAMBAHAN PENDAPATAN HIBAH 2019		32.705.727.264,00

TA 2019

TA 2018

4.3.2. Beban Daerah Rp11.923.139.267.046,22 Rp11.649.454.866.276,05

Jumlah Beban Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp11.923.139.267.046,22. Realisasi beban ini mengalami penurunan sebesar Rp273.684.400.770,17 atau 2,35% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Realisasi Beban Daerah Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	9.735.053.673.996,05	9.215.726.446.108,34	519.327.227.887,71	5,64%
Beban Transfer	2.188.085.593.050,17	2.433.728.420.167,71	(245.642.827.117,54)	(10,09%)
Jumlah	11.923.139.267.046,22	11.649.454.866.276,05	273.684.400.770,17	2,35%

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

TA 2019

TA 2018

4.3.2.1 Beban Operasi Rp9.735.053.673.996,05 Rp9.215.726.446.108,34

Beban Operasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp9.735.053.673.996,05. Nilai realisasi beban operasi dicatat sebesar nilai belanja operasi yang disesuaikan dengan utang tahun 2018 dan tahun 2019, beban dibayar di muka, koreksi lebih/kurang catat tahun 2019, koreksi nilai aset serta kapitalisasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tahun 2019. Realisasi beban operasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp519.327.227.887,71 atau 5,64% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Realisasi Beban Operasi Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	3.527.798.632.319,00	3.583.129.138.747,00	(55.330.506.428,00)	(1,54%)
Beban Persediaan	462.846.690.917,05	305.943.158.625,93	156.903.532.291,12	51,29%
Beban Jasa	1.232.073.797.095,70	1.086.464.809.848,10	145.608.987.247,60	13,40%
Beban Pemeliharaan	164.364.293.022,35	149.887.517.177,00	14.476.775.845,35	9,66%
Beban Perjalanan Dinas	475.081.329.063,00	392.665.821.344,00	82.415.507.719,00	20,99%
Beban Hibah	1.229.654.153.181,00	1.606.378.717.489,00	(376.724.564.308,00)	(23,45%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.296.024.588.020,45	1.079.683.187.902,00	216.341.400.118,45	20,04%
Beban Penyisihan Piutang	1.243.720.577.609,08	944.017.633.424,31	299.702.944.184,77	31,75%
Beban Lain-lain	103.489.612.768,42	67.556.461.551,00	35.933.151.217,40	53,19%



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Jumlah	9.735.053.673.996,05	9.215.726.446.108,34	519.327.227.887,71	5,64%

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
4.3.2.1.1 Beban Pegawai – LO	Rp3.527.798.632.319,00	Rp3.583.129.138.747,00

Jumlah Beban Pegawai Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp3.527.798.632.319,00. Realisasi beban pegawai ini mengalami penurunan sebesar Rp55.330.506.428,00 atau 1,54% jika dibandingkan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan	2.530.567.978.620,00	2.482.541.643.582,00	48.026.335.038,00	1,93%
Beban Tambahan Penghasilan PNS	790.281.124.528,00	839.302.805.260,00	(49.012.349.308,00)	(5,84%)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	34.314.000.000,00	32.227.872.482,00	2.086.127.518,00	6,47%
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	87.499.789.372,00	110.417.155.051,00	(22.917.365.679,00)	(20,76%)
Beban Honorarium PNS	69.901.886.718,00	57.691.312.619,00	12.210.574.099,00	21,17%
Beban Honorarium Non PNS	14.443.553.081,00	60.197.849.753,00	(45.754.296.672,00)	(76,01%)
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	790.300.000,00	750.500.000,00	39.800.000,00	5,30%
Jumlah	3.527.798.632.319,00	3.583.129.138.747,00	(55.330.506.428,00)	(1,54%)

Realisasi beban pegawai tahun anggaran 2019 disajikan sebesar belanja pegawai – LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu dan kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

Belanja pegawai - LRA TA. 2019 **3.527.537.635.743,00**

Mutasi Tambah:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Utang beban jasa dokter BLUD bulan Desember 2019 | 777.042.260,00 |
| 2. Utang jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai RSJ Prof. Muhammad Ildrem tahun 2019 | 1.501.783.500,00 |
| | 2.278.825.760,00 |

Jumlah Mutasi Tambah

Mutasi Kurang:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pengembalian kelebihan pembayaran TTP Disdukcapil tahun 2019 | 9.331.424,00 |
| 1. Pelunasan utang honorarium pokja tahun 2018 pada RSJ Prof. Muhammad Ildrem | 1.075.955.500,00 |
| 2. Pelunasan utang beban jasa dokter BLUD tahun 2018 | 121.131.025,00 |
| 3. Belanja honorarium PNS tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dikapitalisasi | 155.500.000,00 |
| | 155.500.000,00 |



Jumlah Mutasi Kurang	1.361.917.949,00
Baban pegawai - LO TA. 2019	3.527.798.632.319,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

	TA 2019	TA 2018
4.3.2.1.2 Beban Persediaan	Rp462.846.690.917,05	Rp305.943.158.625,93

Jumlah beban persediaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp462.846.690.917,05. Realisasi persediaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp156.903.532.291,12 atau 51,29% jika dibandingkan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bahan Pakai Habis	82.482.074.967,50	8.407.102.205,00	74.074.972.762,50	881,10%
Beban Persediaan Bahan/ Material	117.973.924.966,55	154.943.113.964,93	(36.969.188.998,38)	(23,86%)
Beban Cetak dan Penggandaan	38.781.469.029,00	38.823.064.795,00	(41.595.766,00)	(0,11%)
Beban Makanan dan Minuman	97.491.687.859,00	81.129.252.846,00	16.362.435.013,00	20,17%
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	8.511.295.510,00	6.537.793.268,00	1.973.502.242,00	30,19%
Beban Pakaian Kerja	2.503.198.425,00	2.995.409.750,00	(492.211.325,00)	(16,43%)
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.545.514.500,00	9.820.462.843,00	(274.948.343,00)	(2,80%)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.014.963.436,00	2.477.418.954,00	102.537.544.482,00	4138,89%
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	542.562.224,00	809.540.000,00	(266.977.776,00)	(32,98%)
Jumlah	462.846.690.917,05	305.943.158.625,93	156.903.532.291,12	51,29%

Nilai beban persediaan TA 2019 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh OPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2018 (dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca atas persediaan).

Penyajian nilai beban ini juga memperhitungkan nilai utang tahun 2019 dan tahun 2018 serta kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang obat-obatan pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp8.145.647.657,00.
2. Pelunasan hutang tahun 2018 pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp8.972.013.812,00.
3. Belanja barang yang dikapitalisasi sebesar Rp5.646.350.618,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.



4.3.2.1.3 Beban Jasa **TA 2019** **TA 2018**
Rp1.232.073.797.095,70 **Rp1.086.464.809.848,10**

Jumlah beban jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.232.073.797.095,70. Realisasi beban jasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp145.608.987.247,60 atau 13,40% jika dibandingkan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Realisasi Beban Jasa Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	150.284.568.774,70	134.282.585.820,10	16.001.982.954,60	11,92%
Beban Premi Asuransi	93.678.269.965,00	93.796.028.085,00	(117.758.120,00)	(0,13%)
Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir	48.917.298.597,00	42.339.756.180,00	6.577.542.417,00	15,54%
Beban Sewa Sarana Mobilitas	3.052.067.926,00	4.031.983.482,00	(979.915.556,00)	(24,30%)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.291.403.180,00	21.685.279.400,00	3.606.123.780,00	16,63%
Beban Jasa Konsultasi	39.978.692.716,00	37.491.330.225,00	2.487.362.491,00	6,63%
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	246.350.000,00	225.000.000,00	21.350.000,00	9,49%
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.673.713.243,00	15.664.147.617,00	9.565.626,00	0,06%
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.163.872.000,00	3.064.529.100,00	3.099.342.900,00	101,14%
Beban jasa event organizer	4.213.423.500,00	5.174.784.260,00	(961.360.760,00)	(18,58%)
Beban Barang dan Jasa BOS	370.979.268.794,00	364.407.786.044,00	6.571.482.750,00	1,80%
Beban Hibah Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	129.396.257.652,00	153.446.305.325,00	(24.050.047.673,00)	(15,67%)
Beban Jasa Tenaga Pendukung	344.198.610.748,00	210.855.294.310,00	133.343.316.438,00	63,24%
Jumlah	1.232.073.797.095,70	1.086.464.809.848,10	145.608.987.247,60	13,40%

Realisasi beban jasa tahun anggaran 2019 disajikan sebesar realisasi belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan dan beban dibayar dimuka tahun lalu, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu, beban dibayar di muka tahun 2019, kapitalisasi belanja barang jasa, serta persediaan akhir dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang pemakaian listrik, air, dan telepon per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.512.699.832 (rincian utang pemakaian listrik, air, dan telepon dapat dilihat pada Lampiran 15).
2. Pelunasan hutang listrik, air, dan telepon tahun lalu sebesar Rp2.104.829.083 (rincian pelunasan utang listrik, air, dan telepon dapat dilihat pada Lampiran 15).
3. Penyesuaian atas beban dibayar di muka tahun lalu sebesar Rp3.309.725.505,00 dan tahun 2018 sebesar Rp3.561.551.253,00.
4. Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebesar Rp42.464.274.925,00.
5. Persediaan akhir barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga adalah sebesar Rp102.584.895.394,00 terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp69.591.487.441,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar



Rp32.917.437.133,00 dan Dinas Kehutanan sebesar Rp 75.970.820,00 dan koreksi-koreksi lainnya.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

TA 2019 **TA 2018**

4.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan Rp164.364.293.022,35 Rp149.887.517.177,00

Jumlah beban pemeliharaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp164.364.293.022,35. Realisasi beban pemeliharaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp14.476.775.845,35 atau 9,66% jika dibandingkan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	20.287.913.325,00	16.531.510.648,00	3.756.402.677,00	22,72%
Beban Pemeliharaan	144.076.379.697,35	133.356.006.529,00	10.720.373.168,35	8,04%
Jumlah	164.364.293.022,35	149.887.517.177,00	14.476.775.845,35	9,66%

Penyajian nilai beban pemeliharaan disajikan sebesar belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yaitu utang tahun berjalan sebesar Rp332.591.780,00 serta komponen pengurang yaitu pelunasan utang tahun berjalan sebesar Rp52.994.580,00 dan belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi sebesar Rp30.910.057.665,00 dan koreksi lainnya.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

TA 2019 **TA 2018**

4.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas Rp475.081.329.063,00 Rp392.665.821.344,00

Jumlah beban perjalanan dinas Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp475.081.329.063,00. Realisasi beban perjalanan dinas ini mengalami penurunan sebesar Rp82.415.507.719,00 atau 20,99% jika dibandingkan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	475.081.329.063,00	392.665.821.344,00	82.415.507.719,00	20,99%
Jumlah	475.081.329.063,00	392.665.821.344,00	82.415.507.719,00	20,99%

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

TA 2019 **TA 2018**

4.3.2.1.6 Beban Hibah Rp 1.229.654.153.181,00 Rp1.606.378.717.489,00

Jumlah beban hibah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.229.654.153.181,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Rp376.724.564.308,00 atau 23,45% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi Beban Hibah Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat	310.671.988.000,00	736.228.561.289,00	(425.556.573.289,00)	(57,80%)
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	918.982.165.181,00	870.150.156.200,00	48.832.008.981,00	5,61%
Jumlah	1.229.654.153.181,00	1.606.378.717.489,00	(376.724.564.308,00)	(23,45%)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

TA 2019 **TA 2018**

4.3.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp1.296.024.588.020,45** **Rp1.079.683.187.902,00**

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.296.024.588.020,45. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp216.341.400.118,45 atau 20,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	256.819.999.750,90	238.122.166.205,00	18.697.833.545,90	7,85%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	155.641.505.748,61	116.523.450.440,00	39.118.055.308,61	33,57%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	876.921.341.086,82	711.456.128.838,00	165.465.212.248,82	23,26%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.580.922.783,12	9.362.664.237,00	(7.781.741.453,88)	(83,11%)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.060.818.651,00	4.218.778.182,00	842.040.469,00	19,96%
Jumlah	1.296.024.588.020,45	1.079.683.187.902,00	216.341.400.118,45	20,04%

TA 2019 **TA 2018**

4.3.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang **Rp1.243.720.577.609,08** **Rp944.017.633.424,31**

Jumlah beban penyisihan piutang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.243.720.577.609,08, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 61 Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019
Beban Penyisihan Piutang Pajak - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.241.273.655.687,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Kesehatan	205.855.317,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	582.114.295,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Lingkungan Hidup	107.301.767,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Rumah Sakit Umum Haji Daerah	1.534.962.092,80
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	106.590,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.581.860,28
Jumlah	1.243.720.577.609,08

4.3.2.1.9 Beban Lain-lain **TA 2019** **TA 2018**
Rp 103.489.612.768,42 **Rp67.556.461.551,00**

Beban lain-lain Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 103.489.612.768,42, merupakan nilai aset tahun 2019 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset (barang ekstrakomptabel) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62 Daftar Realisasi Beban Lain-lain per OPD Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No.	Aset Ekstrakomptabel	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin (KIB B)	27.239.010.603,42
2	Gedung dan Bangunan (KIB C)	29.410.600,00
3	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	76.221.191.565,00
	TOTAL	103.489.612.768,42

4.3.2.2 Beban Transfer **TA 2019** **TA 2018**
Rp 2.188.085.593.050,17 **Rp2.433.728.420.167,71**

Jumlah Beban Transfer Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.188.085.593.050,17. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp245.642.827.117,54 atau 10,09% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Realisasi Beban Transfer Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	2.180.757.211.950,17	1.905.659.879.339,71	275.097.332.610,46	14,44%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	0,00	70.098.720.900,00	(70.098.720.900,00)	(100,00%)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	0,00	450.729.067.928,00	(450.729.067.928,00)	(100,00%)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.328.381.100,00	7.240.752.000,00	87.629.100,00	1,21%
Jumlah	2.188.085.593.050,17	2.433.728.420.167,71	(245.642.827.117,54)	(10,09%)

4.3.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
	Rp376.975.524.197,92	Rp87.046.244.268,53

Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp376.975.524.197,92 merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan	%
Pendapatan – LO	12.300.114.791.244,14	11.736.501.110.544,58	563.613.680.699,60	4,80%
Beban – LO	11.923.139.267.046,22	11.649.454.866.276,05	273.684.400.770,20	2,35%
Jumlah	376.975.524.197,92	87.046.244.268,53	837.298.081.469,80	961,90%

4.3.4. Kegiatan Non Operasional

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
	Rp0,00	(Rp15.983.005.171,87)

Realisasi Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp0,00.

4.3.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
	Rp0,00	(Rp15.983.005.171,87)

Realisasi Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp0,00.

4.3.6. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
	Rp376.975.524.197,92	Rp71.063.239.096,66

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp 376.975.524.197,92.

4.3.7. Pos Luar Biasa

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2018</u>
	Rp21.299.175.711,00	Rp53.155.528.758,00

Realisasi Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp21.299.175.711,00 yang merupakan beban luar biasa. Terdapat penurunan sebesar Rp31.856.353.047,00 atau 59,93% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Realisasi beban luar biasa pada Laporan Operasional merupakan realisasi



belanja tidak terduga sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.8. Surplus/ Defisit LO TA 2019 TA 2018
Rp355.676.348.486,92 **Rp17.907.710.338,66**
Realisasi Surplus/ Defisit LO Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp355.676.348.486,92. Terdapat kenaikan sebesar Rp337.768.638.148,28 atau 1886,16% % dari realisasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Surplus/Defisit LO Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	376.975.524.197,92	71.063.239.096,66	305.912.285.101,26	430,48%
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	(21.299.175.711,00)	(53.155.528.758,00)	31.856.353.047,00	(59,93%)
Surplus/Defisit LO	355.676.348.486,92	17.907.710.338,66	408.576.111.019,73	1886,16%

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 66 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	18.387.497.135.274,47	18.644.275.684.185,86
SURPLUS/DEFISIT-LO	355.676.348.486,92	17.907.710.338,66
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(608.230.266.954,16)	(274.686.259.250,05)
Koreksi Ekuitas Lainnya-Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	18.134.943.216.807,23	18.387.497.135.274,47

4.4.1. Ekuitas awal Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp18.387.497.135.274,47 **Rp18.644.275.684.185,86**

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.387.497.135.274,47 yang merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2018.



Jika dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp18.644.275.684.185,86 maka terjadi penurunan sebesar Rp256.778.548.911,39 atau 1,40%.

	<u>Per 31 Desember 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
4.4.2. Surplus/Defisit LO	Rp355.676.348.486,92	Rp17.907.710.338,66

Tahun Anggaran 2019 operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami surplus sebesar Rp355.676.348.486,94 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp17.907.710.338,66,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp337.768.638.148,28 atau 94,97%. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya beban-beban seperti beban pegawai sebesar 1,54%, beban hibah sebesar 23,45%, beban penyusutan dan amortisasi sebesar 12,74%, serta beban transfer sebesar 10,09%. Sedangkan dari pos luar biasa, beban luar biasa juga berkurang signifikan yaitu sekitar 59,93%.

	<u>Per 31 Desember 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
4.4.3. Koreksi Ekuitas	(Rp608.230.266.954,16)	(Rp274.686.259.250,05)
Lainnya		

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, adalah sebesar (Rp608.230.266.954,16) Jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp274.686.259.250,05,- maka terjadi penurunan sebesar Rp333.544.007.704,11 atau 54,84%. Angka tersebut diperoleh dari selisih uraian koreksi ekuitas lainnya pada setiap OPD yang dirangkum seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 67 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

(dalam Rupiah)

No	Uraian Koreksi Ekuitas Lainnya Pada	Per 31 Desember 2019
1	Saldo Awal	(274,686,259,250.05)
2	Penyisihan Piutang	480,777,437.50
3	Penyertaan Modal	(254,457,802,655.08)
4	Aset Tanah	(5,123,134,200.00)
5	Aset Peralatan dan Mesin	(88,260,449,309.45)
6	Gedung dan Bangunan	(3,572,027,372.82)
7	Jalan Irigasi Jaringan	(3,045,850,805.00)
8	Aset Tetap Lainnya	(4,132,814,262.41)
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	128,338,003.00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30,462,372,181.00)
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(80,873,848,200.80)
12	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(966,260,101,150.34)
13	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2,533,393,485.29
14	Penyisihan Piutang Retribusi	449,091,562.91



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

15	Penyisihan Piutang Pajak	950,688,527,154.46
16	Piutang Bagi Hasil Pajak	(174,060,380,877.00)
17	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	12,090,718,633.00
18	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2,357,171.00)
19	Aset Lain-Lain	(10,057,478,369.02)
20	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	574,634,535.00
21	Beban Jasa Dibayar Dimuka	(16,500,000.00)
22	Beban Lain-Lain	33,148,500.00
23	Kelebihan Pembayaran Pihak Ke III	(683,037,790.00)
24	Penerimaan BUMD	(39,860,179,859.40)
25	Ekuitas	274,686,259,250.05
26	Utang PFK	1,026,338.00
27	Beban Barang dan Jasa Bos	85,658,411,600.00
Jumlah		(608,230,266,954.16)

4.4.4. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2019 **Rp18.134.943.216.807,23** Per 31 Desember 2018 **Rp18.387.497.135.274,47**
Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.134.943.216.807,23 Saldo Ekuitas akhir tersebut merupakan perhitungan dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit LO dikurang koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp18.387.497.135.274,47 maka terjadi penurunan sebesar Rp252.553.918.467,22 atau 1,39%.

4.5. Penjelasan Pos-pos Neraca

4.5.1 Aset 31 Desember 2019 **Rp18.616.601.437.549,50** 31 Desember 2018 **Rp19.986.198.193.061,06**
Saldo Aset per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp18.616.601.437.549,50 dan Rp19.986.198.193.061,06 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	2.027.613.806.985,31	2.468.909.239.490,01	(441.295.432.504,70)	(17,87)
Investasi Jangka Panjang	3.469.649.740.656,10	3.254.710.465.678,24	214.939.274.977,87	6,60
Aset Tetap	11.345.694.757.369,30	12.486.292.397.786,00	(1.140.597.640.416,68)	(9,13)
Aset lainnya	1.773.643.132.538,79	1.776.286.090.106,81	(2.642.957.568,02)	(0,15)
Jumlah	18.616.601.437.549,50	19.986.198.193.061,06	(1.369.596.755.511,54)	(6,85)



Berdasarkan rincian pada Tabel 68 di atas, diketahui bahwa total Aset per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebanyak 6,85%. Komposisi aset berdasarkan kelompok kode rekening adalah:

Aset Lancar	2.027.613.806.985,31	10,89%
Investasi Jangka Panjang	3.469.649.740.656,10	18,64%
Aset Tetap	11.345.694.757.369,30	60,94%
Aset lainnya	1.773.643.132.538,79	9,53%
Jumlah	18.616.601.437.549,50	100,00%

Dapat dilihat bahwa Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 paling besar adalah Aset Tetap yaitu 60,94% dari total Aset.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.1 Aset Lancar	Rp2.027.613.806.985,31	Rp2.468.909.239.490,01

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.027.613.806.985,31 dan Rp2.468.909.239.490,01 disajikan sebagai berikut:

Tabel 69 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Kas di Kas Daerah	235.273.302.585,25	975.840.502.146,19
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	144.694.295,00	40.191.082,00
Kas di Bendahara BLUD	10.871.232.990,00	604.961.825,00
Kas di Bendahara BOS	90.320.563.026,00	4.692.934.783,00
Piutang pendapatan	2.687.320.509.627,00	2.169.971.778.340,00
Piutang lainnya	99.584.021.247,18	99.713.235.593,18
Penyisihan piutang	(1.244.362.707.992,12)	(952.260.526.537,91)
Beban dibayar dimuka	2.721.460.796,00	2.989.786.544,00
Persediaan	145.740.730.411,00	167.316.375.714,55
Jumlah Aset Lancar	2.027.613.806.985,31	2.468.909.239.490,01

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Rp235.273.302.585,25	Rp975.840.502.146,19

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah yang berada di rekening Bank Sumut : AC No 100.01.000623.0 sebesar Rp235.273.302.585,25. Saldo tersebut terdiri dari:

1. Sisa Dana BOS Reguler	Rp	30.732.485.181,00
2. Sisa Dana BOS Afiriasi	Rp	1.000.000,00
3. Sisa Dana BOS Kinerja	Rp	84.695.000,00
4. Sisa Dana DAK Fisik (Reguler & Penugasan)	Rp	23.529.844.339,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

5.	Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	Rp	145.938.700,00
6.	Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp	7.124.544.120,00
7.	Sisa Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp	1.788.000.000,00
8.	Sisa Dana PK2&UKM	Rp	184.490.000,00
9.	Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	244.779.360,00
10.	Sisa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Rp	84.733.777,00
11.	Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Rp	478.182.877,00
12.	Lain-lain	Rp	170.874.609.231,25
<i>Jumlah Kas di Kas Daerah</i>		<i>Rp</i>	<i>235.273.302.585,25</i>

Terdapat saldo kas di Rekening penampungan (IA) Bank Sumut yang belum disalurkan oleh Bank Sumut sebesar Rp56.317.401.663,60 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>No. Rekening</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>	
1.	HH Dana Bos BSU TA. 2017	100002240701051360	1.088.520.000,00
2.	HH Dana Bos BSU TA. 2018	100002240701062360	1.552.340.000,00
3.	HH Dana Bos BSU TA. 2019	100002240702909360	3.829.660.000,00
4.	HH Dana Bos Bnon BSU	100002240702704360	1.152.758.000,00
5.	HH IW/Taperum/Askes	100002240701047360	0,00
6.	HH Transfer Kasda Pemprov	100002240701341360	48.100.544.246,60
7.	HH Setoran Titipan Pajak Pemprov	10000240703304360	593.579.417,00
<i>Jumlah</i>		<i>56.317.401.663,60</i>	

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
4.5.1.1.2 Kas di Bendahara	Rp0,00	Rp0,00
Penerimaan		

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan SKPD sampai dengan akhir periode 31 Desember 2019 namun telah disetor pada tahun 2019.

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
4.5.1.1.3 Kas di Bendahara	Rp144.694.295,00	Rp40.191.082,00
Pengeluaran		

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD, Hutang PFK dan sisa kas dan setara kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode.

Pada tahun 2018 masih terdapat sisa UYHD di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke akun kas daerah pada tahun 2019 yaitu:

- Dinas Lingkungan Hidup telah disetor ke Kas Daerah tanggal 3 Januari 2019 (Rp7.014.602,00).
- Dinas Kehutanan telah disetor ke Kas Daerah tanggal 18 Februari 2020 (Rp22.148.080,00).



Sampai dengan 31 Desember 2019 masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp144.694.295,00 yang terdiri dari:

- Sisa UYHD sebesar Rp132.639.557,00 dan
- Hutang PFK sebesar Rp12.054.738,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan Sisa UYHD yang disetor ke Kas Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp132.639.557,00 adalah:

- Dinas Pendidikan terdapat sisa UYHD yang disetor ke Kas Daerah tanggal 15 Januari 2020 (Rp40.460.000,00).
- Dinas Kesehatan terdapat pengembalian belanja barang dan jasa yang disetor ke Kas Daerah tanggal 9 Januari 2020 (Rp11.623.797,00).
- Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat sisa UYHD sebesar Rp71.224.336,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 7 Januari 2020 (Rp63.774.336,00), tanggal 14 Januari 2020 (Rp700.000,00) dan tanggal 15 Januari 2020 (Rp6.750.000,00).
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdapat pengembalian belanja pegawai yang disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Januari 2020 (Rp9.331.424,00).

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan Hutang PFK yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.054.738,00 adalah:

- Rumah Sakit Umum Haji Daerah terdapat Hutang PFK sebesar Rp1.026.338,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu yang merupakan Hutang PFK Pajak sejak tahun 2016 belum disetor ke kas negara sebesar Rp11.028.400,00.

Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 Dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018	Mutasi		Per 31 Desember 2019
		Penambahan	Pengurangan	
A. Sisa UP/GU/TU/LS				
Dinas Pendidikan	0,00	40.460.000,00	0,00	40.460.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	11.623.797,00	0,00	11.623.797,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	71.224.336,00	0,00	71.224.336,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.014.602,00	0,00	(7.014.602,00)	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	9.331.424,00	0,00	9.331.424,00
Dinas Kehutanan	22.148.080,00	0,00	(22.148.080,00)	0,00
<i>Jumlah A</i>	<i>29.162.682,00</i>	<i>132.639.557,00</i>	<i>(29.162.682,00)</i>	<i>132.639.557,00</i>
B. Utang Pajak				
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	0,00	1.026.338,00	0,00	1.026.338,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.028.400,00	0,00	0,00	11.028.400,00
<i>Jumlah B</i>	<i>11.028.400,00</i>	<i>1.026.338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.054.738,00</i>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Per 31 Desember 2018	Mutasi		Per 31 Desember 2019
		Penambahan	Pengurangan	
Jumlah A+ B	40.191.082,00	133.665.895,00	(29.162.682,00)	144.694.295,00

4.5.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp10.871.232.990,00	Rp604.961.825,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.871.232.990,00 merupakan saldo Kas di Bendahara RSUD Haji Medan yang berasal dari pendapatan jasa kesehatan yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
· Saldo Kas	10.383.658,00	23.129.045,00
· BNI Syariah AC 0092757371	0,00	1.130.867,00
· BNI AC 0057865979	9.794.487,00	10.337.210,00
· Bank Mandiri AC 106.00.00808249	1.890.628.267,00	362.451.316,00
· Bank Sumut AC 109.0204.018428-8	157.561.640,00	153.962.533,00
· Bank Sumut (Giro) 109.0103.00000-44	48.395.284,00	53.950.854,00
· Rekening Bank Sumut (Deposito) 317069	1.000.000.000,00	0,00
· Bank Syariah Mandiri AC 7133877748	7.754.469.654,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<u>10.871.232.990,00</u>	<u>604.961.825,00</u>

4.5.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp90.320.563.026,00	Rp4.692.934.783,00

Kas di Bendahara BOS merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 722 sekolah terdiri dari 426 SMA Negeri, 267 SMK Negeri dan 29 SDLB/SMPLB/SLB Negeri.

Terdapat sisa dana BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp90.320.563.026,00 yaitu Kas di Bank Rp90.154.577.807,00 dan Kas Tunai sebesar Rp165.985.219,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3.

	Kas Bank	Kas Tunai	Jumlah
SMA Negeri	51.206.592.714,00	155.806.269,00	51.362.398.983,00
SMK Negeri	38.564.187.391,00	10.178.950,00	38.574.366.341,00
SDLB-SMPLB-SLB Negeri	383.797.702,00	0,00	383.797.702,00
	<u>90.154.577.807,00</u>	<u>165.985.219,00</u>	<u>90.320.563.026,00</u>

4.5.1.1.6 Piutang Pendapatan

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp2.687.320.509.627,00	Rp2.169.971.778.340,00

Piutang merupakan akun untuk mencatat saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada entitas lain yaitu Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi dan lainnya, yang belum diterima sampai dengan akhir periode. Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 71 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2018
		Penambahan	Pengurangan	
PBBKB – BP2RD	86.455.905.864,00	85.847.939.239,00	(86.455.905.864,00)	85.847.939.239,00
Pajak Air Permukaan - BP2RD	1.884.564.797.481,00	2.464.935.129.136,00	(1.884.564.797.481,00)	2.464.935.129.136,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-Dinkes	2.069.059.259,00	994.459.735,00	(2.069.059.259,00)	994.459.735,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSJ	3.354.363.549,00	3.003.567.000,00	(3.354.363.549,00)	3.003.567.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – DLH	176.055.737,00	365.620.000,00	(105.350.000,00)	436.325.737,00
DBH Pajak – SKPKD	184.851.557.534,00	118.029.478.261,00	(184.851.557.534,00)	118.029.478.261,00
Jasa Pelayanan Kesehatan - RSU Haji Medan (BLUD)	8.500.038.916,00	14.011.159.269,00	(8.437.587.666,00)	14.073.610.519,00
Jumlah	2.169.971.778.340,00	2.687.187.352.640,00	(2.169.838.621.353,00)	2.687.320.509.627,00

1. Piutang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah per 31 Desember 2019 terdiri dari:

- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp85.847.939.239,00 (Rincian pada Lampiran 4).
- Piutang Pajak Air Permukaan (APU) sebesar Rp2.464.935.129.136,00 (Rincian pada Lampiran 5).

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp29.158.665.148,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp30.287.149.284,00 tidak dicatat sebagai Piutang karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah terdapat pelunasan pajak dari wajib pajak (Rincian pada Lampiran 6).

2. Piutang Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan adalah Klaim Peserta/Keluarga BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp994.459.735,00 (Rincian pada Lampiran 7) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

- UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provsu
 - September 2019 216.173.600,00
 - Oktober 2019 167.641.200,00
 - November 2019 105.351.200,00
 - Desember 2019 90.338.800,00
 - 579.504.800,00
- UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provsu
 - September 2019 94.274.300,00
 - Oktober 2019 103.999.500,00
 - November 2019 107.514.400,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Desember 2019	103.669.100,00
Klaim pending November 2019	3.845.300,00
Denda September 2019	1.652.335,00
	<u>414.954.935,00</u>
Jumlah Piutang Dinas Kesehatan	994.459.735,00

3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem sebesar Rp3.003.567.000,00 merupakan klaim berkas JKN untuk pelayanan kesehatan yang masih dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan. Piutang RSJ Prof. Muhammad Ildrem per 31 Desember 2019 terdiri dari:

	Rawat Inap		Rawat Jalan		Jumlah	
	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya
September	207	648.071.700	900	205.835.900	1.107	853.907.600
Oktober	134	655.261.600	1.055	196.721.400	1.189	851.983.000
November	110	474.928.500	1.034	193.216.900	1.144	668.145.400
Desember	99	424.712.600	1.096	204.818.400	1.195	629.531.000
	550	2.202.974.400	4.085	800.592.600	4.635	3.003.567.000

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2019 sebesar Rp436.034.737,00 terdapat pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 8.

	31 Desember 2018		Pelunasan	Penambahan	31 Desember
					2019
Piutang 2013	39.764.737,00	2.194.000,00		0,00	37.570.737,00
Piutang 2014	4.430.000,00	1.545.000,00		0,00	2.885.000,00
Piutang 2015	14.314.000,00	1.177.000,00		0,00	13.137.000,00
Piutang 2016	18.581.000,00	1.468.000,00		0,00	17.113.000,00
Piutang 2018	98.966.000,00	98.966.000,00		0,00	0,00
Piutang 2019	0,00	0,00	365.620.000,00		365.620.000,00
	176.055.737,00	105.350.000,00	365.620.000,00		436.325.737,00

5. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN sebesar Rp118.029.478.261,00 merupakan pendapatan atas kekurangan bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2017 dan 2018 sesuai PMK 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 hasil rekon dengan DJPK Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp22.881.895.290,00 dan PMK 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 dalam rangka menangani Pandemi *Covid-19* sebesar Rp95.147.582.971,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9, dibawah ini ada adalah rangkuman (dalam Rupiah):

Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2017 dan 2018 sesuai PMK 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019:

1. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	1.179.543.268,00
2. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	9.407.731.492,00
3. Cukai Hasil Tembakau	203.901.897,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

<i>Kurang Salur DBH Pajak 2017 dan 2018</i>	<i>10.791.176.657,00</i>
4. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	1.354.588.591,00
5. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	9.060.125.499,00
6. DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	1.676.004.543,00
<i>Kurang Salur DBH SDA 2017 dan 2018</i>	<i>12.090.718.633,00</i>
<i>Kurang Salur 2017 dan 2018</i>	<i>22.881.895.290,00</i>
Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2019 sesuai PMK 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020:	
1. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	64.363.083.243,00
2. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	27.047.008.984,00
3. Cukai Hasil Tembakau	0,00
<i>Kurang Salur DBH Pajak 2019</i>	<i>91.410.092.227,00</i>
4. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	1.003.404.864,00
5. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	2.448.347.679,00
6. DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	285.738.201,00
<i>Kurang Salur DBH SDA 2019</i>	<i>3.737.490.744,00</i>
<i>Kurang Salur 2019</i>	<i>95.147.582.971,00</i>
<i>Total Kurang Salur per 31 Desember 2019</i>	<i>118.029.478.261,00</i>

6. Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.073.610.519,00. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 10. Rekap piutang RSUD Haji adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):
- | | |
|--|--------------------------|
| - Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum | 78.895.491,00 |
| - Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS | 13.994.715.028,00 |
| <i>Jumlah</i> | <i>14.073.610.519,00</i> |

4.5.1.1.7 Piutang Lainnya **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp99.584.021.247,18 **Rp99.713.235.593,18**

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp99.584.021.247,18 dan Rp99.713.235.593,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2019
		Penambahan	Pengurangan	
Kelebihan bagi hasil pajak ABT - SKPKD	26.750.865,00	0,00	0,00	26.750.865,00
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BPKAD	81.451.000,00	113.556.000,00	(92.238.000,00)	102.769.000,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BPKAD	113.620.000,00	0,00	0,00	113.620.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - BPKAD	99.486.040.228,18	0,00	(150.532.346,00)	99.335.507.882,18
Bagian lancar tagihan	5.373.500,00	0,00	0,00	5.373.500,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Per 31 Desember 2018	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2019
		Penambahan	Pengurangan	
penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Jumlah	99.713.235.593,18	113.556.000,00	(242.770.346,00)	99.584.021.247,18

1. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT– SKPKD per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.750.865,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Pajak Air Bawah Tanah (ABT) oleh Biro Keuangan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2012 kepada 32 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD per 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Kelebihan Bagi Hasil ABT
Kota Medan	11.312.415,00
Kota Binjai	710.526,00
Kota Tebingtinggi	89.898,00
Kota Pematang Siantar	144.364,00
Kota Sibolga	37.031,00
Kota Tanjung Balai	105.296,00
Kabupaten Batubara	284.516,00
Kabupaten Asahan	557.048,00
Kabupaten Dairi	262.689,00
Kabupaten Deli Serdang	3.929.524,00
Kabupaten Serdang Badagai	429.833,00
Kabupaten Labuhan Batu	411.786,00
Kabupaten Langkat	598.995,00
Kabupaten Mandailing Natal	948.365,00
Kabupaten Nias	268.232,00
Kabupaten Simalungun	532.243,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	326.212,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	872.210,00
Kabupaten Tapanulai Utara	665.526,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	390.998,00
Kabupaten Toba Samosir	347.429,00
Kabupaten Samosir	335.216,00
Kabupaten Padang Sidempuan	160.216,00
Kabupaten Padang Lawas	374.189,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	680.030,00
Kabupaten Pakpak Barat	168.390,00
Kabupaten Nias Selatan	328.994,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	463.652,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	386.948,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Kabupaten Nias Utara	258.782,00
Kabupaten Nias Barat	172.888,00
Kota Gunung Sitoli	196.424,00
<i>Jumlah</i>	<i>26.750.865,00</i>

2. Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah adalah nilai piutang angsuran yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan (terhitung dari tanggal pelaporan) untuk penjualan tanah Eks PRPTE Dinas Perkebunan sebanyak 15 unit. Sedangkan nilai piutang yang belum jatuh tempo dalam tahun berjalan dicatat sebagai Aset Lainnya.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11. Rekapitulasi perhitungan bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2019
Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2018	81.451.000,00
Pelunasan Bagian Lancar 2016-2018	(34.080.000,00)
Alokasi Bagian Lancar 2019	113.556.000,00
Pelunasan Bagian Lancar 2019	(58.158.000,00)
Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2019	102.769.000,00

3. Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2019 adalah merupakan piutang kas penjualan aset daerah berupa kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.024/2324/K/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp113.620.000,00.

4. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Piutang TGR adalah Rekapitulasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembebanan Ganti Rugi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 715 SK, dan 95 SK hasil LHP BPK Tahun 2018. Piutang TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp99.335.507.882,18 dapat dilihat rinciannya pada Lampiran 12:

Tahap I	(276 SK)	74.508.893.804,42
Tahap II	(402 SK)	35.621.817.144,75
Tahap III	(37 SK)	6.411.225.817,43
Koreksi BPK 2018	(95 SK)	3.466.904.402,00
Total	(810 SK)	120.008.841.168,60
Setor Sebelum 2018		(19.519.738.682,42)
Setor 2018		(1.003.062.258,00)
Per 31 Desember 2018		99.486.040.228,18
Setor 2019		150.532.346,00
<i>Per 31 Desember 2019</i>		<i>99.335.507.882,18</i>

5. Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Penataan Ruang dan Permukiman per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.373.500,00 adalah sebagai berikut:

Nilai kontrak/tagihan	399.969.797,00
Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2014	120.469.067,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Pembayaran selama tahun 2015 (115.095.567,00)
Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2014 5.373.500,00

4.5.1.1.8 Penyisihan Piutang 31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp1.244.362.707.992,12) (Rp 952.260.526.537,91)

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya. Saldo penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.244.362.707.992,12 dapat dilihat rinciannya pada Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 7, Lampiran 8 dan Lampiran 10. Rekap penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Piutang pendapatan					
PBBKB - BP2RD	388.622.589,15	0,00	0,00	8.123.421.410,00	8.512.043.999,15
Pajak Air Permukaan - BP2RD	2.211.362,29	24.324.501,10	1.231.514.535.842,00	1.220.539.983,00	1.232.761.611.688,39
Ret.Pelayanan Kesehatan – Dinkes	970.039,50	48.835.160,00	156.050.117,50	0,00	205.855.317,00
Ret. Pelayanan Kesehatan - RSJ	3.147.655,00	152.012.840,00	426.953.800,00	0,00	582.114.295,00
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – DLH	916.630,00	13.866.900,00	21.812.500,00	70.705.737,00	107.301.767,00
DBH Pajak dan Sumber Daya Alam – SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Pelayanan Kesehatan - RSU Haji Medan (BLUD)	22.021.248,48	827.616.249,40	665.373.539,50	62.451.250,00	1.577.462.287,38
Penyisihan Piutang lainnya					
Kelebihan bagi hasil pajak ABT - SKPKD	133.754,33	0,00	0,00	0,00	133.754,33
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BPKAD	513.845,00	0,00	0,00	0,00	513.845,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan-BPKAD	0,00	0,00	0,00	113.620.000,00	113.620.000,00
Bagian lancar TGR - BPKAD	496.677.539,41	0,00	0,00	0,00	496.677.539,41
Bag.lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	5.373.500,00	5.373.500,00
Jumlah	915.214.662,72	1.066.655.650,40	1.232.784.725.799,00	9.596.111.880,00	1.244.362.707.992,12



4.5.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp2.721.460.796,00 **Rp2.989.786.544,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat yang dibayar pada periode berjalan namun menjadi beban tahun berikutnya. Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat tahun 2020 yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.721.460.796,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2019
		Penambahan	Pengurangan	
Sewa gedung/kantor/tempat				
Dinas Pendidikan	76.175.000,00	0,00	(76.175.000,00)	0,00
Dinas Tenaga Kerja	69.532.667,00	99.873.500,00	(117.490.500,00)	51.915.667,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00	37.500.000,00	(34.375.000,00)	23.125.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	61.380.000,00	147.312.000,00	(147.312.000,00)	61.380.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.762.698.877,00	3.158.929.838,00	(3.336.588.586,00)	2.585.040.129,00
Jumlah	2.989.786.544,00	3.443.615.338,00	(3.711.941.086,00)	2.721.460.796,00

Rincian beban dibayar dimuka untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

	Periode	Nilai Sewa	Beban Dibayar Dimuka
Dinas Pendidikan			
1. Cabdis Sibolga	01/07/18 30/06/19	25.000.000,00	0,00
2. Cabdis Gunung Sitoli	01/07/18 30/06/19	17.800.000,00	0,00
3. Cabdis Teluk Dalam	01/07/18 30/06/19	22.250.000,00	0,00
4. Cabdis Siantar	01/07/18 30/06/19	11.125.000,00	0,00
<i>Jumlah</i>			<i>0,00</i>
Dinas Tenaga Kerja			
1. UPT Wil II Deli Serdang	20/09/18 19/09/19	16.666.500,00	0,00
2. UPT Wil III P. Siantar	24/09/18 23/09/19	16.666.500,00	0,00
3. UPT Wil IV Rantau Prapat	21/08/18 20/08/19	10.274.000,00	0,00
4. UPT Wil V Tapsel	02/08/18 01/08/19	12.962.833,33	0,00
5. UPT Wil VI Sibolga	01/08/18 31/07/19	12.962.833,33	0,00
6. UPT Wasnaker 2	01/02/19 31/01/20	25.000.000,00	2.083.333,33
7. UPT Wasnaker 3	26/09/19 25/09/20	20.000.000,00	15.000.000,00
8. UPT Wasnaker 4	21/08/19 20/08/20	13.873.500,00	9.249.000,00
9. UPT Wasnaker 5	21/08/19 20/08/20	20.000.000,00	13.333.333,33
10. UPT Wasnaker 6	01/08/19 31/07/20	21.000.000,00	12.250.000,00
<i>Jumlah</i>		<i>169.406.166,67</i>	<i>51.915.666,67</i>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Dinas Lingkungan Hidup

1. Parapat	13/04/18	12/04/19	5.000.000,00	0,00
2. Parapat	13/04/18	12/04/19	6.250.000,00	0,00
3. Parapat	20/07/18	19/07/19	8.750.000,00	0,00
4. Sewa Rumah Dinas Pegawai Pria	22/08/19	21/08/20	7.500.000,00	5.000.000,00
5. Sewa Rumah Dinas Ka. UPT	06/08/19	06/08/20	15.000.000,00	8.750.000,00
6. Sewa Rumah Dinas Pegawai Wanita	02/09/19	01/09/20	7.500.000,00	5.000.000,00
7. Sewa Rumah Dinas Kasubbag	10/08/19	09/08/20	7.500.000,00	4.375.000,00
<i>Jumlah</i>			<i>57.500.000,00</i>	<i>23.125.000,00</i>

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Tourist Information Center-KNO	20/05/18	19/05/19	61.380.000,00	0,00
2. Tourist Information Center-KNO	20/05/19	19/05/20	147.312.000,00	61.380.000,00
<i>Jumlah</i>			<i>208.692.000,00</i>	<i>61.380.000,00</i>

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 13.

4.5.1.1.10 Persediaan **31 Desember 2019** **Rp145.740.730.411,00** **31 Desember 2018** **Rp167.316.375.714,55**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp145.740.730.411,00 dan Rp167.316.375.714,55 pada masing-masing SKPD dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Dinas Pendidikan	169.362.075,00	78.264.295,00
Dinas Kesehatan	105.340.808.331,00	151.656.244.871,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	1.352.659.870,00	1.381.712.404,00
Rumah Sakit Umum Haji Medan	1.932.763.244,00	2.882.445.121,55
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	21.796.778,00	30.378.583,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	16.646.000,00	15.363.300,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	32.976.302.828,00	7.014.262.310,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	5.230.780,00	5.967.648,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.226.570,00	1.127.600,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.187.236,00	20.662.200,00
Dinas Sosial	4.246.375,00	18.505.106,00
Dinas Tenaga Kerja	5.756.045,00	374.000,00
Dinas Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.693.500,00	20.171.500,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	10.522.310,00	5.536.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	126.969.402,00	82.537.586,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.389.106,00	3.353.430,00
Dinas Pemerdayaan Masyarakat Dan Desa	1.821.200,00	2.509.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	8.525.800,00	2.585.500,00
Dinas Perhubungan	70.173.316,00	16.371.730,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	10.030.065,00	4.570.685,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	2.010.360,00	7.429.150,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	5.152.500,00	6.111.700,00
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	3.852.283,00	13.079.550,00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.484.820,00	5.548.420,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	6.407.200,00	5.765.720,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	140.440.420,00	546.268.283,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	404.885.337,00	543.297.014,00
Dinas Perkebunan	4.087.500,00	4.108.723,00
Dinas Kehutanan	102.455.445,00	157.747.245,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.227.700,00	3.000.060,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.350.600,00	2.333.000,00
Biro Umum Dan Perlengkapan	48.726.450,00	57.691.370,00
Biro Pemerintahan	4.385.138,00	4.573.800,00
Biro Bina Perekonomian	7.740.500,00	7.071.000,00
Biro Sosial Dan Kesejahteraan	9.748.870,00	6.074.045,00
Biro Organisasi	5.844.000,00	2.629.890,00
Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama	545.000,00	421.300,00
Biro Administrasi Pembangunan	1.616.800,00	1.309.980,00
Biro Hukum	1.828.125,00	3.858.830,00
Biro Humas Dan Keprotokolan	2.267.300,00	3.555.464,00
Sekretariat DPRD	119.900.500,00	220.661.100,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	1.307.830,00	1.837.051,00
Inspektorat Daerah Provinsi	247.317.665,00	41.401.240,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.780.920,00	6.057.826,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	66.953.740,00	40.831.190,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	2.430.805.798,00	2.374.035.644,00
Badan Kepegawaian Daerah	5.856.844,00	3.056.415,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.106.000,00	2.395.300,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.533.935,00	1.282.135,00
Total Persediaan	145.740.730.411,00	167.316.375.714,55

Ringkasan persediaan per bidang barang adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<i>Bahan Pakai Habis</i>	<i>145.735.004.911,00</i>	<i>167.316.375.714,55</i>
Bahan	1.289.682.480,00	1.963.985.438,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Bahan Bangunan dan Kontruksi	888.920,00	8.387.119,00
Bahan Kimia	815.648.391,00	1.431.378.419,00
Bahan Bakar dan Pelumas	90.000,00	12.550.000,00
Bahan Baku	11.215.200,00	14.905.200,00
Bahan/ Bibit Tanaman	456.144.469,00	496.508.033,00
Isi Tabung Gas	5.695.500,00	256.667,00
Suku Cadang	1.620.426.736,00	2.338.463.463,00
Suku Cadang Alat Angkutan	2.712.500,00	1.370.116,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	638.270.791,00	1.926.984.344,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	969.688.445,00	394.538.403,00
Suku Cadang Alat Pertanian	9.755.000,00	15.570.600,00
Suku Cadang Lainnya		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.592.478.386,00	4.894.399.608,00
Alat Tulis Kantor	3.330.629.511,00	2.679.289.200,00
Kertas dan Cover	260.832.290,00	205.485.923,00
Bahan Cetak	8.842.600,00	19.808.380,00
Benda Pos	3.612.900,00	1.765.069,00
Persediaan	1.257.250,00	722.475,00
Dokumen/Administrasi Tender		
Bahan Komputer	469.417.663,00	379.287.169,00
Perabot Kantor	733.725.156,00	1.016.890.765,00
Alat Listrik	388.907.517,00	364.053.855,00
Perlengkapan Dinas	247.941.500,00	169.703.000,00
Perlengkapan Pendukung Olah Raga		
Suvenir/Cinder Mata	92.405.000,00	0,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.906.999,00	57.393.772,00
Obat-Obatan	32.603.507.625,00	76.056.924.231,55
Obat	1.705.247.849,00	1.392.302.659,00
Obat-Obatan Lainnya	30.898.259.776,00	74.664.621.572,55
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	102.508.924.574,00	80.243.449.476,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	102.508.924.574,00	80.243.449.476,00
Natura dan Pakan	2.119.985.110,00	1.819.153.498,00
Natura	2.119.985.110,00	1.741.467.098,00
Pakan	0,00	77.686.400,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

<i>Bahan Tak Habis Pakai</i>	5.725.500,00	0,00
Pipa	5.725.500,00	0,00
Pipa Fiber Glass	135.000,00	0,00
Pipa Plastik PVC (UPVC)	168.000,00	0,00
Pipa Lainnya	5.422.500,00	0,00
<i>Barang Bekas Dipakai</i>	0,00	0,00
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00
Pipa Bekas	0,00	0,00
<i>Jumlah Persediaan</i>	145.740.730.411,00	167.316.375.714,55

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.2 Investasi Jangka Panjang	Rp3.469.649.740.656,10	Rp3.254.710.465.678,24

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen dan non permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen (Penyertaan Modal)	3.469.649.740.656,10	3.254.710.465.678,24
<i>Jumlah</i>	<i>3.469.649.740.656,10</i>	<i>3.254.710.465.678,24</i>

Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 merupakan Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dana Bergulir adalah Pinjaman Modal yang diberikan kepada koperasi dan UKM yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) di Sumatera Utara serta PT. Bank Sumut sebagai Bank Pelaksana dengan pola channelling. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir. Pola Channelling yaitu pola penyaluran kredit dengan cara bank hanya sebagai penyalur dan seluruh persyaratan peminjam telah ditetapkan oleh pihak pemilik dana Rincian dana bergulir per 31 Desember 2019 yang disalur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Uraian	Dana Bergulir TA 2018	Setor	Dana Bergulir TA 2019	Total Penyisihan > 4 tahun 100%	NRB
Syariah	3.249.000.000,00	0,00	3.249.000.000,00	(3.249.000.000,00)	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Konvensional	4.200.000.000,00	0,00	4.200.000.000,00	(4.200.000.000,00)	0,00
UKM	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>7.949.000.000,00</i>		<i>7.949.000.000,00</i>	<i>(7.949.000.000,00)</i>	<i>0,00</i>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 20.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Dana Bergulir Pola Syariah	3.249.000.000,00	3.249.000.000,00
2. Dana Bergulir Pola Konvensional	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
3. Dana Bergulir Pola UKM	500.000.000,00	500.000.000,00
4. Dana Bergulir Pola Penjaminan	0,00	0,00
5. Penyisihan Dana Bergulir	(7.949.000.000,00)	(7.949.000.000,00)
<i>Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah menyetorkan ke Kas Daerah adalah:

- Pada Tahun 2016, KSU Ar Ridho menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.000.000,00.
- Pada Tahun 2018, Kopwan Permata Hati menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

Program Dana Bergulir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dari Tahun 2004 s.d 2006 yang bekerjasama dengan PT Bank Sumut. Terdapat uang penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00. Pada Tahun 2019 telah disetorkan ke Kas Daerah Dana Jaminan sebesar Rp. 2.050.000.000 dari PT. Bank Sumut ke Kas Daerah.

Penyebab Dana Bergulir Tidak Tertagih yaitu:

1. Terjadinya kemacetan pinjaman di anggota koperasi;
2. Tingginya permintaan permodalan anggota kepada koperasi sehingga koperasi terus menggulirkan dana tersebut ke anggota yang lain;
3. Rendahnya produktifitas koperasi penerima dana bergulir dikarenakan persoalan internal;
4. Tidak aktifnya koperasi penerima dana bergulir diakibatkan berbagai persoalan seperti: (1) aktivitas koperasi bertumpu kepada satu atau beberapa orang pengurus sehingga jika terjadi hal-hal seperti meninggal atau sakitnya pengurus, koperasi menjadi tidak berjalan/aktif, (2) rentannya koperasi menghadapi persaingan dan persoalan ekonomi, dan sebagainya.

Investasi Permanen (Penyertaan Modal)

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 adalah perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perhitungan penyertaan modal dengan Metode Ekuitas digunakan pada BUMD/BUMN dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode Ekuitas digunakan pada PDAM Tirtanadi, PD Perkebunan, PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya, PD Aneka Industri dan Jasa, PT Bank Sumut serta PT Kawasan Industri Medan.

Perhitungan penyertaan modal dengan Metode Biaya digunakan pada PT Askrida.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Rincian perhitungan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. PDAM Tirtanadi	962.206.882.123,00	950.334.031.303,00
2. PT Perkebunan Sumatera Utara	333.202.683.479,95	313.017.433.814,27
3. PT Pembangunan Prasarana Sumut	36.453.337.657,71	29.591.297.041,87
4. PT Dhirga Surya	240.427.339.758,00	240.328.227.942,00
5. PD Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00
6. PT Bank Sumut	1.749.657.490.012,34	1.592.508.031.998,90
7. PT Kawasan Industri Medan	147.252.007.625,10	128.481.443.578,20
8. PT Asuransi Bangunan Askrida	450.000.000,00	450.000.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>3.469.649.740.656,10</i>	<i>3.254.710.465.678,24</i>

PDAM Tirtanadi

Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp962.206.882.123,00 dan Rp950.334.031.303,00. Besarnya investasi pada PDAM Tirtanadi berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2019 kepemilikan 100% dengan ringkasan di bawah ini.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2018	950.334.031.303,00	100,00%	950.334.031.303,00
Koreksi Ekuitas Saldo Tahun 2018 (Audited)	(8.194.177.445,00)	100,00%	(8.194.177.445,00)
Tambahan modal disetor	43.088.768.662,00	100,00%	43.088.768.662,00
Pembagian Laba	(74.222.080.779,00)	100,00%	(74.222.080.779,00)
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2019	51.200.340.382,00	100,00%	51.200.340.382,00
Deviden	0,00	100,00%	0,00
<i>Saldo 31 Desember 2019</i>	<i>962.206.882.123,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>962.206.882.123,00</i>

PT Perkebunan Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp333.202.683.479,95 dan Rp313.017.433.814,27. Besarnya investasi pada PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2019 dengan kepemilikan 99,40%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2018	313.494.209.485,00		313.017.433.814,27
Jasa Produksi	(1.163.376.169,00)	99,40%	(1.156.395.911,99)
Pendapatan komprehensif	(581.302.454,00)	99,40%	(577.814.639,20)
Deviden	(2.000.000.000,00)	99,40%	(1.988.000.000,00)
Labanya Ditahan	3.419.554.154,00	99,40%	3.399.036.829,00
Labanya Berjalan	20.632.216.688,00	99,40%	20.508.423.387,87
<i>Saldo 31 Desember 2019</i>	<i>333.801.301.704,00</i>		<i>333.202.683.479,95</i>



Kepemilikan modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp250.097.480.000,00 atau 99,40% dan Koperasi Karyawan PT. Perkebunan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 0,60%.

PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp36.453.337.657,71 dan Rp29.591.297.041,87. Besarnya investasi pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2019 dengan kepemilikan 99,50%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	29.739.997.027,00	99,50%	29.591.297.041,87
Koreksi Ekuitas Saldo Tahun 2018 (Audited)	(7.418.740,00)	99,50%	(7.381.646,30)
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2019	6.903.941.972,00	99,50%	6.869.422.262,14
<i>Saldo 31 Desember 2019</i>	<i>36.636.520.259,00</i>	<i>99,50%</i>	<i>36.453.337.657,71</i>

Kepemilikan modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2019 terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 99,50% dan Pemkot Binjai sebesar Rp100.000.000,00 dan Saham yang dialihkan sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Dinas Perhubungan Pemprov Sumut dengan PT PPSU tentang operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sumut I dan Sumut II dengan rute lintasan Simanindo-Tigaras, Sipinggagan-Muara dan Onan Runggu-Balige di Kawasan Danau Toba. Pada pasal 5 Hak dan Kewajiban Para pihak menyatakan bahwa antara lain Dinas Perhubungan Pemprov Sumut mendapatkan bagi hasil sebesar 50% setelah kelebihan atau selisih lebih antara pendapatan dan biaya, dana bagi hasil tersebut dapat disetorkan setelah audit akuntan publik. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada deviden.

PT Dhirga Surya

Penyertaan Modal PT Dhirga Surya Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp240.427.339.758,00 dan Rp240.328.227.942,00. Besarnya investasi pada PT Dhirga Surya berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Setelah Audit Tahun 2019 dengan kepemilikan 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2018	240.328.227.942,00	100,00%	240.328.227.942,00
Laba rugi tahun berjalan	247.779.540,00	100,00%	247.779.540,00
Deviden	(148.667.724,00)	100,00%	(148.667.724,00)
<i>Saldo 31 Desember 2019</i>	<i>240.427.339.758,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>240.427.339.758,00</i>



Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Dhirga Surya Nomor 002/SK/DS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, terdapat akumulasi kelebihan bayar deviden tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp533.037.790,00 ditambah kelebihan pembayaran tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00. Atas kelebihan tersebut disajikan di Laporan Keuangan PT Dhirga Surya di akun Uang Muka-Neraca sebesar Rp679.370.066,00. Rincian kelebihan bayar deviden adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan bayar tahun 2015	203.258.898
Kelebihan bayar tahun 2016	139.778.892
Kelebihan bayar tahun 2017	190.000.000
Kelebihan bayar tahun 2018	150.000.000
Kelebihan bayar tahun 2019	145.000.000
Kelebihan bayar tahun 2015-2019	828.037.790
Deviden Tahun 2018	(148.667.724)
<i>Akumulasi Kelebihan Bayar Deviden s.d Tahun 2019</i>	<i>679.370.066</i>

PD Aneka Industri dan Jasa

Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar dicatat Nihil. Pencatatan Nihil disebabkan akumulasi kerugian PD Aneka Industri dan Jasa telah bernilai negatif. Ekuitas PD Aneka Industri dan Jasa sebesar (Rp9.568.798.309,00) menurut Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2019. Kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 100,00%.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas AIJ 2019</i>	<i>Ekuitas AIJ 2018</i>
Saldo 31 Desember 2018	(6.082.320.334,00)	(6.535.732.473,00)
Koreksi Perubahan Ekuitas (Kerugian) Tahun berjalan	(2.279.024.635,00)	1.536.896.909,00
<i>Saldo 31 Desember 2019</i>	<i>(9.568.798.309,00)</i>	<i>(6.082.320.334,00)</i>

PT Bank Sumut

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.749.657.490.012,34 dan Rp1.592.508.031.998,90. Besarnya investasi pada PT Bank Sumut berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Setelah Audit Tahun 2019 dengan kepemilikan 46,76% dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
Saldo 31 Desember 2018	3.173.605.799.781,00		1.592.508.031.998,90
Tambahan modal disetor	42.417.675.289,00		8.142.610.439,00
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Sekuritas yang Tersedia Untuk Dijual	(13.876.242.188,00)	46,76%	(6.488.530.847,11)
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Program Manfaat Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	55.748.598.107,00	46,76%	26.068.044.474,83
Dividen Tunai	(301.585.771.103,00)		(125.300.302.369,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
Laba Tahun Berjalan	544.755.424.114,00	46,76%	254.727.636.315,71
Saldo 31 Desember 2019	3.501.065.484.000,00		1.749.657.490.012,33

Terdapat dividen setoran modal tahun 2015 sebesar Rp71.651.328.631,00, tahun 2016 sebesar Rp101.821.128.242,00 dan tahun 2017 sebesar Rp102.229.679.041,00 ditambah pada tahun 2019 pengembalian AMU BPPN 2011-2017 sebesar Rp8.142.617.718,00 sehingga totalnya adalah Rp283.844.753.632,00 menjadi tambahan modal disetor Pemprovsu.

Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2019 Rp864.661.550.000,00 yaitu 46,76% dari total Saham PT Bank Sumut sebesar Rp1.848.959.230.000,00.

Tambahan Modal Disetor 2015	71.651.328.631
Tambahan Modal Disetor 2016	101.821.128.242
Tambahan Modal Disetor 2017	102.229.679.041
AMU bppn 2011-2017	8.142.617.718
Jumlah Modal Disetor	283.844.753.632
Modal tahun 2018	580.816.800.000
Modal tahun 2019	864.661.553.632

PT Kawasan Industri Medan

Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Medan Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp147.252.007.625,10 dan Rp128.481.443.578,20. Besarnya investasi pada PT Kawasan Industri Medan berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Sebelum Audit Tahun 2019 dengan kepemilikan 30,00%, dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2018	428.955.493.501,00		128.481.443.578,20
Koreksi Saldo Tahun 2018	(1.751.028.837,00)	30,00%	(525.308.651,10)
Deviden TB 2018	(12.730.970.290,00)		(3.819.291.087,00)
Laba Tahun Berjalan	77.050.545.950,00	30,00%	23.115.163.785,00
Saldo 31 Desember 2019	491.524.040.324,00		147.252.007.625,10

Setoran Modal dan persentase kepemilikan PT Kawasan Industri Medan sesuai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan PT KIM Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemilik Saham

Pemerintah Republik Indonesia	60%	Rp	90.000.000.000,00
Pemerintah Provinsi Sum.Utara	30%	Rp	45.000.000.000,00
Pemerintah Kota Medan	10%	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Modal disetor	100%	Rp	150.000.000.000,00

PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2019 sebesar Rp450.000.000,00 yaitu 0,173% terdiri dari 45 lembar saham dengan nilai nominal per



lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp7.966.962,00 belum dapat diakui sebagai penyertaan modal karena belum ada sertifikat sahamnya. Dari penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 diantaranya sebesar Rp80.000.000,00 merupakan penyertaan modal dalam tahun 2004 yang merupakan konversi dari Dividen tahun 2003 sebesar Rp80.000.000,00 menjadi penyertaan modal sebanyak 8 lembar saham senilai Rp80.000.000,00. Berikut ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas PT Asuransi Bangun Askrida.

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2018	902.047.850.109,00
Modal ditempatkan dan disetor penuh	17.100.000.000,00
Titipan Modal Disetor	(15.880.000.000,00)
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	9.548.439.400,00
Laba Rugi Ditahan	(107.151.044.927,00)
Laba Tahun Berjalan	69.210.417.815,00
<i>Saldo 31 Desember 2019</i>	<i>874.875.662.397,00</i>

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.3. Aset Tetap	Rp11.345.694.757.369,30	Rp12.486.292.397.786,00

Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp11.345.694.757.369,30 dan Rp12.486.292.397.786,00 pada Tabel 67 di bawah ini.

Tabel 76 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Aset Tetap	
	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Tanah	4.908.160.075.088,00	4.861.926.933.583,00
Peralatan dan Mesin	2.779.673.553.888,03	2.375.099.313.534,00
Gedung dan Bangunan	4.467.056.226.389,18	4.270.077.145.650,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.313.180.517.291,00	8.703.290.477.927,00
Aset Tetap Lainnya	280.183.866.534,59	279.369.197.535,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.835.367.272,30	70.425.861.228,00
Akumulasi Penyusutan	(10.439.394.849.093,80)	(8.073.896.531.671,00)
Total Aset Tetap	11.345.694.757.369,30	12.486.292.397.786,00

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.3.1. Tanah	Rp4.908.160.075.088,00	Rp4.861.926.933.583,00

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp4.908.160.075.088,00 dan Rp4.861.926.933.583,00. Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Dinas Pendidikan	996.260.459.371,00	996.210.244.571,00
Dinas Kesehatan	229.910.287.945,00	229.910.287.945,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	15.264.300.000,00	15.264.300.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Rumah Sakit Umum Haji Daerah	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	214.347.959.830,00	214.347.959.830,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	78.997.223.696,00	63.435.117.196,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.780.020.000,00	819.520.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	8.810.900.000,00	8.810.900.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	62.554.804.500,00	62.554.804.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.801.701.850,00	10.801.701.850,00
Dinas Sosial	137.671.417.215,00	137.671.417.215,00
Dinas Tenaga Kerja	25.662.790.600,00	25.662.790.600,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.418.100.000,00	27.418.100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	120.769.231.500,00	116.437.597.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.031.473.200,00	29.031.473.200,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.619.900.000,00	21.619.900.000,00
Dinas Perhubungan	82.635.952.250,00	82.832.920.250,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.299.500.000,00	8.299.500.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.857.200.000,00	5.857.200.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	873.467.740.000,00	873.467.740.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.913.106.542,00	30.743.906.542,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.550.100.000,00	19.550.100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	28.596.964.764,00	26.255.836.500,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	128.107.229.234,00	128.107.229.234,00
Dinas Perkebunan	129.082.850.600,00	133.533.790.600,00
Dinas Kehutanan	87.920.562.153,00	87.920.562.153,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26.242.200.000,00	26.242.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	107.667.575.250,00	107.667.575.250,00
Biro Umum dan Perlengkapan	686.853.175.630,00	686.853.175.630,00
Sekretariat DPRD	298.524.158.855,00	298.524.158.855,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	34.123.517.600,00	34.123.517.600,00
Inspektorat Daerah Provinsi	17.865.100.000,00	17.865.100.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	48.023.556.160,00	48.023.556.160,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	202.592.764.341,00	165.126.498.400,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	61.838.252.002,00	61.838.252.002,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.220.600.000,00	52.220.600.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.477.400.000,00	4.477.400.000,00
Total Tanah	4.908.160.075.088,00	4.861.926.933.583,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Tanah dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 14.

Saldo Awal Tanah 2019	4.861.926.933.583,00
Mutasi Penambahan	
Koreksi OPD/Koreksi Permendagri 108/2016	0,00
Belanja Modal	35.324.222.041,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	397.352.500,00
Koreksi Belanja Modal 2019	15.584.536.500,00
Hutang 2019	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

	Reklasifikasi Aset Tetap 2019	0,00
	Mutasi OPD 2019	4.450.940.000,00
	Pendapatan Hibah/ Penyerahan/ Kurang Catat 2019	8.214.548.064,00
	<hr/> Total Mutasi Penambahan	<hr/> 63.971.599.105,00
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD/ Koreksi Permendagri 108/2016	0,00
	Koreksi Belanja Modal 2019	(2.086.565.600,00)
	Hutang 2019	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2019	(196.968.000,00)
	Mutasi SKPD 2019	(4.450.940.000,00)
	Penghapusan 2019	(11.003.984.000,00)
	<hr/> Total Mutasi Pengurangan	<hr/> (17.738.457.600,00)
	<i>Saldo Akhir Tanah 2019</i>	<i>4.908.160.075.088,00</i>

Terdapat dua bidang tanah dalam sengketa dan sedang dalam proses sidang pada dua OPD, yaitu :

- Biro Umum dan Perlengkapan, lokasi di Jalan Batu Indah III RT.02 RW.03 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung luas tanah 2.895 m² nilai Rp10.145.424.180,00 No. Sertifikat 10.15.26.04.4.00026 dalam proses sidang di Pengadilan Negeri.
- Dinas Kelautan dan Perikanan lokasi di Desa Hajoran Pantai Kalangan Km.12-13 Tapanuli Tengah Luas tanah 49.210 m² Nilai Rp82.500,00 belum bersertifikat dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp2.779.673.553.888,03	Rp2.375.099.313.534,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.779.673.553.888,03 dan Rp2.375.099.313.534,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Dinas Pendidikan	982.991.708.630,03	825.687.201.995,00
Dinas Kesehatan	187.495.602.483,00	176.229.235.172,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	28.682.355.156,00	26.497.271.055,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	190.452.740.601,00	175.680.986.927,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	109.640.391.830,00	98.321.911.059,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	37.274.881.475,00	33.942.315.960,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.498.720.958,00	11.833.594.031,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	6.785.262.800,00	6.679.822.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.399.670.777,00	7.794.928.304,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.680.241.686,00	13.539.823.386,00
Dinas Sosial	56.874.324.803,00	56.217.338.497,00
Dinas Tenaga Kerja	9.735.065.997,00	8.419.951.997,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.118.208.595,00	5.616.202.895,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	28.563.162.729,00	24.541.319.373,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Dinas Lingkungan Hidup	47.609.315.120,00	42.771.869.210,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.771.262.703,00	4.571.531.358,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.756.479.123,00	7.850.877.323,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	3.108.649.161,00	2.910.820.161,00
Dinas Perhubungan	143.546.277.338,00	23.638.934.625,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	36.720.944.091,00	36.838.442.534,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.465.042.999,00	14.404.905.999,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	16.870.286.359,00	15.557.079.209,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	47.751.626.824,00	30.706.332.189,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.028.333.468,00	8.106.068.468,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	39.032.478.789,00	38.157.500.201,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	36.213.519.173,00	33.483.702.768,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	64.946.938.520,00	63.694.707.770,00
Dinas Perkebunan	13.726.001.690,00	13.029.855.390,00
Dinas Kehutanan	44.495.596.620,00	36.487.615.690,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.591.993.771,00	4.800.942.371,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.889.842.282,00	22.033.651.496,00
Biro Umum dan Perlengkapan	144.426.683.591,00	129.443.538.560,00
Biro Pemerintahan Umum	9.559.337.434,00	9.403.343.934,00
Biro Bina Perekonomian	2.681.663.831,00	2.681.663.831,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	2.655.516.562,00	2.623.165.562,00
Biro Organisasi	2.393.008.779,00	2.237.413.279,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	2.766.510.918,00	2.893.992.788,00
Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	3.792.380.790,00	3.777.980.790,00
Biro Hukum	2.919.617.814,00	2.907.738.814,00
Biro Humas Keprotokolan	8.549.672.713,00	7.757.066.273,00
Sekretariat DPRD	57.430.979.410,00	54.625.241.510,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	17.709.689.278,00	17.382.305.769,00
Inspektorat Daerah Provinsi	7.300.084.017,00	8.222.691.844,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	15.402.338.565,00	14.760.975.065,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.924.229.706,00	35.998.152.327,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	198.187.033.058,00	187.508.915.058,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.741.947.108,00	7.231.907.908,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.510.740.218,00	9.464.832.940,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.005.193.545,00	6.131.647.069,00
Total Peralatan dan Mesin	2.779.673.553.888,03	2.375.099.313.534,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 15.

Saldo Awal Peralatan dan Mesin TA 2019		2.375.099.313.534,00
Mutasi Penambahan	Koreksi OPD/Koreksi Permendagri 108/2016	509.084.856.824,03
	Ekstrakomptable 2018	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

	Belanja Modal 2019	388.146.192.604,00
	Koreksi Belanja Modal	103.432.846.670,40
	Kapitalisasi Belanja Jasa 2019	15.944.535.641,00
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	22.074.100,00
	Mutasi OPD 2019	4.205.094.099,00
	Pendapatan Hibah	30.656.199.000,00
	Total Mutasi Penambahan	1.051.491.798.938,43
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD/Koreksi Permendagri 108/2016	(402.230.732.327,00)
	Ekstrakomptable 2018	(1.510.615.918,00)
	Mutasi ke Persediaan	(665.478.433,00)
	Koreksi Belanja Modal	(199.157.009.416,00)
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	(11.774.502.700,00)
	Mutasi OPD 2019	(4.205.094.099,00)
	Penghapusan	0,00
	Ekstrakomptable 2019	(27.374.125.691,40)
	Total Mutasi Pengurangan	(646.917.558.584,40)
	<i>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin 2019</i>	<i>2.779.673.553.888,03</i>

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp4.467.056.226.389,18	Rp4.270.077.145.650,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp4.467.056.226.389,18 dan Rp4.270.077.145.650,00 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	2.501.708.586.722,18	2.382.830.299.245,00
Dinas Kesehatan	89.392.215.302,00	66.177.810.389,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	14.603.697.813,00	14.478.267.840,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	37.192.060.268,00	36.679.230.268,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	30.164.460.840,00	25.790.184.742,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	44.417.447.770,00	69.194.741.770,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.530.058.320,00	7.147.974.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	7.746.074.344,00	7.646.799.344,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.462.347.607,00	3.245.554.673,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.286.843.082,00	12.797.248.429,00
Dinas Sosial	96.053.893.122,00	96.053.893.122,00
Dinas Tenaga Kerja	13.356.563.214,00	12.177.787.851,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.877.404.701,00	8.503.863.207,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	40.227.299.150,00	39.704.918.650,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Dinas Lingkungan Hidup	21.370.256.474,00	17.058.755.044,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.259.713.000,00	28.259.713.000,00
Dinas Perhubungan	30.099.415.294,00	112.553.095.390,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.713.038.421,00	4.249.138.421,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24.546.895.000,00	24.546.895.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	10.299.687.565,00	10.099.887.565,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	404.645.680.550,00	336.671.629.735,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.842.120.048,00	21.447.204.408,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	24.124.320.906,00	23.042.238.906,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	35.680.477.802,00	34.266.634.991,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	122.572.146.811,00	116.389.080.706,00
Dinas Perkebunan	19.463.137.208,00	19.319.076.189,00
Dinas Kehutanan	37.000.945.738,00	31.839.385.742,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.014.244.900,00	11.014.244.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.588.064.088,00	16.179.664.088,00
Biro Umum dan Perlengkapan	232.944.622.317,00	220.498.492.773,00
Biro Pemerintahan Umum	462.075.141,00	462.075.141,00
Sekretariat DPRD	222.277.732.107,00	221.297.642.106,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	12.545.782.904,00	12.545.782.904,00
Inspektorat Daerah Provinsi	32.644.413.550,00	32.223.938.550,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6.368.266.000,00	6.368.266.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.777.587.572,00	26.313.187.572,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	171.127.196.338,00	148.415.492.589,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.596.243.700,00	6.513.839.700,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.073.210.700,00	6.073.210.700,00
Total Gedung dan Bangunan	4.467.056.226.389,18	4.270.077.145.650,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 16.

Saldo Awal Gedung dan Bangunan 2019	4.270.077.145.650,00
Mutasi Penambahan Koreksi OPD/Koreksi Permendagri 108/2016	59.131.995.055,20
Belanja Modal 2019	218.045.649.622,40
Koreksi Belanja Modal	26.141.243.940,00
Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa	35.056.247.300,00
Hutang	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap	31.654.345.879,00
Mutasi OPD 2019	30.239.421.494,00
Pendapatan Hibah	6.343.069.796,00
Total Mutasi Penambahan	406.611.973.086,60
Mutasi Pengurangan Koreksi OPD/Koreksi Permendagri 108/2016	(149.133.521.402,02)
Ekstrakomptable 2018	(47.940.000,00)
Persediaan	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Koreksi Belanja Modal	(22.124.855.099,40)
Hutang	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap	(2.816.428.897,00)
Mutasi OPD 2019	(30.239.421.494,00)
Penghapusan	(5.206.677.360,00)
Ekstrakomptabel	(64.048.095,00)
Total Mutasi Pengurangan	(209.632.892.347,42)
<i>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan 2019</i>	<i>4.467.056.226.389,18</i>

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp9.313.180.517.291,00	Rp8.703.290.477.927,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp9.313.180.517.291,00 dan Rp8.703.290.477.927,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Dinas Pendidikan	42.503.325.939,00	32.183.411.021,00
Dinas Kesehatan	1.387.814.500,00	913.580.500,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	3.142.870.500,00	3.142.870.500,00
Rumah Sakit Umum Haji Medan (Blud)	6.251.578.649,00	5.855.215.649,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	7.025.589.086.267,00	6.578.914.125.676,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.734.428.034.519,00	1.595.598.943.156,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	412.607.829.298,00	412.607.829.298,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.259.160,00	1.259.160,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	776.448.289,00	116.222.000,00
Dinas Sosial	1.570.104.224,00	1.570.104.224,00
Dinas Tenaga Kerja	84.790.000,00	84.790.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.856.894.850,00	1.974.618.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.867.231.923,00	1.760.913.250,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189.340.000,00	189.340.000,00
Dinas Perhubungan	2.267.291.750,00	2.267.291.750,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	550.175.180,00	550.175.180,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	147.250.000,00	147.250.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	326.828.400,00	326.828.400,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	19.306.898.887,00	17.581.009.300,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.959.461.200,00	1.114.633.500,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	174.352.000,00	174.352.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	12.160.096.502,00	11.764.059.136,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	24.156.723.971,00	21.901.242.471,00
Dinas Perkebunan	1.267.407.850,00	1.018.088.800,00
Dinas Kehutanan	2.188.885.377,00	1.679.175.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	165.090.900,00	44.955.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.959.950,00	9.959.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.978.380,00	1.158.317.750,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	799.441.000,00	2.166.046.325,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	631.701.000,00	196.708.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	64.000.000,00	308.720.500,00
Biro Umum dan Perlengkapan	1.356.073.550,00	37.978.380,00
Sekretariat DPRD	2.166.046.325,00	799.441.000,00
Inspektorat Provinsi	507.103.300,00	4.295.835.651,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.484.435.651,00	771.186.000,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	196.708.000,00	64.000.000,00
Total Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.313.180.517.291,00	8.703.290.477.927,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 17.

Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019		8.703.290.477.927,00
Mutasi Penambahan	Koreksi OPD/Koreksi Permendagri 108/2016	3.333.832.145,00
	Belanja modal 2019	584.709.449.585,00
	Koreksi belanja modal	24.692.665.337,00
	Kapitalisasi belanja jasa tahun 2019	24.472.435.730,00
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi aset tetap	9.851.641.827,00
	Mutasi OPD 2019	142.215.950,00
	Pendapatan hibah	0,00
	Total mutasi penambahan	647.202.240.574,00
Mutasi pengurangan	Koreksi opd/ koreksi permendagri 108/2016	(3.333.831.579,00)
	Koreksi belanja modal	(33.300.885.181,00)
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi aset tetap	(139.485.000,00)
	Mutasi OPD 2019	(142.215.950,00)
	Penghapusan	(395.783.500,00)
	Total mutasi pengurangan	(37.312.201.210,00)
<i>Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019</i>		<i>9.313.180.517.291,00</i>

4.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp 280.183.866.534,59 **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp279.369.197.535,00

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp280.183.866.534,59 dan Rp279.369.197.535,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Dinas Pendidikan	137.593.335.693,59	138.766.288.826,00
Dinas Kesehatan	68.100.000,00	68.100.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	248.503.500,00	248.503.500,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	4.119.946.694,00	2.845.555.095,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	15.938.773.538,00	15.938.773.538,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.278.147.000,00	23.291.417.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	766.868.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
Dinas Sosial	25.955.250,00	25.955.250,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.581.974.520,00	2.010.411.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	469.752.520,00	3.344.357.520,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.427.294,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	54.270.000,00	54.270.000,00
Dinas Perhubungan	2.809.958.000,00	2.173.090.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.960.000,00	960.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	83.800.000,00	88.248.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	18.280.200,00	633.157.450,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.183.709.000,00	8.183.162.610,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.083.005.000,00	3.229.705.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.173.917.725,00	4.095.037.725,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8.083.435.140,00	6.595.277.406,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.096.485.000,00	2.096.485.000,00
Dinas Perkebunan	1.654.519.411,00	1.916.319.411,00
Dinas Kehutanan	1.444.177.500,00	1.444.177.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	159.520.500,00	159.520.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	133.717.145,00	102.200.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	1.784.420.288,00	969.396.188,00
Biro Pemerintahan Umum	1.142.598.000,00	1.124.595.000,00
Biro Organisasi	56.968.949,00	56.968.949,00
Biro Hukum	5.476.100,00	5.476.100,00
Biro Humas Keprotokolan	0,00	17.410.000,00
Sekretariat DPRD	3.238.016.750,00	3.464.271.650,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	380.162.706,00	376.612.706,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.562.445.575,00	20.805.575,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.839.000,00	20.839.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	56.731.591.456,00	55.727.283.456,00
Badan Kepegawaian Daerah	29.570.000,00	29.570.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.138.680,00	171.895.680,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.600.400,00	13.600.400,00
Total Aset Tetap Lainnya	280.183.866.534,59	279.369.197.535,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 18.

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2019		279.369.197.535,00
Mutasi Penambahan	Koreksi OPD/ Koreksi Permendagri 108/2016	4.285.444.087,60



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

	Belanja Modal 2019	109.033.381.385,00
	Koreksi Belanja Modal	4.445.093.020,00
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2019	3.395.411.619,00
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	196.968.000,00
	Mutasi OPD 2019	2.803.440.000,00
	Pendapatan Hibah	0,00
	Ekstrakomtable 2019	0,00
	Total Mutasi Penambahan	124.159.738.111,60
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD/ Koreksi Permendagri 108/2016	(21.490.519.850,01)
	Mutasi ke Persediaan	(969.936.040,00)
	Koreksi Belanja Modal	(24.401.621.657,00)
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	0,00
	Mutasi OPD 2019	(261.800.000,00)
	Penghapusan	0,00
	Ekstrakomtable 2019	(76.221.191.565,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(123.345.069.112,01)
	<i>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya 2019</i>	<i>280.183.866.534,59</i>

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp36.835.367.272,30	Rp70.425.861.228,00

Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp36.835.367.272,30 dan Rp70.425.861.228,00. Rincian KDP berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Dinas Pendidikan	17.315.410.641,00	15.560.775.744,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	10.952.440.957,00	10.952.440.957,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	4.371.515.674,30	9.660.106.827,00
Biro Umum dan Perlengkapan	4.196.000.000,00	4.196.000.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	30.056.537.700,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.835.367.272,30	70.425.861.228,00

Jumlah KDP berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	KDP Gedung dan Bangunan	KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan	<i>31 Desember 2019 Audited</i>
Dinas Pendidikan	17.315.410.641,00	0,00	<i>17.315.410.641,00</i>
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	0,00	10.952.440.957,00	<i>10.952.440.957,00</i>
Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	4.371.515.674,30	<i>4.371.515.674,30</i>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Biro Umum dan Perlengkapan	4.196.000.000,00	0,00	4.196.000.000,00
<i>Total</i>	<i>21.511.410.641,00</i>	<i>15.323.956.631,30</i>	<i>36.835.367.272,30</i>

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 19.

Saldo Awal KDP TA 2019		70.425.861.228,00
Mutasi Penambahan	Koreksi Belanja Modal	4.111.699.546,00
	Hutang	259.816.128,30
	Reklasifikasi Aset Tetap	1.754.634.897,00
	Total Mutasi Penambahan	6.126.150.571,30
Mutasi Pengurangan	Reklasifikasi Aset Tetap	(39.716.644.527,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(39.716.644.527,00)
<i>Saldo Akhir KDP TA 2019</i>		<i>36.835.367.272,30</i>

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(Rp10.439.394.849.093,80)	(Rp8.073.896.531.671,00)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan KDP. Akumulasi Penyusutan tahun per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp10.439.394.849.093,80 dan Rp8.073.896.531.671,00. Ringkasan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Peralatan Dan Mesin	(2.015.621.168.009,13)	(1.657.136.851.878,00)
Gedung Dan Bangunan	(1.253.092.014.576,66)	(1.081.267.264.093,00)
Jalan,Irigasi Dan Jaringan	(7.162.050.903.451,16)	(5.317.109.682.460,00)
Aset Tetap Lainnya	(8.630.763.056,83)	(18.382.733.240,00)
<i>Total Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(10.439.394.849.093,80)</i>	<i>(8.073.896.531.671,00)</i>

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.5.1.4 Aset Lainnya	Rp1.773.643.132.538,79	Rp1.776.286.090.106,81

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.773.643.132.538,79 dan Rp1.776.286.090.106,81 terdiri dari:



Tabel 77 Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Aset Lainnya	
	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Tagihan Jangka Panjang	2.379.731.724,00	2.493.287.724,00
Aset Tidak Berwujud	15.021.588.915,00	10.419.524.473,00
Aset Lain-lain	1.756.241.811.899,79	1.763.373.277.909,81
Total Aset Lainnya	1.773.643.132.538,79	1.776.286.090.106,81

Rincian lebih lanjut dari saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.379.731.724,00 dan Rp2.493.287.724,00 terdiri dari:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Tagihan Penjualan Angsuran		
Angsuran Penjualan Tanah Pemprov pada BPKAD	896.043.825,00	1.009.599.825,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Daerah	1.483.687.899,00	1.483.687.899,00
<i>Saldo Tagihan Jangka Panjang</i>	<i>2.379.731.724,00</i>	<i>2.493.287.724,00</i>

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD adalah pembayaran angsuran penjualan tanah eks PRPTE Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Sumatera Utara. Keterangan dapat dilihat pada Lampiran 11.

Ringkasan perhitungan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Tanah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 2018	1.009.599.825,00
Bagian Lancar 2019	(113.556.000,00)
<i>Tagihan Penjualan Angsuran 2019</i>	<i>896.043.825,00</i>

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah - SKPKD

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masih pada angka yang sama sebesar Rp1.483.687.899,00 merupakan tagihan akibat adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR), yang akan jatuh tempo setelah tahun 2017 atau lebih dari satu tahun terhitung dari tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

1. Musleh	9.749.999,00
2. Drs.Gunadi Napitupulu	23.800.000,00
3. Drs.Bonar Lumban Gaol	20.000.000,00
4. Zainuddin Syah Lubis	1.426.000,00
5. Bendahara Biro Bina Sosial	1.428.711.900,00
<i>Jumlah</i>	<i>1.483.687.899,00</i>

Berikut penjelasan lebih lanjut:

- Tuntutan ganti rugi kepada Musleh merupakan ketekoran kas karena penggunaan uang penerimaan/pendapatan RSUD Pirngadi. Pada waktu itu yang bersangkutan sebagai Bendaharawan Khusus Penerimaan.
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Gunadi Napitupulu mantan PNS pada Biro Hukum SetdaprovSU merupakan kerugian daerah karena pembebasan tanah pertapakan Sekolah Dasar Negeri Nomor 173525 pada tahun 1995 di Kabupaten Tapanuli Utara (Kab.Tobasa).
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Bonar Lumban Gaol Cs. merupakan kerugian daerah atas hilangnya kendaraan dinas milik Kantor PDE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, merk Toyota Kijang Standar (SX) BK785 H pada tanggal 7 Februari 2000.
- Tuntutan ganti rugi kepada Zainuddin Syah Lubis merupakan kerugian daerah atas kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha pada tahun 1993.
- Tuntutan ganti rugi kepada Sdr. Nurintan (Bendaharawan Proyek Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2013 pada Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.428.711.900,00 adalah merupakan kerugian daerah atas dana proyek yang belum dipertanggungjawabkan. Terhadap permasalahan Sdr.Nurintan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan No:1.814/Pid.B/2004/PN-Mdn tanggal 11 November 2004, yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 150.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/609/2005 tanggal 21 Maret 2005, menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdr. Nurintan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1.428.711.900,00 kepada Sdr.Nurintan oleh Tim TP/TGR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dalam proses.

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp15.021.588.915,00 dan Rp10.419.524.473,00. Nilai aset tidak berwujud merupakan nilai netto yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud	60.000.997.720,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(44.979.408.805,00)
Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud	15.021.588.915,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Berikut ini rekapitulasi aset tak berwujud pada SKPD:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Dinas Pendidikan	8.449.011.025,00	826.178.251,00
Dinas Kesehatan	248.164.000,00	321.020.305,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	98.314.286,00	126.357.144,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	6.857.143,00	13.714.286,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	21.175.000,00	80.918.576,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	6.302.214,00	23.041.857,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.036.762.145,00	1.164.598.145,00
Dinas Sosial	12.194.286,00	18.291.429,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.428.572,00	76.785.716,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	165.718.286,00	11.185.715,00
Dinas Lingkungan Hidup	35.330.623,00	70.661.250,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	181.418.542,00	226.773.176,00
Dinas Perhubungan	261.683.571,00	228.292.861,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.142.858,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	219.972.857,00	328.784.825,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	0,00	37.803.858,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	42.110.144,00	56.146.858,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.314.286,00	28.628.572,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	5.657.143,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	28.521.430,00	57.042.860,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	42.000.000,00	70.000.000,00
Dinas Kehutanan	63.300.000,00	84.400.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	31.596.429,00	56.278.575,00
Biro Pemerintahan Umum	27.430.638,00	54.861.276,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	707.143,00	1.628.286,00
Inspektorat Daerah Provinsi	406.398.571,00	364.060.004,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	27.771.429,00	55.542.858,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	356.604.723,00	613.177.531,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.154.594.429,00	5.362.378.827,00
Badan Kepegawaian Daerah	19.071.429,00	38.142.858,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.835.714,00	15.028.573,00
TOTAL	15.021.588.915,00	10.419.524.473,00

c. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.756.241.811.899,79 dan Rp1.763.373.277.909,81. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>Aset Lain-lain</i>	<i>Per 31 Desember 2019</i>	<i>Per 31 Desember 2018</i>
Aset Non Operasional	1.422.742.355.254,00	1.429.792.079.254,00
Kondisi Rusak berat	328.586.380.917,79	317.345.759.484,79
Dan Lain-Lain	4.913.075.728,00	16.235.439.171,02



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

<i>Aset Lain-lain</i>	<i>Per 31 Desember 2019</i>	<i>Per 31 Desember 2018</i>
<i>Total Aset Lain – lain</i>	<i>1.756.241.811.899,79</i>	<i>1.763.373.277.909,81</i>

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 Rp1.756.241.811.899,79 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

SKPD	Aset Non Operasional	Kondisi Rusak berat	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lainnya
Dinas Pendidikan	43.007.374.000,00	125.057.641.373,79	0,00	177.337.378.816,81
Dinas Kesehatan	33.571.084.413,00	52.007.032.266,00	0,00	85.578.116.679,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	0,00	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	19.635.613.541,00	4.474.649.255,00	0,00	24.110.262.796,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.187.564.919.691,00	10.920.216.909,00	0,00	1.198.485.136.600,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	42.461.009.647,00	1.725.189.299,00	0,00	44.186.198.946,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.780.123.681,00	0,00	1.780.123.681,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	5.706.326.803,00	0,00	5.706.326.803,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.841.375,00	1.007.370.900,00	0,00	1.077.212.275,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	8.858.447.350,00	0,00	8.858.447.350,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	576.403.300,00	0,00	576.403.300,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	139.521.000,00	5.872.838.350,00	0,00	6.012.359.350,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.161.816.325,00	310.200.000,00	0,00	9.472.016.325,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	398.555.000,00	0,00	398.555.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	8.807.183.670,00	0,00	8.807.183.670,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.676.685.062,00	0,00	2.676.685.062,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	133.498.900,00	0,00	133.498.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	488.140.000,00	1.083.439.985,00	0,00	1.571.579.985,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.023.000,00	611.067.153,00	0,00	628.090.153,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	9.950.003.588,00	0,00	9.950.003.588,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	2.519.510.266,00	0,00	2.519.510.266,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	9.448.245.903,00	0,00	9.448.245.903,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	249.013.000,00	3.756.592.334,00	0,00	4.005.605.334,00
Dinas Perkebunan	0,00	7.090.873.750,00	0,00	7.090.873.750,00
Dinas Kehutanan	0,00	1.927.208.500,00	0,00	1.927.208.500,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

SKPD	Aset Non Operasional	Kondisi Rusak berat	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lainnya
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.596.449.000,00	7.863.614.675,00	0,00	10.460.063.675,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	4.299.189.865,00	0,00	4.299.189.865,00
Biro Umum dan Perlengkapan	256.220.000,00	9.511.000,00	0,00	265.731.000,00
Biro Pemerintahan Umum	0,00	808.936.010,00	0,00	808.936.010,00
Biro Bina Perekonomian	0,00	692.697.000,00	0,00	692.697.000,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	0,00	639.527.500,00	0,00	639.527.500,00
Biro Organisasi	0,00	166.677.300,00	0,00	166.677.300,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	0,00	133.041.870,00	0,00	133.041.870,00
Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.377.098.000,00	0,00	1.377.098.000,00
Biro Hukum	0,00	202.208.800,00	0,00	202.208.800,00
Biro Humas Keprotokolan	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	3.597.573.540,00	0,00	3.597.573.540,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	0,00	165.580.000,00	0,00	165.580.000,00
Inspektorat Daerah Provinsi	0,00	1.854.886.327,00	0,00	1.854.886.327,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	80.350.000,00	0,00	80.350.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83.462.752.186,00	12.398.553.910,00	4.913.075.728,00	100.774.381.824,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	22.131.545.150,00	0,00	22.131.545.150,00
Badan Kepegawaian Daerah	61.578.076,00	1.930.714.600,00	0,00	1.992.292.676,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.070.597.422,00	0,00	2.070.597.422,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.432.574.351,00	0,00	1.432.574.351,00
Jumlah	1.422.742.355.254,00	328.586.380.917,79	4.913.075.728,00	1.756.241.811.899,79

Keterangan untuk Aset Lain-lain pada kolom Dan Lain-lain sebesar Rp14.185.439.171,02 pada table di atas adalah sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp9.272.363.443,02. Aset lain-lain tersebut bersaldo nihil pada tahun 2019 karena telah dicatat pada tahun 2018 sehingga saldo 2018 terlalu besar, dikoreksi pada tahun 2019. Saldo tahun 2018 sebesar Rp9.272.363.443,02 tersebut terdiri dari (dalam Rupiah):

Denda keterlambatan	160.057.482
Aset penyerahan P2D bidang Pendidikan 10 kab/kota Kondisi rusak berat maupun tidak ditemukan	9.121.321.257
Hasil verifikasi faktual Tahap II merupakan aset ekstrakomptable	(9.015.296)
	<u>9.272.363.443</u>

2. Aset Lain-lain pada Dinas Koperasi dan UKM per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp2.050.000.000,00. Aset lain-lain tersebut bersaldo nihil pada tahun 2019 karena Saldo dana penjaminan tersebut telah disetor



kembali ke Kas Daerah pada tanggal 9 September 2019 sesuai dengan STS Nomor : 120040401001076677529. Saldo pada tahun 2018 sebesar Rp2.050.000.000,00 merupakan dana penjamin kredit yang ditempatkan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada PT Bank Sumut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/1906/KF-UKM/2007 antara Dinas Koperasi dan UKM, PT Bank Sumut dan PT Asuransi Kredit Indonesia.

3. Aset Lain-Lain pada BPKAD sebesar Rp4.913.075.728,00 terdiri dari Aset Lain-lain sebesar Rp2.138.852.500,00 merupakan Reklas dari Aset Tetap. Dan Aset Lain-lain sebesar Rp2.774.223.228,00 merupakan Hak Tagih kepada KPPN TA.2010 sebesar Rp94.747.729,00 dan Pajak Pusat yang tidak disetor Bendahara sebesar Rp2.679.475.499,00.

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
4.5.2 Kewajiban	Rp481.658.220.742,27	Rp1.598.701.057.786,59

Pos kewajiban ini merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar yang terdiri dari:

Tabel 79 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12.054.738,00	11.028.400,00
Pendapatan diterima dimuka	1.177.181.089,97	370.207.971,46
Utang beban	424.561.718.638,00	13.701.586.000,30
Utang Jangka Pendek Lainnya	55.907.266.276,30	1.584.618.235.414,83
Jumlah Kewajiban	481.658.220.742,27	1.598.701.057.786,59

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
4.5.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp12.054.738,00	Rp11.028.400,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang PFK pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp12.054.738,00 dan Rp11.028.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2019
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	0,00	1.026.338,00	0,00	1.026.338,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.028.400,00	0,00	0,00	11.028.400,00
Jumlah	11.028.400,00	1.026.338,00	0,00	12.054.738,00



	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
4.5.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka	Rp1.177.181.089,97	Rp370.207.971,46

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.177.181.089,97 dan Rp370.207.971,46 terdiri dari (dalam Rupiah):

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	679.370.066,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	497.811.023,97	370.207.971,46
<i>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</i>	<i>1.177.181.089,97</i>	<i>370.207.971,46</i>

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III menampung kelebihan pembayaran deviden oleh PT. Dhirga Surya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp679.370.066,00. Ringkasan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan pembayaran deviden tahun 2015	203.258.898
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2016	139.778.892
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2017	190.000.000
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2018	150.000.000
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2019	145.000.000
	<u>828.037.790</u>
Deviden perhitungan Laporan Keuangan 2018	(148.667.724)
<i>Jumlah Kelebihan pembayaran deviden</i>	<i>679.370.066</i>

Pendapatan Diterima Dimuka lainnya

Saldo Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp497.811.023,97 sebesar Rp370.207.971,46. Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa:

- i. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut, gedung sayap kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai SK Gubernur Nomor 821.28/2272/2019 tanggal 9 Agustus 2019. Pembayaran oleh PT Bank Sumut telah diterima pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp377.055.000,00 untuk masa sewa lima tahun dihitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 s.d. 21 Agustus 2023.
- ii. Penerimaan sewa dari PT Indosat, Lantai XII Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/204/KPTS/2016 tanggal 22 Maret 2016. Telah diterima sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 15 Juli 2016, untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d. 22 Maret 2021.



- iii. Penerimaan sewa dari PT Pelindo I, Tanah dan Bangunan Jl. Gunung Krakatau No. 112 Medan, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2016 tanggal 13 September 2016. Telah diterima sebesar Rp360.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 13 September 2016 s.d 13 September 2021.
- iv. Penerimaan sewa dari PT Sinar Belintang, Tanah/lahan Milik Pemprovsum di Jalan TPI Bagan Deli Belawan Lingk.III, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/550/KPTS/2016 tanggal 13 September 2016. Telah diterima sebesar Rp18.000.000,00 untuk masa sewa 3 tahun dihitung sejak tanggal 13 September 2016 s.d 13 September 2019.
- v. Penerimaan sewa dari PT Atra Kana Perkasa, Tanah di Jalan Soekarno Hatta KM 21 Nomor 45 Kota Binjai, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/72/KPTS/2014 tanggal 20 Januari 2014. Telah diterima sebesar Rp344.400.000,00 pada tanggal 25 Februari 2014 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 27 Januari 2014 s.d 27 Januari 2019.
- vi. Penerimaan sewa dari Yayasan Kasih Arga Putra, Tanah dan Bangunan Jl. Merdeka 22 Dolok Sanggul, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/91/KPTS/2018 tanggal 22 Februari 2018. Senilai Rp51.187.500,00 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 22 Februari 2018 s.d 22 Februari 2023.
- vii. Penerimaan sewa dari Kantin Dharma Wanita Bappeda Provsu Jl. Diponegoro No. 21A sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 028/9864 tanggal 1 Oktober 2018. Senilai Rp4.800.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d 1 Oktober 2020.
- viii. Penerimaan sewa dari Kantin Inspektorat Provsu Jl. K.H.Wahid Hasym No.8 Medan, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 028/9863 tanggal 1 Oktober 2018. Senilai Rp4.800.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d 1 Oktober 2020.
- ix. Penerimaan sewa dari Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. M. Ildrem Medan Jl.Letjend.Jamin Ginting KM.10 Jl.Tali Air No.21 Medan (Luas bangunan 112 M2), sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 011/9899/2018. Senilai Rp13.440.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d 1 Oktober 2020. Pembayaran sewa masih 1 tahun sampai dengan Oktober 2019.
- x. Telah habis masa kontrak dengan PT. Telekomunikasi Selular, sewa Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Lantai XII sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/409/KPTS/2013. Surat persetujuan perpanjangan sewa sedang dalam proses.



- xi. Telah habis masa kontrak, penerimaan sewa dari PT Pembangunan Prasarana sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/205/KPTS/2016 tanggal 22 Maret 2016 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d 22 Maret 2018.
- xii. Telah habis masa kontrak, sewa dari Kantin Disnaker Nurfatni Tnjg sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/483/KPTS/2016 tanggal 29 Juli 2016, untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016 s.d 29 Juli 2018 (Menunggu 14 bulan).
- xiii. Telah habis masa kontrak, penerimaan sewa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provsu Jl. Alfalah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/515/KPTS/2016 tanggal 2 September 2016. Masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 2 September 2016 s.d 2 September 2018.
- xiv. Sewa Bangunan Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Lantai I Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan kepada PT. Bank Sumut untuk penempatan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai SK Gubsu No.188.44/744/KPTS/2017 Tanggal 27-12-2017 periode 27 Februari 2017 s.d 27 Februari 2022 senilai Rp75.000.000,00 (belum menyelesaikan pembayaran). SK tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan SK Gubsu No.188.44/758/KPTS/2019 Tgl.2-12-2019.

Tabel 81 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018	Mutasi		Per 31 Desember 2019
		Penambahan	Pengurangan	
PT Bank Sumut	0,00	377.055.000,00	(100.548.000,00)	276.507.000,00
PT Indosat	110.958.904,11	0,00	(50.000.000,00)	60.958.904,11
PT.PELINDO 1	194.301.369,86	0,00	(72.000.000,00)	122.301.369,86
PT.Sinar Belitang	4.191.780,82	0,00	(4.191.780,82)	0,00
PT Atra Kana Perkasa	4.974.666,67	0,00	(4.974.666,67)	0,00
Yayasan Kasih Arga Putra	42.656.250,00	0,00	(10.237.500,00)	32.418.750,00
Gedung Kantin Bappeda	4.200.000,00	0,00	(2.400.000,00)	1.800.000,00
Gedung Kantin Inspektorat	8.925.000,00	0,00	(5.100.000,00)	3.825.000,00
Jumlah	370.207.971,46	377.055.000,00	(249.451.947,49)	497.811.023,97

4.5.2.3 Utang Beban 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp424.561.718.638,00 **Rp13.701.586.000,30**

Utang Beban per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp424.561.718.638,00 dan Rp13.701.586.000,30. Utang beban timbul karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima hak atas barang/jasa, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, dengan rincian di bawah ini. Rincian Hutang Beban masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 21.



Tabel 82 Rincian Utang Beban Per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Utang beban Telepon	89.715.440,00	494.308.928,00
2	Utang beban Air	212.595.709,00	282.736.649,30
3	Utang beban Listrik	1.210.388.683,00	1.327.783.506,00
4	Utang beban obat	8.144.621.319,00	8.972.013.812,00
5	Utang honor tenaga ahli	777.042.260,00	121.131.025,00
6	Honor pegawai honorer	1.501.783.500,00	2.475.033.500,00
7	Surat tanda nomor kendaraan	18.094.520,00	28.578.580,00
8	Cetak	611.937.500,00	0,00
9	Transfer	411.995.539.707,00	0,00
	Jumlah Utang Beban	424.561.718.638,00	13.701.586.000,30

Utang Beban Transfer merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas Dan Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Laporan Keuangan tahun 2018 dicatat sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sumatera Utara Bab VI Pasal 41 ayat 10 menyatakan bahwa penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per bulan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Utang Beban Transfer sebesar Rp411.995.539.707,00 dapat dilihat pada Lampiran 22. Rekap menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Penetapan Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil	Saldo Utang Bagi Hasil Tahun 2019
1. Kota Medan	695.139.267.949,00	564.496.591.438,00	130.642.676.511,00
2. Kota Binjai	36.447.097.337,00	30.588.517.829,00	5.858.579.508,00
3. Kota Tebing Tinggi	32.771.336.055,00	24.506.712.475,00	8.264.623.580,00
4. Kota Pematang Siantar	40.802.071.380,00	33.511.716.557,00	7.290.354.823,00
5. Kota Sibolga	17.918.510.710,00	15.136.124.891,00	2.782.385.819,00
6. Kota Tanjung Balai	24.193.535.685,00	21.575.888.040,00	2.617.647.645,00
7. Kab. Batubara	52.105.607.229,00	40.304.441.089,00	11.801.166.140,00
8. Kab. Asahan	92.344.552.437,00	63.562.075.087,00	28.782.477.350,00
9. Kab. Dairi	34.799.489.717,00	31.158.361.325,00	3.641.128.392,00
10. Kab. Deli Serdang	203.994.821.770,00	167.837.100.033,00	36.157.721.737,00
11. Kab. Serdang Bedagai	62.694.379.310,00	53.101.891.545,00	9.592.487.765,00
12. Kab. Karo	52.230.947.819,00	42.424.565.841,00	9.806.381.978,00
13. Kab. Labuhan Batu	62.064.485.805,00	47.451.461.309,00	14.613.024.496,00
14. Kab. Langkat	93.896.867.167,00	77.761.588.278,00	16.135.278.889,00
15. Kab. Mandailing Natal	51.886.009.897,00	45.354.978.173,00	6.531.031.724,00
16. Kab. Nias	19.377.094.662,00	17.096.469.264,00	2.280.625.398,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

17. Kab. Simalungun	93.183.786.479,00	73.712.753.629,00	19.471.032.850,00
18. Kab. Tapanuli Tengah	41.539.314.836,00	35.067.644.420,00	6.471.670.416,00
19. Kab. Tapanuli Selatan	45.665.128.747,00	40.797.866.076,00	4.867.262.671,00
20. Kab. Tapanuli Utara	46.633.810.683,00	35.750.842.064,00	10.882.968.619,00
21. Kab. Humbang	31.597.981.269,00	26.057.659.705,00	5.540.321.564,00
22. Kab. Toba Samosir	42.492.718.781,00	29.782.469.765,00	12.710.249.016,00
23. Kab. Samosir	24.466.743.415,00	18.067.070.742,00	6.399.672.673,00
24. Kota Padangsidempuan	27.896.267.070,00	22.153.417.161,00	5.742.849.909,00
25. Kab. Padang Lawas	36.566.393.690,00	28.941.488.071,00	7.624.905.619,00
26. Kab. Padang Lawas	37.463.495.932,00	29.882.246.909,00	7.581.249.023,00
27. Kab. Pakpak Bharat	13.630.662.490,00	11.653.698.650,00	1.976.963.840,00
28. Kab. Nias Selatan	33.081.266.042,00	28.304.823.022,00	4.776.443.020,00
29. Kab. Labuhanbatu Utara	37.889.499.846,00	32.223.458.936,00	5.666.040.910,00
30. Kab. Labuhanbatu	41.957.153.281,00	36.016.560.268,00	5.940.593.013,00
31. Kab. Nias Utara	18.538.097.980,00	14.136.710.693,00	4.401.387.287,00
32. Kab. Nias Barat	14.608.685.304,00	11.901.060.970,00	2.707.624.334,00
33. Kota Gunungsitoli	20.880.131.182,00	18.443.417.994,00	2.436.713.188,00
<i>Total</i>	<i>2.180.757.211.956,00</i>	<i>1.768.761.672.249,00</i>	<i>411.995.539.707,00</i>

4.5.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp55.907.266.276,30	Rp1.584.618.235.414,83

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp55.907.266.276,30 dan Rp1.584.618.235.414,83 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan di atas, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 83 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.	Rumah Sakit Umum Haji Medan	10.608.548.435,00	574.634.535,00
b.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	6.207.078.342,00	6.207.078.342,00
c.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	259.816.128,30	0,00
d.	Biro Umum dan Perlengkapan - Sekretariat Daerah	532.497.260,00	242.416.000,00
e.	SKPKD	37.010.986.823,00	1.576.893.186.537,83
f.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	700.920.000,00
g.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1.288.339.288,00	0,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	55.907.266.276,30	1.584.618.235.414,83

a. Rumah Sakit Umum Haji Medan

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp10.608.548.435,00 terdiri dari (dalam rupiah):



Uang Muka Pasien yang ada di Kas BLUD	740.025.035,00
Utang Dana Talangan Bank Syariah Mandiri yang dibayar tahun 2020	9.868.523.400,00
<i>Jumlah Utang Jangka Pendek RSUD Haji Medan</i>	<i>10.608.548.435,00</i>

b. Dinas Bina Marga

Utang kontrak tahun jamak sebesar Rp6.207.078.342,00 merupakan nilai sisa kontrak dari proyek tahun jamak tahun 2007 s.d 2009 pada Dinas Bina Marga yang telah selesai dikerjakan, dengan uraian sebagai berikut:

- i. Pekerjaan Peningkatan Jalan Binjai-Timbang Lawang di Kabupaten Langkat, kontrak Nomor 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp46.659.161.000,00. Sisa Kontrak yang belum dibayar sebesar Rp522.695.933,00.
- ii. Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan di Kabupaten Samosir, kontrak Nomor 602/KPA-MY.PJ/147/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp44.092.376.692,00. Sisa kontrak yang belum dibayar sebesar Rp5.684.382.409,00

c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Utang pekerjaan belum selesai sebesar Rp259.816.128,30 terdiri dari:

- i. Koreksi atas pengakuan utang paket pekerjaan pengamanan sungai Sei Bingai Binjai, MC per 31 Desember 2019 progres fisik 60% atau Rp872.245.042,20 sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp799.557.955,00 sehingga terdapat utang atas progres fisik yang sudah dikerjakan sebesar Rp72.687.087,20.
- ii. Koreksi atas pengakuan utang paket pekerjaan pengamanan sungai Sei Batang Serangan langkat, MC per 31 Desember 2019 progres fisik 95% atau Rp1.030.755.517,60 sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp976.505.227,00 sehingga terdapat utang atas progres fisik yang sudah dikerjakan sebesar Rp54.250.290,60.
- iii. Koreksi atas pengakuan utang paket pekerjaan penataan pemukiman strategis pada PKN Deli Serdang, MC per 31 Desember 2019 progres fisik 92,886% atau Rp2.468.515.114,50 sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp2.335.636.364,00 sehingga terdapat utang atas progres fisik yang sudah dikerjakan sebesar Rp132.878.750,50.

d. Biro Umum dan Perlengkapan

Utang jangka pendek lainnya pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp532.497.260,00 terdiri dari:

- i. Koreksi BPK tahun 2018 atas penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya yang merupakan pekerjaan Pengadaan Lift Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 yang sudah selesai tahun 2017 dan sudah digunakan per 31 Desember 2018 tetapi belum selesai dibayar sebesar Rp218.000.000,00
- ii. Pekerjaan penataan kolam, taman dan tempat parkir Rumah Dinas Jabatan Jl. Sudirman no. 41 Medan. Sesuai kontrak nomor 027/02/57.02/SP/WAT/2018



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

sebesar Rp4.470.490.000,00 sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.801.704.696,00 belum terbayar Rp314.497.260,00

e. SKPKD

Saldo utang Jangka Pendek lainnya SKPKD per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp37.010.986.823,00 dan Rp1.576.893.186.537,83 merupakan utang SKPKD yang terdiri atas (dalam Rupiah):

Utang SKPKD	31 Desember 2019	31 Desember 2018
i. Utang bagi hasil pajak daerah	0,00	1.500.716.820.298,83
ii. Utang dana BOS	30.818.180.181,00	76.176.366.239,00
iii. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan	6.192.806.642,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>37.010.986.823,00</i>	<i>1.576.893.186.537,83</i>

i. Utang Bagi Hasil Pajak Daerah

Saldo Utang Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.500.716.820.298,83 telah dibayarkan pada tahun 2019 ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp.807.644.059.834,- telah dibayarkan kepada 33 Kabupaten/ Kota pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai dengan SP2D nomor 60 s.d 92.
2. Rp.100.568.704.874,- telah dibayarkan kepada Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 sesuai dengan SP2D nomor 103.
3. Rp.120.070.943.020,- telah dibayarkan kepada 30 Kabupaten/ Kota kecuali Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba Samosir, Kab. Nias Barat pada tanggal 7 Januari 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 156 s.d 185.
4. Rp.286.055.572.321,- telah dibayarkan kepada 32 Kabupaten/ Kota kecuali Kab. Nias Barat pada tanggal 21 Februari 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 222 s.d 253.
5. Rp.173.408.150.549,- telah dibayarkan kepada 33 Kabupaten/ Kota pada tanggal 26 Februari 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 265 s.d 297.
6. Rp12.969.389.700,83 Kurang Salur Bagi Hasil Triwulan IV TA 2017 akibat pemotongan Insentif 3% telah dibayarkan kepada 33 Kabupaten/ Kota pada tanggal 29 April 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 1064 s.d 1096

Sehingga total keseluruhan hutang sebesar Rp1.500.716.820.298,83 telah selesai dibayarkan pada tahun 2019 ini.

Untuk tahun 2019 Utang Bagi Hasil Pajak Daerah bersaldo nihil karena saldo hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas Dan Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dicatat pada akun Utang Beban.

ii. Utang Dana Bos

Utang dana BOS per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp30.818.180.181,00 dan Rp76.176.366.239,00 merupakan sisa dana BOS pada Rekening Kas BUD yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran.



Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Utang Dana Bos per 31 Desember 2019 sebesar Rp30.818.180.181,00 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Reguler

Saldo Awal Dana Bos TA. 2019	76.176.366.239,00
Penerimaan Dana Bos TA. 2019	2.911.315.213.800,00
Penyaluran Dana Bos TA. 2019	(2.958.568.260.039,00)
Pengembalian Dana Bos TA. 2019	1.809.165.181,00
<i>Sisa Dana Bos TA. 2019</i>	<i>30.732.485.181,00</i>

Afirmasi

Saldo Awal Dana Bos TA. 2019	0,00
Penerimaan Dana Bos TA. 2019	231.625.000.000,00
Penyaluran Dana Bos TA. 2019	(231.624.000.000,00)
Pengembalian Dana Bos TA. 2019	0,00
<i>Sisa Dana Bos TA. 2019</i>	<i>1.000.000,00</i>

Kinerja

Saldo Awal Dana Bos TA. 2019	0,00
Penerimaan Dana Bos TA. 2019	92.302.695.000,00
Penyaluran Dana Bos TA. 2019	(92.218.000.000,00)
Pengembalian Dana Bos TA. 2019	0,00
<i>Sisa Dana Bos TA. 2019</i>	<i>84.695.000,00</i>

Total Dana BOS

Saldo Awal Dana Bos TA. 2019	76.176.366.239,00
Penerimaan Dana Bos TA. 2019	3.235.242.908.800,00
Penyaluran Dana Bos TA. 2019	(3.282.410.260.039,00)
Pengembalian Dana Bos TA. 2019	1.809.165.181,00
<i>Sisa Dana Bos TA. 2019</i>	<i>30.818.180.181,00</i>

iii. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp6.192.806.642,00 (Rincian lihat lampiran 17) merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

1. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	3.865.088.602,00
---	------------------



2. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	2.050.035.868,00
<i>Total Lebih Salur DBH Pajak</i>	<i>5.915.124.470,00</i>
3. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	216.000.000,00
4. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	53.101.543,00
5. DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	8.580.629,00
<i>Total Lebih Salur DBH SDA</i>	<i>277.682.172,00</i>
<i>Total Lebih Salur</i>	<i>6.192.806.642,00</i>

- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provsu
Pada tahun 2018 terdapat utang sebesar Rp700.920.000,00 atas Rumah relokasi pengungsi Sinabung di Kabupaten Karo yang belum diserahkan sehingga sampai dengan 31 Desember 2019 utang tersebut bersaldo Rp0,00.
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Terdapat Persediaan-Barang Diserahkan ke masyarakat yang belum dibayar kegiatan KRPL pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp1.288.339.288,00.

4.5.3 Ekuitas

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp18.134.943.216.807,25	Rp18.387.497.135.274,47

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp18.134.943.216.807,25 dan Rp18.387.497.135.274,47 dengan uraian sebagai berikut:

	<u>Per 31 Desember 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
Ekuitas Awal	18.387.497.135.274,47	18.644.275.684.185,86
Penyesuaian		
- Surplus/Defisit LO	355.676.348.486,92	17.907.710.338,66
- Koreksi Ekuitas lainnya	(608.230.266.954,16)	(274.686.259.250,05)
<i>Ekuitas Akhir</i>	<i>18.134.943.216.807,23</i>	<i>18.387.497.135.274,47</i>

Saldo Ekuitas akhir merupakan perhitungan dari ekuitas awal dikurang Defisit LO ditambah koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan Ekuitas Akhir TA 2019 dengan TA 2018 sebesar Rp18.134.943.216.807,23 dan Rp18.387.497.135.274,47 maka terjadi penurunan sebesar Rp252.553.918.467,24. Keterangan lebih lanjut mengenai rincian Koreksi Ekuitas lainnya dapat dilihat pada Lampiran 23.

4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.



Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah selama periode Tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar Rp740.567.199.560,94 yang berasal dari:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Saldo awal kas	975.840.502.146,19	832.429.227.070,22
Kenaikan bersih kas		
Aktivitas operasi	878.522.952.194,46	1.705.293.647.828,97
Aktivitas investasi	(1.249.514.293.636,40)	(1.564.464.517.053,00)
Aktivitas pendanaan	(283.844.753.000,00)	(0,00)
Aktivitas transitoris	(85.731.105.119,00)	2.582.144.300,00
Kenaikan/(penurunan) bersih	(740.567.199.560,94)	143.411.275.075,97
Saldo akhir kas	235.273.302.585,25	975.840.502.146,19

4.6.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp975.840.502.146,19 yang berasal dari saldo akhir kas per 31 Desember 2018.

4.6.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp878.522.952.194,46 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

4.6.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp1.249.514.293.636,40 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4.6.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp283.844.753.000,00. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pemerintah dalam penyertaan modal untuk penyehatan operasional perusahaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah melalui perusahaan daerah kepada masyarakat.



4.6.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas aktivitas transitoris adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang merupakan realisasi penerimaan perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan setara kas setelah dikurangi pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran setara kas.

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp85.731.105.119,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

4.6.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp336.597.738.158,25. Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Bank Sumut AC No.100.01.000623.0 sebesar Rp235.273.302.585,25 saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, saldo kas di bendahara pengeluaran bersih sebesar Rp132.639.557,00 (kas di bendahara pengeluaran Rp144.694.295,00 dikurang Utang PFK Rp12.054.738,00), saldo kas di bendahara BLUD sebesar Rp10.871.232.990,00 serta saldo akhir kas dibendahara BOS sebesar Rp90.320.563.026,00. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp336.597.738.158,25.



BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good government*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 secara keseluruhan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA




EDY RAHMAYADI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN

TABEL RINCIAN PERHITUNGAN PENDAPATAN LO

No	Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan				Pengurangan				Pendapatan LO
			Koreksi	Penambahan Piutang/ Pend. Diterima dimuka	Penamb. Kas Bend.	Akumulasi	Koreksi	Pelunasan Piutang/ Pengembalian Jaminan	Penyetor. Kas. Bend	Akumulasi	
PENDAPATAN PAJAK											
1	PKB	1,995,480,813,304.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,995,480,813,304.00
2	BBNKB	1,315,420,245,168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,315,420,245,168.00
3	PBBKB	889,959,158,091.00	-	85,847,939,239.00	-	85,847,939,239.00	-	86,455,905,864.00	-	86,455,905,864.00	889,351,191,466.00
4	Pajak Air Permukaan	62,420,420,198.00	-	2,464,935,129,136.00	-	2,464,935,129,136.00	-	1,884,564,797,481.00	-	1,884,564,797,481.00	642,790,751,853.00
5	Pajak Rokok	795,163,307,893.00	-	-	-	-	-	-	-	-	795,163,307,893.00
	Jumlah 1	5,058,443,944,654.00	-	2,550,783,068,375.00	-	2,550,783,068,375.00	-	1,971,020,703,345.00	-	1,971,020,703,345.00	5,638,206,309,684.00
PENDAPATAN RETRIBUSI											
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan										
	Dinas Kesehatan	7,000,761,450.00	-	994,459,735.00	-	994,459,735.00	-	2,069,059,259.00	-	2,069,059,259.00	5,926,161,926.00
	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	14,845,841,877.00	-	3,003,567,000.00	-	3,003,567,000.00	-	3,354,363,549.00	-	3,354,363,549.00	14,495,045,328.00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta										
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	303,282,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	303,282,500.00
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA										
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	443,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	443,500,000.00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan										
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500,000.00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah										
	Dinas Pendidikan	15,225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,225,000.00
	Dinas Kesehatan	442,084,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	442,084,000.00
	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	626,697,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	626,697,077.00
	Dinas Tenaga Kerja	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00
	Dinas Lingkungan Hidup	1,763,553,000.00	-	365,620,000.00	-	365,620,000.00	-	-	-	-	2,129,173,000.00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	112,589,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	112,589,000.00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	355,444,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	355,444,500.00
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	312,061,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	312,061,000.00
	Dinas Kehutanan	159,557,685.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,557,685.00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	736,850,000.00	-	-	-	-	-	377,055,000.00	-	377,055,000.00	359,795,000.00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125,589,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,589,000.00
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa										
	Dinas Kesehatan	11,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,050,000.00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,200,000.00
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	31,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,550,000.00
	Dinas Kehutanan	12,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600,000.00
	Biro Umum dan Perlengkapan	1,821,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,730,000.00
	Badan Penghubung Daerah Provinsi	452,475,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	452,475,000.00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga										
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1,647,605,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,647,605,250.00
	Dinas Kehutanan	159,065,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,065,000.00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah										
	Dinas Kelautan dan Perikanan	397,787,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	397,787,000.00
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,331,767,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,331,767,772.00
	Dinas Perkebunan	975,630,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	975,630,750.00
9	Retribusi Izin Trayek										
	Dinas Perhubungan	322,940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	322,940,000.00
10	Retribusi Izin Perikanan										
	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,151,613,102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,151,613,102.00
11	Retribusi Perpanjangan Izin Memepekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)										
	Dinas Tenaga Kerja	1,761,481,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,761,481,300.00
	Jumlah 2	38,408,031,263.00	-	4,363,646,735.00	-	4,363,646,735.00	-	5,800,477,808.00	-	5,800,477,808.00	36,971,200,190.00
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN											
1	PT. Perkebunan Sumatera Utara	2,706,000,000.00	18,520,423,387.87	-	18,520,423,387.87	-	-	-	-	-	21,226,423,387.87
2	PT. Bank Sumut	409,145,056,001.00	274,801,789,694.00	-	274,801,789,694.00	-	145,374,455,747.67	-	-	-	538,572,389,947.33
3	PT. Diriga Surya Sumatera Utara	145,000,000.00	247,779,540.00	-	247,779,540.00	-	145,000,000.00	-	-	-	392,779,540.00
4	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	300,000,000.00	6,869,422,262.14	-	6,869,422,262.14	-	-	-	-	-	7,169,422,262.14
5	PDAM Tirtanadi	20,000,000,000.00	51,200,340,382.00	-	51,200,340,382.00	-	-	-	-	-	51,200,340,382.00
6	PT. Kawasan Industri Medan	3,819,291,087.00	19,295,872,698.00	-	19,295,872,698.00	-	-	-	-	-	23,115,163,785.00

No	Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan				Pengurangan				Pendapatan LO	
			Koreksi	Penambahan Piutang/ Pend. Diterima dimuka	Penamb. Kas Bend.	Akumulasi	Koreksi	Pelunasan Piutang/ Pengembalian Jaminan	Penyetor. Kas. Bend.	Akumulasi		
7	PT. Asuransi Bangun Askrida	169,595,681.00				-					-	169,595,681.00
	Jumlah 3	436,284,942,769.00	370,935,627,964.01	-	-	370,935,627,964.01	-	145,519,455,747.67	-	145,519,455,747.67	-	661,701,114,985.34
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH											
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan BPKAD	86,190,000.00										86,190,000.00
2	Penerimaan Jasa Giro Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	33,154,847,351.00										33,154,847,351.00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	2,269,050,882.82										2,269,050,882.82
4	Pendapatan Denda Pajak Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	70,314,829,731.00										70,314,829,731.00
5	Pendapatan Dari Pengembalian BPKAD	52,181,532,629.49						2,050,000,000.00		2,050,000,000.00		50,131,532,629.49
6	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan BPKAD	326,128,496.00						242,770,346.00		242,770,346.00		83,358,150.00
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	-		249,451,947.49		249,451,947.49						249,451,947.49
8	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Haji Daerah	66,750,389,275.00		14,585,793,804.00		14,585,793,804.00		19,620,770,636.00		19,620,770,636.00		61,715,412,443.00
9	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,050,525,000.00										3,050,525,000.00
	Jumlah 4	228,133,493,365.31	-	14,835,245,751.49	-	14,835,245,751.49	-	21,913,540,982.00	-	21,913,540,982.00	-	221,055,198,134.80
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT											
1	Dana Bagi Hasil Pajak	322,412,067,550.00		91,410,092,227.00		91,410,092,227.00		5,915,124,470.00		5,915,124,470.00		407,907,035,307.00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	58,892,050,331.00		3,737,490,744.00		3,737,490,744.00		277,682,172.00		277,682,172.00		62,351,858,903.00
3	Dana Alokasi Umum	2,713,750,553,000.00										2,713,750,553,000.00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4,205,592,917,360.00		1,537,540,500,039.00		1,537,540,500,039.00		3,235,242,908,800.00		3,235,242,908,800.00		2,507,890,508,599.00
	Jumlah 5	7,300,647,588,241.00	-	1,632,688,083,010.00	-	1,632,688,083,010.00	-	3,241,435,715,442.00	-	3,241,435,715,442.00	-	5,691,899,955,809.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH											
1	Pendapatan hibah	17,680,635,177.00	32,705,727,264.00			32,705,727,264.00						50,386,362,441.00
	Jumlah 6	17,680,635,177.00	32,705,727,264.00	-	-	32,705,727,264.00	-	-	-	-	-	50,386,362,441.00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	13,079,598,635,469.30	403,641,355,228.01	4,202,670,043,871.49	-	4,606,311,399,099.50	-	5,385,689,893,324.67	-	5,385,689,893,324.67	-	12,300,220,141,244.10

TABEL RINCIAN PERHITUNGAN BEBAN LO

No	Uraian	Belanja LRA	Mutasi						Koreksi	Akumulasi	Koreksi Pengurang	Akumulasi	Beban LO			
			Utang		Beban Dibayar Dimuka		Persediaan									
			Penambahan	Pembayaran	Penggunaan	Penambahan	Awal	Akhir								
1	Beban pegawai															
	Beban Gaji dan Tunjangan	#REF!										#REF!				
	Beban Tambahan Penghasilan PNS	#REF!								9.331.424,00	9.331.424,00	#REF!				
	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	#REF!										#REF!				
	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	#REF!										#REF!				
	Beban Honorarium PNS	#REF!	1.501.783.500,00	(1.075.955.500,00)						425.828.000,00	155.500.000,00	155.500.000,00	#REF!			
	Beban Honorarium Non PNS	#REF!	777.042.260,00	(121.131.025,00)									#REF!			
	Beban Pegawai BOS	#REF!											#REF!			
	Jumlah 1	#REF!	2.278.825.760,00	(1.197.086.525,00)						425.828.000,00	164.831.424,00	164.831.424,00	#REF!			
2	Beban Persediaan															
	Beban Bahan Pakai Habis	#REF!											#REF!			
	Beban Persediaan Bahan Material	#REF!	8.145.647.657,00	(8.972.013.812,00)									#REF!			
	Beban Cetak dan Penggandaan	#REF!	611.937.500,00							11.692.750,00	(2.725.000,00)	620.905.250,00	#REF!			
	Beban Makanan dan Minuman	#REF!											#REF!			
	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	#REF!											#REF!			
	Beban Pakaian Kerja	#REF!											#REF!			
	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	#REF!											#REF!			
	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	#REF!		(700.920.000,00)						75.396.826.886,00	(102.508.924.574,00)	1.288.339.288,00	(26.524.678.400,00)	#REF!		
	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00								542.562.224,00		542.562.224,00		542.562.224,00		
	Jumlah 2	#REF!	8.757.585.157,00	(9.672.933.812,00)						167.305.369.198,55	(145.677.383.075,00)	1.288.339.288,00	22.000.976.756,55	5.646.350.618,00	5.646.350.618,00	#REF!
3	Beban Jasa															
	Beban Jasa Kantor	#REF!	#REF!	#REF!										#REF!		
	Beban Premi Asuransi	#REF!												#REF!		
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	#REF!			#REF!	#REF!						#REF!		#REF!		
	Beban Sewa Sarana Mobilitas	#REF!												#REF!		
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	#REF!												#REF!		
	Beban Jasa Konsultasi	#REF!										#REF!	#REF!	#REF!		
	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	#REF!												#REF!		
	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	#REF!												#REF!		
	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	#REF!												#REF!		
	Beban jasa event organizer	#REF!												#REF!		
	Beban Barang dan Jasa BOS	#REF!								85.658.411,600,00		85.658.411,600,00	#REF!	#REF!		

No	Uraian	Belanja LRA	Mutasi						Koreksi	Akumulasi	Koreksi Pengurang	Akumulasi	Beban LO
			Utang		Beban Dibayar Dimuka		Persediaan						
			Penambahan	Pembayaran	Penggunaan	Penambahan	Awal	Akhir					
	Beban Hibah Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	#REF!							#REF!		-	#REF!	
	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	#REF!	#REF!	(1,399,078,000.00)					#REF!	139,260,000.00	139,260,000.00	#REF!	
	Jumlah 3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	#REF!	85,658,411,600.00	#REF!	#REF!	#REF!	
4	Beban Pemeliharaan												
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	#REF!	18,094,520.00	(28,578,580.00)					(9,480,000.00)	(19,964,060.00)	11,623,797.00	11,623,797.00	#REF!
	Beban Pemeliharaan	#REF!	314,497,260.00	(24,416,000.00)						290,081,260.00	30,910,057,665.00	30,910,057,665.00	#REF!
	Jumlah 4	#REF!	332,591,780.00	(52,994,580.00)	-	-	-	(9,480,000.00)	-	270,117,200.00	30,921,681,462.00	30,921,681,462.00	#REF!
5	Beban Perjalanan Dinas												
	Beban Perjalanan Dinas	#REF!											#REF!
	Jumlah 5	#REF!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!
6	Beban Hibah												
	Beban Hibah kepada Pemerintah	0.00											
	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00											
	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	#REF!											#REF!
	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	#REF!							1,809,165,181.00	1,809,165,181.00	1,744,869,760,000.00	1,744,869,760,000.00	#REF!
	Beban Hibah kepada Rumah Ibadah	0.00											
	Jumlah 6	#REF!	-	-	-	-	-	-	1,809,165,181.00	1,809,165,181.00	1,744,869,760,000.00	1,744,869,760,000.00	#REF!
7	Beban penyusutan dan amortisasi												
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin											256,819,999,750.90	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan											155,641,505,748.61	
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan											876,921,341,086.82	
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya											1,580,922,783.12	
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud											5,060,818,651.00	
	Jumlah 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,296,024,588,020.45	
8	Beban penyisihan piutang												
	Beban Penyisihan Piutang Pajak - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah											1,241,273,655,687.00	
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Kesehatan											205,855,317.00	
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem											582,114,295.00	
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Lingkungan Hidup											107,301,767.00	
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Rumah Sakit Umum Haji Daerah											1,534,962,092.80	

No	Uraian	Belanja LRA	Mutasi						Koreksi	Akumulasi	Koreksi Pengurang	Akumulasi	Beban LO
			Utang		Beban Dibayar Dimuka		Persediaan						
			Penambahan	Pembayaran	Penggunaan	Penambahan	Awal	Akhir					
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah											106,590.00	
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah											16,581,860.28	
	Jumlah 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,243,720,577,609.08	
9	Beban lain-lain							103,489,612,768.42				103,489,612,768.42	
	Beban lain-lain												
	Jumlah 9	-	-	-	-	-	-	103,489,612,768.42	-	-	-	103,489,612,768.42	
10	Beban Transfer												
	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	#REF!	411,995,539,707.00	(1,500,716,820,298.83)					(1,088,721,280,591.83)			#REF!	
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	-										-	
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	-										-	
	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	#REF!										#REF!	
	Jumlah 10	#REF!	411,995,539,707.00	(1,500,716,820,298.83)	-	-	-	-	(1,088,721,280,591.83)	-	-	#REF!	
	JUMLAH BEBAN	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	167,305,369,198.55	#REF!	192,245,528,837.42	#REF!	#REF!	#REF!	11,923,139,267,046.22

KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	BANK	TUNAI	SALDO PER 31 DES 2019 (AUDITED)
1	SMAN 1 BP MANDOGÉ	10,360,000.00	0.00	10,360,000.00
2	SMAN 1 BANDAR PULAU	37,825,000.00	0.00	37,825,000.00
3	SMAN 1 PULAU RAKYAT	0.00	465,804.00	465,804.00
4	SMAN 1 TANJUNG BALAI	358,000,000.00	0.00	358,000,000.00
5	SMAN 1 SIMPANG EMPAT	8,527,700.00	12,351,769.00	20,879,469.00
6	SMAN 1 AIR BATU	380,500,000.00	250,234.00	380,750,234.00
7	SMAN 1 BUNTU PANE	700.00	0.00	700.00
8	SMAN 2 MERANTI	0.00	0.00	0.00
9	SMAN 1 MERANTI	0.00	6,069,750.00	6,069,750.00
10	SMAN 1 AIR JOMAN	0.00	0.00	0.00
11	SMAN 1 AEK KUASAN	0.00	0.00	0.00
12	SMAN 3 KISARAN	0.00	6,440,000.00	6,440,000.00
13	SMAN 4 KISARAN	0.00	15,945,399.00	15,945,399.00
14	SMAN 2 KISARAN	669,000,000.00	0.00	669,000,000.00
15	SMAN 1 KISARAN	17,540,000.00	10,945,599.00	28,485,599.00
16	SMAN 1 AEK SONGSONGAN	0.00	13,917,440.00	13,917,440.00
17	SMAN 1 SEI KEPAYANG	202,000,000.00	0.00	202,000,000.00
18	SMA NEGERI 1 MEDANG DERAS	0.00	0.00	0.00
19	SMA NEGERI 1 AIR PUTIH	606,524,900.00	0.00	606,524,900.00
20	SMA NEGERI 1 LIMA PULUH	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21	SMA NEGERI 1 SEI BALAI	306,000,000.00	0.00	306,000,000.00
22	SMA NEGERI 1 SEI SUKA	128,740,000.00	0.00	128,740,000.00
23	SMA NEGERI 1 TALAWI	0.00	0.00	0.00
24	SMA NEGERI 1 TANJUNG TIRAM	35,600,000.00	0.00	35,600,000.00
25	SMAN 1 SIDIKALANG	1,127,787.00	0.00	1,127,787.00
26	SMAN 2 SIDIKALANG	2,602,082.00	0.00	2,602,082.00
27	SMAN 1 PARBULUAN	70,783.00	0.00	70,783.00
28	SMAN 1 SUMBUL	921,707.00	0.00	921,707.00
29	SMAN 1 PEGAGAN HILIR	0.00	0.00	0.00
30	SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HULU	298,713,080.00	0.00	298,713,080.00
31	SMAN 1 SIEMPAT NEMPU	304,008,561.00	0.00	304,008,561.00
32	SMAN 1 SILIMA PUNGGU-PUNGGU	1,009,305.00	0.00	1,009,305.00
33	SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HILIR	226,401,538.00	0.00	226,401,538.00
34	SMAN 1 TIGALINGGA	593,000,000.00	0.00	593,000,000.00
35	SMAN 1 TANAH PINEM	260,219,101.00	0.00	260,219,101.00
36	SMAN 1 LAE PARIRA	0.00	0.00	0.00
37	SMAN 1 SILAHISABUNGAN	264,012,000.00	0.00	264,012,000.00
38	SMAN GUNUNG MERIAH	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00
39	SMAN 1 SIBOLANGIT	16,083,400.00	0.00	16,083,400.00
40	SMA NEGERI 1 KUTALIMBARU	0.00	0.00	0.00
41	SMAN 1 PANCUR BATU	735,000,000.00	0.00	735,000,000.00
42	SMAN 1 NAMORAMBE	365,718,170.00	0.00	365,718,170.00
43	SMAN 1 BANGUN PURBA	0.00	373.00	373.00
44	SMAN 1 GALANG	800,000.00	0.00	800,000.00
45	SMAN 1 TANJUNG MORAWA	200,000.00	0.00	200,000.00
46	SMA NEGERI 2 TANJUNG MORAWA	0.00	0.00	0.00
47	SMAN 1 DELI TUA	833,000,000.00	0.00	833,000,000.00
48	SMAN 1 SUNGGAL	1,313,453.00	0.00	1,313,453.00
49	SMAN HAMPARAN PERAK	0.00	0.00	0.00
50	SMAN 1 LABUHAN DELI	219,116.00	0.00	219,116.00
51	SMAN 1 PERCUT SEI TUAN	0.00	0.00	0.00
52	SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN	0.00	0.00	0.00
53	SMAN 1 BATANG KUIS	0.00	0.00	0.00
54	SMA NEGERI 1 PANTAI LABU	364,000,000.00	0.00	364,000,000.00
55	SMA NEGERI 1 BERINGIN	0.00	0.00	0.00
56	SMAN 2 LUBUK PAKAM	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00
57	SMAN 1 LUBUK PAKAM	6,460,000.00	0.00	6,460,000.00
58	SMA NEGERI 1 STM HILIR	346,000,000.00	0.00	346,000,000.00
59	SMAN 1 PAKKAT	0.00	0.00	0.00
60	SMAN 1 ONAN GANJANG	0.00	0.00	0.00
61	SMAN 1 LINTONGNIHUTA	0.00	0.00	0.00
62	SMAN 2 LINTONGNIHUTA	0.00	0.00	0.00
63	SMAN 1 DOLOK SANGGUL	0.00	0.00	0.00
64	SMAN 2 DOLOKSANGGUL	0.00	0.00	0.00
65	SMAN 1 PARLILITAN	0.00	0.00	0.00
66	SMAN 1 POLLUNG	0.00	0.00	0.00
67	SMAN 1 PARANGINAN	0.00	0.00	0.00
68	SMAN 1 BAKTI RAJA	98,906,046.00	0.00	98,906,046.00
69	SMAN 1 SJAMAPOLANG	228,080,000.00	0.00	228,080,000.00
70	SMAN 1 TARABINTANG	0.00	0.00	0.00
71	SMA NEGERI 1 MARDINDING	224,240,000.00	0.00	224,240,000.00
72	SMA NEGERI 1 LAU BALENG	0.00	0.00	0.00
73	SMA NEGERI 1 TIGABINANGA	0.00	0.00	0.00
74	SMA NEGERI 1 JUHAR	172,520,000.00	0.00	172,520,000.00
75	SMA NEGERI 1 MUNTE	374,260,000.00	0.00	374,260,000.00
76	SMA NEGERI 1 KUTABULUH	9,520,000.00	0.00	9,520,000.00
77	SMA NEGERI 1 SIMPANGEMPAT	273,000,000.00	0.00	273,000,000.00
78	SMA NEGERI 1 KABANJAHE	105,760,000.00	0.00	105,760,000.00
79	SMA NEGERI 2 KABANJAHE	0.00	0.00	0.00
80	SMA NEGERI 1 BERASTAGI	0.00	0.00	0.00
81	SMA NEGERI 1 TIGAPANAH	0.00	0.00	0.00
82	SMA NEGERI 1 BARUSJAHE	0.00	0.00	0.00
83	SMA NEGERI 1 TIGANDERKET	0.00	0.00	0.00
84	SMAN 1 BILAH HULU	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
85	SMAN 2 BILAH HULU	0.00	0.00	0.00
86	SMAN 1 PANGKATAN	234,000,000.00	0.00	234,000,000.00
87	SMAN 2 PANGKATAN	290,000,000.00	0.00	290,000,000.00

KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	BANK	TUNAI	SALDO PER 31 DES 2019 (AUDITED)
88	SMAN 1 BILAH BARAT	204,000,000.00	0.00	204,000,000.00
89	SMAN 1 BILAH HILIR	0.00	0.00	0.00
90	SMAN 1 PANAI HULU	456,680,000.00	0.00	456,680,000.00
91	SMAN 1 PANAI TENGAH	0.00	0.00	0.00
92	SMAN 1 PANAI HILIR	0.00	0.00	0.00
93	SMAN 2 PANAI HILIR	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
94	SMAN 2 RANTAU SELATAN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
95	SMAN 1 RANTAU SELATAN	1,514,573.00	0.00	1,514,573.00
96	SMAN 3 RANTAU UTARA	37,022,250.00	0.00	37,022,250.00
97	SMAN 2 RANTAU UTARA	643,508.00	0.00	643,508.00
98	SMAN 1 RANTAU UTARA	187,350.00	0.00	187,350.00
99	SMA NEGERI 2 BILAH HILIR	0.00	0.00	0.00
100	SMAN 1 SEI KANAN	11,985,000.00	0.00	11,985,000.00
101	SMAN 2 SEI KANAN	0.00	0.00	0.00
102	SMAN 1 TORGAMBA	0.00	0.00	0.00
103	SMAN 2 TORGAMBA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
104	SMAN 3 TORGAMBA	0.00	0.00	0.00
105	SMAN 1 KOTAPINANG	735,754,712.00	0.00	735,754,712.00
106	SMAN 2 KOTAPINANG	366,885,370.00	0.00	366,885,370.00
107	SMAN 1 SILANGKITANG	0.00	0.00	0.00
108	SMAN 1 KAMPUNG RAKYAT	0.00	0.00	0.00
109	SMAN 2 KAMPUNG RAKYAT	0.00	0.00	0.00
110	SMAN 1 NA IX-X	0.00	0.00	0.00
111	SMAN 1 AEK NATAS	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
112	SMAN 1 AEK KUO	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
113	SMAN 1 KUALUH HILIR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
114	SMA NEGERI 2 KUALUH HILIR	158,000,000.00	0.00	158,000,000.00
115	SMAN 1 KUALUH SELATAN	38,200,000.00	0.00	38,200,000.00
116	SMAN 1 KUALUH HULU	798,884,000.00	1,171,443.00	800,055,443.00
117	SMAN 1 KUALUH LEIDONG	0.00	0.00	0.00
118	SMAN 1 MERBAU	8,563,600.00	0.00	8,563,600.00
119	SMAN 1 BOHOROK	0.00	0.00	0.00
120	SMA NEGERI 1 SALAPIAN	25,080,000.00	0.00	25,080,000.00
121	SMAN 1 SEI BINGAI	0.00	0.00	0.00
122	SMA NEGERI 1 KUJALA	18,560,000.00	0.00	18,560,000.00
123	SMAN 1 SELESAI	641,000,000.00	0.00	641,000,000.00
124	SMAN 1 BINJAI	0.00	0.00	0.00
125	SMAN 1 STABAT	0.00	0.00	0.00
126	SMAN 1 WAMPU	0.00	0.00	0.00
127	SMAN 1 PADANG TUALANG	0.00	0.00	0.00
128	SMAN 1 HINAI	0.00	0.00	0.00
129	SMAN 1 SECANGGANG	536,680,000.00	0.00	536,680,000.00
130	SMAN 1 TANJUNG PURA	0.00	0.00	0.00
131	SMAN 1 GEBANG	0.00	0.00	0.00
132	SMAN 1 SEI LEPAN	0.00	0.00	0.00
133	SMAN 1 BABALAN	0.00	0.00	0.00
134	SMAN 1 BRANDAN BARAT	22,000,000.00	5,521,400.00	27,521,400.00
135	SMAN 1 BESITANG	0.00	0.00	0.00
136	SMAN 1 PANGKALAN SUSU	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
137	SMAN 1 BATAHAN	0.00	0.00	0.00
138	SMAN 1 BATANG NATAL	0.00	0.00	0.00
139	SMAN 1 KOTANOPAN	0.00	0.00	0.00
140	SMAN 1 MUARA SIPONGI	400,000.00	0.00	400,000.00
141	SMAN 1 PANYABUNGAN	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
142	SMAN 2 PLUS PANYABUNGAN	297,000,000.00	0.00	297,000,000.00
143	SMAN 3 PANYABUNGAN	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00
144	SMAN 1 NATAL	45,577,000.00	0.00	45,577,000.00
145	SMAN 1 MUARA BATANG GADIS	0.00	0.00	0.00
146	SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS	0.00	0.00	0.00
147	SMAN 1 SIABU	11,080,000.00	0.00	11,080,000.00
148	SMAN 2 SIABU	216,840,000.00	0.00	216,840,000.00
149	SMAN 1 PANYABUNGAN UTARA	156,480,000.00	0.00	156,480,000.00
150	SMAN 1 PANYABUNGAN TIMUR	0.00	0.00	0.00
151	SMAN 1 PANYABUNGAN SELATAN	15,440,000.00	0.00	15,440,000.00
152	SMAN 1 TAMBANGAN	1,500,000.00	1,981,000.00	3,481,000.00
153	SMAN 1 LINGGA BAYU	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
154	SMA NEGERI 1 RANTO BAEK	0.00	0.00	0.00
155	SMAN 1 SINUNUKAN	358,000,000.00	0.00	358,000,000.00
156	SMAN 1 HUTABARGOT	78,280,000.00	0.00	78,280,000.00
157	SMAN 1 NAGA JUANG	94,000,000.00	0.00	94,000,000.00
158	SMAN 1 IDANOGAWO	828,176.00	0.00	828,176.00
159	SMAN 1 GIDO	809,444,100.00	0.00	809,444,100.00
160	SMAN 1 HILIDUHO	291,820,000.00	0.00	291,820,000.00
161	SMAN 1 BAWOLATO	334,314.00	0.00	334,314.00
162	SMA NEGERI 2 BAWOLATO	0.00	0.00	0.00
163	SMA NEGERI 1 ULUGAWO	208,803,227.00	0.00	208,803,227.00
164	SMA NEGERI 1 MAU	106,000,000.00	0.00	106,000,000.00
165	SMAN 1 BOTOMUZOI	125,500,000.00	0.00	125,500,000.00
166	SMAN 1 LOLOFITU MOI	184,000,000.00	0.00	184,000,000.00
167	SMAN 2 LOLOFITU MOI	230,680,000.00	0.00	230,680,000.00
168	SMAN 1 SIROMBU	369,000,000.00	0.00	369,000,000.00
169	SMAN 1 LAHOMI	0.00	0.00	0.00
170	SMAN 1 MANDREHE	376,000,000.00	0.00	376,000,000.00
171	SMAN 2 MANDREHE	0.00	0.00	0.00
172	SMA NEGERI 3 MANDREHE	210,000,000.00	20,000.00	210,020,000.00
173	SMAN 1 MORO O	5,680,000.00	0.00	5,680,000.00
174	SMAN 2 MORO O	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	BANK	TUNAI	SALDO PER 31 DES 2019 (AUDITED)
175	SMAN 1 ULU MORO O	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
176	SMAN 1 MANDREHE UTARA	124,000,000.00	0.00	124,000,000.00
177	SMAN 2 MANDREHE UTARA	116,000,000.00	0.00	116,000,000.00
178	SMAN 3 MANDREHE UTARA	0.00	0.00	0.00
179	SMA NEGERI 1 PULAU PULAU BATU	300,013,800.00	0.00	300,013,800.00
180	SMA NEGERI 1 TELUK DALAM	891,241,070.00	0.00	891,241,070.00
181	SMA NEGERI 1 AMANDRAYA	234,000,000.00	0.00	234,000,000.00
182	SMA NEGERI 1 LAHUSA	367,103,485.00	0.00	367,103,485.00
183	SMA NEGERI 2 LAHUSA	0.00	0.00	0.00
184	SMA NEGERI 3 LAHUSA	120,200,000.00	0.00	120,200,000.00
185	SMA NEGERI 1 GOMO	0.00	0.00	0.00
186	SMA NEGERI 2 GOMO	0.00	0.00	0.00
187	SMA NEGERI 1 LOLOMATUA	308,000,000.00	0.00	308,000,000.00
188	SMA NEGERI 1 LOLOWA U	0.00	0.00	0.00
189	SMA NEGERI 1 HIBALA	0.00	0.00	0.00
190	SMA NEGERI 2 HIBALA	560,000.00	0.00	560,000.00
191	SMA NEGERI 1 SUSUA	0.00	0.00	0.00
192	SMA NEGERI 2 SUSUA	0.00	0.00	0.00
193	SMA NEGERI 3 SUSUA	0.00	0.00	0.00
194	SMA NEGERI 4 SUSUA	0.00	0.00	0.00
195	SMA NEGERI 1 MANIAMOLO	248,000,000.00	0.00	248,000,000.00
196	SMA NEGERI 2 MANIAMOLO	80,020,000.00	0.00	80,020,000.00
197	SMA NEGERI 1 HILIMEGAI	126,000,000.00	0.00	126,000,000.00
198	SMA NEGERI 2 HILIMEGAI	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
199	SMA NEGERI 1 TOMA	212,000,000.00	0.00	212,000,000.00
200	SMA NEGERI 2 TOMA	0.00	0.00	0.00
201	SMA NEGERI 1 MAZINO	0.00	0.00	0.00
202	SMA NEGERI 1 UMBUNASI	134,020,000.00	0.00	134,020,000.00
203	SMA NEGERI 1 ARAMO	134,000,000.00	0.00	134,000,000.00
204	SMA NEGERI 1 MAZO	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00
205	SMA NEGERI 2 MAZO	80,340,000.00	0.00	80,340,000.00
206	SMA NEGERI 1 FANAYAMA	280,000.00	0.00	280,000.00
207	SMA NEGERI 1 ULUNOYO	170,060,000.00	0.00	170,060,000.00
208	SMA NEGERI 2 ULUNOYO	206,000,000.00	0.00	206,000,000.00
209	SMA NEGERI 1 HURUNA	148,000,000.00	757,000.00	148,757,000.00
210	SMA NEGERI 2 HURUNA	44,893,800.00	0.00	44,893,800.00
211	SMA NEGERI 3 HURUNA	180,000.00	0.00	180,000.00
212	SMA NEGERI 1 OOU	420,000.00	0.00	420,000.00
213	SMA NEGERI 1 ONOHAZUMBA	282,000,000.00	0.00	282,000,000.00
214	SMA NEGERI 2 ONOHAZUMBA	60,100,000.00	0.00	60,100,000.00
215	SMA NEGERI 1 HILISALAWAAHE	0.00	0.00	0.00
216	SMA NEGERI 2 HILISALAWAAHE	0.00	0.00	0.00
217	SMA NEGERI 1 ULUSUSUA	104,280,000.00	0.00	104,280,000.00
218	SMA NEGERI 1 SIDUAORI	0.00	0.00	0.00
219	SMA NEGERI 2 SIDUAORI	0.00	0.00	0.00
220	SMA NEGERI 1 SOMAMBAWA	148,000,000.00	0.00	148,000,000.00
221	SMA NEGERI 1 BORONADU	0.00	0.00	0.00
222	SMA NEGERI 1 ULU IDANOTAE	234,000,000.00	0.00	234,000,000.00
223	SMA NEGERI 1 IDANOTAE	0.00	0.00	0.00
224	SMA NEGERI 1 SATU ATAP PULAU SIMUK	75,384,208.00	0.00	75,384,208.00
225	SMA NEGERI 1 TANAH MASA	26,459,514.00	0.00	26,459,514.00
226	SMA NEGERI 1 ONOLALU	93,140,000.00	0.00	93,140,000.00
227	SMA NEGERI 1 LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	208,020,000.00	0.00	208,020,000.00
228	SMAN 1 TUHEMBERUA	423,000,000.00	0.00	423,000,000.00
229	SMAN 1 LOTU	431,300,000.00	0.00	431,300,000.00
230	SMA Negeri 1 Sitolu Ori	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
231	SMA NEGERI 1 SAWO	228,000,000.00	0.00	228,000,000.00
232	SMAN 1 ALASA	0.00	0.00	0.00
233	SMA Negeri 2 Alasa	68,054,494.00	0.00	68,054,494.00
234	SMAN 1 NAMOHALU ESIWA	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00
235	SMA Negeri 2 Namohalu Esiwa	5,894,377.00	0.00	5,894,377.00
236	SMA NEGERI 2 ALASA TALUMUZOI	118,000,000.00	0.00	118,000,000.00
237	SMA Negeri 1 Tugala Oyo	69,120,000.00	0.00	69,120,000.00
238	SMAN 1 LAHEWA	440,000,000.00	0.00	440,000,000.00
239	SMAN 1 AFULU	0.00	188,500.00	188,500.00
240	SMA NEGERI 1 LAHEWA TIMUR	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00
241	SMA NEGERI 1 BARUMUN	0.00	0.00	0.00
242	SMAN 1 SOSA	0.00	0.00	0.00
243	SMA NEGERI 1 BARUMUN TENGAH	361,000,000.00	0.00	361,000,000.00
244	SMA NEGERI 1 HUTARAJA TINGGI	122,080,000.00	0.00	122,080,000.00
245	SMA NEGERI 1 ULU BARUMUN	0.00	0.00	0.00
246	SMAN 1 SOSOPAN	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00
247	SMA NEGERI 1 BARUMUN SELATAN	0.00	0.00	0.00
248	SMAN 1 SIHAPAS BARUMUN	119,960,000.00	0.00	119,960,000.00
249	SMAN 1 PADANG BOLAK JULU	386,000,000.00	0.00	386,000,000.00
250	SMAN 2 PADANG BOLAK	196,000,000.00	0.00	196,000,000.00
251	SMAN 1 PADANG BOLAK	585,000,000.00	0.00	585,000,000.00
252	SMAN 1 HALONGONAN	0.00	0.00	0.00
253	SMAN 1 DOLOK SIGOMPULON	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00
254	SMAN 1 PORTIBI	0.00	0.00	0.00
255	SMAN 1 SIMANGAMBAT	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00
256	SMAN 1 BATANG ONANG	392,000,000.00	0.00	392,000,000.00
257	SMAN 1 DOLOK	334,000,000.00	0.00	334,000,000.00
258	SMAN 1 SALAK	0.00	0.00	0.00
259	SMAN 1 KERAJAAN	298,000,000.00	0.00	298,000,000.00
260	SMAN 1 SIGUNUNG	318,000,000.00	362,400.00	318,362,400.00
261	SMAN 1 TINADA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	BANK	TUNAI	SALDO PER 31 DES 2019 (AUDITED)
262	SMAN 1 SITU JULU	0,00	0,00	0,00
263	SMAN 1 SIANJUR MULAMULA	370,000,000.00	0,00	370,000,000.00
264	SMAN 1 ONANRUNGGU	0,00	0,00	0,00
265	SMAN 1 PALIPI	306,000,000.00	0,00	306,000,000.00
266	SMAN 2 PANGURURAN	451,000,000.00	0,00	451,000,000.00
267	SMAN 1 PANGURURAN	11,280,000.00	0,00	11,280,000.00
268	SMAN 1 SIMANINDO	0,00	0,00	0,00
269	SMAN 1 RONGGURNIHUTA	40,600,000.00	0,00	40,600,000.00
270	SMAN 1 SITOTIO	0,00	0,00	0,00
271	SMAN 1 KOTARIH	222,000,000.00	0,00	222,000,000.00
272	SMAN 1 DOLOK MASIHUL	13,500,000.00	0,00	13,500,000.00
273	SMAN 1 SIPSISPIS	352,000,000.00	0,00	352,000,000.00
274	SMAN 1 DOLOK MERAWAN	340,219,218.00	0,00	340,219,218.00
275	SMAN 1 TEBING TINGGI	298,000,000.00	0,00	298,000,000.00
276	SMAN 1 BANDAR KHALIPAH	49,514,915.00	0,00	49,514,915.00
277	SMAN 1 TANJUNG BERINGIN	0,00	0,00	0,00
278	SMAN 1 TELUK MENGKUDU	309,680,000.00	0,00	309,680,000.00
279	SMAN 1 SEI RAMPAH	605,000,000.00	0,00	605,000,000.00
280	SMAN 1 PERBAUNGAN	840,000.00	0,00	840,000.00
281	SMAN 2 PERBAUNGAN	0,00	0,00	0,00
282	SMAN 1 PANTAI CERMIN	0,00	0,00	0,00
283	SMAN 1 SILINDAK	222,000,000.00	0,00	222,000,000.00
284	SMAN 1 BINTANG BAYU	0,00	0,00	0,00
285	SMAN 1 SERBA JADI	312,000,000.00	0,00	312,000,000.00
286	SMAN 1 TEBING SYAHBANDAR	274,113.00	0,00	274,113.00
287	SMAN 1 SEI BAMBAN	0,00	0,00	0,00
288	SMAN 1 PEGAJAHAN	370,500,000.00	965,330.00	371,465,330.00
289	SMA NEGERI 1 SILIMAKUTA	0,00	0,00	0,00
290	SMA NEGERI 1 PURBA	0,00	0,00	0,00
291	SMA NEGERI 1 DOLOK PARDAMEAN	305,000,000.00	0,00	305,000,000.00
292	SMA NEGERI 1 SIDAMANIK	1,960,000.00	0,00	1,960,000.00
293	SMA NEGERI 1 GIRSANG SIPANGAN BOLON	0,00	0,00	0,00
294	SMA NEGERI 1 TANAH JAWA	0,00	0,00	0,00
295	SMA NEGERI 1 DOLOK PANRIBUAN	0,00	0,00	0,00
296	SMA NEGERI 1 RAYA	9,880,000.00	0,00	9,880,000.00
297	SMA NEGERI 1 DOLOK SILOU	0,00	0,00	0,00
298	SMA NEGERI 1 SILAU KAHEAN	0,00	1,400,000.00	1,400,000.00
299	SMA NEGERI 1 RAYA KAHEAN	360,000.00	0,00	360,000.00
300	SMA NEGERI 1 DOLOK BATUNANGGAR	2,690,655.00	0,00	2,690,655.00
301	SMA NEGERI 1 SIANTAR	803,000,000.00	0,00	803,000,000.00
302	SMA NEGERI 1 HUTABAYURAJA	0,00	0,00	0,00
303	SMA NEGERI 1 PEMATANG BANDAR	341,600,000.00	0,00	341,600,000.00
304	SMA NEGERI 1 BANDAR	0,00	0,00	0,00
305	SMA NEGERI 2 BANDAR	0,00	0,00	0,00
306	SMA NEGERI 1 BOSAR MALIGAS	43,320,000.00	0,00	43,320,000.00
307	SMA NEGERI 1 UJUUNG PADANG	0,00	0,00	0,00
308	SMA NEGERI 1 PANOMBEIAN PANEI	360,000,000.00	0,00	360,000,000.00
309	SMAN 1 BATANG ANGKOLA	33,840,000.00	3,321,848.00	37,161,848.00
310	SMAN 1 BATANGTORU	0,00	0,00	0,00
311	SMA NEGERI 2 PLUS SIPIROK	243,000,000.00	0,00	243,000,000.00
312	SMA NEGERI 1 SIPIROK	5,880,000.00	0,00	5,880,000.00
313	SMAN 1 ARSE	242,000,000.00	0,00	242,000,000.00
314	SMAN 1 SAIPAR DOLOK HOLE	0,00	0,00	0,00
315	SMAN 1 SAYUR MATINGGI	0,00	840,000.00	840,000.00
316	SMAN 1 ANGKOLA BARAT	0,00	0,00	0,00
317	SMAN 1 ANGKOLA SELATAN	28,040,000.00	0,00	28,040,000.00
318	SMAN 1 ANGKOLA TIMUR	214,000,000.00	0,00	214,000,000.00
319	SMAN 1 SIBABANGUN	0,00	0,00	0,00
320	SMAN 1 MATAULI PANDAN	0,00	0,00	0,00
321	SMAN 1 KOLANG	364,000,000.00	0,00	364,000,000.00
322	SMAN 1 SORKAM	20,160,000.00	0,00	20,160,000.00
323	SMAN 1 BARUS	0,00	0,00	0,00
324	SMAN 1 MANDUAMAS	0,00	0,00	0,00
325	SMAN 1 SOSORGADONG	0,00	0,00	0,00
326	SMAN 1 SORKAM BARAT	0,00	0,00	0,00
327	SMAN 1 ANDAM DEWI	0,00	0,00	0,00
328	SMAN 1 SITAHUIS	0,00	840,000.00	840,000.00
329	SMAN 1 SIRANDORUNG	226,220,000.00	0,00	226,220,000.00
330	SMAN 1 TUKKA	4,517,000.00	0,00	4,517,000.00
331	SMAN 2 TUKKA	0,00	0,00	0,00
332	SMAN 1 PINANGSORI	610,960,000.00	0,00	610,960,000.00
333	SMAN 1 PASARIBU TOBING	0,00	0,00	0,00
334	SMAN 1 PARMONANGAN	0,00	0,00	0,00
335	SMAN 2 PARMONANGAN	0,00	0,00	0,00
336	SMAN 1 ADIANKOTING	304,000,000.00	0,00	304,000,000.00
337	SMAN 1 SIPOHOLON	0,00	0,00	0,00
338	SMAN 1 TARUTUNG	69,800,000.00	0,00	69,800,000.00
339	SMAN 2 TARUTUNG	122,600,000.00	0,00	122,600,000.00
340	SMAN 3 TARUTUNG	227,000,000.00	0,00	227,000,000.00
341	SMAN 1 PAHAE JAE	593,445.00	0,00	593,445.00
342	SMAN 1 PAHAE JULU	292,000,000.00	0,00	292,000,000.00
343	SMAN 1 PANGARIBUAN	100,142.00	0,00	100,142.00
344	SMAN 1 GAROGA	378,000,000.00	0,00	378,000,000.00
345	SMAN 1 SIPAHUTAR	0,00	0,00	0,00
346	SMAN 2 SIBORONGBORONG	0,00	0,00	0,00
347	SMAN 1 SIBORONGBORONG	0,00	0,00	0,00
348	SMAN 1 PAGARAN	0,00	0,00	0,00

KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	BANK	TUNAI	SALDO PER 31 DES 2019 (AUDITED)
349	SMAN 1 MUARA	0,00	0,00	0,00
350	SMA NEGERI 1 PURBATUA	168,958,000	0,00	168,958,000
351	SMAN 1 SIMANGUMBAN	0,00	0,00	0,00
352	SMAN 1 BALIGE	0,00	0,00	0,00
353	SMAN 2 BALIGE	625,900,100,000	0,00	625,900,100,000
354	SMAN 1 LAGU BOTI	14,675,472,000	0,00	14,675,472,000
355	SMAN 1 HABINSARAN	41,137,720,000	0,00	41,137,720,000
356	SMAN 1 SILAEN	1,160,000,000	0,00	1,160,000,000
357	SMAN 1 LUMBANJULU	412,927,000	0,00	412,927,000
358	SMAN 1 ULUAN	350,000,000,000	0,00	350,000,000,000
359	SMAN 1 PINTU POHAN MERANTI	112,000,000,000	0,00	112,000,000,000
360	SMAN 1 AJIBATA	126,070,000,000	0,00	126,070,000,000
361	SMAN 1 BORBOR	248,320,000,000	0,00	248,320,000,000
362	SMAN 1 SIANTAR NARUMONDA	30,364,000,000	0,00	30,364,000,000
363	SMAN 1 PARMAKSIAN	83,406,000	0,00	83,406,000
364	SMAN 2 BINJAI	0,00	0,00	0,00
365	SMAN 5 BINJAI	0,00	0,00	0,00
366	SMAN 3 BINJAI	13,362,500,000	0,00	13,362,500,000
367	SMAN 1 BINJAI	809,000,000,000	0,00	809,000,000,000
368	SMAN 4 BINJAI	1,680,000,000	1,876,000,000	3,556,000,000
369	SMAN 6 BINJAI	0,00	0,00	0,00
370	SMA NEGERI 7	0,00	0,00	0,00
371	SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI IDANOI	198,121,331,000	103,160,000	198,224,491,000
372	SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI	0,00	0,00	0,00
373	SMA NEGERI 2 GUNUNGSITOLI	571,694,000	0,00	571,694,000
374	SMA NEGERI 3 GUNUNGSITOLI	0,00	0,00	0,00
375	SMA NEGERI UNGGULAN SUKMA NIAS	301,432,306,000	113,890,000	301,546,196,000
376	SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI UTARA	188,000,000,000	0,00	188,000,000,000
377	SMAN 17 MEDAN	4,480,000,000	560,000,000	5,040,000,000
378	SMAN 13 MEDAN	0,00	0,00	0,00
379	SMAN 21 MEDAN	0,00	0,00	0,00
380	SMAN 14 MEDAN	0,00	0,00	0,00
381	SMAN 8 MEDAN	20,404,200,000	0,00	20,404,200,000
382	SMAN 18 MEDAN	0,00	0,00	0,00
383	SMAN 5 MEDAN	13,540,000,000	0,00	13,540,000,000
384	SMAN 6 MEDAN	0,00	1,500,000,000	1,500,000,000
385	SMAN 10 MEDAN	0,00	0,00	0,00
386	SMAN 2 MEDAN	0,00	0,00	0,00
387	SMAN 1 MEDAN	1,177,000,000,000	0,00	1,177,000,000,000
388	SMAN 15 MEDAN	2,000,000,000	2,053,838,000	4,053,838,000
389	SMAN 12 MEDAN	0,00	280,000,000	280,000,000
390	SMAN 4 MEDAN	1,089,000,000,000	0,00	1,089,000,000,000
391	SMAN 3 MEDAN	1,537,000,000,000	0,00	1,537,000,000,000
392	SMAN 7 MEDAN	735,000,000,000	0,00	735,000,000,000
393	SMAN 11 MEDAN	727,000,000,000	0,00	727,000,000,000
394	SMAN 20 MEDAN	1,680,000,000	0,00	1,680,000,000
395	SMAN 9 MEDAN	0,00	20,592,000	20,592,000
396	SMAN 19 MEDAN	0,00	0,00	0,00
397	SMAN 16 MEDAN	0,00	0,00	0,00
398	SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN	0,00	0,00	0,00
399	SMAN 5 PADANG SIDEMPUAN	0,00	0,00	0,00
400	SMAN 1 PADANG SIDEMPUAN	0,00	1,410,000,000	1,410,000,000
401	SMAN 2 PADANG SIDEMPUAN	521,000,000,000	0,00	521,000,000,000
402	SMAN 4 PADANG SIDEMPUAN	0,00	1,347,770,000	1,347,770,000
403	SMAN 6 PADANG SIDEMPUAN	0,00	0,00	0,00
404	SMAN 7 PADANG SIDEMPUAN	17,234,600,000	0,00	17,234,600,000
405	SMAN 8 PADANG SIDEMPUAN	266,000,000,000	0,00	266,000,000,000
406	SMAN 1 PEMATANG SIANTAR	0,00	0,00	0,00
407	SMAN 2 PEMATANG SIANTAR	1,960,000,000	1,680,000,000	3,640,000,000
408	SMAN 4 PEMATANG SIANTAR	871,260,000,000	24,595,731,000	895,855,731,000
409	SMAN 3 PEMATANG SIANTAR	0,00	0,00	0,00
410	SMAN 5 PEMATANG SIANTAR	0,00	20,300,000	20,300,000
411	SMAN 6 PEMATANGSIANTAR	840,000,000	0,00	840,000,000
412	SMAN 1 SIBOLGA	731,000,000,000	2,461,200,000	733,461,200,000
413	SMAN 3 SIBOLGA	0,00	278,786,000	278,786,000
414	SMAN 2 SIBOLGA	0,00	0,00	0,00
415	SMAN 4 SIBOLGA	0,00	0,00	0,00
416	SMAN 3 TANJUNGBALAI	7,567,000,000	5,658,023,000	13,225,023,000
417	SMAN 2 TANJUNGBALAI	657,000,000,000	629,490,000	657,629,490,000
418	SMAN 6 TANJUNGBALAI	880,000,000	0,00	880,000,000
419	SMAN 1 TANJUNGBALAI	36,713,700,000	6,850,696,000	43,564,396,000
420	SMAN 5 TANJUNGBALAI	2,484,488,000	15,512,734,000	17,997,222,000
421	SMAN 7 TANJUNGBALAI	15,238,400,000	0,00	15,238,400,000
422	SMAN 4 TANJUNGBALAI	1,761,967,000	898,770,000	2,660,737,000
423	SMA NEGERI 4 TEBING TINGGI	12,524,800,000	0,00	12,524,800,000
424	SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI	1,960,000,000	0,00	1,960,000,000
425	SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI	2,000,000,000	0,00	2,000,000,000
426	SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI	674,337,300,000	0,00	674,337,300,000
	JUMLAH	51,206,592,714.00	155,806,269.00	51,362,398,983.00

**PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2019**

NO.	KOTA/KABUPATEN	PIUTANG	PIUTANG	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	SISA PIUTANG
		s/d 31-12-2018	s/d 31-12-2019	0,5%	10%	50%	100%			
1	MEDAN	21,576,728,766	21,401,498,720	107,007,493.60				107,007,493.60	21,294,491,226.80	21,401,498,720
2	DELI SERDANG	10,385,770,329	9,855,525,762	49,277,628.81				49,277,628.81	9,806,248,133.59	9,855,525,762
3	SERDANG BEDAGAI	2,302,086,605	2,235,856,415	11,179,282.08				11,179,282.08	2,224,677,132.93	2,235,856,415
4	TEBING TINGGI	1,721,440,422	1,916,617,564	9,583,087.82				9,583,087.82	1,907,034,476.18	1,916,617,564
5	BINJAI	2,029,320,990	1,951,288,340	9,756,441.70				9,756,441.70	1,941,531,898.30	1,951,288,340
6	LANGKAT	3,477,317,871	3,524,132,105	17,620,660.53				17,620,660.53	3,506,511,444.48	3,524,132,105
7	SIMALUNGUN	2,504,757,257	2,596,748,926	12,983,744.63				12,983,744.63	2,583,765,181.37	2,596,748,926
8	PEMATANG SIANTAR	2,512,853,742	2,540,308,876	12,701,544.38				12,701,544.38	2,527,607,331.62	2,540,308,876
9	TANJUNG BALAI	1,408,322,760	1,363,207,810	6,816,039.05				6,816,039.05	1,356,391,770.95	1,363,207,810
10	ASAHAN	3,511,396,599	3,242,212,452	16,211,062.26				16,211,062.26	3,226,001,390.12	3,242,212,452
11	BATU BARA	3,260,174,060	3,139,764,381	15,698,821.91				15,698,821.91	3,124,065,559.10	3,139,764,381
12	LABUHAN BATU	2,872,962,349	2,909,907,880	14,549,539.40				14,549,539.40	2,895,358,340.60	2,909,907,880
13	LABUHAN BATU UTARA	1,474,153,992	1,555,823,744	7,779,118.72				7,779,118.72	1,548,044,625.28	1,555,823,744
14	LABUHAN BATU SELATAN	1,914,073,566	2,014,902,666	10,074,513.33				10,074,513.33	2,004,828,152.95	2,014,902,666
15	KARO	2,982,153,795	3,060,573,697	15,302,868.49				15,302,868.49	3,045,270,828.52	3,060,573,697
16	DAIRI	1,041,314,290	975,161,850	4,875,809.25				4,875,809.25	970,286,040.75	975,161,850
17	PAKPAK BARAT	82,017,903	85,166,696	425,833.48				425,833.48	84,740,862.52	85,166,696
18	SIBOLGA	850,266,968	901,136,747	4,505,683.74				4,505,683.74	896,631,063.27	901,136,747
19	TAPANULI TENGAH	1,163,423,190	1,290,658,222	6,453,291.11				6,453,291.11	1,284,204,930.89	1,290,658,222
20	TAPANULI UTARA	1,022,341,670	1,154,280,146	5,771,400.73				5,771,400.73	1,148,508,745.27	1,154,280,146
21	TOBA SAMOSIR	1,288,147,521	1,337,754,094	6,688,770.47				6,688,770.47	1,331,065,323.53	1,337,754,094
22	HUMBANG HAUNDUTAN	901,091,977	886,270,173	4,431,350.87				4,431,350.87	881,838,822.14	886,270,173
23	SAMOSIR	335,961,315	344,206,684	1,721,033.42				1,721,033.42	342,485,650.58	344,206,684
24	TAPANULI SELATAN	1,456,425,315	1,036,335,463	5,181,677.32				5,181,677.32	1,031,153,785.69	1,036,335,463
25	PADANG LAWAS	1,029,266,088	1,050,014,086	5,250,070.43				5,250,070.43	1,044,764,015.57	1,050,014,086
26	PADANG LAWAS UTARA	581,016,363	543,372,051	2,716,860.26				2,716,860.26	540,655,190.75	543,372,051
27	MANDAILING NATAL	1,667,546,638	1,592,410,928	7,962,054.64				7,962,054.64	1,584,448,873.36	1,592,410,928
28	P.SIDEMPUAN	1,373,269,933	1,559,096,679	7,795,483.40				7,795,483.40	1,551,301,195.61	1,559,096,679
29	NIAS	87,673,965	161,007,494	805,037.47				805,037.47	160,202,456.53	161,007,494
30	GUNUNG SITOLI	867,398,653	804,458,417	4,022,292.09				4,022,292.09	800,436,124.92	804,458,417
31	NIAS BARAT	99,908,685	96,149,988	480,749.94				480,749.94	95,669,238.06	96,149,988
32	NIAS UTARA	81,634,772	92,399,988	461,999.94				461,999.94	91,937,988.06	92,399,988
33	NIAS SELATAN	229,049,952	319,256,479	1,596,282.40				1,596,282.40	317,660,196.61	319,256,479
34	BELAWAN	241,216,153	187,012,305	935,061.53				935,061.53	186,077,243.48	187,012,305
36	KURANG BAYAR	8,123,421,410	8,123,421,410				8,123,421,410	8,123,421,410	-	8,123,421,410
	JUMLAH	86,455,905,864	85,847,939,239	388,622,589	-	-	8,123,421,410	8,512,043,999	77,335,895,240	85,847,939,239

**DATA PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN
TAHUN 2019**

NO.	KOTA/ KABUPATEN	PIUTANG	PIUTANG	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	SISA PIUTANG
		s/d 31-12-2018	s.d 31-12-2019	0,5%	10%	50%	100%			
1	TEBING TINGGI	6,620,971	6,763,756	33,818.78				33,818.78	6,729,937.22	6,763,756
2	SEI RAMPAH	-	-	-				-	-	-
3	PADANG SIDEMPUAN	-	-	-				-	-	-
4	SIPROK	-	-	-				-	-	-
5	GUNUNG TUA	-	-	-				-	-	-
6	SIBUHUAN	-	-	-				-	-	-
7	RANTAU PRAPAT	128,623,439	104,941,255			52,470,628		52,470,627.50	52,470,627.50	104,941,255
8	AEK KANOPAN	-	-	-				-	-	-
9	KOTA PINANG	-	-	-				-	-	-
10	KABANJAHE	-	55,652,751	278,263.76				278,263.76	55,374,487.25	55,652,751
11	MEDAN SELATAN	-	-	-				-	-	-
12	PEMATANG SIANTAR	-	1,569,143	7,845.72				7,845.72	1,561,297.29	1,569,143
13	PERDAGANGAN	21,175,567	8,541,824	42,709.12				42,709.12	8,499,114.88	8,541,824
14	MEDAN UTARA	-	-	-				-	-	-
15	SIBOLGA	-	-	-				-	-	-
16	BARUS	-	101,327,278.00	506,636.39				506,636.39	100,820,641.61	101,327,278
17	BINJAI	216,735,358	124,952,040	624,760.20				624,760.20	124,327,279.80	124,952,040
18	SIDIKALANG	-	-	-				-	-	-
19	SALAK	-	-	-				-	-	-
20	BALIGE	-	-	-				-	-	-
21	PANGURURAN	32,598,180	33,292,489	166,462.45				166,462.45	33,126,026.56	33,292,489
22	TARUTUNG	6,797,625	6,178,050	30,890.25				30,890.25	6,147,159.75	6,178,050
23	DOLOK SANGGUL	589,592,727	243,245,011		24,324,501			24,324,501.10	218,920,509.90	243,245,011
24	GUNUNG SITOLI	-	-	-				-	-	-
25	TELUK DALAM	-	-	-				-	-	-
26	PANYABUNGAN	8,980,800	1,375,950	6,879.75				6,879.75	1,369,070.25	1,375,950
27	NATAL	-	-	-				-	-	-
28	KISARAN	41,413,510	53,145,004	265,725.02				265,725.02	52,879,278.98	53,145,004
29	LIMA PULUH	-	23,897,123	119,485.62				119,485.62	23,777,637.39	23,897,123
30	TANJUNG BALAI	982,917,953	1,069,655,858				1,069,655,858	1,069,655,858.00	-	1,069,655,858
31	LUBUK PAKAM	170,410,436	150,884,125				150,884,125	150,884,125.00	-	150,884,125
32	STABAT	31,891,415	17,762,461	88,812.31				88,812.31	17,673,648.70	17,762,461
33	P.BRANDAN	15,508,685	7,814,589	39,072.95				39,072.95	7,775,516.06	7,814,589
34	INALUM	1,882,311,530,815	2,462,924,130,429			1,231,462,065,215		1,231,462,065,215	1,231,462,065,215	2,462,924,130,429
JUMLAH		1,884,564,797,481	2,464,935,129,136	2,211,362	24,324,501	1,231,514,535,842	1,220,539,983	1,232,761,611,688	1,232,173,517,448	2,464,935,129,136

**PIUTANG PKB DAN BBN-KB
S/D 31 DESEMBER 2019**

NO	UPT DINAS	PIUTANG AWAL (1 JAN 2019)				REALISASI PIUTANG				SISA PIUTANG(31 DES 2019)				TUNGGAKAN 2019				TUNGGAKAN S/D 31 DES 2019			
		PKB		BBNKB		PKB		BBNKB		PKB		BBNKB		PKB		BBNKB		PKB		BBNKB	
		KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP	KEND	RP
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Medan Utara	13,861	17,452,412,518	9,180	38,118,221,659	8,328	8,191,071,217	7,665	34,729,295,075	5,533	9,261,341,301	1,515	3,388,926,584	4,534	8,452,763,134	3,332	23,424,574,544	10,067	17,714,104,435	4,847	26,813,501,128
2	Medan Selatan	1,637	4,085,865,783	101	35,416,264	199	489,845,065	13	8,973,000	1,438	3,596,020,718	88	26,443,264	534	2,150,340,909	85	84,703,000	1,972	5,746,361,627	173	111,146,264
3	Lubuk Pakam	418	673,452,373	15	13,069,803	40	109,509,560	2	1,094,000	378	563,942,813	13	11,975,803	46	117,510,664	5	6,581,000	424	681,453,477	18	18,556,803
4	Tebing Tinggi	163	180,958,829	21	18,377,830	22	50,118,452	1	52,500	141	130,840,377	20	18,325,330	44	74,459,372	8	5,880,000	185	205,299,749	28	24,205,330
5	Pematang Siantar	735	877,342,197	42	44,460,305	79	152,168,302	16	22,577,916	656	725,173,895	26	21,882,389	158	270,510,693	22	33,853,850	814	995,684,588	48	55,736,239
6	Binjai	175	367,591,539	17	10,062,239	51	86,147,587	5	1,680,000	124	281,443,952	12	8,382,239	41	131,113,485	13	11,581,000	165	412,557,437	25	19,963,239
7	Stabat	69	86,495,632	4	2,997,000	5	1,119,300	0	0	64	85,376,332	4	2,997,000	7	17,179,165	0	0	71	102,555,497	4	2,997,000
8	Tanjung Balai	32	45,602,994	0	0	5	3,239,700	0	0	27	42,363,294	0	0	1	4,189,500	0	0	28	46,552,794	0	0
9	Kisaran	485	471,934,669	12	7,369,322	25	101,936,900	1	663,000	460	369,997,769	11	6,706,322	34	49,393,802	5	3,933,000	494	419,391,571	16	10,639,322
10	Rantau Prapat	67	165,983,437	3	3,440,000	11	15,618,822	1	682,000	56	150,364,615	2	2,758,000	13	68,660,570	2	2,819,000	69	219,025,185	4	5,577,000
11	Lima puluh	52	18,187,222	0	0	1	230,000	0	0	51	17,957,222	0	0	1	577,500	0	0	52	18,534,722	0	0
12	Perdagangan	72	61,333,920	3	8,438,500	9	11,339,012	0	0	63	49,994,908	3	8,438,500	14	19,138,550	3	1,271,000	77	69,133,458	6	9,709,500
13	Serdang Bedagai	22	28,345,714	0	0	0	0	0	0	22	28,345,714	0	0	13	14,192,701	0	0	35	42,538,415	0	0
14	Aek Kanopan	42	40,689,281	0	0	1	508,130	0	0	41	40,181,151	0	0	0	0	0	0	41	40,181,151	0	0
15	Kota Pinang	10	3,699,300	0	0	1	362,250	0	0	9	3,337,050	0	0	2	1,536,500	0	0	11	4,873,550	0	0
16	Kabanjahe	75	580,811,409	18	16,226,912	17	235,189,930	1	700,000	58	345,621,479	17	15,526,912	76	274,088,632	31	41,287,000	134	619,710,111	48	56,813,912
17	Pangkalan Brandan	14	11,078,540	0	0	0	0	0	0	14	11,078,540	0	0	0	0	0	0	14	11,078,540	0	0
18	Sibolga	76	57,134,261	33	158,678,000	5	9,993,375	4	66,700,000	71	47,140,886	29	91,978,000	8	2,656,150	1	1,220,000	79	49,797,036	30	93,198,000
19	Sidikalang	27	24,588,226	9	49,612,918	5	4,927,299	2	9,910,000	22	19,660,927	7	39,702,918	6	616,750	0	0	28	20,277,677	7	39,702,918
20	Tarutung	93	116,740,231	66	376,664,650	66	78,155,675	60	364,425,025	27	38,584,556	6	12,239,625	18	47,326,357	15	158,146,000	45	85,910,913	21	170,385,625
21	Padang Sidempuan	310	245,104,477	185	459,098,324	131	62,038,275	116	281,491,000	179	183,066,202	69	177,607,324	75	52,268,315	54	100,740,000	254	235,334,517	123	278,347,324
22	Panyabungan	26	17,718,714	7	8,069,000	2	367,500	0	0	24	17,351,214	7	8,069,000	1	4,520,250	0	0	25	21,871,464	7	8,069,000
23	Sibuhuan	104	62,140,451	0	0	5	6,715,090	0	0	99	55,425,361	0	0	37	18,423,500	0	0	136	73,848,861	0	0
24	Gunung Sitoli	176	163,498,310	20	152,953,500	11	7,159,575	9	99,849,000	165	156,338,735	11	53,104,500	15	18,010,534	3	16,660,000	180	174,349,269	14	69,764,500
25	Gunung tua	1	718,849	0	0	0	0	0	0	1	718,849	0	0	0	0	0	0	1	718,849	0	0
26	Natal	15	8,275,707	0	0	0	0	0	0	15	8,275,707	0	0	1	0	0	0	16	8,275,707	0	0
27	Tapanuli Tengah	20	26,465,894	5	68,545,500	3	13,112,750	2	58,100,000	17	13,353,144	3	10,445,500	2	119,500	1	2,390,000	19	13,472,644	4	12,835,500
28	Balige	120	90,878,196	71	306,632,250	67	51,661,660	60	244,650,000	53	39,216,536	11	61,982,250	50	38,244,216	39	126,342,000	103	77,460,752	50	188,324,250
29	Teluk Dalam	84	243,502,455	25	199,024,500	4	11,670,750	2	48,000,000	80	231,831,705	23	151,024,500	8	5,145,687	4	2,814,000	88	236,977,392	27	153,838,500
30	Pangururan	104	93,398,194	43	144,777,350	48	51,334,918	24	67,746,100	56	42,063,276	19	77,031,250	93	216,865,709	48	348,004,680	149	258,928,985	67	425,035,930
31	Dolok Sanggul	25	47,542,847	12	13,395,000	0	0	0	0	25	47,542,847	12	13,395,000	1	0	0	0	26	47,542,847	12	13,395,000
32	Salak	8	2,536,989	1	168,000	0	0	0	0	8	2,536,989	1	168,000	1	3,861,812	1	1,940,000	9	6,398,801	2	2,108,000
33	Sipirok	880	401,365,117	684	1,487,910,000	439	198,287,458	424	1,103,489,000	441	203,077,659	260	384,421,000	503	295,385,468	486	1,318,878,000	944	498,463,127	746	1,703,299,000
	JUMLAH	19,998	26,753,394,275	10,577	41,703,608,826	9,580	9,943,828,552	8,408	37,110,077,616	10,418	16,809,565,723	2,169	4,593,531,210	6,337	12,349,099,425	4,158	25,693,618,074	16,755	29,158,665,148	6,327	30,287,149,284

Piutang Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Ayat dan Pasal Penerimaan/ Nomor Perda Pungut	Uraian	Penetapan Pendapatan 2019	Realisasi Penetapan Pendapatan 2019	Piutang 2019/klaim pending dan denda keterlambatan	Pembayaran Piutang 2019	Saldo Piutang 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.1.2.1.1 No 7 Tahun 2018	Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	6,836,551,000 5,645,151,000	4,951,228,711 3,848,197,711	994,459,735 216,173,600 167,641,200 105,351,200 90,338,800		994,459,735 216,173,600 167,641,200 105,351,200 90,338,800	September 2019 Oktober 2019 November 2019 Desember 2019
		UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	1,191,400,000	1,103,031,000	94,274,300 103,999,500 107,514,400 103,669,100 3,845,300 1,652,335		94,274,300 103,999,500 107,514,400 103,669,100 3,845,300 1,652,335	September 2019 Oktober 2019 November 2019 Desember 2019 Klaim pending November 2019 Denda September 2019
		Jumlah.....	6,836,551,000	4,951,228,711	994,459,735		994,459,735	

PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Nama Instansi, Pemerintah, Perusahaan, BUMD, BUMN	Jumlah Piutang	Periode	Penyisihan Piutang		
				Macet	100%	
		37,570,737.00	2013	Macet	100%	37,570,737.00
1	RS. Permata Madina Penyabungan	3,200,000.00				
2	PT. Kurnia Citra Lestari	3,383,737.00				
3	PT. Bumi Angkasa	5,880,000.00				
4	PT. Mandiri Sejahtera	1,302,000.00				
5	PT. Harapan Sentosa	8,216,000.00				
6	PT. Aira Laboratori	15,589,000.00				
		2,885,000.00	2014	Macet	100%	2,885,000.00
7	PT. Gunung Gahapi Sakti	2,085,000.00				
8	PT. Ecogreen Oleochemicals	800,000.00				
		13,137,000.00	2015	Macet	100%	13,137,000.00
9	CV. Bumi Sari Raya	4,113,000.00				
10	Badan Lingkungan Hidup Propsi/Batahan	4,512,000.00				
11	Badan Lingkungan Hidup Propsi/Batahan	4,512,000.00				
		17,113,000.00	2016	Macet	100%	17,113,000.00
12	Badan Lingkungan Hidup Propsi/Batahan	4,885,000.00				
13	Badan Lingkungan Hidup Propsi/Batahan	6,114,000.00				
14	Badan Lingkungan Hidup Propsi/Batahan	6,114,000.00				
		365,329,000.00	2019			36,594,575.00
15	PT. ASTAJAYA	380,000.00	April	Diragukan	50%	190,000.00
16	RS. PATAR ASIH	640,000.00	Mei	Diragukan	50%	320,000.00
17	PT. TRIPATRA ENGINEERING AND KONTRAKTOR	86,000.00	Mei	Diragukan	50%	43,000.00
18	PT. ANUGRAH SARI LAUT	1,101,000.00	Juni	Diragukan	50%	550,500.00
19	PT. BINTANG NAULI	1,034,000.00	Juni	Diragukan	50%	517,000.00
20	PT. GAHARU MAS	797,000.00	Juni	Diragukan	50%	398,500.00
21	PT. OIKOS	73,000.00	Juni	Diragukan	50%	36,500.00
22	PT. DUTA TANGKAS	369,000.00	Agustus	Diragukan	50%	184,500.00
23	CV. JASA MANDIRI	16,910,000.00	Agustus	Diragukan	50%	8,455,000.00
24	CV. JASA MANDIRI	9,150,000.00	Agustus	Diragukan	50%	4,575,000.00
25	PT. PLN LABUHAAN ANGIN	73,000.00	September	Diragukan	50%	36,500.00
26	CV. JASA MANDIRI	10,796,000.00	September	Diragukan	50%	5,398,000.00
27	AYU HANDAYANI	52,000.00	September	Diragukan	50%	26,000.00
28	POLDASU	1,706,000.00	September	Diragukan	50%	853,000.00
29	PT. BUANA SAWIT	458,000.00	September	Diragukan	50%	229,000.00
30	CV. JASA MANDIRI	4,912,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	491,200.00
31	AUTO 2000	285,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	28,500.00
32	CV. KARYA WAWASAN LINGKUNGAN LESTARI	1,130,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	113,000.00
33	CV. KARYA WAWASAN LINGKUNGAN LESTARI	2,320,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	232,000.00
34	CV. KARYA WAWASAN LINGKUNGAN LESTARI	4,356,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	435,600.00
35	PT. PACIFIC PALMINDO	479,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	47,900.00
36	CV. PAMOTU MAJU	810,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	81,000.00
37	CV. PAMOTU MAJU	410,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	41,000.00
38	PT. BUANA SAWIT	458,000.00	Oktober	Kurang Lancar	10%	45,800.00
39	PT. TRIPATRA ENGINEERING AND KONTRAKTOR	73,000.00	November	Kurang Lancar	10%	7,300.00
40	CV. JASA MANDIRI	4,270,000.00	November	Kurang Lancar	10%	427,000.00
41	PT. PACIFIC PALMINDO	1,370,000.00	November	Kurang Lancar	10%	137,000.00
42	YAYASAN PENDIDIKAN BANGSA	2,466,000.00	November	Kurang Lancar	10%	246,600.00
43	YAYASAN PENDIDIKAN BANGSA	1,570,000.00	November	Kurang Lancar	10%	157,000.00
44	PT. INDOJAYA AGRINUSA	2,642,000.00	November	Kurang Lancar	10%	264,200.00
45	PT. INDOJAYA AGRINUSA	2,642,000.00	November	Kurang Lancar	10%	264,200.00
46	PT. INDUSTRI PLYWOOD TJIPTA RIMBA	1,114,000.00	November	Kurang Lancar	10%	111,400.00
47	PT. SARANA ESA CITA	916,000.00	November	Kurang Lancar	10%	91,600.00
48	PT. UNGGUL LESTARI	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
49	PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY	458,000.00	November	Kurang Lancar	10%	45,800.00
50	PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY	825,000.00	November	Kurang Lancar	10%	82,500.00
51	SPBU 14.225.314	607,000.00	November	Kurang Lancar	10%	60,700.00
52	SPBU 14.22.311	607,000.00	November	Kurang Lancar	10%	60,700.00
53	PT. PERTAMINA	220,000.00	November	Kurang Lancar	10%	22,000.00

PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Nama Instansi, Pemerintah, Perusahaan, BUMD, BUMN	Jumlah Piutang	Periode	Penyisihan Piutang		
				Kurang Lancar	10%	
54	PT. AKR CORPORINDO	110,000.00	November	Kurang Lancar	10%	11,000.00
55	PT. AKR CORPORINDO	110,000.00	November	Kurang Lancar	10%	11,000.00
56	PT. NAULI SAWIT	634,000.00	November	Kurang Lancar	10%	63,400.00
57	TPA TADUKAN RAGA	4,286,000.00	November	Kurang Lancar	10%	428,600.00
58	TPA TADUKAN RAGA	1,710,000.00	November	Kurang Lancar	10%	171,000.00
59	TPA NAMORUBE JULU	3,870,000.00	November	Kurang Lancar	10%	387,000.00
60	TPA NAMORUBE JULU	1,710,000.00	November	Kurang Lancar	10%	171,000.00
61	PT. ASIA NAGRO AGUNG JAYA	634,000.00	November	Kurang Lancar	10%	63,400.00
62	PT. BAHANA NUSA INTERINDO	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
63	PT. ANUGERAH TANJUNG MEDAN	814,000.00	November	Kurang Lancar	10%	81,400.00
64	PT. ANUGERAH TANJUNG MEDAN	3,690,000.00	November	Kurang Lancar	10%	369,000.00
65	PT. INO ALAM NUSA	458,000.00	November	Kurang Lancar	10%	45,800.00
66	DLH DELI SERDANG	5,488,000.00	November	Kurang Lancar	10%	548,800.00
67	PT. ANGKASA PURA	916,000.00	November	Kurang Lancar	10%	91,600.00
68	DLH KAB. PADANG LAWAS	8,661,000.00	November	Kurang Lancar	10%	866,100.00
69	PT. GUNTUNG INDAMANNUSA	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
70	PT. SIRINGO-RINGO	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
71	PT. INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
72	PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR 2	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
73	PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH	916,000.00	November	Kurang Lancar	10%	91,600.00
74	PT. WIRA INO MAS	349,000.00	November	Kurang Lancar	10%	34,900.00
75	PT. WIRA INO MAS	980,000.00	November	Kurang Lancar	10%	98,000.00
76	RSU SINGKIL	1,480,000.00	November	Kurang Lancar	10%	148,000.00
77	PT. MAJU ANEKA SAWIT	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
78	PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR I	1,832,000.00	November	Kurang Lancar	10%	183,200.00
79	PT MUSIM MAS KIM II	23,910,000.00	November	Kurang Lancar	10%	2,391,000.00
80	PT BERASTAGI BINTANG ASIA	458,000.00	November	Kurang Lancar	10%	45,800.00
81	PT. MUSIM MAS TANJUNG MULIA	1,170,000.00	November	Kurang Lancar	10%	117,000.00
82	PT. MUSIM MAS MARTUBUNG	980,000.00	November	Kurang Lancar	10%	98,000.00
83	PT. INTI BENUA PERKASATAMA BUKIT KAPUR	2,674,000.00	November	Kurang Lancar	10%	267,400.00
84	PT. KURNIA MITRA SAWIT	3,690,000.00	November	Kurang Lancar	10%	369,000.00
85	PT. KWALA MAS SAWIT ABADI	3,690,000.00	November	Kurang Lancar	10%	369,000.00
86	PT. MUTIARA AGRO SEJAHTERA	3,690,000.00	November	Kurang Lancar	10%	369,000.00
87	PT. KAMPARINDO AGRO INDUSTRI	3,690,000.00	November	Kurang Lancar	10%	369,000.00
88	PT. ASTA KERAMAS	4,005,000.00	November	Kurang Lancar	10%	400,500.00
89	UD. SEJATI	2,850,000.00	November	Kurang Lancar	10%	285,000.00
90	UD. SEJAHTERA	1,450,000.00	November	Kurang Lancar	10%	145,000.00
91	CV. JASA MANDIRI	6,434,000.00	Desember	Lancar	0.50%	32,170.00
92	CV. JASA MANDIRI	4,620,000.00	Desember	Lancar	0.50%	23,100.00
93	PT. PACIFIC PALMINDO	479,000.00	Desember	Lancar	0.50%	2,395.00
94	PT. INDOJAYA AGRINUSA	2,642,000.00	Desember	Lancar	0.50%	13,210.00
95	PT. INDOJAYA AGRINUSA	2,642,000.00	Desember	Lancar	0.50%	13,210.00
96	PT. INDUSTRI PLYWOOD TJIPTA RIMBA	1,114,000.00	Desember	Lancar	0.50%	5,570.00
97	PT. SARANA ESA CITA	916,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,580.00
98	PT. UNGGUL LESTARI	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
99	PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY	1,710,000.00	Desember	Lancar	0.50%	8,550.00
100	PT. NAULI SAWIT	15,046,000.00	Desember	Lancar	0.50%	75,230.00
101	PT. ASIA NAGRO AGUNG JAYA	634,000.00	Desember	Lancar	0.50%	3,170.00
102	PT. ASIA NAGRO AGUNG JAYA	2,755,000.00	Desember	Lancar	0.50%	13,775.00
103	PT. BAHANA NUSA INTERINDO	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
104	PT. INO ALAM NUSA	458,000.00	Desember	Lancar	0.50%	2,290.00
105	PT. INO ALAM NUSA	458,000.00	Desember	Lancar	0.50%	2,290.00
106	PT. GUNTUNG INDAMANNUSA	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
107	PT. GUNTUNG INDAMANNUSA	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
108	PT. SIRINGO-RINGO	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
109	PT. INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
110	PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR 2	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
111	PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH	916,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,580.00

PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Nama Instansi, Pemerintah, Perusahaan, BUMD, BUMN	Jumlah Piutang	Periode	Penyisihan Piutang		
				Lancar	0.50%	
112	PT. WIRA INO MAS	349,000.00	Desember	Lancar	0.50%	1,745.00
113	PT. WIRA INO MAS	980,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,900.00
114	PT. MAJU ANEKA SAWIT	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
115	PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR I	1,832,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,160.00
116	PT MUSIM MAS KIM II	2,763,000.00	Desember	Lancar	0.50%	13,815.00
117	PT BERASTAGI BINTANG ASIA	458,000.00	Desember	Lancar	0.50%	2,290.00
118	PT BERASTAGI BINTANG ASIA	1,710,000.00	Desember	Lancar	0.50%	8,550.00
119	PT. MUSIM MAS TANJUNG MULIA	1,170,000.00	Desember	Lancar	0.50%	5,850.00
120	PT. MUSIM MAS TANJUNG MULIA	4,355,000.00	Desember	Lancar	0.50%	21,775.00
121	PT. MUSIM MAS BELAWAN	82,000.00	Desember	Lancar	0.50%	410.00
122	PT. MUSIM MAS BELAWAN	1,268,000.00	Desember	Lancar	0.50%	6,340.00
123	PT. MUSIM MAS BELAWAN	82,000.00	Desember	Lancar	0.50%	410.00
124	PT. MUSIM MAS BELAWAN	1,268,000.00	Desember	Lancar	0.50%	6,340.00
125	PT. MUSIM MAS BELAWAN	16,595,000.00	Desember	Lancar	0.50%	82,975.00
126	PT. MUSIM MAS MARTUBUNG	980,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,900.00
127	PT. MUSIM MAS MARTUBUNG	6,699,000.00	Desember	Lancar	0.50%	33,495.00
128	PT. INTI BENUA PERKASATAMA LUBUK GAUNG	9,110,000.00	Desember	Lancar	0.50%	45,550.00
129	PT. BELAWAN BERLIAN INDONESIA	2,175,000.00	Desember	Lancar	0.50%	10,875.00
130	PT MUSIM MAS KIM I	8,144,000.00	Desember	Lancar	0.50%	40,720.00
131	PT MUSIM MAS KIM III	2,900,000.00	Desember	Lancar	0.50%	14,500.00
132	PT MUSIM MAS EX TLB	855,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,275.00
133	PT. SENTRAL ANEKA TEKNOTAMA	855,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,275.00
134	PT. INTI BENUA PERKASATAMA PELABUHAN	5,400,000.00	Desember	Lancar	0.50%	27,000.00
135	PT. CIPTA AGRO SEJATI	3,690,000.00	Desember	Lancar	0.50%	18,450.00
136	PT. KARYA BHAKTI MANUNGGAL	324,000.00	Desember	Lancar	0.50%	1,620.00
137	PT. PUTRA ROBURAN	7,175,000.00	Desember	Lancar	0.50%	35,875.00
138	PT. PATI SARI	4,840,000.00	Desember	Lancar	0.50%	24,200.00
139	PT. CIOMAS	288,000.00	Desember	Lancar	0.50%	1,440.00
140	ULPL GLUGUR	2,370,000.00	Desember	Lancar	0.50%	11,850.00
141	PT. SRI SUMATERA	1,865,000.00	Desember	Lancar	0.50%	9,325.00
142	RSU ESHMUN	559,000.00	Desember	Lancar	0.50%	2,795.00
143	DLH LABUHAN BATU UTARA	21,020,000.00	Desember	Lancar	0.50%	105,100.00
144	DLH LABUHAN BATU UTARA	9,458,000.00	Desember	Lancar	0.50%	47,290.00
145	PT. BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH	824,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,120.00
146	PTPN III KEBUN SEI BARUHUR	216,000.00	Desember	Lancar	0.50%	1,080.00
147	PT. HARI SEJAHTERA TAPIOKA	230,000.00	Desember	Lancar	0.50%	1,150.00
148	PT. GUNUNG MELAYU	384,000.00	Desember	Lancar	0.50%	1,920.00
149	PT. SUPRA MATRA ABADI	384,000.00	Desember	Lancar	0.50%	1,920.00
150	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LANGKAT	768,000.00	Desember	Lancar	0.50%	3,840.00
151	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TOBA SAMOSI	690,000.00	Desember	Lancar	0.50%	3,450.00
152	PT. KARYA PRATAMA NIAGA JAYA	634,000.00	Desember	Lancar	0.50%	3,170.00
153	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	951,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,755.00
154	PT. MUSIM MAS ANGGADA	855,000.00	Desember	Lancar	0.50%	4,275.00
	TOTAL	436,034,737.00				107,300,312.00

RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 - 2019

NO	DBH	PMK 140/PMK.07/2019						PENYELESAIAN KB/LB DI TW IV TA 2019					NETTO	SISA KB 2018 PMK 180/PMK.07/ 2019 menurut BPKAD Provsu	SISA LB 2017- 2018	KB 2019 PMK 36/PMK.07/2020 (PANDEMI COVID-19)	KB 2017-2019
		2017		2018		TOTAL		PENYELESAIAN KB DBH			PEMOTONGAN LB DBH (PER- 8/PK/2019)						
		KB	LB	KB	LB	KB	LB	SALUR NOVEMBER	SALUR DESEMBER			TOTAL					
								PMK 167/PMK.07/2 019	PMK 180/PMK.07/2019	SEBAGIAN KB 2018							
2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017									
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9	10	11	12=9+10+11	13	14=12-3	15=5-11	16=8-13	17	18=15+17
#	PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	4,900,396,998	6,969,162,190	1,179,543,268	349,966,076	6,079,940,266	7,319,128,266	0	4,900,396,998	0	4,900,396,998	3,454,039,664	1,446,357,334	1,179,543,268	3,865,088,602	64,363,083,243	65,542,626,511
#	Pajak Bumi Dan Bangunan	46,883,223,629	0	9,407,731,492	2,050,035,868	56,290,955,121	2,050,035,868	0	46,883,223,629	0	46,883,223,629	0	46,883,223,629	9,407,731,492	2,050,035,868	27,047,008,984	36,454,740,476
#	Cukai Hasil Tembakau	4,836,523	0	203,901,897	0	208,738,420	0	0	4,836,523	0	4,836,523	0	4,836,523	203,901,897	0	0	203,901,897
TOTAL PAJAK		51,788,457,150	6,969,162,190	10,791,176,657	2,400,001,944	62,579,633,807	9,369,164,134	0		0	51,788,457,150	3,454,039,664	48,334,417,486	10,791,176,657	5,915,124,470	91,410,092,227	102,201,268,884
4	KEHUTANAN	4,321,494,749		1,354,588,591	216,000,000	5,676,083,340	216,000,000	0	4,321,494,749	0	4,321,494,749	0	4,321,494,749	1,354,588,591	216,000,000	1,003,404,864	2,357,993,455
5	MINERBA	1,958,628,030	1,588,224,365	9,060,125,499	53,101,543	11,018,753,529	1,641,325,908	352,518,777	1,606,109,253	0	1,958,628,030	1,588,224,365	370,403,665	9,060,125,499	53,101,543	2,448,347,679	11,508,473,178
6	MIGAS	0	816,273,515	1,676,004,543	0	1,676,004,543	816,273,515	0		0	0	816,273,515	(816,273,515)	1,676,004,543	0	285,738,201	1,961,742,744
7	PANAS BUMI	84,963,165	0	0	8,580,629	84,963,165	8,580,629	0	84,963,165	0	84,963,165	0	84,963,165	0	8,580,629	0	0
8	PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SDA		6,365,085,944	2,404,497,880	12,090,718,633	277,682,172	18,455,804,577	2,682,180,052	352,518,777	6,012,567,167	0	6,365,085,944	2,404,497,880	3,960,588,064	12,090,718,633	277,682,172	3,737,490,744	15,828,209,377
TOTAL PAJAK +SDA		58,153,543,094	9,373,660,070	22,881,895,290	2,677,684,116	81,035,438,384	12,051,344,186	352,518,777	6,012,567,167	0	58,153,543,094	5,858,537,544	52,295,005,550	22,881,895,290	6,192,806,642	95,147,582,971	118,029,478,261

**PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM HAJI
PER 31 DESEMBER 2019**

PIUTANG PENDAPATAN - UMUM

No.	Uraian	Tanggal Kwitansi (Tagihan)	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Zaleha	3/8/2017	33 bulan	100%	1,200,000	Macet	1,200,000.00
2	Bagara Siregar	4/1/2017	32 bulan	100%	11,181,450	Macet	11,181,450.00
3	Wulan Sundari	10/6/2017	26 bulan	100%	4,479,000	Macet	4,479,000.00
4	Endang Lestari	11/21/2017	25 bulan	100%	5,485,250	Macet	5,485,250.00
5	Usa Dewi	11/21/2017	25 bulan	100%	19,968,050	Macet	19,968,050.00
6	Revansyah Hasibuan	11/21/2017	25 bulan	100%	5,526,750	Macet	5,526,750.00
7	Guslina	3/21/2018	21 bulan	100%	4,464,950	Macet	4,464,950.00
8	Cici	7/2/2018	17 bulan	100%	10,145,800	Macet	10,145,800.00
9	Baby Husni	6/27/2019	6 bulan	50.0%	4,657,000	Diragukan	2,328,500.00
10	Nuraini	7/31/2019	5 bulan	50.0%	5,500,297	Diragukan	2,750,148.50
11	Nurlina	7/24/2019	5 bulan	50.0%	6,286,944	Diragukan	3,143,472.00
Jumlah					78,895,491		70,673,370.50

PIUTANG PENDAPATAN - BPJS

No.	Uraian	Tanggal Kwitansi (Tagihan)	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Klaim Obat Rajal dan Ranap Januari 2019	14-Aug-19	4 bulan	50.0%	131,101,267	Diragukan	65,550,633.50
2	Klaim Rajal dan Ranap Juni 2018/Pending	28 Agt 2019	4 bulan	50.0%	451,765,500	Diragukan	225,882,750.00
3	Klaim Rajal dan Ranap Maret 2019/Pending	7-Sep-19	3 bulan	50.0%	731,436,071	Diragukan	365,718,035.50
4	Klaim Rajal dan Ranap Agustus 2019	4-Nov-19	1 bulan	10.0%	2,970,635,400	Kurang Lancar	297,063,540.00
5	Klaim Rajal dan Ranap Mei 2019/Pending	6-Nov-19	1 bulan	10.0%	496,998,500	Kurang Lancar	49,699,850.00
6	Klaim Obat Rawat Jalan April 2019	12-Nov-19	1 bulan	10.0%	124,360,044	Kurang Lancar	12,436,004.40
7	Klaim Obat Rawat Jalan Mei 2019	12-Nov-19	1 bulan	10.0%	162,621,307	Kurang Lancar	16,262,130.70
8	Klaim Alat Kesehatan September 2019	13-Nov-19	1 bulan	10.0%	1,000,000	Kurang Lancar	100,000.00
9	Klaim Rajal dan Ranap Mei 2019/Pending II	14-Nov-19	1 bulan	10.0%	60,635,843	Kurang Lancar	6,063,584.30
10	Klaim Rajal dan Ranap Juni 2019/Pending	25-Nov-19	1 bulan	10.0%	402,562,800	Kurang Lancar	40,256,280.00
11	Klaim Rajal dan Ranap September 2019	26-Nov-19	1 bulan	10.0%	3,454,391,300	Kurang Lancar	345,439,130.00
12	Klaim Rajal dan Ranap Agustus 2019/Pending	29-Nov-19	1 bulan	10.0%	602,957,300	Kurang Lancar	60,295,730.00
13	Klaim Obat Rawat Jalan Juni 2019	17-Dec-19	0 bulan	0.5%	163,251,496	Lancar	816,257.48
14	Klaim Ambulance bulan Juli 2019	17-Dec-19	0 bulan	0.5%	375,000	Lancar	1,875.00
15	Klaim Ambulance bulan Agustus 2019	18-Dec-19	0 bulan	0.5%	150,000	Lancar	750.00
16	Klaim Ambulance bulan September 2019	18-Dec-19	0 bulan	0.5%	225,000	Lancar	1,125.00
17	Klaim Ambulance bulan Oktober 2019	18-Dec-19	0 bulan	0.5%	675,000	Lancar	3,375.00
18	Klaim Rajal dan Ranap Oktober 2019	27-Dec-19	0 bulan	0.5%	4,239,573,200	Lancar	21,197,866.00
Jumlah					13,994,715,028		1,506,788,916.88

REKAPITULASI PEMBAYARAN ANGSURAN PENJUALAN TANAH EKS PRPTE DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama Pembeli dan Alamat Rumah	Harga Tanah dan Luas Tanah	Angsuran Pertama									Total Pembayaran	Sisa Yang Harus Di Bayar
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1.	Ny. Hj. Nuraina Maas (Janda Alm. Ir. Asli Hasibuan) Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 C	129,611,000 226 m ²	6,480,550	7,165,550	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	2,740,000	-	-	42,785,550	86,825,450
2.	Ir. Mahrum Sipayung, MS Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 E	129,611,000 226 m ²	6,480,550	7,165,550	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	64,705,550	64,905,450
3.	Ir. Washington Siregar Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 F	130,758,000 228 m ²	6,537,900	7,228,900	8,292,000	8,292,000	8,292,000	8,292,000	8,292,000	4,837,000	-	53,525,900	77,232,100
4.	Ir. Amiruddin Muhammad Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 G	129,037,500 225 m ²	6,451,875	7,133,875	8,184,000	8,184,000	8,184,000	8,184,000	4,092,000	-	-	43,961,875	85,075,625
5.	Ir. Benari Ambarita Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 H	130,184,500 227 m ²	6,509,225	7,199,225	8,280,000	8,280,000	8,280,000	6,900,000	-	-	-	38,939,225	91,245,275
6.	Sugio, SH Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 J	129,611,000 226 m ²	6,480,550	7,165,550	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	-	56,485,550	73,125,450
7.	Ir. R. Effendi Siboro, M. Si Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 K	130,184,500 227 m ²	6,509,225	7,199,225	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	690,000	57,569,225	72,615,275
8.	Binsar Hutagaol Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 L	129,611,000 226 m ²	6,480,550	7,165,550	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,220,000	64,705,550	64,905,450
9.	Elmando Hutabarat Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 M	104,950,500 183 m ²	5,247,525	5,802,525	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	52,422,525	52,527,975
10.	Ny. Kumala Sari (Janda Alm. Saridin) Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 N	104,377,000 182 m ²	5,218,850	5,769,850	6,612,000	6,612,000	6,612,000	6,612,000	6,612,000	6,612,000	6,612,000	52,053,850	52,323,150
11.	Irwan Tampubolon Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 O	104,377,000 182 m ²	5,218,850	5,769,850	6,612,000	6,612,000	6,612,000	6,612,000	6,612,000	6,612,000	-	45,441,850	58,935,150
12.	Narwin Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 P	103,230,000 180 m ²	5,161,500	5,706,500	6,540,000	6,540,000	6,540,000	6,540,000	6,540,000	6,540,000	6,540,000	51,486,500	51,743,500
13.	Nurhayati, M Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 Q	71,687,500 125 m ²	3,584,375	3,964,375	4,560,000	4,560,000	4,560,000	4,560,000	4,560,000	4,560,000	4,560,000	35,884,375	35,803,125
14.	Beni Pandiangan Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 R	87,172,000 152 m ²	4,358,600	4,819,600	5,532,000	5,532,000	5,532,000	5,532,000	5,532,000	5,532,000	5,532,000	43,543,600	43,628,400
15.	Ir. Rustam Effendi Rambe Jl. Asrama Komp. Disbun No. 124 R	175,491,000 306 m ²	8,774,550	9,701,550	11,124,000	11,124,000	11,124,000	11,124,000	11,124,000	11,124,000	11,124,000	87,569,550	87,921,450
JUMLAH.....		1,789,893,500	89,494,675	98,957,675	113,556,000	113,556,000	113,556,000	112,176,000	95,704,000	85,417,000	58,158,000	791,080,675	998,812,825

REKAPITULASI KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH TAHAP I

L

SUMBER INFORMASI/DATA		URAIAN/TEMUAN	TAHUN KEJADIAN	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	NILAI	SISA 31/12/2018
LHP atas Belanja 2005 dan 2006	1	Pembebanan biaya pengujian laboratorium dalam kontrak pekerjaan Hotmix senilai Rp663.072.298,44 tidak sesuai ketentuan	2005 dan 2006	Dinas Jalan dan Jembatan	PT Gaol Maju Jaya	8.500,000	-
					CV Mentari Jasa Mulia	4.230,000	4.230,000
					PT Sifra Kasih	11.030,000	11.030,000
					CV Citra Buana	7.530,000	7.530,000
					CV Trisula	2.295,000	2.295,000
					CV Kurnia Pratama Kencana	4.270,000	4.270,000
					PT Tri Embun Surya Matio	9.032,400	9.032,400
					CV Pemuda Baru	4.867,500	4.867,500
					UD Razasa Karya	3.310,000	-
					CV Rizki Rizka Jaya	3.420,000	3.420,000
					CV Beraspati	370,000	370,000
					CV Abadi Jaya Makmur	3.180,000	3.180,000
					CV Pemuda Panca Perkasa	-	-
					PT Tiga Dimensi Karya Konstruksi	7.566,000	7.566,000
					CV Nurani	9.299,000	9.299,000
					PT Kurpahi Jaya	8.400,000	8.400,000
					CV Cendana Jaya Mulia Kencana	11.276,000	11.276,000
					CV Gemilang Aneka	4.390,000	4.390,000
					CV Anugrah Muara Sejati	4.140,000	-
					PT Medan Jaya Cipta Sarana	49.635,000	-
					PT Budi Graha Perkasa	12.100,000	12.100,000
					CV Juanda Prima Eng	3.519,900	3.519,900
					CV Kenali Jasa	8.000,000	8.000,000
					CV Votride	8.000,000	8.000,000
					CV Sabarita	3.500,000	3.500,000
					PT Dian Perkasa	8.900,000	8.900,000
					PT Karya Agung Sejati Nadajaya	8.100,000	8.100,000
					CV Pusaka Agung	6.435,000	6.435,000
					CV Pembangunan Nadajaya	3.850,000	-
					PT Jaya Mitra Konstruksi	7.485,500	7.485,500
					UD Sri Haji	285,000	285,000
					PT Nauli Dolpa Putra	6.420,000	6.420,000
					PT Bersama Abadi Jaya	1.025,000	1.025,000
					CV Semangat Baru	5.400,000	5.400,000
					CV Almandili	4.240,000	4.240,000
					PT Winda Pratama Karya	5.450,000	5.450,000
					CV Mentari Jasa Mulia	4.220,000	4.220,000
					UD Razasa Karya	4.320,000	-
					PT Dian Perkasa	2.662,000	2.662,000
					CV Asih Garam	3.910,000	3.910,000
					PT Winda Pratama Karya	6.000,000	6.000,000
					CV Cendana Jaya Mulia Kencana	4.906,000	4.906,000
					PT Menara Kharisma	3.806,000	3.806,000
					PT Dian Perkasa	3.600,000	-
					PT Anugrah Bahari Sejahtera	4.150,000	4.150,000
					PT Roy Grup	3.786,000	3.786,000
					CV FIFO	5.000,000	5.000,000
					CV Penambangan Jaya	6.500,000	6.500,000
					PT Bintang Saudara	17.500,000	17.500,000
					PT Muslimindo Nanda Prima	7.500,000	7.500,000
					CV Harapan Insani	10.000,000	10.000,000
					CV Faisal Kontraktor	6.000,000	6.000,000
					PT Nuansa Alamsah Lestari	22.330,000	22.330,000
					CV Care Indonusa	6.000,000	6.000,000
					CV Muara Kasih	6.110,000	6.110,000
					CV Mitra Harapan Baru	10.195,000	10.195,000
					CV Surya	9.800,000	9.800,000
					PT Medan Jaya Cipta Sarana	700,000	700,000
					CV Fifo	40.500,000	40.500,000
					CV Chokki Karya	4.138,000	4.138,000
					CV Karya Mitra Konstruksi	16.705,000	16.705,000
					CV Ersima Godung	12.000,000	12.000,000
					CV Lawrensi	-	-
					PT Sinar Kasih Reinhard	5.217,998	5.217,998
					PT Sabarita Perkasa Abadi	10.700,000	10.700,000
					PT Pusaka Agung Jayakarta	21.630,000	-
					CV Risma Karya	16.200,000	16.200,000
Fa. Puramot Jaya	7.500,000	-					
CV Razasa Karya	5.600,000	-					
PT Sinar Kasih Reinhard	8.760,000	8.760,000					
PT Subur Sari Lasderich	15.295,000	15.295,000					
PT Kuala Mas	3.600,000	3.600,000					
CV Tinma Sarina	9.900,000	9.900,000					
Fa. Puramot Jaya	11.330,000	11.330,000					
PT Jaya Mitra Konstruksi	4.000,000	-					
PT Putra Rezki Mandiri	4.070,000	4.070,000					
PT Yudha Karya	4.800,000	4.800,000					
PT Tiga Dimensi Karya Konstruksi	6.175,000	-					
PT Ganda Rima Sari	3.725,000	3.725,000					
PT Siege Sinar Gemilang	3.180,000	3.180,000					
PT Komrit Jaya Mukti	800,000	800,000					
CV Harapan Insani	14.800,000	14.800,000					
PT Nagaseribu	500,000	500,000					
PT Istaka Karya	5.500,000	-					
PT Karya Muda Nasional	6.000,000	-					
PT Usaha Sejahtera Mandiri	11.000,000	11.000,000					
PT Ipin	11.000,000	11.000,000					
LHP atas LKPD TA 2007	2	Pengeluaran bantuan keuangan kepada para guru besar/profesor Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Provsu sebesar Rp7.499.997.000,00 tidak tepat sasaran	2007	Biro Bina Sosial dan Kemasyarakatan	Asosiasi Profesor Indonesia (API) Sumatera Utara	7.499,997,000	7.499,997,000

REKAPITULASI KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH TAHAP I

L

SUMBER INFORMASI/DATA		URAIAN/TEMUAN	TAHUN KEJADIAN	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	NILAI	SISA 31/12/2018			
LHP atas LKPD TA 2008	3	Penghitungan volume pekerjaan aspal (AC-WC dan AC-BC) pada Dinas Jalan dan Jembatan tidak mengacu pada spesifikasi teknis kontrak dan merugikan keuangan Daerah sebesar Rp4.844.874.285,45	2008	Dinas Jalan dan Jembatan	PT Jamal Putra	527.417.376	526.417.376			
					PT Cipta Prasetyo Group	976.791.643	976.791.643			
					PT Rony Putra Mandiri	976.046.880	966.046.880			
					PT Surya Jaya Prasetya	738.064.239	735.064.239			
					PT Surya Barumun Setia	427.430.477	425.930.477			
					PT Panbar Perkasa Sejahtera	447.472.821	437.472.821			
	6	Pembelian belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Provsu merugikan keuangan Daerah sebesar Rp1.200.711.500,00	2008	Sekretariat DPRD	PT Naga Saribu	751.650.850	749.650.850			
					Syahru M. Pasaribu/H. Amas	51.185.500	51.185.500			
					H.M. Zaki Abdullah	79.022.500	79.022.500			
					Eddi Rangkuji	49.582.500	49.582.500			
					Analisman Zaluku, S.Sos	36.591.000	36.591.000			
					Drs. H.Riial Sirait	38.265.000	38.265.000			
					Drs. H. Banuaran Ritonga	65.067.000	65.067.000			
					Drs. H. Rahmad P. Hasibuan	59.395.000	59.395.000			
					Belli Simanjuntak	52.289.000	52.289.000			
					Sigit Pramono Asri, SE	66.270.000	66.270.000			
					Heriansyah	60.549.500	60.549.500			
					Drs. H. Ibrahim Saky BB, MAP	54.904.000	54.904.000			
					Drs. Parluhutan Siregar	79.066.000	79.066.000			
					DR. (HC) Drs. Toqa Sianturi	55.096.500	55.096.500			
					Pdt. Petrus Sihombing S.Th	83.461.000	83.461.000			
					H. Raden M. Syafii, SH	61.300.000	61.300.000			
					Ir. Tosim Gurning	25.728.000	25.728.000			
					Ir. Edison Siantun	27.445.000	27.445.000			
					Zakaria Bangun, SH, MH	26.080.000	26.080.000			
					Drs. H. Mahmuddin Lubis	59.749.000	59.749.000			
					Drs. H. Yulizar P. Lubis	49.350.000	49.350.000			
					Sobambowo Bu'ulolo	45.818.000	45.818.000			
					Budiman P. Nadapdap	53.457.000	53.457.000			
					H. Mutawalli Ginting	21.040.000	21.040.000			
	7	Kemahalan harga pada pengadaan komputer dan printer merugikan keuangan Daerah sebesar Rp221.671.839,14	2008	Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	CV Zam Zam	124.843.454	124.843.454			
					CV Nikita GC	16.589.345	16.589.345			
					CV Karva Aditya	8.487.500	8.487.500			
CV Lega Kalsio					9.910.220	9.910.220				
CV Ezra Jaya Kencana					8.318.929	8.318.929				
CV Tunas Asli Mulia					15.391.820	15.391.820				
8	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tidak sesuai kontrak sebesar Rp534.798.413,49	2008 dan 2009	Dinas Bina Marga	PT. Karya Agung Pratama Cipta	187.877.463.87	183.877.463.87				
				PT. Tisa Lestari	346.920.949.62	341.920.949.62				
LHP atas Pemeriksaan Infrastruktur Jalan Jembatan Tahun 2009	10	Paket pekerjaan pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala jalan TA 2008 dan 2009	2008 dan 2009	Dinas Jalan dan Jembatan	PT. Karya Murni Perkasa	320.673.058.48	207.661.458.48			
	11	Peningkatan jalan provinsi jurusan Tomok - Onan	2008 dan 2009	Dinas Jalan dan	PT. Lampiri Djaya Abadi -	5.970.487.039.70	5.970.487.039.70			
	12	Peningkatan jalan provinsi jurusan Dolok Sanggul	2008 dan 2009	Dinas Jalan dan	PT. Subur Sari Lasderich	2.343.840.944.83	2.334.208.485.43			
LHP atas LKPD TA 2009	13	Penetapan HPS pada pengadaan kendaraan dinas Biro Perlengkapan Setda Provsu T.A. 2009 tidak sesuai ketentuan sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp76.819.091,27	2009	Biro Perlengkapan	CV Tri Mutiara Indah	76.819.091.27	76.819.091.27			
					14	Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal pada beberapa SKPD yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp195.464.640,34	2009	Dinas Tarukim	CV Ellatec Dwidaya	37.785.592.63
	CV Nias Indah	35.149.227.04	-							
	Dinas Pendapatan	UD Razasa Karya	13.704.469.18	-						
		PT Zhaifira Tetap Jaya	23.373.035.99	-						
	Biro Perlengkapan	CV Dian Wira Putra	18.742.865.50	-						
		CV Difa Indah Lestari	54.790.350.00	40.000.000.00						
	CV Lamro	5.289.100.00	-							
	CV Nur Wahyudi	6.630.000.00	-							
	15	Realisasi belanja modal pengadaan barang/jasa di Setda pada T.A. 2009 dilaksanakan belum sesuai ketentuan (kekurangan pekerjaan sebesar Rp241.003.000,00, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp278.785.184,00, dan kemahalan harga sebesar Rp24.586.943,80)	2009	Biro Perlengkapan				CV Shibarasi Karya	6.625.000.00	6.625.000.00
								CV Aneka Niaga	4.750.000.00	4.750.000.00
								CV Nabila	26.700.000.00	25.700.000.00
								CV Aneka Niaga	8.000.000.00	8.000.000.00
								PT Elzetar	35.100.000.00	30.100.000.00
								Biro Keuangan	CV Sinar Permata Indah	69.600.000.00
					CV Hamko	21.296.884.00	16.296.884.00			
					CV Sumber Rezeki Utama	6.896.400.00	1.724.100.00			
					CV Mega Komputindo	132.000.000.00	132.000.000.00			
					Biro Pemerintahan	CV Mutiara Samudera	49.373.000.00	49.373.000.00		
	CV Betha	35.530.000.00	-							
	Biro Pembangunan	CV Betha	28.430.000.00	28.430.000.00						
		CV Betha	112.200.000.00	112.200.000.00						
		CV Betha	2.241.000.00	2.241.000.00						
	Dinas Pendapatan	CV Betha	18.380.343.80	18.380.343.80						
CV Buana Soro		6.206.600.00	-							

REKAPITULASI KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH TAHAP I

L

SUMBER INFORMASI/DATA	URAIAN/TEMUAN	TAHUN KEJADIAN	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	NILAI	SISA 31/12/2018
LHP atas Belanja TA 2009 dan 2010	16 Beberapa pekerjaan di Sekretariat DPRD dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp101.302.520,36	2009 dan 2010	Sekretariat DPRD	CV Medan Jaya Raya	7.809.500,00	-
				CV Medcom Jaya Perkasa	12.257.140,00	-
				CV Medan Jaya Raya	5.539.300,00	-
				CV Medan Jaya Raya	5.740.000,00	-
				CV Anugrah Rezeki Prima	3.234.940,80	-
				CV Sarana Utama Mandiri	48.800.000,00	48.800.000,00
	17 Pembayaran tidak sesuai fisik pekerjaan sebesar Rp181.155.537,50 pada paket pekerjaan di Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat	2009 dan 2010	Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	CV Natali Putra	17.921.639,56	17.921.639,56
				CV Puttar Tugan Mandiri	133.609.748,00	133.609.748,00
	18 Terdapat dua kontrak atas pekerjaan yang sama pada pekerjaan pembangunan mess mahasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Yogyakarta tahun 2008 dan kelebihan pembayaran yang berindikasi merugikan daerah sebesar Rp918.512.611,37	2009 dan 2010	Dinas Tarukim	PT Parik Sabungan- Medan	918.512.611,37	96.025.611,37
19 Biaya pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan melebihi harga pasar sebesar Rp385.737.584,80	2009 dan 2010	Dinas Kesehatan	PT Antrama	219.240.000,00	187.095.200,00	
			CV Sarida Jaya	166.497.584,80	-	
20 Terdapat kekurangan fisik senilai Rp570.056.902,49, pemborosan senilai Rp61.689.558,36, serta jaminan pelaksanaan senilai Rp132.181.350,00 yang belum dicairkan	2009 dan 2010	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	CV Sinta Nuriah	6.291.974,77	-	
			UD Razasa	59.993.879,04	-	
			CV Cipta Muda	27.593.388,01	-	
			CV Hanovan Natama	10.106.903,45	-	
			CV Anugrah Prima Abadi	49.122.573,07	-	
			PT Andry Cipta Karya	47.237.013,05	-	
			CV Pembangunan Baru	29.513.970,58	-	
			PT Panbar Perkasa Sejahtera	125.086.087,87	5.000.000,00	
21 Terjadi rekayasa pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan pada kontrak peningkatan jalan penghubung/poros di PTA Rawa Kolang SP 3 Kabupaten Tapanuli Tengah dan indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp46.974.467,08	2009 dan 2010	Dinas Tenaga Kerja	CV Hotma	46.974.467,08	46.974.467,08	
LHP LKPD TA 2010	22 Harga pengadaan komputer notebook pada Dinas Pendidikan diperhitungkan lebih tinggi sebesar Rp49.959.000,00	2010	Dinas Pendidikan	CV PILAR PERKASA	49.959.000,00	49.959.000,00
	23 Terdapat kekurangan pekerjaan pengadaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp39.939.760,00	2010	Dinas Pendidikan	CV TITIAN BERKAH	39.939.760,00	39.939.760,00
	24 Terdapat sisa kas Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kesbangpol dan Linmas sebesar Rp2.413.013.643,00 belum dicairkan	2010	Badan Kesbangpol dan Linmas	Darwinsyah, SH	1.275.784.593,00	1.275.784.593,00
	25 Pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp4.058.245.862,00 belum disetor ke kas daerah	2010	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD (RB)	4.058.245.862,00	3.258.245.862,00
LHP atas Belanja TA 2011	26 Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp108.839.434,05 dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak senilai Rp2.232.952.938,59 pada paket pekerjaan pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala jalan Dinas Bina Marga TA 2011	2011	Dinas Bina Marga	PT WKDU	359.428.395,80	359.428.395,80
				PT HJR	42.460.488,68	42.460.488,68
				PT SMJ	530.486.867,54	374.773.466,43
				PT FPA	101.893.413,60	-
				PT EMB	378.147.209,00	-
				PT WSC	261.202.750,00	-
				PT AK	9.804.797,57	-
				PT SMJ	658.368.450,45	67.909.758,75
	27 Terdapat pemahalan harga atas pengadaan barang secara langsung pada Biro Perlengkapan dan Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp103.895.000,00 yang berindikasi merugikan keuangan daerah	2011	Biro Umum	CV EJK	7.650.000,00	7.150.000,00
				CV TU	6.668.750,00	6.668.750,00
				CV TU	10.543.750,00	10.543.750,00
				CV GT	5.000.000,00	5.000.000,00
				CV TU	5.325.000,00	5.325.000,00
				CV GT	12.775.000,00	12.775.000,00
Biro Perlengkapan	CV GT	5.287.500,00	5.287.500,00			
	CV PPI	36.062.500,00	-			
	CV AR	9.968.750,00	-			
	CV BM	4.614.000,00	-			

REKAPITULASI KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH TAHAP I

L

SUMBER INFORMASI/DATA	URAIAN/TEMUAN	TAHUN KEJADIAN	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	NILAI	SISA 31/12/2018				
LHP atas LKPD TA 2011	29	Kas pada bendahara pengeluaran pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tekor sebesar Rp9.029.575.785,00	2011	Biro Umum	Aminuddin	9,029,575,785.00	9,029,575,785.00			
	30	Ketekoran kas pada bendahara pengeluaran pembantu pejabat pengelola keuangan daerah pada Biro Umum TA 2011 sebesar Rp916.500.000,00	2011	Biro Umum	Aminuddin	836,500,000.00	836,500,000.00			
					Neman Sitepu	50,000,000.00	50,000,000.00			
Nursyamsiah					30,000,000.00	30,000,000.00				
32	Realisasi belanja Biro Umum TA 2011 sebesar Rp4.657.878.907,00 tanpa dilakukan pengesahan SPJ, dan termasuk diantaranya sebesar Rp1.313.985.169,48 terindikasi disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu Biro Umum (ditambah penyalahgunaan anggaran sebesar Rp410.746.500,00)	2011	Biro Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1,724,731,669.48	1,724,731,669.48				
34	Realisasi belanja honorarium pegawai non honorer tidak tetap dan belanja jasa pihak ketiga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp27.464.575.500,00, diragukan kewajarannya sebesar Rp2.945.000.000,00 dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp2.575.540.000,00	2011	Badan Kesbangpol dan Linmas	AK (LSM LSNS SU & LSM	181,860,000.00	181,860,000.00				
				JL (LSM LKMD SU)	80,000,000.00	80,000,000.00				
				HA (LSM KPMK)	77,000,000.00	77,000,000.00				
				RPH (BRKN)	549,000,000.00	549,000,000.00				
				FKS (PII & BDJAP)	176,000,000.00	176,000,000.00				
				IB (LSM LAS & LPLR)	55,000,000.00	55,000,000.00				
				AAH (LSM LSPPP SU)	130,000,000.00	130,000,000.00				
				EM (LSM CI)	84,680,000.00	84,680,000.00				
				SF (LSM FPD)	100,000,000.00	100,000,000.00				
				AID (LSM DPW-FKPKBM)	110,000,000.00	110,000,000.00				
				AM (LSM KREATIF REMAJA)	107,500,000.00	107,500,000.00				
				IP (LSM PKBM GENERASI)	105,000,000.00	105,000,000.00				
				HD A (LSM DPD PERTI SUMUT)	108,000,000.00	108,000,000.00				
				EP (Lembaga Pengkaji Proyek	75,000,000.00	75,000,000.00				
				H (BP2AD -IND)	75,000,000.00	75,000,000.00				
				HY (PD WANITA PERTI SUMUT)	90,000,000.00	90,000,000.00				
				AI(LSM ANAK BANGSA)	67,000,000.00	67,000,000.00				
				AM(LSM Transportasi	60,000,000.00	60,000,000.00				
				AM(LSM DPP Peduli Bangsa)	40,000,000.00	40,000,000.00				
				RS(LSM HARAPAN)	50,000,000.00	50,000,000.00				
				EW(LEMBAGA PENGAJIAN	50,000,000.00	50,000,000.00				
				USJ (DPP PENJARA UJ	32,000,000.00	32,000,000.00				
				AH (LSM PENA)	40,000,000.00	40,000,000.00				
				AM (GPMD)	25,000,000.00	25,000,000.00				
				AM (SENTRA MASYARAKAT	25,000,000.00	25,000,000.00				
				AID (DPW PEMUDA ISLAM)	20,000,000.00	20,000,000.00				
				RS(LSM GEMA FALUTA)	20,000,000.00	20,000,000.00				
				AM(LSM DPSI SE- SUMUT)	17,500,000.00	17,500,000.00				
				AM (LSM FORMAPSU)	17,500,000.00	17,500,000.00				
				AM (LSM AMPPUN)	7,500,000.00	7,500,000.00				
				35	Belanja hibah dan bantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial dan Biro Perekonomian tidak didukung laporan pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban tidak lengkap minimal sebesar Rp98.353.000.000,00 dan pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.916.390.000,00 serta terdapat indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp6.597.372.000,00	2011	Biro Bina Sosial dan Kemasyarakatan	FC SU	200,000,000.00	200,000,000.00
								GERADI SU	100,000,000.00	100,000,000.00
								NATASSIA	46,880,000.00	46,880,000.00
								LSM BP LABURA	82,450,000.00	82,450,000.00
FKM2B SU, FORKIMDO, GM2MD	500,000,000.00	500,000,000.00								
THE IC	200,000,000.00	200,000,000.00								
FOKKER,BPKM,BKP,GBAK,PBN	925,000,000.00	925,000,000.00								
FCI	86,000,000.00	86,000,000.00								
LP3	150,000,000.00	150,000,000.00								
LKP BKM	200,000,000.00	200,000,000.00								
LKP MC	150,000,000.00	150,000,000.00								
LSM CRI	100,000,000.00	100,000,000.00								
LMPAB	200,000,000.00	200,000,000.00								
FAM SU	75,000,000.00	75,000,000.00								
LEMBAGA KP2	250,000,000.00	250,000,000.00								
LSNS SU	150,000,000.00	150,000,000.00								
LPPP SU	100,000,000.00	100,000,000.00								
LSM BP	100,000,000.00	100,000,000.00								
LEMBAGA PIP	100,000,000.00	100,000,000.00								
LSM KPBAI	200,000,000.00	200,000,000.00								
LSM AMAN	100,000,000.00	100,000,000.00								
LPP GEMINI	100,000,000.00	100,000,000.00								
LSM INSET	36,020,000.00	36,020,000.00								
KOREK	200,000,000.00	200,000,000.00								
PORTIBI	50,000,000.00	50,000,000.00								
AMPIBI	50,000,000.00	50,000,000.00								
GKPS BANGUN	22,500,000.00	22,500,000.00								
GMPB TABAGSEL	50,000,000.00	50,000,000.00								
PROVINSI BUDAYA	50,000,000.00	50,000,000.00								
LP3S	50,000,000.00	50,000,000.00								
LSM ED NEWS	50,000,000.00	50,000,000.00								
LSM CMI SUMUT	100,000,000.00	100,000,000.00								
LKP LIA BARASI	12,500,000.00	12,500,000.00								
YAYASAN CI SU	27,500,000.00	27,500,000.00								
LAM	25,000,000.00	25,000,000.00								

REKAPITULASI KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH TAHAP I

L

SUMBER INFORMASI/DATA	URAIAN/TEMUAN	TAHUN KEJADIAN	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	NILAI	SISA 31/12/2018			
LHP atas Belanja TA 2012	Pelaksanaan fisik pekerjaan pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman kurang volume senilai Rp1.161.421.478,35 tidak sesuai spesifikasi senilai Rp119.177.173,59, serta pekerjaan yang rusak setelah dikerjakan senilai Rp164.741.400,00	2012	Dinas Perumahan dan Permukiman	CV Ka	7.389.900,00	-			
				CV PT	73.619.065,53	-			
				CV K	113.555.676,93	-			
				CV RPJ	45.810.786,00	-			
				CV KJ	43.856.876,70	-			
				CV Rz	127.027.865,64	-			
				CV SR	72.497.940,00	-			
				CV RA	69.211.945,50	-			
				CV EM	17.621.753,46	-			
				CV MRN	43.782.889,15	-			
				CV MRN	22.004.675,00	-			
				CV YA	28.054.282,66	-			
				CV KCB	19.159.325,25	-			
				CV SJ	50.985.937,88	-			
				CV D MMK	54.224.632,00	-			
				CV Kr	26.316.710,24	-			
				CV TMP	7.843.706,00	-			
				CV MJC	19.635.783,29	-			
				CV LP	43.279.539,38	43.279.539,38			
				CV MKM	71.637.521,21	71.637.521,21			
				CV RK	56.355.653,13	56.355.653,13			
				CV SJ	22.817.808,85	22.817.808,85			
				CV BIKI	124.731.204,55	-			
CV YA	44.459.005,50	44.459.005,50							
CV KCB	7.855.401,82	7.855.401,82							
CV SJ	20.844.778,50	20.844.778,50							
CV SJ	5.391.178,80	5.391.178,80							
CV MKM	28.140.474,66	28.140.474,66							
CV RA	12.486.334,31	-							
LHP atas LKPD TA 2012	Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dalam kontrak senilai Rp766.752.160,08 pada paket pekerjaan peningkatan jalan Dinas Bina Marga TA 2012	2012	Dinas Bina Marga dan Kontruksi	PT BUDI KARYA INDAH	398.863.230,44	298.863.230,44			
				PT DALIHAN NATOLU GROUP	367.888.929,64	-			
LHP atas LKPD TA 2012	Realisasi belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp4.656.404.765,00 dan terdapat pajak yang tidak disetor senilai Rp140.574.851,00, serta hutang kepada pihak ketiga senilai Rp210.240.000,00	2012	Satpol PP	Kepala Satpol PP Bendahara Pengeluaran Satpol PP Tahun 2012	4.656.404.765,00	4.656.404.765,00			
				Pembangunan gedung kantor UPT Padang Sidimpunan dan UPT Baru pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	2012	Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	UPT PADANGSIDIMPUNAN (PT UPT BARUS (PT ANDIKA PUTRA PERDANA))	1.072.112.994,58	0,58
								500.590.815,88	34.451.438,88
LHP atas LKPD TA 2012	Terdapat pengadaan alat kedokteran dan kesehatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan mengalami keterlambatan serta belum sepenuhnya dimanfaatkan (pengadaan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp1.740.543.750,00)	2012	Dinas Kesehatan	PT RN	861.795.000,00	861.795.000,00			
				PT MK	878.748.750,00	878.748.750,00			
LHP atas LKPD TA 2013	Terdapat kekurangan volume pekerjaan satuan dan bronjong pada Dinas Tarukim dan PSDA Senilai Rp1.416.828.253,50	2013	Dinas Tarukim	CV G	198.128.169,58	198.128.169,58			
				CV SAS	34.775.889,01	34.775.889,01			
				CV SG	61.156.390,31	61.156.390,31			
				CV CPN	148.413.762,80	143.413.762,80			
				CV AKP	112.880.094,08	107.880.094,08			
				CV MK	183.329.651,96	181.329.651,96			
				CV VUM	436.429.795,64	321.429.795,64			
				CV SAJ	75.140.110,28	55.140.110,28			
				CV R	54.242.093,51	49.242.093,51			
				CV AG	52.265.381,19	37.265.381,19			
				Dinas PSDA	UD BAG	12.157.572,27	-		
				CV PB	47.909.342,88	-			
				Terdapat kekurangan volume pekerjaan laston pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara senilai Rp392.713.333,88	2013	Dinas Bina Marga	PT BMA	141.310.634,91	91.310.634,91
							PT PN	98.871.354,97	0,97
							CV MK	66.230.540,43	-
							PT KMI	46.620.712,96	-
							PT MBCP	39.680.090,61	-
LHP atas LKPD TA 2014	Pekerjaan pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Dinas Pertanian dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dan tidak dapat diselesaikan oleh Rekanan (kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp337.266.761,07)	2014	Dinas Pertanian	CV H	337.266.761,07	337.266.761,07			
				Kekurangan volume pekerjaan pada sepuluh SKPD sebesar Rp796.471.961,54, pekerjaan sebesar Rp33.811.250,00 tidak didukung dengan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan terdapat pemborosan sebesar Rp108.289.000,00 (kekurangan volume pada Dinas Pendidikan dikoreksi sebesar Rp44.850.600)	2014	Dinas Kesehatan	CV DPJ	167.475,581	-
CV DJ	60.837,289	40.837,289,20							
CV TK	11.906,024	-							
Dinas Kesos	PT KPP	13.802,610	-						
	BPAD	PT KPK	22.632,849			-			
PT DT		137.687,455	-						
CV B		11.568,724	-						
Biro Perkap		PT FPA	25.726,989			-			
Dinas Tarukim		CV PMB	24.282,032			-			
Dinas Pertanian	CV G	33.205,631	33.205,630,50						
	CV SM	27.026,699	-						
	CV RA	7.726,022	-						
Dinas Perindag	PT RA	207.743,456	-						

REKAPITULASI KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH TAHAP I

L

SUMBER INFORMASI/DATA		URAIAN/TEMUAN	TAHUN KEJADIAN	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	NILAI	SISA 31/12/2018					
LHP atas Belanja TA 2015	52	Kekurangan volume pekerjaan pengaspalan jalan senilai Rp1.277.378.219,32 dan denda keterlambatan sebesar Rp17.828.127,76	2015	Dinas Bina Marga	PT STM	108,679,602	-					
					PT Ayu Seta Perdana	33,005,540	-					
					PT FIFO Pusaka Abadi	38,517,603	-					
					PT Razasa Karya	66,406,747	(0)					
					PT MNP	21,484,743	-					
					PT Zafira Tetap Jaya	146,064,338	-					
					PT Mg	43,198,753	0					
					PT NJM	141,833,226	-					
					PT M-PT MTJ KSO	73,113,682	-					
					PT Kurnia Djaja Alam	34,954,551	-					
	53	Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan gedung senilai Rp492.348.050,66 dan denda keterlambatan sebesar Rp65.685.352,00 pada Empat SKPD	2015	Dinas Pendidikan	CV Aulya Baru	36,056,273	36,056,273					
					CV Aulya Baru	301,720,602	301,720,602					
					CV KM	65,029,576	-					
					PT KPM	110,823,176	-					
					PT SMG	267,870,000	-					
					Dinas Koperasi dan	PT BM	52,153,547	-				
					Direktur Rumah	CV TMP	51,599,600	-				
					Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	PT HJS	10,101,728	-				
					54	Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan Irigasi, saluran jaringan senilai Rp478.864.697,51 dan denda keterlambatan sebesar Rp39.946.869,89	2015	Dinas Pertanian	CV SRU	79,037,949	79,037,949	
									CV KG	217,159,807	217,159,807	
Dinas PSDA	CV GA	41,145,612	-									
Dinas Tarukim	CV A	40,179,973	40,179,973									
CV MR	81,932,781	81,932,781										
CV LP	19,408,575	19,408,575										
55	Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan senilai Rp184.477.105,55 pada dua SKPD	2015	Dinas Tarukim	CV DKM	64,602,420	64,602,420						
				CV KJ	17,816,579	17,816,579						
				CV KLM	11,994,257	11,994,257						
				Dinas Perhubungan	CV MM	65,288,708	65,288,708					
				CV BJ	24,775,141	-						
				56	Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp914.250.000,00 atas pekerjaan jasa konsultansi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman serta Dinas Pendapatan	2015	Dinas Tarukim	CV SSn	30,000,000	30,000,000		
PT MY	50,000,000	50,000,000										
Dinas Pendapatan	PT WB	834,250,000	-									
LHP atas LKPD TA 2015	57	Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp2.662.756.587,75	2015	Dinas Bina Marga	PT Trimurti Perkasa	285,878,223	-					
					PT Mitra Engineering Grup	58,347,794	-					
					PT Daksina Persada	641,786,301	-					
					PT Takmir Jaya Perkasa	362,331,255	337,331,255					
					PT Sinar Kasih Reinhard	243,817,822	-					
					PT Dian Perkasa	269,766,672	-					
					PT Mido Artha Sari	167,678,796	-					
					PT Pusaka Agung Jayakarya	45,046,222	-					
					PT Rumah Berneh	65,860,774	-					
					PT Rumah Ukir Mulia	30,195,180	-					
					CV Rizki Yulinda	59,128,091	-					
					PT Satu Tiga Mandiri	16,604,753	-					
					PT Putra El Khoir	23,634,270	-					
					CV Bina Sarana	94,332,197	-					
					CV Yakin Jaya	22,872,556	-					
					CV Anugrah	46,358,336	-					
					Dinas Pendapatan	CV GNGC	32,931,456	-				
					CV T	79,987,873	-					
					TOTAL						74,508,893,804	60,779,926,790

NOMOR KEP. PEMBEBANAN 188.44/XXX/KP TS/2018
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

NOMOR KEP. PEMBEBANAN 188.44/XXX/KP TS/2018
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

NOMOR KEP. PEMBEBANAN 188.44/XXX/KP TS/2018
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
382
383
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

NOMOR KEP. PEMBEBANAN 188.44/XXX/KP TS/2018
609
610
553
554
611
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
583
584
585
586
587
588
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
613
614
615
616
617
618
619
620
621
624
625
626
627
628
629
630
631
632
612
622
623
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643

NOMOR KEP. PEMBEBANAN 188.44/XXX/KP TS/2018
605
606
607
608
797
796
794
795
793
569
572
568
571
570
575
580
579
573
576
581
578
577
574
582
591
589
590

NOMOR KEP. PEMBEBANAN 188.44/XXX/KP TS/2018
512
513
524
525
522
515
511
520
518
514
516
517
519
523
521
535
532
541
540
533
534
536
538
531
539
537
530
529
526
527
528

BEBAN DIBAYAR DIMUKA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	KEGIATAN	UPT	JANGKA WAKTU		MASA SEWA (BULAN)	NILAI SEWA	BEBAN SEWA SEBELUMNYA	BEBAN SEWA TAHUN 2018	BEBAN SEWA TAHUN 2019	SEWA DIBAYAR DIMUKA
			AWAL	AKHIR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sewa Gerai Binanga	SIBUHUAN	20/12/18	19/12/20	24	99,440,000			49,720,000	49,720,000
2	Sewa Gerai Tanah Jawa	P. SIANTAR	08/11/18	08/11/19	12	50,000,000			50,000,000	
3	Sewa Gerai Sayur Matinggi	SIPIROK	02/03/19	01/03/22	36	177,000,000			49,166,667	127,833,333
4	Sewa Gerai Raya	P. SIANTAR	04/04/19	03/04/20	12	48,000,000			36,000,000	12,000,000
5	Sewa Gerai Kerasaan	PERDAGANGAN	01/04/19	31/03/21	24	60,000,000			22,500,000	37,500,000
6	Sewa Gerai Gunung Tua	GUNUNG TUA	01/11/18	01/11/19	12	49,000,000			49,000,000	
7	Sewa Gerai Kotanopan	PANYABUNGAN	27/01/19	26/01/20	12	49,000,000			44,916,667	4,083,333
8	Sewa Gerai Danau Toba	P. SIANTAR	13/05/19	12/05/20	12	50,000,000			33,333,333	16,666,667
9	Sewa Gerai	Rantau Prapat	13/02/19	12/02/20	12	40,000,000			36,666,667	3,333,333
10	Sewa Gerai Tanah Jawa	Pematang Siantar	08/11/19	08/11/20	12	50,000,000			8,333,333	41,666,667
11	Sewa Gerai Pasir Mandoge	Kisaran	09/11/19	09/11/20	12	72,000,000			12,000,000	60,000,000
12	Sewa Gerai Sorkam	Pandan	08/11/19	08/11/20	12	58,000,000			9,666,667	48,333,333
13	Sewa Gerai Barus	Pandan	11/11/19	11/11/20	12	55,000,000			9,166,667	45,833,333
14	Sewa Gerai	Pandan	08/11/19	08/11/20	12	58,000,000			9,666,667	48,333,333
15	Sewa Gerai Sigalingga	Sidikalang	13/11/19	13/11/20	12	49,000,000			8,166,667	40,833,333
16	Sewa Gerai Langgapayung	Kota Pinang	15/11/19	15/11/20	12	38,500,000			6,416,667	32,083,333
17	Sewa Gedung Kantor	Kota Pinang	05/12/19	05/12/20	12	238,500,000			19,875,000	218,625,000
18	Sewa Gerai	Lima Puluh		15/12/20	12	60,000,000				60,000,000
19	Sewa Gerai Centre Point	Medan Utara	04/12/19	03/12/20	12	350,000,000			29,166,667	320,833,333
20	Sewa Gedung Kantor	Aek Kanopan	01/07/19	30/06/20	12	119,800,000			59,900,000	59,900,000
21	Sewa Gerai	Aek Kanopan	10/11/19	09/11/20	12	78,000,000			13,000,000	65,000,000
22	Sewa Samsat Corner Carefour	Medan Utara	15/05/19	14/05/21	24	215,592,000			71,864,000	143,728,000
23	Sewa Gerai Simpang Kantor	Medan Utara	29/10/19	28/10/20	12	49,000,000			8,166,667	40,833,333
24	Sewa Samsat Corner Sun Plaza	Medan Selatan	25/08/19	24/08/20	12	455,419,800			151,806,600	303,613,200
25	Sewa Gerai Binjai Supermall	Binjai	13/05/19	12/05/20	12	450,178,038			300,118,692	150,059,346
26	Sewa Gerai Kuala	Binjai	01/06/19	30/05/20	12	44,500,000			25,958,333	18,541,667
27	Sewa Gerai Perumnas Mandala	Medan Selatan	16/09/19	15/09/20	12	95,000,000			23,750,000	71,250,000
28	Sewa Gedung Samsat Gerai Deli Tua	Medan Selatan	15/04/18	14/04/20	24	76,000,000	25,333,333	38,000,000	12,666,667	
29	Sewa Gedung Kantor Kotanopan	PANYABUNGAN	27/01/18	26/01/19	12	39,750,000	36,437,500	3,312,500		
30	Sewa Gerai Samsat Tembung	Medan Utara	01/07/18	30/06/20	24	148,000,000	37,000,000	74,000,000	37,000,000	
31	Sewa Gerai Samsat Kampung Lalang	Medan Utara	15/07/18	14/07/20	24	154,000,000	32,083,333	77,000,000	44,916,667	
32	Sewa Gudang	Medan Utara	06/08/18	05/08/20	24	99,000,000	20,625,000	49,500,000	28,875,000	
33	Sewa Gerai Samsat Marelan	Medan Utara	18/07/18	17/07/20	24	126,000,000	26,250,000	63,000,000	36,750,000	
34	Sewa Gedung Kantor	Aek Kanopan	01/07/18	30/06/19	12	119,800,000	59,900,000	59,900,000		
35	Sewa Gedung Samsat Gerai Tuntungan	Medan Selatan	07/05/18	06/05/20	24	76,000,000	25,333,333	38,000,000	12,666,667	
36	Sewa Gerai Perbaungan	Sei Rampah	01/06/18	31/05/20	24	120,000,000	35,000,000	60,000,000	25,000,000	
37	Sewa Gerai Dolok	Sei Rampah	05/11/18	04/11/21	36	144,000,000	8,000,000	48,000,000	88,000,000	
38	Sewa Gerai Kantor	Kota Pinang	15/11/18	15/11/19	12	38,500,000	3,208,333	35,291,667		
39	Sewa Gerai Kantor	Aek Kanopan	10/11/18	10/11/19	12	78,000,000	13,000,000	65,000,000		
40	Sewa Gerai Kuala	Binjai	01/06/18	30/05/19	12	45,000,000	26,250,000	18,750,000		
41	Sewa Gerai	Lubuk Pakam	06/12/18	06/12/20	24	62,270,000	2,594,583	31,135,000	28,540,417	
42	Sewa Gerai Sigalingga	Sidikalang	13/11/18	13/11/19	12	49,000,000	8,166,667	40,833,333		
43	Sewa Gedung Kantor Samsat	Tanjung Balai	07/12/18	06/12/20	24	350,000,000	14,583,333	175,000,000	160,416,667	
44	Sewa Gedung Kantor Samsat	Kota Pinang	05/12/18	05/12/19	12	238,500,000	19,875,000	218,625,000		
45	Sewa Gerai Batang Toru	Sipirok	05/08/18	04/08/20	24	137,500,000	28,645,833	68,750,000	40,104,167	
46	Sewa Gedung dan Peralatan Sewa Gedung/ Kantor/ Aula	Kisaran	09/11/18	09/11/19	12	72,000,000	12,000,000	60,000,000		

BEBAN DIBAYAR DIMUKA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	KEGIATAN	UPT	JANGKA WAKTU		MASA SEWA (BULAN)	NILAI SEWA	BEBAN SEWA SEBELUMNYA	BEBAN SEWA TAHUN 2018	BEBAN SEWA TAHUN 2019	SEWA DIBAYAR DIMUKA
			AWAL	AKHIR						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
47	Sewa Gedung Kantor Samsat Gerai Sorkam	Pandan	08/11/18	08/11/19	12	58,000,000		9,666,667	48,333,333	
48	Sewa Gedung Kantor Samsat Barus	Pandan	11/11/18	11/11/19	12	55,000,000		9,166,667	45,833,333	
49	Sewa UPT Pandan	Pandan	08/11/18	08/11/19	12	58,000,000		9,666,667	48,333,333	
50	Sewa Gerai Indrapura	Lima Puluh	16/12/18	15/12/19	12	60,000,000			60,000,000	
51	Sewa Gedung Samsat Gerai Deli Tua	Medan Selatan	15/04/17	14/04/18	12	38,000,000	25,333,333	12,666,667		-
52	Sewa Gedung Kantor Samsat Gerai Tuntungan	Medan Selatan	20/05/17	19/05/18	12	40,000,000	23,333,333	16,666,667		-
53	Sewa Gedung Gerai Samsat	Balige	07/07/17	07 Juli 2022	60	99,000,000	9,900,000	19,800,000	19,800,000	49,500,000
54	Sewa Gedung/ Kantor Samsat Gerai Sorkam	Pandan	08/11/17	08/11/18	12	29,000,000	4,833,333	24,166,667		-
55	Belanja Sewa/ Gedung/ Kantor/ Tempat Gerai Pinang	Pandan	08/11/17	08/11/18	12	29,000,000	4,833,333	24,166,667		-
56	Sewa Gerai Mandoge	Kisaran	09/11/17	09/11/18	12	72,250,000	12,041,667	60,208,333		-
57	Sewa Gedung Gerai	Aek Kanopan	10/11/17	10/11/18	12	68,500,000	11,416,667	57,083,333		-
58	Sewa Gerai di Gunung Tua	Gunung Tua	01/11/17	01/11/18	12	49,000,000	8,166,667	40,833,333		-
59	Sewa Gerai Sigalingga	Sidikalang	13/11/17	13/11/18	12	49,000,000	8,166,667	40,833,333		-
60	Sewa Gerai Samsat Tiga Binanga	Kabanjahe	20/12/17	19/12/19	24	99,000,000		49,500,000	49,500,000	
61	Sewa Gedung Samsat Indrapura	Lima Puluh	16/12/17	15/12/18	12	51,750,000		51,750,000		-
62	Belanja Sewa/ Gedung/ Kantor/ Tempat Gerai Tanah Jawa	Pematang Siantar	08/11/17	08/11/18	12	39,000,000	6,500,000	32,500,000		-
63	Sewa Gedung Kantor	Kota Pinang	05/12/17	05/12/18	12	295,000,000	24,583,333	270,416,667		-
64	Sewa Gerai Langgapayung	Kota Pinang	15/11/17	15/11/18	12	38,500,000	3,208,333	35,291,667		-
65	Sewa Lahan Parkir	Kabanjahe	10/11/17	10/11/18	12	14,000,000	2,333,333	11,666,667		-
66	Sewa Samsat Gerai Binanga	Sibuhuan	20/12/17	19/12/18	12	49,720,000		49,720,000		-
67	Samsat Gerai Marelan	Medan Utara	01/07/16	30/06/18	24	121,000,000	90,750,000	30,250,000		-
68	Samsat Gerai Tembung	Medan Utara	01/07/16	30/06/18	24	127,000,000	95,250,000	31,750,000		-
69	Samsat Gerai Ladys Kampung Lalang	Medan Utara	15/07/16	14/07/18	24	143,000,000	101,291,667	41,708,333		-
70	Gudang Medan Utara	Medan Utara	06/08/16	05/08/18	24	99,000,000	70,125,000	28,875,000		-
71	Samsat Gerai Dolok Masihul	Tebing Tinggi	16/09/15	15/09/18	36	99,000,000	74,250,000	24,750,000		-
72	Samsat Gerai Perbaungan	Sei Rampah	01/06/16	31/05/18	24	99,000,000	78,375,000	20,625,000		-
73	Samsat Gerai Batang Toru	Padang Sidempuan	05/08/16	04/08/18	24	120,000,000	85,000,000	35,000,000		-
74	Sewa Gedung Samsat Tanjung Balai	Tanjung Balai	07/12/16	06/12/18	24	294,800,000	159,683,333	135,116,667		-
75	SEWA GEDUNG KANTOR GERAI KOTA NOPAN	PANYABUNGAN	27/01/17	26/01/18	12	49,992,000	45,826,000	4,166,000		-
76	SEWA GERAI SAYUR MATINGGI	SIPROK	02/03/17	01/03/19	24	110,000,000	45,833,333	55,000,000	9,166,667	
77	SEWA GERAI SAMSAT BELAWAN	MEDAN UTARA	30/10/17	29/10/19	24	99,000,000	8,250,000	49,500,000	41,250,000	
78	SEWA GEDUNG KANTOR GERAI CENTRE POINT	MEDAN UTARA	04/12/17	03/12/19	24	715,000,000	29,791,667	357,500,000	327,708,333	
79	SEWA GEDUNG SAMSAT	RANTAU PRAPAT	13/02/17	12/02/19	24	100,000,000	45,833,333	50,000,000	4,166,667	
80	SEWA GEDUNG GERAI SAMSAT	PERDAGANGAN	01/04/17	31/03/18	12	30,000,000	22,500,000	7,500,000		-
81	SEWA GEDUNG KANTOR	AEK KANOPAN	01/07/17	30/06/18	12	125,000,000	62,500,000	62,500,000		-
82	Sewa Gedung Samsat Medan Fair	Medan Utara	15/05/17	14/05/19	24	180,904,800	52,763,900	90,452,400	37,688,500	
83	Sewa Gerai Tanjung Morawa	Lubuk Pakam	06/12/17	07/12/18	12	42,570,000	3,547,500	39,022,500		-
84	Sewa Gerai Kuala	Binjai	01/06/16	31/05/18	24	79,981,000	63,318,292	16,662,708		-
85	Samsat Corner Sun Plaza	Medan Selatan	25/08/17	24/08/18	12	394,344,347	131,448,116	262,896,231		-
86	Samsat Corner Sun Plaza	Medan Selatan	25/08/18	24/08/19	12	423,577,440		141,192,480	282,384,960	
JUMLAH						10,077,139,425	1,410,987,141	2,744,523,570	3,336,588,585	2,585,040,129

REKAPITULASI TANAH PER 31 DESEMBER 2019

No.	OPD	SALDO 31 DESEMBER 2018	SALDO SETELAH KOREKSI OPD	KAPITALISASI BELANJA MODAL 2019	KOREKSI BELANJA MODAL		KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA 2019
			NILAI PEROLEHAN	(+)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	996,210,244,571.00	996,210,244,571.00	-	22,430,000.00	-	-
2	DINAS KESEHATAN	229,910,287,945.00	229,910,287,945.00	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT JIWA	15,264,300,000.00	15,264,300,000.00	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT HAJI	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	-	-	-	-
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	214,347,959,830.00	214,347,959,830.00	-	-	-	-
6	DINAS SDA, CK, & TR	63,435,117,196.00	63,435,117,196.00	-	15,562,106,500.00	-	-
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	819,520,000.00	819,520,000.00	1,960,500,000.00	-	-	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA	8,810,900,000.00	8,810,900,000.00	-	-	-	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	62,554,804,500.00	62,554,804,500.00	-	-	-	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10,801,701,850.00	10,801,701,850.00	-	-	-	-
11	DINAS SOSIAL	137,671,417,215.00	137,671,417,215.00	-	-	-	-
12	DINAS TENAGA KERJA	25,662,790,600.00	25,662,790,600.00	-	-	-	-
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27,418,100,000.00	27,418,100,000.00	-	-	-	-
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	116,437,597,500.00	116,437,597,500.00	53,878,000.00	-	-	-
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29,031,473,200.00	29,031,473,200.00	-	-	-	-
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21,619,900,000.00	21,619,900,000.00	-	-	-	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	82,832,920,250.00	82,832,920,250.00	-	-	-	-
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8,299,500,000.00	8,299,500,000.00	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	5,857,200,000.00	5,857,200,000.00	-	-	-	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	873,467,740,000.00	873,467,740,000.00	-	-	-	-
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	30,743,906,542.00	30,743,906,542.00	2,086,565,600.00	-	2,086,565,600.00	-
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	19,550,100,000.00	19,550,100,000.00	-	-	-	-
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	26,255,836,500.00	26,255,836,500.00	-	-	-	-
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	128,107,229,234.00	128,107,229,234.00	-	-	-	-
28	DINAS PERKEBUNAN	133,533,790,600.00	133,533,790,600.00	-	-	-	-
29	DINAS KEHUTANAN	87,920,562,153.00	87,920,562,153.00	-	-	-	-
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	26,242,200,000.00	26,242,200,000.00	-	-	-	-
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	107,667,575,250.00	107,667,575,250.00	-	-	-	-
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	48,023,556,160.00	48,023,556,160.00	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	165,126,498,400.00	165,126,498,400.00	31,223,278,441.00	-	-	397,352,500.00
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52,220,600,000.00	52,220,600,000.00	-	-	-	-
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4,477,400,000.00	4,477,400,000.00	-	-	-	-
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	686,853,175,630.00	686,853,175,630.00	-	-	-	-
46	SEKWAN	298,524,158,855.00	298,524,158,855.00	-	-	-	-
47	INSPEKTORAT DAERAH	17,865,100,000.00	17,865,100,000.00	-	-	-	-
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	61,838,252,002.00	61,838,252,002.00	-	-	-	-
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	34,123,517,600.00	34,123,517,600.00	-	-	-	-
	TOTAL	4,861,926,933,583.00	4,861,926,933,583.00	35,324,222,041.00	15,584,536,500.00	2,086,565,600.00	397,352,500.00

REKAPITULASI TANAH PER 31 DESEMBER 2019

No.	OPD	REKLASIFIKASI ASET TETAP	MUTASI OPD 2019		PENGHAPUSAN	PENDAPATAN HIBAH/ PENYERAHAN/ KURANG CATAT	SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	SALDO 31 DESEMBER 2019
			(-)	(+)				
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	27,784,800.00	996,260,459,371.00	996,260,459,371.00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	229,910,287,945.00	229,910,287,945.00
3	RUMAH SAKIT JIWA	-	-	-	-	-	15,264,300,000.00	15,264,300,000.00
4	RUMAH SAKIT HAJI	-	-	-	-	-	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	214,347,959,830.00	214,347,959,830.00
6	DINAS SDA, CK, & TR	-	-	-	-	-	78,997,223,696.00	78,997,223,696.00
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	2,780,020,000.00	2,780,020,000.00
8	BADAN KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	8,810,900,000.00	8,810,900,000.00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	62,554,804,500.00	62,554,804,500.00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	10,801,701,850.00	10,801,701,850.00
11	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	137,671,417,215.00	137,671,417,215.00
12	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	25,662,790,600.00	25,662,790,600.00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	-	-	-	-	-	27,418,100,000.00	27,418,100,000.00
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	-	4,450,940,000.00	-	173,184,000.00	-	120,769,231,500.00	120,769,231,500.00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	29,031,473,200.00	29,031,473,200.00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	21,619,900,000.00	21,619,900,000.00
19	DINAS PERHUBUNGAN	196,968,000.00	-	-	-	-	82,635,952,250.00	82,635,952,250.00
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	8,299,500,000.00	8,299,500,000.00
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	-	-	-	5,857,200,000.00	5,857,200,000.00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	873,467,740,000.00	873,467,740,000.00
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	10,830,800,000.00	-	19,913,106,542.00	19,913,106,542.00
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	19,550,100,000.00	19,550,100,000.00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	2,341,128,264.00	28,596,964,764.00	28,596,964,764.00
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	128,107,229,234.00	128,107,229,234.00
28	DINAS PERKEBUNAN	-	-	4,450,940,000.00	-	-	129,082,850,600.00	129,082,850,600.00
29	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	87,920,562,153.00	87,920,562,153.00
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	26,242,200,000.00	26,242,200,000.00
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	107,667,575,250.00	107,667,575,250.00
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	48,023,556,160.00	48,023,556,160.00
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	5,845,635,000.00	202,592,764,341.00	202,592,764,341.00
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	52,220,600,000.00	52,220,600,000.00
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	4,477,400,000.00	4,477,400,000.00
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	-	-	-	-	-	686,853,175,630.00	686,853,175,630.00
46	SEKWAN	-	-	-	-	-	298,524,158,855.00	298,524,158,855.00
47	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	17,865,100,000.00	17,865,100,000.00
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	-	-	61,838,252,002.00	61,838,252,002.00
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	34,123,517,600.00	34,123,517,600.00
	TOTAL	196,968,000.00	4,450,940,000.00	4,450,940,000.00	11,003,984,000.00	8,214,548,064.00	4,908,160,075,088.00	4,908,160,075,088.00

REKAPITULASI PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2019

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	KAPITALISASI BELANJA MODAL 2019	KOREKSI BELANJA MODAL		KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA 2019	REKLASIFIKASI ASET TETAP		REKLASIFIKASI ASET TETAP		MUTASI OPD 2019
		(+)	(+)	(-)	(+)	(+)	Beban Susut (+)	(-)	Beban Susut (-)	(+)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DINAS PENDIDIKAN	243,935,357,840.00	77,875,407,301.00	161,348,447,196.00	15,321,276,641.00	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	22,004,906,446.00	1,797,171,381.00	12,663,302,619.00	129,890,000.00	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT JIWA	2,185,084,101.00	1,333,550,000.00	1,333,550,000.00	-	-	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT HAJI	18,818,466,475.00	409,326,035.00	451,686,035.00	-	-	-	4,096,299,255.00	4,096,299,255.00	-
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	11,539,995,671.00	377,661,700.00	377,661,700.00	-	-	-	162,339,900.00	-	-
6	DINAS SDA, CK, & TR	3,346,282,945.00	324,461,000.00	324,461,000.00	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	713,099,060.00	157,428,837.00	201,061,982.00	-	-	-	-	-	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA	105,440,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	-	-	-	-	-	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,934,456,175.00	99,991,250.00	126,538,250.00	-	-	-	240,494,102.00	240,494,102.00	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	785,755,200.00	407,969,200.00	420,417,200.00	7,950,000.00	-	-	621,770,900.00	614,153,870.00	-
11	DINAS SOSIAL	509,646,300.00	509,646,300.00	118,102,800.00	-	-	-	-	-	234,450,000.00
12	DINAS TENAGA KERJA	834,232,680.00	179,685,000.00	204,731,560.00	-	-	-	-	-	533,900,000.00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	42,367,000.00	12,950,000.00	12,950,000.00	-	-	-	552,761,300.00	544,060,300.00	-
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	4,211,117,406.00	788,482,520.00	957,695,520.00	-	-	-	-	-	-
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6,086,967,344.00	2,214,751,500.00	3,457,265,934.00	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	205,581,345.00	139,536,005.00	139,536,005.00	-	-	-	-	-	-
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,534,461,000.00	24,600,000.00	9,600,000.00	-	-	-	-	-	468,900,000.00
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	203,959,500.00	93,299,000.00	99,429,500.00	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	645,722,500.00	3,888,872,466.40	474,205,000.00	211,243,000.00	22,074,100.00	22,074,100.00	2,348,397,000.00	2,137,564,299.00	-
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	786,890,917.00	59,596,067.00	68,596,067.00	-	-	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	41,770,000.00	-	580,000.00	14,499,000.00	-	-	-	-	-
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU	703,381,900.00	219,962,900.00	219,962,900.00	-	-	-	-	-	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,785,999,176.00	5,040,800,069.00	1,990,596,560.00	33,110,000.00	-	-	-	-	460,250,000.00
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	866,965,000.00	599,545,875.00	544,245,875.00	-	-	-	-	-	-
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	893,378,588.00	2,618,400.00	2,618,400.00	-	-	-	-	-	-
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,072,329,306.00	1,302,537,048.00	615,593,050.00	-	-	-	-	-	-
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	784,021,650.00	302,060,625.00	302,060,625.00	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERKEBUNAN	574,553,000.00	201,225,749.00	201,225,749.00	124,672,000.00	-	-	-	-	-
29	DINAS KEHUTANAN	8,276,917,930.00	827,653,800.00	827,653,800.00	-	-	-	-	-	-
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1,946,509,670.00	152,908,800.00	277,895,200.00	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,995,451,180.00	6,704,742.00	143,795,139.00	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	641,363,500.00	18,980,000.00	18,980,000.00	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	199,762,500.00	-	-	-	-	-	-	-	910,342,239.00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	510,039,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,586,742,700.00	65,224,000.00	65,224,000.00	-	-	1,594,962,422.00	1,536,720,186.00	-	-
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,083,611,100.00	39,732,000.00	39,732,000.00	-	-	210,064,624.00	208,975,624.00	-	-
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	17,113,098,250.00	3,436,513,400.00	5,834,286,300.00	-	-	-	-	-	780,147,360.00
38	BIRO PEMERINTAHAN	173,996,500.00	-	18,003,000.00	-	-	-	-	-	-
39	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	BIRO SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,351,000.00
41	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	449,215,500.00
42	BIRO OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	133,041,870.00	132,036,370.00	5,560,000.00
43	BIRO ADM PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/ JASA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400,000.00
44	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	11,879,000.00
45	BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN	765,767,440.00	407,740,000.00	464,350,000.00	-	-	-	-	-	303,699,000.00
46	SEKWAN	2,625,489,250.00	144,276,000.00	189,997,250.00	4,895,000.00	-	-	-	-	-
47	INSPEKTORAT DAERAH	1,094,248,500.00	81,754,000.00	225,754,000.00	-	-	1,814,371,327.00	1,807,026,827.00	-	-
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	14,751,488,700.00	251,555,700.00	4,357,005,700.00	-	-	-	-	-	-
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	229,517,659.00	4,411,500.00	4,411,500.00	97,000,000.00	-	-	-	-	-
	TOTAL	388,146,192,604.00	103,432,846,670.40	199,157,009,416.00	15,944,535,641.00	22,074,100.00	22,074,100.00	11,774,502,700.00	11,317,330,833.00	4,205,094,099.00

REKAPITULASI PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2019

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	MUTASI OPD 2019			PENDAPATAN HIBAH/ PENYERAHAN/ KURANG CATAT		EKSTRAKOMPTABLE	SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 2019	PENYUSUTAN 2019	SALDO 31 DESEMBER 2019
		Beban Susut (+)	(-)	Beban Susut (-)	(+)	Beban Susut (+)			(-)		
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	291,600,000.00	47,481,800.00	26,079,936,993.00	982,991,708,629.04	597,587,839,479.95	106,163,435,033.91	385,403,869,149.09
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	2,297,920.00	-	2,297,920.00	145,907,769,256.39	16,584,429,854.00	41,587,833,226.61	
3	RUMAH SAKIT JIWA	-	-	-	-	-	200,000.00	28,682,155,156.00	20,915,026,789.60	3,123,943,255.79	7,767,128,366.40
4	RUMAH SAKIT HAJI	-	-	-	-	-	33,148,500.00	190,452,740,601.00	139,762,104,883.14	21,506,144,139.14	50,690,635,717.86
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	109,640,391,830.00	-	59,175,000.00	85,553,876,173.48	5,278,865,632.86	24,086,515,656.52	
6	DINAS SDA, CK, & TR	-	-	-	-	-	13,717,500.00	37,274,881,475.00	28,073,835,147.59	4,042,782,041.18	9,201,046,327.41
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	7,904,088.00	12,498,720,958.00	10,657,742,031.28	740,741,248.00	1,840,978,926.72
8	BADAN KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	6,785,262,800.00	6,460,336,775.00	-	227,271,625.00	324,926,025.00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	60,625,600.00	9,401,717,777.00	6,947,262,489.57	775,632,476.31	2,454,455,287.43
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	19,068,000.00	13,680,241,686.00	9,318,414,505.07	1,610,057,017.93	4,361,827,180.93
11	DINAS SOSIAL	234,450,000.00	-	-	4,810,000.00	-	56,874,324,803.00	52,097,005,791.87	2,557,620,721.77	4,777,319,011.13	
12	DINAS TENAGA KERJA	533,900,000.00	-	-	-	-	27,972,120.00	9,735,065,997.00	8,619,957,459.00	576,241,770.67	1,115,108,538.00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	5,103,208,595.00	3,081,938,475.57	766,664,779.00	2,021,270,119.43
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	-	-	-	28,563,162,729.00	-	20,061,050.00	19,284,377,414.60	2,689,006,118.14	9,278,785,314.40	
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	14,487,000.00	47,609,315,120.00	35,069,973,644.56	3,682,302,508.40	12,539,341,475.44
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	5,850,000.00	4,771,262,703.00	2,189,778,568.93	819,308,761.64	2,581,484,134.07
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	468,900,000.00	-	-	-	-	97,759,200.00	9,771,479,123.00	6,536,023,227.49	902,114,038.70	3,235,455,895.51
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	3,108,649,161.00	1,508,069,381.64	555,980,441.46	1,600,579,779.36
19	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	30,021,849,000.00	30,021,849,000.00	186,045,000.40	143,546,277,338.00	118,157,142,588.57	9,033,468,442.15	25,389,134,749.43
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	895,389,360.00	895,389,360.00	-	-	-	36,720,944,091.00	31,591,549,642.46	2,500,520,437.65	5,129,394,448.54
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	-	-	-	-	14,465,042,999.00	12,524,619,618.21	1,292,859,116.21	1,940,423,380.79
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU	-	-	-	-	-	-	16,870,286,359.00	16,068,640,124.00	436,312,635.00	801,646,235.00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	460,250,000.00	-	-	7,500,000.00	7,500,000.00	230,259,700.00	47,643,307,624.00	30,574,902,831.60	6,216,607,848.77	17,068,404,792.40
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	9,028,333,468.00	6,878,371,416.75	1,262,125,924.82	2,149,962,051.25
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	18,400,000.00	39,032,478,789.00	30,669,162,880.50	4,520,899,538.07	8,363,315,908.50
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	36,213,519,173.00	-	29,456,900.00	36,213,519,173.00	28,157,439,999.84	4,650,181,762.45	8,056,079,173.16
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-	335,250,000.00	335,250,000.00	-	64,946,938,520.00	51,499,248,429.60	6,088,746,467.25	13,447,690,090.40
28	DINAS PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-	13,726,001,690.00	11,467,744,998.76	1,173,140,955.81	2,258,256,691.24
29	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	44,495,596,620.00	-	268,937,000.00	33,083,444,314.32	3,514,337,287.39	11,412,152,305.68	
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	30,471,870.00	6,591,993,771.00	4,198,217,519.09	885,733,459.88	2,393,776,251.91
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	770,000.00	26,889,842,282.00	20,918,900,563.47	1,488,494,972.15	5,970,941,718.53
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	15,402,338,565.00	12,672,705,562.14	1,484,161,300.71	2,729,633,002.86
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	910,342,239.00	2,184,027,360.00	2,176,890,960.00	-	-	-	34,924,229,706.00	30,016,301,740.50	2,214,687,571.00	4,907,927,965.50
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	7,741,947,108.00	7,034,540,356.27	455,607,382.71	707,406,751.73
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	97,475,000.00	9,510,740,218.00	6,744,641,668.21	1,233,229,562.04	2,766,098,549.79
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	7,005,193,545.00	5,552,822,543.21	582,716,718.21	1,452,371,001.79
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	650,742,017.14	597,607,379.00	242,147,164.71	-	-	1,248,100.00	144,533,155,791.00	111,580,823,070.65	13,201,809,850.33	32,952,332,720.35
38	BIRO PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	9,559,337,434.00	8,949,332,194.00	405,487,130.00	610,005,240.00
39	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-	2,681,663,831.00	2,309,766,056.71	210,862,190.71	371,897,774.29
40	BIRO SOSIAL	-	-	-	-	-	-	2,655,516,562.00	2,346,845,681.57	166,061,916.14	308,670,880.43
41	BIRO ORGANISASI	227,194,285.00	293,620,000.00	182,635,713.00	-	-	-	2,393,008,779.00	2,026,521,619.71	177,812,766.43	366,487,159.29
42	BIRO OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	2,766,510,918.00	2,326,949,703.71	192,161,092.86	439,561,214.29
43	BIRO ADM PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/ JASA	-	-	-	-	-	-	3,792,380,790.00	3,343,855,025.00	408,863,962.07	448,525,765.00
44	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	-	2,919,617,814.00	2,418,387,859.00	278,458,651.43	501,229,955.00
45	BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN	234,450,000.00	234,450,000.00	234,450,000.00	-	-	-	8,549,672,713.00	5,139,034,862.36	1,420,420,541.64	3,410,637,850.64
46	SEKWAN	-	-	-	-	-	5,180,000.00	57,430,979,410.00	51,377,953,992.60	2,259,646,078.11	6,053,025,417.40
47	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	58,485,000.00	7,300,084,017.00	5,373,888,796.28	789,541,835.49	1,926,195,220.72
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	-	-	-	198,187,033,058.00	166,316,629,896.04	16,304,688,953.28	31,870,403,161.96
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	384,150.00	17,709,689,278.00	14,729,450,959.25	1,238,514,857.95	2,980,238,318.75
TOTAL		3,720,228,541.14	4,205,094,099.00	3,731,513,197.71	30,656,199,000.00	30,412,080,800.00	27,374,125,691.40	2,779,673,553,887.04	2,015,621,168,009.13	258,690,702,672.65	764,052,385,877.91

REKAPITULASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2019

No.	OPD	SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 2018	KOREKSI OPD/ KOREKSI PERMENDAGRI 108				EKSTRAKOMPITAB LE	KAPITALISASI BELANJA MODAL 2019	KOREKSI BELANJA MODAL		KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA 2019	REKLASIFIKASI ASET TETAP	
				(+)	PENYUSUTAN (+)	(-)	PENYUSUTAN (-)			(-)	(+)		(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DINAS PENDIDIKAN	2,382,830,299,245.00	545,346,172,057.00	29,581,095,556.20	23,175,946,924.37	39,721,494,847.25	25,839,507,923.57	-	134,516,311,980.00	706,992,439.00	10,372,347,615.00	-	73,105,665.00	8,652,983.00
2	DINAS KESEHATAN	66,177,810,389.00	31,556,924,842.00	-	18,212,678,830.54	-	-	-	5,651,000,000.00	10,817,848,613.00	-	6,745,556,300.00	-	-
3	RUMAH SAKIT JIWA	14,478,267,840.00	5,086,941,571.00	-	92,793,665.74	-	-	-	110,229,973.00	-	-	-	15,200,000.00	7,904,000.00
4	RUMAH SAKIT HAJI	36,679,230,268.00	4,918,806,091.00	-	1,923,866,883.04	-	-	-	198,413,000.00	314,417,000.00	-	-	-	-
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	25,790,184,742.00	10,094,815,043.00	1,322,128,978.00	4,538,874,225.96	1,322,128,978.00	703,891,635.00	-	-	-	-	4,211,936,198.00	162,339,900.00	-
6	DINAS SDA, CK. & TR	69,194,741,770.00	14,472,772,782.00	3,974,288,870.00	1,409,093,765.76	3,974,288,870.00	1,093,260,052.11	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7,147,974,000.00	2,374,623,968.00	-	10,919,741.81	-	-	-	-	197,013,320.00	-	-	-	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA	7,646,799,344.00	1,086,191,630.00	99,254,344.00	33,430,145.62	99,254,344.00	19,850,869.20	-	-	-	-	99,275,000.00	-	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3,245,554,673.00	2,379,523,727.00	2,004,243,673.00	2,004,243,673.00	2,004,243,673.00	1,300,224,723.23	-	796,368,000.00	-	796,368,000.00	512,774,000.00	704,018,934.00	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12,797,248,429.00	1,386,020,741.00	-	417,019,425.07	-	-	-	-	-	-	1,273,817,468.00	628,778,680.00	56,518,696.00
11	DINAS SOSIAL	96,053,893,122.00	48,897,601,308.00	-	5,806,048,579.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS TENAGA KERJA	12,177,787,851.00	4,774,137,099.00	-	184,696,508.16	-	-	-	-	-	-	1,654,320,363.00	-	-
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8,503,863,207.00	822,610,980.00	-	112,978,679.00	-	964,206.00	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	39,704,918,650.00	10,105,666,639.00	-	704,304,473.41	-	-	-	449,473,500.00	-	200,750,000.00	-	-	-
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17,058,755,044.00	1,633,066,207.00	2,881,095,000.00	518,917,395.57	-	-	-	2,408,609,592.00	-	1,149,728,162.00	171,525,000.00	-	-
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,026,000.00	-	-
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28,259,713,000.00	823,178,194.00	-	23,832,438.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,515,494.00	-	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	112,553,095,390.00	74,027,357,862.00	1,383,643,000.00	97,495,478.81	83,914,065,096.00	62,208,720,891.00	-	3,414,667,466.40	-	3,414,667,466.40	76,742,000.00	-	-
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,249,138,421.00	2,610,271,874.00	252,993,744.00	338,406,170.57	252,993,744.00	29,564,006.00	-	-	480,250,000.00	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	24,546,895,000.00	4,103,995,446.00	-	6.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	10,099,887,565.00	1,833,498,119.00	-	27,194,353.17	-	-	-	-	-	-	199,800,000.00	-	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	336,671,629,735.00	44,948,091,471.00	484,553,000.00	764,058,655.73	484,553,000.00	182,203,880.00	-	37,731,820,652.00	398,422,750.00	1,384,727,587.00	1,636,312,000.00	-	-
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	21,447,204,408.00	7,150,780,523.00	-	-	238,140,912.45	-	-	1,570,327,400.00	2,348,965,600.00	317,700,000.00	-	-	-
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	23,042,238,906.00	2,769,160,807.00	-	939,656,222.87	-	-	-	200,000,000.00	-	-	882,082,000.00	-	-
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34,266,634,991.00	6,593,438,808.00	1,241,359,300.00	1,117,136,172.11	1,241,359,300.00	466,440,656.00	-	1,269,598,527.00	541,602,013.00	457,000,829.00	59,643,100.00	-	-
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	116,389,080,706.00	27,480,152,926.00	11,164,004,550.00	8,230,207,800.01	11,193,804,550.00	2,162,471,092.00	-	5,509,717,740.00	3,951,551,205.00	3,831,815,440.00	583,412,600.00	-	-
28	DINAS PERKEBUNAN	19,319,076,189.00	5,618,790,172.00	4,287,962,000.00	2,290,577,745.87	4,287,962,000.00	1,749,161,859.00	47,940,000.00	560,113,492.00	-	-	97,079,527.00	-	-
29	DINAS KEHUTANAN	31,839,385,742.00	15,030,512,700.00	203,563,000.00	1,564,302,101.77	203,563,000.00	40,712,600.00	-	1,650,816,251.00	149,750,000.00	199,750,000.00	3,546,378,745.00	14,365,000.00	6,185,500.00
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11,014,244,900.00	3,737,050,126.00	-	4,849,527.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16,179,664,088.00	3,761,592,086.00	-	2,253,777,641.06	-	6,816,686.00	-	-	408,400,000.00	-	-	-	-
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,368,266,000.00	3,908,631,325.00	-	3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26,313,187,572.00	6,404,872,872.00	-	2,248,411,696.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6,513,839,700.00	2,071,996,928.00	29,505,000.00	305,132,882.46	29,505,000.00	8,261,400.00	-	3,637,681,300.00	-	-	388,185,000.00	30,056,537,700.00	420,922,787.00
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6,073,210,700.00	1,206,385,388.00	-	221,219,337.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	220,498,492,773.00	135,701,373,125.00	-	25,723,917,176.27	182,000,000.00	52,000,000.00	-	-	1,909,181,000.00	-	10,718,948,544.00	-	-
37	BIRO PEMERINTAHAN	462,075,141.00	60,217,278.00	-	7.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	SEKWAN	221,297,642,106.00	26,768,096,824.00	222,305,040.00	54,775,176.20	222,305,000.00	50,720,200.00	-	-	-	-	980,089,961.00	-	-
39	INSPEKTORAT DAERAH	32,223,938,550.00	1,151,982,986.00	-	163,426,757.17	-	-	-	-	-	-	420,475,000.00	-	-
40	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	148,415,492,589.00	15,648,559,304.00	-	8,842,808,522.97	-	-	-	18,370,500,749.00	3,916,850,000.00	-	424,353,000.00	-	-
41	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	12,545,782,904.00	2,921,402,264.00	-	326,293,955.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,270,077,145,650.00	1,081,267,264,093.00	59,131,995,055.20	114,683,092,747.19	149,133,521,402.25	96,152,913,591.57	47,940,000.00	218,045,649,622.40	26,141,243,940.00	22,124,855,099.40	35,056,247,300.00	31,654,345,879.00	500,183,966.00

REKAPITULASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2019

No.	OPD	REKLASIFIKASI ASET TETAP		MUTASI OPD 2019				PENGHAPUSAN		PENDAPATAN HIBAH/ PENYERAHAN/ KURANG CATAT		EKSTRAKOMPTA BLE	SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 2019
		(-)	Beban Susut (-)	(+)	Beban Susut (+)	(-)	Beban Susut (-)	(-)	Beban Susut (-)	(+)	Beban Susut (+)			
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	DINAS PENDIDIKAN	1,754,634,897.00	-	-	-	-	-	-	-	5,878,669,796.00	117,573,396.00	29,410,600.00	2,501,708,586,721.95	602,915,065,137.62
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,392,215,302.00	63,281,025,784.37
3	RUMAH SAKIT JIWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,603,697,813.00	5,658,404,935.65
4	RUMAH SAKIT HAJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,192,060,268.00	8,074,313,809.55
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,164,460,840.00	15,913,936,210.85
6	DINAS SDA, CK, & TR	-	-	-	-	24,777,294,000.00	495,545,880.00	-	-	-	-	-	44,417,447,770.00	15,548,437,170.07
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	4,814,929,000.00	1,085,638,632.00	-	-	-	-	-	2,530,058,320.00	1,417,879,003.63
8	BADAN KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,746,074,344.00	1,258,498,113.62
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,462,347,607.00	3,478,184,374.44
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	394,714,000.00	49,949,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,287,495.00	14,286,843,082.00	2,325,067,937.09
11	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,053,893,122.00	57,369,065,302.51
12	DINAS TENAGA KERJA	475,545,000.00	335,219,368.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,356,563,214.00	5,005,249,992.39
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	373,541,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,877,404,701.00	1,141,269,905.43
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	-	-	273,657,000.00	74,793,911.18	-	-	-	-	-	-	-	40,227,299,150.00	12,085,422,665.57
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,370,256,474.00	2,577,201,075.10
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	194,026,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,259,713,000.00	1,420,639,512.42
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	-	-	-	-	179,515,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,099,415,294.00	12,675,697,538.90
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,350,000.00	4,713,038,421.00	3,576,111,481.06
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,546,895,000.00	4,727,440,965.88
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,299,687,565.00	2,077,718,872.42
23	DINAS PEMUDA DAN OLARAGRA	-	-	29,592,223,000.00	2,419,529,866.40	-	-	-	-	-	-	-	404,645,680,550.00	57,451,080,806.55
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	5,206,677,360.00	1,002,683,207.89	-	-	-	19,842,120,048.00	6,623,272,974.72
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,124,320,906.00	4,425,476,346.32
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,680,477,802.00	8,076,895,280.21
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,572,146,811.00	37,483,248,949.94
28	DINAS PERKEBUNAN	191,535,000.00	34,478,000.00	-	-	273,657,000.00	74,793,911.18	-	-	-	-	-	19,463,137,208.00	6,851,914,195.72
29	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000,945,738.00	20,400,649,062.64
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,014,244,900.00	4,038,353,044.35
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,588,064,088.00	6,850,771,379.85
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,368,266,000.00	4,236,068,968.23
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	464,400,000.00	262,486,956.52	-	26,777,587,572.00	9,645,950,550.65
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,596,243,700.00	3,745,834,597.88
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,073,210,700.00	1,892,165,323.22
36	BIRO LUMUM DAN PERLENGKAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,944,622,317.00	189,421,512,171.92
37	BIRO PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,075,141.00	69,458,788.20
38	SEKWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,277,732,107.00	31,234,113,211.78
39	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	32,644,413,550.00	-	-	2,024,352,121.88	-
40	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,127,196,338.00	32,457,000,736.21
41	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,545,782,904.00	3,637,266,277.82
	TOTAL	2,816,428,897.00	419,646,927.42	30,239,421,494.00	2,494,323,777.58	30,239,421,494.00	1,655,978,423.18	5,206,677,360.00	1,002,683,207.89	6,343,069,796.00	380,060,352.52	64,048,095.00	4,467,056,226,388.95	1,253,092,014,576.66

REKAPITULASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2019

No.	OPD	PENYUSUTAN 2019	SALDO 31 DESEMBER 2019
1	2	29	30
1	DINAS PENDIDIKAN	60,106,227,700.82	1,898,793,521,584.33
2	DINAS KESEHATAN	13,511,422,111.83	26,111,189,517.63
3	RUMAH SAKIT JIWA	470,765,696.91	8,945,292,877.35
4	RUMAH SAKIT HAJI	1,231,840,835.52	29,117,746,458.45
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1,984,138,576.90	14,250,524,629.15
6	DINAS SDA, CK, & TR	1,255,376,554.42	28,869,010,599.93
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117,973,925.82	1,112,179,316.37
8	BADAN KESATUAN BANGSA	158,727,207.20	6,487,576,230.38
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	394,641,697.67	984,163,232.56
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	515,458,634.02	11,961,775,144.91
11	DINAS SOSIAL	2,665,415,414.67	38,684,827,819.49
12	DINAS TENAGA KERJA	381,635,753.65	8,351,313,221.61
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	206,644,452.42	7,736,134,795.57
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	1,200,657,641.97	28,141,876,484.43
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	425,217,472.53	18,793,055,398.90
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	573,628,879.70	26,839,073,487.58
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH		
19	DINAS PERHUBUNGAN	759,565,089.09	17,423,717,755.10
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	656,997,442.49	1,136,926,939.94
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH	623,445,513.01	19,819,454,034.12
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	217,026,400.26	8,221,968,692.58
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	9,501,604,693.42	347,194,599,743.45
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	713,316,572.07	13,218,847,073.28
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	716,659,316.45	19,698,844,559.68
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	832,760,956.10	27,603,582,521.79
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3,935,359,315.93	85,088,897,861.07
28	DINAS PERKEBUNAN	800,980,048.04	12,611,223,012.28
29	DINAS KEHUTANAN	3,840,361,360.87	16,600,296,675.36
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	296,453,391.01	6,975,891,855.65
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	842,218,338.79	9,737,292,708.15
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	327,437,640.12	2,132,197,031.77
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	730,179,025.63	17,131,637,021.35
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	956,043,400.41	36,850,409,102.12
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	464,560,597.42	4,181,045,376.78
36	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	28,048,221,870.65	43,523,110,145.08
37	BIRO PEMERINTAHAN	9,241,502.82	392,616,352.80
38	SEKWAN	4,461,961,411.58	191,043,618,895.22
39	INSPEKTORAT DAERAH	708,942,378.71	30,620,061,428.12
40	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7,965,632,909.23	138,670,195,601.79
41	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	389,570,058.30	8,908,516,626.18
	TOTAL	152,998,311,790.43	3,213,964,211,812.29

REKAPITULASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 17 - 1

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 2018	SALDO 31 DESEMBER 2018	KOREKSI OPD/ KOREKSI PERMENDAGRI 108				SALDO SETELAH KOREKSI OPD	SALDO SETELAH KOREKSI OPD	
					(+)	PENYUSUTAN (+)	(-)	PENYUSUTAN (-)		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	DINAS PENDIDIKAN	32,183,411,021.00	11,859,991,948.00	20,323,419,073.00	35,000,019.64	34,435,349.11	35,000,001.00	102,980,457.00	32,183,411,039.64	11,791,446,840.11	68,545,107.89
2	DINAS KESEHATAN	913,580,500.00	263,260,178.00	650,320,322.00	-	34.50	-	-	913,580,500.00	263,260,212.50	(34.50)
3	RUMAH SAKIT JIWA	3,142,870,500.00	732,818,657.00	2,410,051,843.00	-	8.79	-	-	3,142,870,500.00	732,818,665.79	(8.79)
4	RUMAH SAKIT HAJI	5,855,215,649.00	1,004,826,006.00	4,850,389,643.00	-	881,824.48	-	-	5,855,215,649.00	1,005,707,830.48	(881,824.48)
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	6,578,914,125,676.00	4,342,801,346,616.00	2,236,112,779,060.00	-	956,679,474,634.24	-	-	6,578,914,125,676.00	5,299,480,821,250.24	(956,679,474,634.24)
6	DINAS SDA, CK, & TR	1,595,598,943,156.00	701,968,347,992.00	893,630,595,164.00	3,199,382,126.00	11,126,193,027.42	3,199,381,578.00	566,755,578.00	1,595,598,943,704.00	712,527,785,441.42	(10,559,437,449.42)
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	412,607,829,298.00	227,399,745,749.00	185,208,083,549.00	-	207.89	-	-	412,607,829,298.00	227,399,745,956.89	(207.89)
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,259,160.00	1,259,160.00	-	-	-	-	-	1,259,160.00	1,259,160.00	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	116,222,000.00	11,132,405.00	105,089,595.00	-	448,463.24	-	-	116,222,000.00	11,580,868.24	(448,463.24)
11	DINAS SOSIAL	1,570,104,224.00	443,297,595.00	1,126,806,629.00	-	19,026,217.38	-	-	1,570,104,224.00	462,323,812.38	(19,026,217.38)
12	DINAS TENAGA KERJA	84,790,000.00	22,610,664.00	62,179,336.00	-	2.67	-	-	84,790,000.00	22,610,666.67	(2.67)
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	1,974,618,900.00	806,845,708.00	1,167,773,192.00	99,450,000.00	103,076,211.60	99,450,000.00	99,450,000.00	1,974,618,900.00	810,471,919.60	(3,626,211.60)
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,760,913,250.00	174,653,681.00	1,586,259,569.00	-	13,764,185.67	-	-	1,760,913,250.00	188,417,866.67	(13,764,185.67)
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	189,340,000.00	12,622,666.00	176,717,334.00	-	-	-	-	189,340,000.00	12,622,666.00	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	2,267,291,750.00	1,825,229,007.00	442,062,743.00	-	-	-	0.33	2,267,291,750.00	1,825,229,006.67	0.33
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	550,175,180.00	197,510,378.00	352,664,802.00	-	46.28	-	-	550,175,180.00	197,510,424.28	(46.28)
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	147,250,000.00	36,099,998.00	111,150,002.00	-	2.00	-	-	147,250,000.00	36,100,000.00	(2.00)
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	326,828,400.00	126,027,610.00	200,800,790.00	-	-	-	-	326,828,400.00	126,027,610.00	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	17,581,009,300.00	11,688,833,691.00	5,892,175,609.00	-	167,779,951.22	-	-	17,581,009,300.00	11,856,613,642.22	(167,779,951.22)
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,114,633,500.00	696,170,694.00	418,462,806.00	-	4.00	-	0.00	1,114,633,500.00	696,170,698.00	(4.00)
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	174,352,000.00	60,888,819.00	113,463,181.00	-	2.05	-	-	174,352,000.00	60,888,821.05	(2.05)
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,764,059,136.00	2,476,184,097.00	9,287,875,039.00	-	18,831,871.56	-	-	11,764,059,136.00	2,495,015,968.56	(18,831,871.56)
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	21,901,242,471.00	9,088,397,900.00	12,812,844,571.00	-	147,064,923.68	-	-	21,901,242,471.00	9,235,462,823.68	(147,064,923.68)
28	DINAS PERKEBUNAN	1,018,088,800.00	166,934,915.00	851,153,885.00	-	118,758,500.00	-	0.25	1,018,088,800.00	285,693,414.75	(118,758,499.75)
29	DINAS KEHUTANAN	1,679,175,000.00	1,056,528,309.00	622,646,691.00	-	24.33	-	-	1,679,175,000.00	1,056,528,333.33	(24.33)
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44,955,500.00	26,427,776.00	18,527,724.00	-	0.32	-	-	44,955,500.00	26,427,776.32	(0.32)
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9,959,950.00	663,996.00	9,295,954.00	-	1.00	-	-	9,959,950.00	663,997.00	(1.00)
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	37,978,380.00	10,444,049.00	27,534,331.00	-	6.00	-	0.50	37,978,380.00	10,444,054.50	(5.50)
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	799,441,000.00	190,275,648.00	609,165,352.00	-	2.00	-	-	799,441,000.00	190,275,650.00	(2.00)
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	771,186,000.00	163,280,475.00	607,905,525.00	-	5.95	-	-	771,186,000.00	163,280,480.95	(5.95)
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	64,000,000.00	13,902,498.00	50,097,502.00	-	2.00	-	-	64,000,000.00	13,902,500.00	(2.00)
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	1,158,317,750.00	236,845,911.00	921,471,839.00	-	52.75	-	-	1,158,317,750.00	236,845,963.75	(52.75)
46	SEKWAN	2,166,046,325.00	452,548,367.00	1,713,497,958.00	-	16.75	-	-	2,166,046,325.00	452,548,383.75	(16.75)
47	INSPEKTORAT DAERAH	308,720,500.00	68,262,259.00	240,458,241.00	-	10,275,996.56	-	-	308,720,500.00	78,538,255.56	(10,275,996.56)
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	4,295,835,651.00	927,113,038.00	3,368,722,613.00	-	494,860.19	-	0.44	4,295,835,651.00	927,607,897.76	(494,859.76)
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	196,708,000.00	98,354,000.00	98,354,000.00	-	-	-	-	196,708,000.00	98,354,000.00	-
	TOTAL	8,703,290,477,927.00	5,317,109,682,460.00	3,386,180,795,467.00	3,333,832,145.64	968,440,506,435.61	3,333,831,579.00	769,186,036.52	8,703,290,478,493.64	6,284,781,002,859.09	(967,671,320,399.09)

REKAPITULASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 17 - 2

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO KOREKSI OPD SETELAH PENYUSUTAN	KAPITALISASI BELANJA MODAL 2019	KOREKSI BELANJA MODAL		KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA 2019	REKLASIFIKASI ASET TETAP		REKLASIFIKASI ASET TETAP		MUTASI OPD 2019	
			(+)	(+)	(-)	(+)	(+)	Beban Susut (+)	(-)	Beban Susut (-)	(+)	Beban Susut (+)
1	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	DINAS PENDIDIKAN	20,391,964,199.53	-	10,319,914,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	650,320,287.50	-	-	-	474,234,000.00	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT JIWA	2,410,051,834.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT HAJI	4,849,507,818.52	197,951,000.00	198,412,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1,279,433,304,425.76	424,654,022,657.00	-	-	22,020,937,934.00	-	-	-	-	-	-
6	DINAS SDA, CK, & TR	883,071,158,262.59	151,960,474,331.00	8,857,287,962.00	31,648,778,305.00	-	9,660,106,827.00	461,154,203.00	-	-	-	-
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	185,208,083,341.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	104,641,131.76	-	-	-	660,226,289.00	-	-	-	-	-	-
11	DINAS SOSIAL	1,107,780,411.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS TENAGA KERJA	62,179,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	1,164,146,980.40	544,310,000.00	445,340,000.00	249,590,000.00	-	-	-	-	-	142,215,950.00	24,887,791.25
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,572,495,383.33	2,375,656,077.00	2,395,888,596.00	49,610,000.00	384,384,000.00	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	176,717,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	442,062,743.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	352,664,755.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	111,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	200,800,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,724,395,657.78	124,700,000.00	1,384,727,587.00	-	216,462,000.00	-	-	-	-	-	-
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	418,462,802.00	1,240,611,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	113,463,178.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,269,043,167.44	1,632,305,385.00	116,638,857.00	1,352,906,876.00	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	12,665,779,647.32	1,781,036,135.00	178,454,235.00	-	295,991,130.00	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERKEBUNAN	732,395,385.25	-	-	-	200,000,000.00	191,535,000.00	34,478,000.00	-	-	-	-
29	DINAS KEHUTANAN	622,646,666.67	-	289,510,000.00	-	220,200,377.00	-	-	-	-	-	-
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	18,527,723.68	-	120,135,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9,295,953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27,534,325.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	609,165,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	607,905,519.05	-	-	-	-	-	-	139,485,000.00	27,897,000.00	-	-
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	50,097,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	921,471,786.25	-	197,755,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
46	SEKWAN	1,713,497,941.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	INSPEKTORAT DAERAH	230,182,244.44	198,382,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	3,368,227,753.24	-	188,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	98,354,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,418,509,475,634.55	584,709,449,585.00	24,692,665,337.00	33,300,885,181.00	24,472,435,730.00	9,851,641,827.00	495,632,203.00	139,485,000.00	27,897,000.00	142,215,950.00	24,887,791.25

REKAPITULASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 17 - 3

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	MUTASI OPD 2019		PENGHAPUSAN		SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	BEBAN SUSUT REKLAS DLL	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 2019	PENYUSUTAN 2019	SALDO 31 DESEMBER 2019	
		(-)	Beban Susut (-)	(-)	Beban Susut (-)						
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	42,503,325,939.64	(68,545,107.89)	11,791,446,840.11	13,731,337,221.68	1,939,890,381.57	28,771,988,717.96
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	1,387,814,500.00	34.50	263,260,212.50	305,638,325.00	42,378,112.50	1,082,176,175.00
3	RUMAH SAKIT JIWA	-	-	-	-	3,142,870,500.00	8.79	732,818,665.79	855,716,579.82	122,897,914.04	2,287,153,920.18
4	RUMAH SAKIT HAJI	-	-	-	-	6,251,578,649.00	881,824.48	1,005,707,830.48	1,253,231,989.86	247,524,159.38	4,998,346,659.14
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	7,025,589,086,267.00	956,679,474,634.24	5,299,480,821,250.24	6,046,437,738,252.41	746,956,917,002.17	979,151,348,014.59
6	DINAS SDA, CK, & TR	-	-	-	-	1,734,428,034,519.00	11,020,591,652.42	712,988,939,644.42	807,663,545,424.59	94,674,605,780.17	926,764,489,094.41
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	412,607,829,298.00	207.89	227,399,745,956.89	255,189,113,530.62	27,789,367,573.73	157,418,715,767.38
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	1,259,160.00	-	1,259,160.00	-	-	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	776,448,289.00	448,463.24	11,580,868.24	80,593,243.76	69,012,375.52	695,855,045.24
11	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	1,570,104,224.00	19,026,217.38	462,323,812.38	508,054,582.95	45,730,770.57	1,062,049,641.05
12	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	84,790,000.00	2.67	22,610,666.67	25,437,000.00	2,826,333.33	59,353,000.00
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	-	-	-	-	2,856,894,850.00	28,514,002.85	835,359,710.85	964,525,746.31	129,166,035.46	1,892,369,103.69
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	6,867,231,923.00	13,764,185.67	188,417,866.67	630,923,069.85	442,505,203.18	6,236,308,853.15
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	189,340,000.00	-	12,622,666.00	18,934,000.00	6,311,334.00	170,406,000.00
19	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	2,267,291,750.00	(0.33)	1,825,229,006.67	1,849,752,816.67	24,523,810.00	417,538,933.33
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	550,175,180.00	46.28	197,510,424.28	216,470,939.00	18,960,514.71	333,704,241.00
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH	-	-	-	-	147,250,000.00	-	36,100,000.00	41,008,333.33	4,908,333.33	106,241,666.67
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	326,838,400.00	-	126,027,610.00	142,369,030.00	16,341,420.00	184,459,370.00
23	DINAS PEMUDA DAN OLARAHAGA	-	-	-	-	19,306,898,887.00	167,779,951.22	11,856,613,642.22	13,234,099,253.00	1,377,485,610.78	6,072,799,634.00
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	395,783,500.00	119,175,698.00	1,959,461,200.00	(119,175,694.00)	576,995,000.00	689,333,560.00	112,338,560.00	1,270,127,640.00
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	174,352,000.00	2.05	60,888,821.05	66,685,384.21	5,796,563.16	107,666,615.79
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	12,160,096,502.00	18,831,871.56	2,495,015,968.56	3,046,333,477.91	551,317,509.35	9,113,763,024.09
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-	-	24,156,723,971.00	147,064,923.68	9,235,462,823.68	10,875,758,395.50	1,640,295,571.82	13,280,965,575.50
28	DINAS PERKEBUNAN	142,215,950.00	24,887,791.00	-	-	1,267,407,850.00	128,348,708.75	295,283,623.75	403,000,611.67	107,716,987.92	864,407,238.33
29	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	2,188,885,377.00	24.33	1,056,528,333.33	1,284,984,188.50	228,455,855.17	903,901,188.50
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	165,090,900.00	0.32	26,427,776.32	31,521,615.26	5,093,838.95	133,569,284.74
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	9,959,950.00	1.00	663,997.00	995,995.00	331,998.00	8,963,955.00
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	37,978,380.00	5.50	10,444,054.50	11,393,514.00	949,459.50	26,584,866.00
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	799,441,000.00	2.00	190,275,650.00	209,909,666.67	19,634,016.67	589,531,333.33
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	631,701,000.00	(27,896,994.05)	135,383,480.95	154,006,600.00	18,623,119.05	477,694,400.00
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	64,000,000.00	2.00	13,902,500.00	15,668,333.33	1,765,833.33	48,331,666.67
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	-	-	-	-	1,356,073,550.00	52.75	236,845,963.75	283,698,893.33	46,852,929.58	1,072,374,656.67
46	SEKWAN	-	-	-	-	2,166,046,325.00	16.75	452,548,383.75	547,914,415.83	95,366,032.08	1,618,131,909.17
47	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	507,103,300.00	10,275,996.56	78,538,255.56	114,818,124.44	36,279,868.89	392,285,175.56
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	-	4,484,435,651.00	494,859.76	927,607,897.76	1,047,107,376.66	119,499,478.91	3,437,328,274.34
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	196,708,000.00	-	98,354,000.00	118,024,800.00	19,670,800.00	78,683,200.00
	TOTAL	142,215,950.00	24,887,791.00	395,783,500.00	119,175,698.00	9,313,180,517,291.64	968,019,879,904.34	6,285,129,562,364.34	7,162,050,903,451.16	876,921,341,086.82	2,151,129,613,840.48

REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 18 - 1

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 2018	SALDO 31 DESEMBER 2018	KOREKSI OPD/ KOREKSI PERMENDAGRI 108				MUTASI KE PERSEDIAAN
					(+)	PENYUSUTAN (+)	(-)	PENYUSUTAN (-)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS PENDIDIKAN	138,766,288,826.00	9,636,945,827.00	129,129,342,999.00	2,672,974,084.60	196,640,195.00	7,929,165,090.01	5,579,509,754.29	969,936,040.00
2	DINAS KESEHATAN	68,100,000.00	-	68,100,000.00	-	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT HAJI	248,503,500.00	-	248,503,500.00	-	-	-	-	-
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	2,845,555,095.00	9,900,000.00	2,835,655,095.00	-	-	-	-	-
6	DINAS SDA, CK, & TR	15,938,773,538.00	-	15,938,773,538.00	-	-	-	-	-
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23,291,417,000.00	5,548,000.00	23,285,869,000.00	-	-	13,270,000.00	5,548,000.00	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA	27,000,000.00	12,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-
11	DINAS SOSIAL	25,955,250.00	-	25,955,250.00	-	-	-	-	-
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	2,010,411,500.00	-	2,010,411,500.00	-	-	-	-	-
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,344,357,520.00	2,992,000.00	3,341,365,520.00	-	-	2,888,575,000.00	2,992,000.00	-
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	54,270,000.00	-	54,270,000.00	-	-	-	-	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	2,173,090,000.00	-	2,173,090,000.00	-	-	-	-	-
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	960,000.00	-	960,000.00	-	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	88,248,000.00	5,448,000.00	82,800,000.00	-	-	4,448,000.00	4,448,000.00	-
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	633,157,450.00	28,497,250.00	604,660,200.00	-	-	614,877,250.00	27,897,250.00	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8,183,162,610.00	5,037,985,457.00	3,145,177,153.00	88,880,000.00	1,709.00	8,060,402,610.00	4,992,414,166.00	-
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,229,705,000.00	1,315,735,000.00	1,913,970,000.00	421,400,000.00	-	421,400,000.00	421,400,000.00	-
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4,095,037,725.00	202,775,000.00	3,892,262,725.00	40,170,000.00	-	40,170,000.00	40,170,000.00	-
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,595,277,406.00	-	6,595,277,406.00	3.00	-	-	-	-
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2,096,485,000.00	-	2,096,485,000.00	-	-	-	-	-
28	DINAS PERKEBUNAN	1,916,319,411.00	107,620,000.00	1,808,699,411.00	-	-	-	107,620,000.00	-
29	DINAS KEHUTANAN	1,444,177,500.00	210,350,000.00	1,233,827,500.00	98,900,000.00	-	98,900,000.00	98,900,000.00	-
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	159,520,500.00	22,450,000.00	137,070,500.00	-	-	-	-	-
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	102,200,000.00	-	102,200,000.00	-	-	-	-	-
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20,805,575.00	-	20,805,575.00	-	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20,839,000.00	-	20,839,000.00	-	-	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	29,570,000.00	-	29,570,000.00	-	-	-	-	-
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	171,895,680.00	61,102,800.00	110,792,880.00	-	-	152,757,000.00	61,102,800.00	-
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13,600,400.00	5,922,000.00	7,678,400.00	-	3,948,000.00	-	9,870,000.00	-
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	969,396,188.00	146,562,000.00	822,834,188.00	150,785,000.00	-	161,785,000.00	132,769,000.00	-
38	BIRO PEMERINTAHAN	1,124,595,000.00	842,507,000.00	282,088,000.00	647,230,000.00	-	647,230,000.00	647,230,000.00	-
41	BIRO ORGANISASI	56,968,949.00	-	56,968,949.00	-	-	-	-	-
44	BIRO HUKUM	5,476,100.00	-	5,476,100.00	-	-	-	-	-
45	BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN	17,410,000.00	3,482,000.00	13,928,000.00	-	-	17,410,000.00	3,482,000.00	-
46	SEKWAN	3,464,271,650.00	340,729,900.00	3,123,541,750.00	34,800,000.00	-	261,054,900.00	261,054,900.00	-
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	55,727,283,456.00	22,176,000.00	55,705,107,456.00	-	-	47,520,000.00	22,176,000.00	-
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	376,612,706.00	359,505,006.00	17,107,700.00	130,305,000.00	-	131,555,000.00	131,555,000.00	-
	TOTAL	279,369,197,535.00	18,382,733,240.00	260,986,464,295.00	4,285,444,087.60	200,589,904.00	21,490,519,850.01	12,550,138,870.29	969,936,040.00

REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 18 - 2

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO SETELAH KOREKSI OPD			SALDO KOREKSI OPD SETELAH PENYUSUTAN	KAPITALISASI BELANJA MODAL 2019	KOREKSI BELANJA MODAL			KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA 2019	REKLASIFIKASI ASET TETAP	
		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	PERUB SUSUT SETELAH KOREKSI			(+)	(-)	(+)		(+)	(+)
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	DINAS PENDIDIKAN	132,540,161,780.59	4,254,076,267.71	5,382,869,559.29	128,286,085,512.88	96,134,906,518.00	2,203,142,440.00	18,008,897,280.00	-	-	-	
2	DINAS KESEHATAN	68,100,000.00	-	-	68,100,000.00	-	-	-	-	-	-	
4	RUMAH SAKIT HAJI	248,503,500.00	-	-	248,503,500.00	470,469,000.00	-	470,469,000.00	-	-	-	
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	2,845,555,095.00	9,900,000.00	-	2,835,655,095.00	-	-	-	1,274,391,599.00	-	-	
6	DINAS SDA, CK, & TR	15,938,773,538.00	-	-	15,938,773,538.00	-	-	-	-	-	-	
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23,278,147,000.00	-	5,548,000.00	23,278,147,000.00	197,013,320.00	-	197,013,320.00	-	-	-	
8	BADAN KESATUAN BANGSA	27,000,000.00	12,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
9	SATJAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	22,400,000.00	766,868,000.00	-	-	-	-	
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
11	DINAS SOSIAL	25,955,250.00	-	-	25,955,250.00	-	-	-	-	-	-	
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	2,010,411,500.00	-	-	2,010,411,500.00	322,363,020.00	-	12,600,000.00	-	-	261,800,000.00	
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	455,782,520.00	-	2,992,000.00	455,782,520.00	-	13,970,000.00	-	-	-	-	
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	74,427,294.00	-	15,000,000.00	-	-	-	
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	54,270,000.00	-	-	54,270,000.00	-	-	-	-	-	-	
19	DINAS PERHUBUNGAN	2,173,090,000.00	-	-	2,173,090,000.00	-	-	-	439,900,000.00	196,968,000.00	-	
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	960,000.00	-	-	960,000.00	480,250,000.00	9,000,000.00	480,250,000.00	-	-	-	
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	83,800,000.00	1,000,000.00	4,448,000.00	82,800,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	18,280,200.00	600,000.00	27,897,250.00	17,680,200.00	-	-	-	-	-	-	
23	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	211,640,000.00	45,573,000.00	4,992,412,457.00	166,067,000.00	7,420,695,259.00	79,200,000.00	3,527,826,259.00	-	-	-	
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,229,705,000.00	894,335,000.00	421,400,000.00	2,335,370,000.00	853,300,000.00	-	-	-	-	-	
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4,095,037,725.00	162,605,000.00	40,170,000.00	3,932,432,725.00	997,193,800.00	-	-	-	-	-	
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,595,277,409.00	-	-	6,595,277,409.00	857,313,174.00	1,150,682,335.00	689,515,798.00	169,678,020.00	-	-	
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2,096,485,000.00	-	-	2,096,485,000.00	298,190,000.00	-	298,190,000.00	-	-	-	
28	DINAS PERKEBUNAN	1,916,319,411.00	-	107,620,000.00	1,916,319,411.00	-	-	-	-	-	-	
29	DINAS KEHUTANAN	1,444,177,500.00	111,450,000.00	98,900,000.00	1,332,727,500.00	239,510,000.00	-	239,510,000.00	-	-	-	
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	159,520,500.00	22,450,000.00	-	137,070,500.00	-	-	-	-	-	-	
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	102,200,000.00	-	-	102,200,000.00	457,550,000.00	31,517,145.00	457,550,000.00	-	-	-	
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20,805,575.00	-	-	20,805,575.00	-	-	-	-	-	2,541,640,000.00	
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20,839,000.00	-	-	20,839,000.00	-	-	-	-	-	-	
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	29,570,000.00	-	-	29,570,000.00	-	-	-	-	-	-	
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19,138,680.00	-	61,102,800.00	19,138,680.00	-	-	-	-	-	-	
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13,600,400.00	-	5,922,000.00	13,600,400.00	-	-	-	-	-	-	
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	958,396,188.00	13,793,000.00	132,769,000.00	944,603,188.00	198,500,000.00	167,910,100.00	-	459,614,000.00	-	-	
38	BIRO PEMERINTAHAN	1,124,595,000.00	195,277,000.00	647,230,000.00	929,318,000.00	-	18,003,000.00	-	-	-	-	
41	BIRO ORGANISASI	56,968,949.00	-	-	56,968,949.00	-	-	-	-	-	-	
44	BIRO HUKUM	5,476,100.00	-	-	5,476,100.00	-	-	-	-	-	-	
45	BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN	-	-	3,482,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
46	SEKWAN	3,238,016,750.00	79,675,000.00	261,054,900.00	3,158,341,750.00	-	-	-	-	-	-	
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	55,679,763,456.00	-	22,176,000.00	55,679,763,456.00	-	-	-	1,051,828,000.00	-	-	
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	375,362,706.00	227,950,006.00	131,555,000.00	147,412,700.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	-	
	TOTAL	261,194,185,732.59	6,033,184,273.71	12,349,548,966.29	255,161,001,458.88	109,033,381,385.00	4,445,093,020.00	24,401,621,657.00	3,395,411,619.00	196,968,000.00	2,803,440,000.00	

REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 18 - 3

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	MUTASI OPD 2019			SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	BEBAN SUSUT REKLAS DLL	AKUM SUSUT SETELAH REKLAS	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 2019	PENYUSUTAN 2019	SALDO 31 DESEMBER 2019
		Beban Susut (+)	(-)	(-)						
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	75,275,977,765.00	137,593,335,693.59	(5,382,869,559.29)	4,254,076,267.71	5,053,179,267.63	799,102,999.92	132,540,156,425.96
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	68,100,000.00	-	-	-	-	68,100,000.00
4	RUMAH SAKIT HAJI	-	-	-	248,503,500.00	-	-	-	-	248,503,500.00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	4,119,946,694.00	-	9,900,000.00	9,900,000.00	-	4,110,046,694.00
6	DINAS SDA, CK, & TR	-	-	-	15,938,773,538.00	-	-	-	-	15,938,773,538.00
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	23,278,147,000.00	(5,548,000.00)	-	-	-	23,278,147,000.00
8	BADAN KESATUAN BANGSA	-	-	-	27,000,000.00	-	12,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	22,400,000.00	766,868,000.00	-	-	4,900,000.00	4,900,000.00	761,968,000.00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
11	DINAS SOSIAL	-	-	-	25,955,250.00	-	-	-	-	25,955,250.00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	-	-	-	2,581,974,520.00	-	-	-	-	2,581,974,520.00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	469,752,520.00	(2,992,000.00)	-	2,794,000.00	2,794,000.00	466,958,520.00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	59,427,294.00	-	-	-	-	59,427,294.00
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	-	-	-	54,270,000.00	-	-	-	-	54,270,000.00
19	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	2,809,958,000.00	-	-	-	-	2,809,958,000.00
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	9,960,000.00	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00	960,000.00
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	4,500,000.00	83,800,000.00	(4,448,000.00)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	82,800,000.00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	18,280,200.00	(27,897,250.00)	600,000.00	600,000.00	-	17,680,200.00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA	-	-	-	4,183,709,000.00	(4,992,412,457.00)	45,573,000.00	60,764,000.00	15,191,000.00	4,122,945,000.00
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	4,083,005,000.00	(421,400,000.00)	894,335,000.00	1,064,995,000.00	170,660,000.00	3,018,010,000.00
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	918,313,800.00	4,173,917,725.00	(40,170,000.00)	162,605,000.00	162,605,000.00	-	4,011,312,725.00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	8,083,435,140.00	-	-	-	-	8,083,435,140.00
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-	2,096,485,000.00	-	-	-	-	2,096,485,000.00
28	DINAS PERKEBUNAN	-	261,800,000.00	-	1,654,519,411.00	(107,620,000.00)	-	-	-	1,654,519,411.00
29	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	1,444,177,500.00	(98,900,000.00)	111,450,000.00	111,450,000.00	-	1,332,727,500.00
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	159,520,500.00	-	22,450,000.00	22,450,000.00	-	137,070,500.00
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	133,717,145.00	-	-	1,076,363.20	1,076,363.20	132,640,781.80
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,016,656,000.00	-	-	2,562,445,575.00	1,016,656,000.00	1,016,656,000.00	1,524,984,000.00	508,328,000.00	1,037,461,575.00
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	20,839,000.00	-	-	-	-	20,839,000.00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	29,570,000.00	-	-	-	-	29,570,000.00
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	19,138,680.00	(61,102,800.00)	-	-	-	19,138,680.00
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	13,600,400.00	(5,922,000.00)	-	-	-	13,600,400.00
37	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	-	-	-	1,784,420,288.00	(132,769,000.00)	13,793,000.00	52,268,820.00	38,475,820.00	1,732,151,468.00
38	BIRO PEMERINTAHAN	-	-	-	1,142,598,000.00	(647,230,000.00)	195,277,000.00	223,671,600.00	28,394,600.00	918,926,400.00
41	BIRO ORGANISASI	-	-	-	56,968,949.00	-	-	-	-	56,968,949.00
44	BIRO HUKUM	-	-	-	5,476,100.00	-	-	-	-	5,476,100.00
45	BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN	-	-	-	-	(3,482,000.00)	-	-	-	-
46	SEKWAN	-	-	-	3,238,016,750.00	(261,054,900.00)	79,675,000.00	79,675,000.00	-	3,158,341,750.00
48	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	56,731,591,456.00	(22,176,000.00)	-	-	-	56,731,591,456.00
49	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	-	-	-	380,162,706.00	(131,555,000.00)	227,950,006.00	227,950,006.00	-	152,212,700.00
	TOTAL	1,016,656,000.00	261,800,000.00	76,221,191,565.00	280,183,866,534.59	- 11,332,892,966.29	7,049,840,273.71	8,630,763,056.83	1,580,922,783.12	271,553,103,477.76

REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER 31 DESEMBER 2019

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	SALDO 31 DESEMBER 2018	NILAI PEROLEHAN	SALDO KOREKSI OPD SETELAH PENYUSUTAN	KOREKSI BELANJA MODAL	HUTANG	REKLASIFIKASI ASET TETAP		SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	SALDO 31 DESEMBER 2019
						(+)		(+)	(-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DINAS PENDIDIKAN	15,560,775,744.00	15,560,775,744.00	15,560,775,744.00	15,560,775,744.00	-	-	1,754,634,897.00	-	17,315,410,641.00	17,315,410,641.00
2	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	10,952,440,957.00	10,952,440,957.00	10,952,440,957.00	10,952,440,957.00	-	-	-	-	10,952,440,957.00	10,952,440,957.00
3	DINAS SDA, CK, & TR	9,660,106,827.00	9,660,106,827.00	9,660,106,827.00	9,660,106,827.00	4,111,699,546.00	259,816,128.30	-	9,660,106,827.00	4,371,515,674.30	4,371,515,674.30
4	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30,056,537,700.00	30,056,537,700.00	30,056,537,700.00	30,056,537,700.00	-	-	-	30,056,537,700.00	-	-
5	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	4,196,000,000.00	4,196,000,000.00	4,196,000,000.00	4,196,000,000.00	-	-	-	-	4,196,000,000.00	4,196,000,000.00
	TOTAL	70,425,861,231.00	70,425,861,232.00	70,425,861,233.00	70,425,861,234.00	4,111,699,553.00	259,816,128.30	1,754,634,905.00	39,716,644,536.00	36,835,367,282.30	36,835,367,283.30

DANA BERGULIR
BERDASARKAN NILAI BERSIH YANG DAPAT DITAGIH (NET REALIZED VALUE)
MELALUI USAHA MIKRO DAN KECIL (UKM)
TAHUN 2007

No.	Kab/Kota	Nama	Alamat	Nilai Bantuan (Rp)	Saldo Angsuran Pokok per 31/12/2019	Umur Piutang					
						Jatuh Tempo	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur (setelah tanggal jatuh tempo)				
							< 1 th	1 s.d 2 th	> 2 s.d 3 th	> 3 s.d 4 th	> 4 th
						2009	2010 (0%)	2011 (25%)	2012 (50%)	2013 (75%)	2014 (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Medan	1 Khaidar Tanjung	Jln. Karya No. 16 Sei Agul	5,000,000	-						5,000,000
		2 Bayu, AK ST	Jln. Sutrisno Gg. Damai 45	5,000,000	-						5,000,000
		3 Mhd. Mahmunar,SH	Jln. Sekip Gg. Penghulu 2	5,000,000	-						5,000,000
		4 Drs. Azwar	Jln. SM. Raja Gg. Thawalib 7	5,000,000	-						5,000,000
		5 H. Sunarto, SH, M.Hur	Jln. Senam 16 A	5,000,000	-						5,000,000
		6 Afrida	Jln. Bromo NO. 36/40	5,000,000	-						5,000,000
		7 Robinsor Simorangkir	Jln. Kelambir V No. 42	5,000,000	-						5,000,000
		8 Menanti Siregar	Jln. Menteng Swasembada 21	5,000,000	-						5,000,000
		9 Ruggun Sitanggang	Jln. K.H. Wahid Hasyim 28	5,000,000	-						5,000,000
		10 Marlia	Jln. Sekip 25	5,000,000	-						5,000,000
		J u m l a h		50,000,000	-						50,000,000
2	Dairi	1 Judika Siburian	Jln. Martabe Sidikalang	10,000,000	-						10,000,000
		2 Evi Ugaitna Sinuhaji	Jln. Lae Malum 54	5,000,000	-						5,000,000
		3 Yusrizal Tanjung	Jln Kapur Baru NO. 10	5,000,000	-						5,000,000
		4 Guntur Manullang	Jln. Kalang Baru No. 6	5,000,000	-						5,000,000
		5 Poni Joparman Saragi	Jln. A. Yani Sidikalang	10,000,000	-						10,000,000
		6 Naumas Sitanggang	Jln. Dr. F. L. Sihombing	5,000,000	-						5,000,000
		7 Parasian Marbun	Jln. Sumbul Karo Pading	10,000,000	-						10,000,000
		8 Alamsyah Kudadiri	Simpang Tiga Sitinjo	5,000,000	-						5,000,000
		9 Mangisi Banjarnahor	Lae Pinang Desa Bintang	5,000,000	-						5,000,000
		10 Morris Lubis	Jln SM. Raja No. 10	5,000,000	-						5,000,000
		11 Odomina Samsosir	Jln. Lestari No. 42 Sidikalang	10,000,000	-						10,000,000
		12 Mangisi Hutagaol	Jln Ds Sungai Raya	5,000,000	-						5,000,000
		13 Leonardos Oriondo	Jln. Sibura-bura	10,000,000	-						10,000,000
		J u m l a h		90,000,000	-						90,000,000
3	Deli Serdang	1 Ikrom	Ds. Sukakarya P. Batu	20,000,000	-						20,000,000
		2 Basyir Yus	Jl. Banteng Gg Aman No.61 Sung	20,000,000	-						20,000,000
		3 Okta Eka Sinarta P	Jl. Medan L.Pakam Km. 14,5 Tam	20,000,000	-						20,000,000
		4 Masdalillah	Jln. KA. A. Dahlan L.Pakam	5,000,000	-						5,000,000
		5 Dewi Puspita Sari	Komp.Pesantren Darul Arafah Kut	20,000,000	-						20,000,000
		6 Edi Suyanto	Jln. Sidomulyo Gg.Perdamaian Nd	5,000,000	-						5,000,000
		J u m l a h		90,000,000	-						90,000,000
4	Humbang	1 Risma V.S Gultom	Kampung Baru	10,000,000	-						10,000,000
	Hasundutan	2 Riama Sinaga	Letkol GA. Manullang	15,000,000	-						15,000,000
		3 Elfrida Sitohang	Perluasan Dolok Sanggul	15,000,000	-						15,000,000
		4 Tumpak Simanullang	Maduma Dolok Sanggul	15,000,000	-						15,000,000
		5 Jonny Simamora	Maduma Dolok Sanggul	20,000,000	-						20,000,000
		6 Leder Smatupang	Sihasma Parlilitan	15,000,000	-						15,000,000
		J u m l a h		90,000,000	-						90,000,000
5	Pakpak Bharat	1 Musa Berutu	Salak	20,000,000	-						20,000,000
		2 Bependi Banurea	Salak	5,000,000	-						5,000,000
		3 Jhons Hendry Bancin	Salak	20,000,000	-						20,000,000
		4 Neri Bancin	P.B. Boang	10,000,000	-						10,000,000
		5 Mangara Bancin	P.B. Boang	5,000,000	-						5,000,000
		6 Dian Berutu	Kuta Parira	15,000,000	-						15,000,000
		7 Sumihar Simamora	Salak	15,000,000	-						15,000,000
		J u m l a h		90,000,000	-						90,000,000
6	Serdang Bedaga	1 Slamet Sutanto	Karang Rejo Perbaungan	10,000,000	-						10,000,000
		2 Ruslaini	Ds. Firdaus Sei Rampah	15,000,000	-						15,000,000
		3 Idris	Ds. Bengkel Perbaungan	10,000,000	-						10,000,000
		4 Meja Izhar	Ds. Bengkel Perbaungan	5,000,000	-						5,000,000
		5 Sri Hartini	Ds. Dolok Sagal Dolok Masihul	5,000,000	-						5,000,000
		6 Pujoti Lestari	Ds. Bengkel Perbaungan	10,000,000	-						10,000,000
		7 Aspiandi Hadi	Ds. Bengkel Perbaungan	5,000,000	-						5,000,000
		8 Ruswanto	Perumnas Blok A 52 Perbaungan	5,000,000	-						5,000,000
		9 Eddy Marpaung	Candrawasih Ds. Cermin	15,000,000	-						15,000,000
		10 L. Oginis Pintu Batu	Perumnas Melati Perbaungan	5,000,000	-						5,000,000
		11 Arbani	Perumnas Melati Perbaungan	5,000,000	-						5,000,000
		J u m l a h		90,000,000	-						90,000,000
		J u m l a h		500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000

Utang Beban Per 31 Desember 2019

Lampiran 21

Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2018									Jumlah
		Telepon	Air	Listrik	Obat	Honor tenaga Ahli	Honor pegawai honorer	STNK	Cetak	Transfer	
Dinas Pendidikan	36,433,987.00	-	9,786,530.00	44,417,393.00	-	-	-	-	-	-	54,203,923.00
Dinas Kesehatan	114,854,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	1,075,955,500.00	-	-	22,143,000.00	-	-	1,501,783,500.00	-	611,937,500.00	-	2,135,864,000.00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	10,622,929,513.00	10,174,965.00	-	148,373,160.00	8,144,621,319.00	777,042,260.00	-	-	-	-	9,080,211,704.00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	-	8,849,483.00	16,730,400.00	48,679,029.00	-	-	-	-	-	-	74,258,912.00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	80,101,958.00	16,815,240.00	8,414,512.00	66,795,749.00	-	-	-	-	-	-	92,025,501.00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	94,120.00	-	123,720.00	-	-	-	-	-	-	-	123,720.00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	23,721,754.00	972,642.00	1,146,099.00	7,209,910.00	-	-	-	-	-	-	9,328,651.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,922,934.30	-	4,119,390.00	19,117,191.00	-	-	-	-	-	-	23,236,581.00
Dinas Sosial	161,943,858.00	3,947,870.00	3,974,120.00	47,110,096.00	-	-	-	-	-	-	55,032,086.00
Dinas Tenaga Kerja	21,307,570.00	114,207.00	726,340.00	85,755,239.00	-	-	-	-	-	-	86,595,786.00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	2,037,698.00	15,967,334.00	-	-	-	-	-	-	18,005,032.00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	31,258,561.00	87,720.00	3,029,775.00	42,611,168.00	-	-	-	-	-	-	45,728,663.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Te	21,166,679.00	49,360.00	2,316,710.00	19,194,903.00	-	-	-	-	-	-	21,560,973.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23,990,888.00	-	-	54,325,328.00	-	-	-	-	-	-	54,325,328.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	620,720.00	571,580.00	2,579,710.00	57,720,971.00	-	-	-	-	-	-	60,872,261.00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	64,850,945.00	898,970.00	4,641,330.00	34,440,866.00	-	-	-	-	-	-	39,981,166.00
Dinas Perkebunan	36,980,181.00	6,547,070.00	29,774,237.00	1,354,603.00	-	-	-	-	-	-	37,675,910.00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9,647,032.00	166,940.00	9,500.00	12,321,914.00	-	-	-	-	-	-	12,498,354.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40,576,402.00	-	770,448.00	15,728,569.00	-	-	-	-	-	-	16,499,017.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25,445,893.00	165,940.00	10,708,730.00	15,893,273.00	-	-	-	-	-	-	26,767,943.00
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,995,539,707.00	411,995,539,707.00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	60,836,128.00	5,240,525.00	12,625,820.00	45,486,523.00	-	-	-	-	-	-	63,352,868.00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13,431,468.00	1,828,751.00	1,613,930.00	8,425,982.00	-	-	-	-	-	-	11,868,663.00
Biro Umum dan Perlengkapan	360,410,360.00	14,148,529.00	47,929,104.00	305,294,566.00	-	-	-	-	-	-	367,372,199.00
Inspektorat Daerah Provinsi	31,000,580.00	-	3,748,500.00	-	-	-	18,094,520.00	-	-	-	21,843,020.00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	730,754,877.00	18,642,775.00	44,790,109.00	66,136,498.00	-	-	-	-	-	-	129,569,382.00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	27,350,000.00	492,873.00	998,997.00	25,885,418.00	-	-	-	-	-	-	27,377,288.00
Jumlah	13,701,586,000.30	89,715,440.00	212,595,709.00	1,210,388,683.00	8,144,621,319.00	777,042,260.00	1,501,783,500.00	18,094,520.00	611,937,500.00	411,995,539,707.00	424,561,718,638.00

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA UTARA - MASA PAJAK TAHUN 2019
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN REALISASI TRANSFER KEPADA KABUPATEN/KOTA

Kode	Kabupaten / Kota	1. Pajak Air Permukaan (PAP) - Masa Pajak Tahun 2019													
		Keputusan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Tahun 2019						Realisasi Transfer Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019					Saldo Per 31/12/2019	Realisasi Hutang Pada TA 2020 6 Februari 2020	Sisa Saldo
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	Sub Total	25 Juli 2019	19 September 2019	13 Desember 2019	31 Desember 2019	Sub Total				
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6+7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 7 - 12	14	15=13-14	
1	Kota Medan	490,755,711.00	418,091,001.00	384,838,689.00	556,076,943.00	1,849,762,344.00	490,755,711.00	418,091,001.00	85,790,122.00	-	994,636,834.00	855,125,510.00	855,125,510.00	0.00	
2	Kota Binjai	26,296,647.00	17,693,804.00	17,086,099.00	23,309,890.00	84,386,440.00	26,296,647.00	17,693,804.00	17,086,099.00	-	61,076,550.00	23,309,890.00	23,309,890.00	0.00	
3	Kota Tebing Tinggi	41,624,584.00	38,209,497.00	35,596,605.00	44,197,355.00	159,628,041.00	41,624,584.00	38,209,497.00	35,596,605.00	-	115,430,686.00	44,197,355.00	44,197,355.00	0.00	
4	Kota Pematang Siantar	33,866,086.00	25,055,577.00	20,862,643.00	27,628,477.00	107,412,783.00	33,866,086.00	25,055,577.00	20,862,643.00	-	79,784,306.00	27,628,477.00	27,628,477.00	0.00	
5	Kota Sibolga	17,030,259.00	14,967,926.00	14,281,420.00	16,663,966.00	62,943,571.00	17,030,259.00	14,967,926.00	14,281,420.00	3,765,102.00	50,044,707.00	12,898,864.00	12,898,864.00	0.00	
6	Kota Tanjung Balai	26,002,982.00	24,684,422.00	20,798,289.00	25,081,539.00	96,567,232.00	26,002,982.00	24,684,422.00	20,798,289.00	-	71,485,693.00	25,081,539.00	25,081,539.00	0.00	
7	Kab. Batubara	96,170,792.00	70,380,120.00	99,243,568.00	104,378,584.00	370,173,064.00	96,170,792.00	70,380,120.00	99,243,568.00	-	265,794,480.00	104,378,584.00	104,378,584.00	0.00	
8	Kab. Asahan	191,140,227.00	160,987,138.00	153,015,753.00	187,986,810.00	693,129,928.00	191,140,227.00	160,987,138.00	108,221,958.00	13,733,937.00	474,083,260.00	219,046,668.00	219,046,668.00	0.00	
9	Kab. Dairi	157,712,821.00	261,082,415.00	149,427,754.00	244,871,907.00	813,094,897.00	157,712,821.00	261,082,415.00	-	-	418,795,236.00	394,299,661.00	394,299,661.00	0.00	
10	Kab. Deli Serdang	455,602,810.00	382,271,344.00	369,409,651.00	318,003,357.00	1,525,287,162.00	455,602,810.00	382,271,344.00	-	-	837,874,154.00	687,413,008.00	687,413,008.00	0.00	
11	Kab. Serdang Bedagai	97,165,442.00	95,970,726.00	97,448,656.00	109,447,461.00	400,032,285.00	97,165,442.00	95,970,726.00	-	-	193,136,168.00	206,896,117.00	206,896,117.00	0.00	
12	Kab. Karo	219,577,523.00	253,262,560.00	216,229,142.00	276,163,575.00	965,232,800.00	219,577,523.00	253,262,560.00	78,651,989.00	7,021,995.00	558,514,067.00	406,718,733.00	406,718,733.00	0.00	
13	Kab. Labuhan Batu	160,075,303.00	153,768,924.00	162,856,340.00	183,225,384.00	659,925,951.00	160,075,303.00	153,768,924.00	54,810,244.00	3,949,412.00	372,603,883.00	287,322,068.00	287,322,068.00	0.00	
14	Kab. Langkat	288,997,843.00	373,817,227.00	157,031,480.00	177,507,253.00	997,353,803.00	288,997,843.00	373,817,227.00	-	-	662,815,070.00	334,538,733.00	334,538,733.00	0.00	
15	Kab. Mandailing Natal	106,428,623.00	84,498,356.00	88,303,499.00	121,631,713.00	400,862,191.00	106,428,623.00	84,498,356.00	88,303,499.00	19,433,720.00	298,664,198.00	102,197,993.00	102,197,993.00	0.00	
16	Kab. Nias	25,598,454.00	18,790,648.00	16,740,594.00	23,885,118.00	85,014,814.00	25,598,454.00	18,790,648.00	16,740,594.00	-	61,129,696.00	23,885,118.00	23,885,118.00	0.00	
17	Kab. Simalungun	727,871,729.00	373,119,909.00	358,558,694.00	543,582,586.00	2,003,132,918.00	727,871,729.00	373,119,909.00	-	-	1,100,991,638.00	902,141,280.00	902,141,280.00	0.00	
18	Kab. Tapanuli Tengah	177,628,572.00	214,684,322.00	106,822,886.00	177,538,063.00	676,673,843.00	177,628,572.00	214,684,322.00	-	-	392,312,894.00	284,360,949.00	284,360,949.00	0.00	
19	Kab. Tapanuli Selatan	124,795,379.00	108,232,353.00	104,488,786.00	126,068,985.00	463,585,503.00	124,795,379.00	108,232,353.00	36,797,722.00	24,626,195.00	294,451,649.00	169,133,854.00	169,133,854.00	0.00	
20	Kab. Tapanuli Utara	96,567,824.00	71,225,504.00	74,825,072.00	84,754,584.00	327,372,984.00	96,567,824.00	71,225,504.00	74,825,072.00	-	242,618,400.00	84,754,584.00	84,754,584.00	0.00	
21	Kab. Humbang Hasundutan	250,847,670.00	239,630,354.00	180,573,661.00	152,336,348.00	823,388,033.00	250,847,670.00	239,630,354.00	180,573,661.00	-	671,051,685.00	152,336,348.00	152,336,348.00	0.00	
22	Kab. Toba Samosir	1,962,039,513.00	725,404,229.00	821,197,700.00	1,772,950,331.00	5,281,591,773.00	1,962,039,513.00	725,404,229.00	143,182,953.00	-	2,830,626,695.00	2,450,965,078.00	2,450,965,078.00	0.00	
23	Kab. Samosir	69,645,051.00	62,754,872.00	60,275,293.00	68,423,251.00	261,098,467.00	69,645,051.00	62,754,872.00	60,275,293.00	-	192,675,216.00	68,423,251.00	68,423,251.00	0.00	
24	Kota Padangsidempuan	17,803,605.00	13,309,830.00	13,714,911.00	16,347,154.00	61,175,500.00	17,803,605.00	13,309,830.00	13,714,911.00	-	44,828,346.00	16,347,154.00	16,347,154.00	0.00	
25	Kab. Padang Lawas	81,275,393.00	79,949,003.00	74,430,969.00	98,500,276.00	334,155,641.00	81,275,393.00	79,949,003.00	74,430,969.00	6,415,827.00	242,071,192.00	92,084,449.00	92,084,449.00	0.00	
26	Kab. Padang Lawas Utara	74,337,721.00	70,635,927.00	61,825,114.00	83,488,997.00	290,287,759.00	74,337,721.00	70,635,927.00	61,825,114.00	29,912,310.00	236,711,072.00	53,576,687.00	53,576,687.00	0.00	
27	Kab. Pakpak Bharat	22,938,846.00	28,736,212.00	17,995,009.00	25,644,726.00	95,314,793.00	22,938,846.00	28,736,212.00	2,570,397.00	-	54,245,455.00	41,069,338.00	41,069,338.00	0.00	
28	Kab. Nias Selatan	35,930,925.00	26,817,113.00	23,304,122.00	33,977,095.00	120,029,255.00	35,930,925.00	26,817,113.00	23,304,122.00	-	86,052,160.00	33,977,095.00	33,977,095.00	0.00	
29	Kab. Labuhanbatu Utara	160,723,640.00	141,783,365.00	135,780,157.00	157,408,975.00	595,696,137.00	160,723,640.00	141,783,365.00	25,204,506.00	-	327,711,511.00	267,984,626.00	267,984,626.00	0.00	
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	151,767,834.00	139,483,667.00	140,734,900.00	179,567,728.00	611,554,129.00	151,767,834.00	139,483,667.00	40,704,918.00	-	331,956,419.00	279,597,710.00	279,597,710.00	0.00	
31	Kab. Nias Utara	19,490,603.00	14,307,155.00	12,746,249.00	18,186,073.00	64,730,080.00	19,490,603.00	14,307,155.00	12,746,249.00	-	46,544,007.00	18,186,073.00	18,186,073.00	0.00	
32	Kab. Nias Barat	9,239,744.00	6,782,471.00	6,042,506.00	8,621,316.00	30,686,037.00	9,239,744.00	6,782,471.00	6,042,506.00	-	22,064,721.00	8,621,316.00	8,621,316.00	0.00	
33	Kota Gunungsitoli	12,951,120.00	9,506,821.00	8,469,630.00	12,084,286.00	43,011,857.00	12,951,120.00	9,506,821.00	8,469,630.00	-	30,927,571.00	12,084,286.00	12,084,286.00	0.00	
TOTAL		6,429,901,276.00	4,719,894,792.00	4,204,955,841.00	5,999,540,106.00	21,354,292,015.00	6,429,901,276.00	4,719,894,792.00	1,405,055,053.00	108,858,498.00	12,663,709,619.00	8,690,582,396.00	8,690,582,396.00	0.00	

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA UTARA - MASA PAJAK TAHUN 2019
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN REALISASI TRANSFER KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN

Kode Kabupaten / Kota		6. Pajak Provinsi Tahun 2019 - Konsolidasi					
		Hutang Per 31 Desember 2019 = Keputusan Alokasi Bagian Bagi Hasil Tahun 2019 - Realisasi Transfer Pada Tahun Anggaran 2019					
		PAP	PKB	BBNKB	PBBKB	PAJAK ROKOK	TOTAL
1	2	15 = 3 - 9	16 = 4 - 10	17 = 5 - 11	18 = 6 - 12	19 = 7 - 13	20 = 15+16+17+18+19
1	Kota Medan	855,125,510.00	34,423,949,632.00	45,641,769,746.00	49,721,831,623.00	-	130,642,676,511.00
2	Kota Binjai	23,309,890.00	1,572,923,965.00	65,111,397.00	4,197,234,256.00	-	5,858,579,508.00
3	Kota Tebing Tinggi	44,197,355.00	3,338,020,294.00	51,998,365.00	4,830,407,566.00	-	8,264,623,580.00
4	Kota Pematang Siantar	27,628,477.00	2,368,243,121.00	85,716,165.00	4,808,767,060.00	-	7,290,354,823.00
5	Kota Sibolga	12,898,864.00	644,298,322.00	557,021,503.00	1,568,167,130.00	-	2,782,385,819.00
6	Kota Tanjung Balai	25,081,539.00	358,413,608.00	25,280,425.00	2,208,872,073.00	-	2,617,647,645.00
7	Kab. Batubara	104,378,584.00	3,312,993,100.00	302,273,655.00	8,081,520,801.00	-	11,801,166,140.00
8	Kab. Asahan	219,046,668.00	15,786,710,732.00	2,558,835,930.00	10,217,884,020.00	-	28,782,477,350.00
9	Kab. Dairi	394,299,661.00	949,829,429.00	850,597,721.00	1,446,401,581.00	-	3,641,128,392.00
10	Kab. Deli Serdang	687,413,008.00	12,902,637,165.00	568,486,239.00	21,999,185,325.00	-	36,157,721,737.00
11	Kab. Serdang Bedagai	206,896,117.00	4,509,512,029.00	481,170,501.00	4,394,909,118.00	-	9,592,487,765.00
12	Kab. Karo	406,718,733.00	3,564,459,547.00	136,179,369.00	5,699,024,329.00	-	9,806,381,978.00
13	Kab. Labuhan Batu	287,322,068.00	5,736,934,792.00	1,382,509,712.00	7,206,257,924.00	-	14,613,024,496.00
14	Kab. Langkat	334,538,733.00	7,712,770,613.00	1,706,891,435.00	6,381,078,108.00	-	16,135,278,889.00
15	Kab. Mandailing Natal	102,197,993.00	3,527,502,159.00	1,921,767,235.00	979,564,337.00	-	6,531,031,724.00
16	Kab. Nias	23,885,118.00	1,135,634,434.00	894,469,283.00	226,636,563.00	-	2,280,625,398.00
17	Kab. Simalungun	902,141,280.00	10,199,096,067.00	1,990,477,693.00	6,379,317,810.00	-	19,471,032,850.00
18	Kab. Tapanuli Tengah	284,360,949.00	2,984,367,715.00	1,186,519,123.00	2,016,422,629.00	-	6,471,670,416.00
19	Kab. Tapanuli Selatan	169,133,854.00	2,637,719,627.00	2,000,908,187.00	59,501,003.00	-	4,867,262,671.00
20	Kab. Tapanuli Utara	84,754,584.00	5,043,101,538.00	2,487,482,542.00	3,267,629,955.00	-	10,882,968,619.00
21	Kab. Humbang Hasundutan	152,336,348.00	2,327,609,940.00	1,228,203,778.00	1,832,171,498.00	-	5,540,321,564.00
22	Kab. Toba Samosir	2,450,965,078.00	4,238,174,527.00	2,251,871,531.00	3,769,237,880.00	-	12,710,249,016.00
23	Kab. Samosir	68,423,251.00	2,908,036,677.00	1,582,166,822.00	1,841,045,923.00	-	6,399,672,673.00
24	Kota Padangsidempuan	16,347,154.00	785,064,620.00	1,445,817,947.00	3,495,620,188.00	-	5,742,849,909.00
25	Kab. Padang Lawas	92,084,449.00	3,459,515,426.00	1,593,022,646.00	2,480,283,098.00	-	7,624,905,619.00
26	Kab. Padang Lawas Utara	53,576,687.00	4,185,914,207.00	1,902,087,102.00	1,439,671,027.00	-	7,581,249,023.00
27	Kab. Paikpak Bharat	41,069,338.00	929,302,118.00	497,556,406.00	509,035,978.00	-	1,976,963,840.00
28	Kab. Nias Selatan	33,977,095.00	2,921,174,956.00	1,493,459,062.00	327,831,907.00	-	4,776,443,020.00
29	Kab. Labuhanbatu Utara	267,984,626.00	2,735,206,758.00	251,937,198.00	2,410,912,328.00	-	5,666,040,910.00
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	279,597,710.00	2,389,105,777.00	196,439,270.00	3,075,450,256.00	-	5,940,593,013.00
31	Kab. Nias Utara	18,186,073.00	1,699,495,252.00	983,437,909.00	1,700,268,053.00	-	4,401,387,287.00
32	Kab. Nias Barat	8,621,316.00	1,098,669,865.00	651,098,397.00	949,234,756.00	-	2,707,624,334.00
33	Kota Gunungsitoli	12,084,286.00	640,005,433.00	232,484,806.00	1,552,138,663.00	-	2,436,713,188.00
TOTAL		8,690,582,396.00	153,026,393,445.00	79,205,049,100.00	171,073,514,766.00	-	411,995,539,707.00